

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

UNITED TO ACHIEVE CONTINUOUS GROWTH

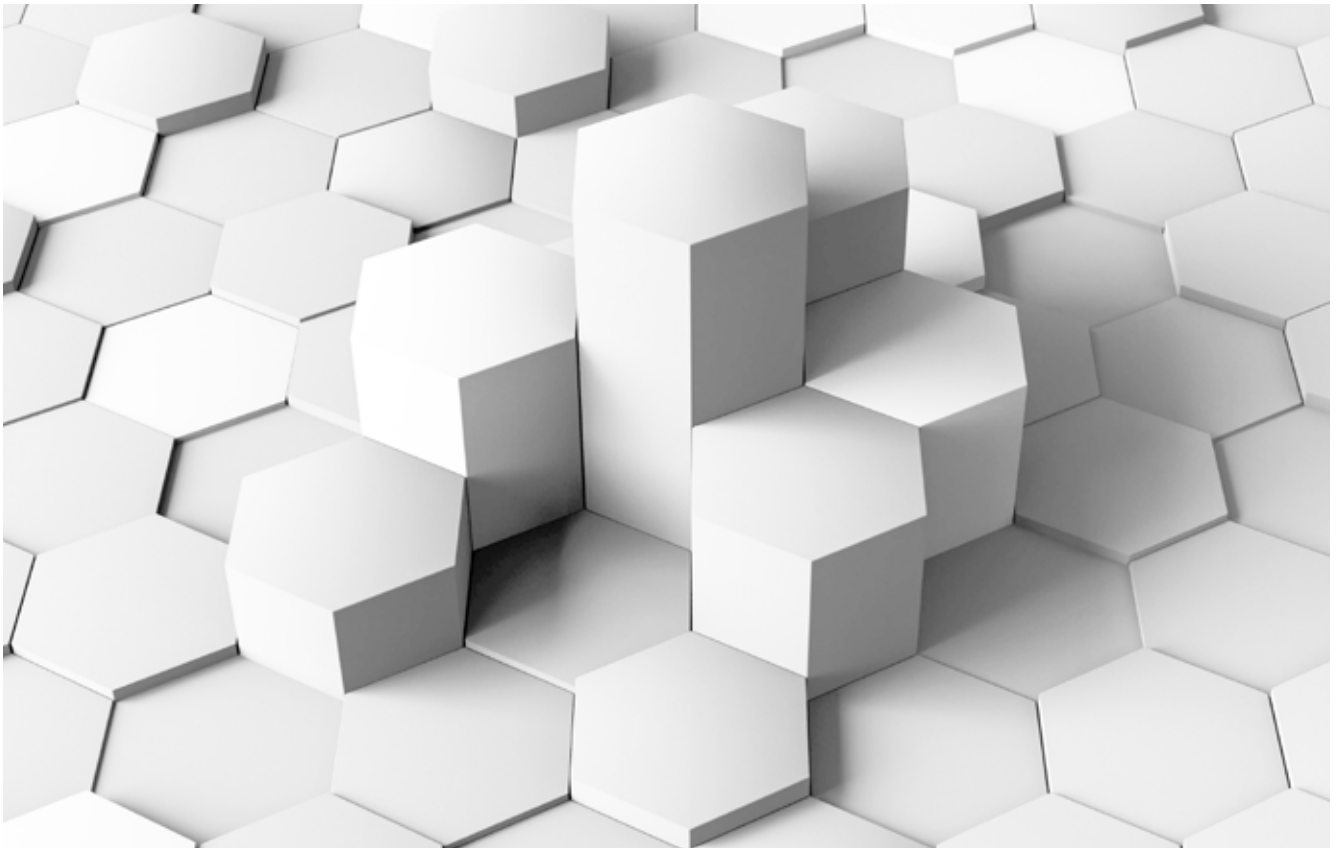
Bersatu Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Berkesinambungan

2023

Annual & Sustainability Report
Laporan Tahunan & Keberlanjutan

MIZUHO





UNITED TO ACHIEVE CONTINUOUS GROWTH

Bersatu Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Berkesinambungan

Tema "Bersatu Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Berkesinambungan" mencerminkan komitmen Perseroan dalam membangun hubungan kolaboratif dan kemitraan sebagai pendorong kemajuan. Perseroan percaya pada keyakinan bahwa dengan membentuk aliansi yang kuat, Perseroan memberdayakan diri dan orang lain untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Tema ini mencerminkan dedikasi Perseroan yang teguh dalam memupuk hubungan sinergis, memanfaatkan kekuatan bersama, dan bergerak menuju tujuan bersama dengan semangat dan tekad yang kuat.

Tema kolaborasi tersebut menemukan ekspresi dalam desain yang elegan dan inovatif yang mengutamakan koherensi dan efisiensi. Begitu pula, tema "Bersatu" mencerminkan prinsip-prinsip arsitektur modern dengan menekankan pentingnya integrasi, inovasi, dan ketahanan melalui upaya kolektif. Seperti struktur bangunan modern yang berani dan khas, pendekatan Perseroan terhadap kemitraan menekankan kejelasan, kreativitas, dan integrasi yang lancar dari berbagai elemen untuk membentuk jalan bersama menuju pertumbuhan yang berkesinambungan.

The theme "United to Achieve Continuous Growth" reflects the Company's commitment to building collaborative relationships and partnerships as drivers of progress. The Company believes in the conviction that by forming strong alliances, it empowers itself and others to achieve growth and success together. This theme reflects the Company's steadfast dedication to fostering synergistic relationships, harnessing collective strengths, and moving towards common goals with spirit and determination.

This theme of collaboration finds expression in elegant and innovative designs that prioritize coherence and efficiency. Similarly, the theme "United" reflects the principles of modern architecture by emphasizing the importance of integration, innovation, and resilience through collective efforts. Like the bold and distinctive structures of modern buildings, the Company's approach to partnerships emphasizes clarity, creativity, and seamless integration of various elements to forge a common path towards continuous growth.

Batasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang, serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini memuat kata "Perseroan" dan "Perusahaan" yang mengacu pada PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang jasa pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini telah disiapkan dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bilamana terdapat perbedaan arti atau interpretasi antara keduanya, maka yang berlaku adalah naskah dalam Bahasa Indonesia dalam menentukan tujuan, maksud, dan pengertian dari Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Disclaimer

This Annual Report and Sustainability Report contains a statement of the financial condition, results of operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives of the Company, which are classified as forward statements in the implementation of applicable legislation, with the exception of historical matters. These statements have the prospect of risks, uncertainties, and can result in actual developments materially different from those reported.

Prospective statements in this Annual Report and Sustainability Report are based on various assumptions regarding current conditions and future conditions, as well as the business environment in which the Company conducts business activities. The Company does not guarantee that documents that have been confirmed as valid will result in certain results as expected.

This Annual Report and Sustainability Report contains the words "the Company" and "the Corporate" which refer to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, which runs main business activities in the fields of investment, working capital, multipurpose financing services, and/or other financing business activity with the approval of the Financial Services Authority ("OJK"). Sometimes the word "we" is used for convenience to refer to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.

The Annual Report and Sustainability Report has been prepared in 2 (two) languages, namely bahasa Indonesia and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail in determining the spirit, intent and meaning of this Annual Report and Sustainability Report.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

KINERJA 2023 / 2023 PERFORMANCE	4
Ikhtisar Keuangan / Financial Highlights	5
Sekilas Kinerja 2023 / 2023 Performance Overview	6
Informasi Saham / Shares Information	7
Grafik Perdagangan Saham Tahun 2022 - 2023 / Share Trading Chart Year 2022 - 2023	8
Aksi Korporasi / Corporate Action	8
Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham / Suspension of Shares Trading and / or Delisting	8
Peristiwa Penting / Event Highlights	9
LAPORAN MANAJEMEN / MANAGEMENT REPORT	16
Laporan Dewan Komisaris / The Board of Commissioners Report	17
Laporan Direksi / The Board of Directors Report	24
PROFIL PERSEROAN / COMPANY PROFILE	32
Sekilas Perseroan / Company Overview	33
Kegiatan Usaha / Business Activities	34
Produk & Layanan / Products & Services	35
Jaringan Kantor / Office Network	36
Jejak Langkah Perseroan / Company Milestones	38
Visi, Misi dan Nilai Perseroan / Vision, Mission and Values of The Company	40
Profil Direksi / The Board of Directors Profile	41
Profil Dewan Komisaris / The Board of Commissioners Profile	46
Struktur Organisasi / Organization Structure	52
Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi / Affiliation Relationship of Members of The Board of Commissioners and The Board of Directors	54
Struktur Kepemilikan Saham / Shareholding Structure	55
Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal / Capital Market Supporting Institutions & Professionals	56
Informasi Entitas Anak / Subsidiary Information	56
Informasi Kepemilikan Saham / Shareholding Information	57
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership	57
Daftar Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi / Shareholders List Based on Classification	57
Kronologis Pencatatan Saham / Chronology of Shares Listing	58
Kronologis Pencatatan Efek Lainnya / Chronology of Other Securities Listings	59
Sumber Daya Manusia / Human Resources	60
Teknologi Informasi / Information Technology	63
Keanggotaan Pada Asosiasi / Association Membership	65
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN / MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	66
Uraian Per Segmen / Description Per Segment	67
Uraian Kinerja Keuangan Perseroan / Description of Company Financial Performance	68
Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang / Ability to Pay Liabilities and Receivables Collectability	73
Struktur Modal / Capital Structure	74
Kebijakan Struktur Modal / Capital Structure Policy	74
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal / Material Commitments to Capital Goods Investment	75
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan / Material Information and Material Facts that Occured After the Date of the Accountant's Report	75

Prospek Usaha / Business Prospect	75	TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN / SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY	160
Unit Bisnis Korporasi & Unit Bisnis Ritel / Corporate Business Unit & Retail Business Unit	76	Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Corporate Social and Environmental Responsibility Commitment and Policy	161
Target dan Realisasi Tahun Buku / Target and Realization of the Financial Year	79	Visi, Misi dan Nilai Perseroan / Vision, Mission and Values of The Company	161
Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir / Capital Goods Investment Realized at the End of Fiscal Year	79	Profil Perseroan / Company Profile	161
Dividen / Dividend	80	Penjelasan Strategi Keberlanjutan / Elaboration on Sustainability Strategy	162
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum / Realization of The Use of Funds From Public Offering	80	Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Achievements of Sustainable Finance Action Plan	163
Informasi Material Lainnya / Other Material Information	80	Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Objective of Sustainable Finance Action Plan	165
Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan / Changes to Laws and Regulation with Significant Effects	80	Program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Sustainable Finance Action Plan Program	166
Perubahan Kebijakan Akuntansi / Changes in Accounting Policies	81	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 5 (Lima) Tahun / 5 (Five) Years Sustainable Finance Action Plan	167
TATA KELOLA / CORPORATE GOVERNANCE	82	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 1 (Satu) Tahun / 1 (One) Years Sustainable Finance Action Plan	169
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") / General Meeting of Shareholders ("GMS")	83	Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Sustainable Finance Action Plan Preparation Process	170
Pelaksanaan RUPS Tahun 2023 / The Implementation of 2023 GMS	83	Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Determinative Factors of Sustainable Finance Action Plan	171
Pelaksanaan RUPS Tahun 2022 / The Implementation of 2022 GMS	85	Prioritas Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Priority of Detail of Sustainable Finance Action Plan	172
Dewan Komisaris / Board of Commissioners	86	Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Sustainable Finance Action Plan Activities	173
Direksi / Board of Directors	96	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan / Performance Overview of Sustainability Aspect	174
Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi / Procedure and Basis for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors	106	Penjelasan Direksi / The Board of Directors' Remark	176
Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees Under the Board of Commissioners	108	Tata Kelola Keberlanjutan / Sustainability Governance	184
Komite Audit / Audit Committee	108	Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Follow Up to Sustainable Finance Action Plan	187
Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee	115	Kinerja Keberlanjutan / Sustainability Performance	188
Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee	121	Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan / Responsibility for Sustainable Product Developments and/or Services	196
Komite Pendukung Pelaksanaan Tugas Direksi / Supporting Committee for Implementing the Duties of the Board of Directors	125	Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan / Report and Complaint Resolution	196
Penilaian Kinerja Komite dan Unit Kerja yang Berada di Bawah Direksi / Performance Assessment of Committees and Work Units Under the Board of Directors	125	REFERENSI KRITERIA POJK NO. 51/POJK.03/2017 / CRITERIA REFERENCE PURSUANT TO POJK NO. 51/POJK.03/2017	198
Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee	125	LEMBAR UMPAN BALIK / FEEDBACK SHEET	203
Komite Pengarah Teknologi Informasi / Information Technology Steering Committee	127	SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2023 / STATEMENT LETTER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE 2023 ANNUAL REPORT	205
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	129	LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT / AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENT	207
Unit Audit Internal / Internal Audit Unit	131		
Pengendalian Internal / Internal Control	134		
Sistem Manajemen Risiko / Risk Management System	135		
Sanksi Administratif / Administrative Sanction	142		
Litigasi / Litigation	143		
Kode Etik / Code of Conducts	143		
Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan Direksi / Share Ownership Program by Employees and Board of Directors	144		
Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System	144		
Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / Guidelines on The Implementation of Good Corporate Governance	145		
Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU,PPT dan PPPSPM) / Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons (AML-PTF and PFPMDW)	148		
Kebijakan Antikorupsi / Anti-Corruption Policy	151		
Perlindungan Konsumen / Customer Protection	151		
Rekomendasi dalam Penerapan Pedoman GCG / Recommendation on GCG Guidelines Implementation	154		

KINERJA 2023

2023 PERFORMANCE

MIZUHO



LAPORAN POSISI KEUANGAN	2021	2022	2023	STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Aset				Asset
Kas dan setara kas	95.64	102.60	50.36	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	1,193.68	1,438.26	1,730.18	Net Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan - bersih	835.78	674.83	813.26	Net Finance lease receivables
Piutang lain-lain - bersih	91.74	79.06	82.48	Other receivables - net
Biaya dibayar dimuka	1.02	1.75	2.61	Prepaid expenses
Aset pajak tangguhan	5.61	11.58	11.66	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	39.82	53.03	51.81	Property and equipment - net
Aset derivatif	0.19	17.53	7.95	Derivatives assets
Aset hak-guna – bersih	8.65	33.76	32.11	Right-of-use assets - net
Aset lain-lain	51.02	54.27	11.16	Other assets
Jumlah Aset	2,323.15	2,466.67	2,793.58	Total Assets
Liabilitas dan Ekuitas				Liabilities and Equity
Utang bank	1,612.76	1,661.38	1,939.81	Bank loans
Utang usaha	0.85	0.71	0.97	Trade payables
Liabilitas derivatif	0.18	0	0.23	Derivative liabilities
Utang lain-lain	61.92	56.11	46.37	Other payables
Biaya masih harus dibayar	3.56	14.37	11.90	Accrued expenses
Utang pajak	2.00	2.25	2.05	Taxes payables
Liabilitas sewa	4.95	29.54	27.30	Lease liabilities
Liabilitas imbalan pasca-kerja	11.69	12.41	14.47	Post-employment benefits liabilities
Jumlah Liabilitas	1,697.91	1,776.77	2,043.10	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	625.24	689.90	750.48	Total Equity
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	2,323.15	2,466.67	2,793.58	Total Liabilities & Equity

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	2021	2022	2023	STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan				Revenues
Pembiayaan konsumen	189.38	224.00	265.37	Consumer financing
Sewa pembiayaan	64.88	46.35	55.54	Finance leases
Administrasi dan provisi	29.45	32.45	45.41	Administration and provision
Penalti	12.36	14.58	20.75	Penalty
Bunga	0.44	0.39	0.33	Interest
Pendapatan lain-lain	6.38	15.29	13.94	Other income
Jumlah Pendapatan	302.89	333.06	401.34	Total Revenues

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN (LANJUTAN)	2021	2022	2023	STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
Beban				Expenses
Bunga dan keuangan	58.23	59.24	105.23	Interest and financing charges
Umum dan administrasi	50.45	63.90	69.64	General and administrative
Kepegawaian	92.07	102.96	112.20	Personnel
Penyisihan kerugian penurunan nilai	93.38	49.55	52.16	Provision for impairment losses
Beban lain-lain	0.59	2.07	0.88	Other expenses
Jumlah beban	294.72	277.72	340.11	Total Expenses
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	8.17	55.34	61.23	Profit (loss) before income tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(15.94)	6,71	(0.08)	Income Tax (Expense) Benefit
Laba (rugi) tahun berjalan	(7.77)	62.05	61.15	Net (loss) profit for the year
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain	1.12	2.60	(0.56)	Total Other comprehensive income (loss)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	(6.65)	64.65	60.59	Total Comprehensive (Loss) Income for the Year
Laba (rugi) per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	(1.37)	10.91	10.75	Basic earning per share (in full Rupiah)

RASIO KEUANGAN	2021	2022	2023	FINANCIAL RATIOS
Rasio Laba (Rugi) Bersih Terhadap Total Aset	-0.33%	2.52%	2.19%	Net Profit (Loss) to Total Assets Ratio
Rasio Laba (Rugi) Bersih Terhadap Ekuitas	-1.24%	8.99%	8,15%	Net Profit (Loss) to Equity Ratio
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan	-2.56%	18.63%	15.24%	Profit (Loss) on Revenue Ratio
Rasio Lancar	143.83%	147.69%	138.45%	Current Ratio
NPF Neto	2.93%	2.22%	0.19%	NPF Net
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	99.54%	87.29%	85.38%	Operating Expenses to Operating Income
Net Interest Margin	8.67%	9.88%	8.98%	Net Interest Margin
Total Kewajiban terhadap Ekuitas	2.72x	2.58x	2,72x	Total Liabilities to Equity
Total Kewajiban terhadap Total Aset	0.73x	0.72x	0.73x	Total Liabilities to Total Assets
Rasio Piutang terhadap Ekuitas	3.25x	3.06x	3.39x	Accounts Receivable to Equity Ratio
Rasio Gearing	2.60x	2.42x	2.59x	Gearing Ratio

○ Sekilas Kinerja 2023 2023 Performance Overview

Jumlah Pendapatan
Total Revenues



Jumlah Aset
Total Assets



NPF Neto
NPF NetRasio Gearing
Gearing Ratio

Informasi Saham

Shares Information

Data Saham Perkuartal Tahun 2023

2023 Quarterly Shares Information

Bursa Efek / Stock Exchange : PT Bursa Efek Indonesia (IDX)

	Harga Saham / Share Price (Rp)			Volume Perdagangan di Pasar Reguler Trading Volume in Regular Market (Lembar / Shares)	Jumlah Saham yang Beredar Number of Outstanding Shares (Lembar / Shares)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Dalam Miliar Rupiah / In Billion Rupiah)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Kuartal I 1st Quarter	113	88	91	33,660,100	5,687,353,997	51.75
Kuartal II 2nd Quarter	112	85	92	118,271,200	5,687,353,997	52.32
Kuartal III 3rd Quarter	108	85	91	55,665,300	5,687,353,997	51.75
Kuartal IV 4th Quarter	92	83	86	17,719,200	5,687,353,997	48.91

Data Saham Perkuartal Tahun 2022

2022 Quarterly Shares Information

Bursa Efek / Stock Exchange : PT Bursa Efek Indonesia (IDX)

	Harga Saham / Share Price (Rp)			Volume Perdagangan di Pasar Reguler Trading Volume in Regular Market (Lembar / Shares)	Jumlah Saham yang Beredar Number of Outstanding Shares (Lembar / Shares)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Dalam Miliar Rupiah / In Billion Rupiah)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Kuartal I 1st Quarter	165	102	116	61,093,500	5,687,353,997	65.97
Kuartal II 2nd Quarter	128	99	106	58,181,700	5,687,353,997	60.29
Kuartal III 3rd Quarter	148	100	120	386,410,100	5,687,353,997	68.25
Kuartal IV 4th Quarter	168	102	103	153,372,500	5,687,353,997	58.58

Total jumlah saham per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 5.687.353.997. Total Kapitalisasi Pasar Saham Perseroan per 31 Desember 2023 tercatat mengalami penurunan menjadi sebesar Rp48,91 miliar dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.58 miliar.

The total number of shares as of December 31, 2023 and 2022 is 5,687,353,997. The Company's Total Share Market Capitalization as of December 31, 2023 was recorded to have decreased to Rp48.91 billion compared to Rp58.58 billion as of December 31, 2022.

Grafik Perdagangan Saham Tahun 2022 - 2023 Share Trading Chart Year 2022 - 2023



Aksi Korporasi Corporate Action

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak melaksanakan aksi korporasi, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham.

Throughout 2023, the Company did not conduct any corporate actions, such as stock split, reverse stock, stock dividend, stock bonus, and changes in the nominal value of shares.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham Suspension of Shares Trading and / or Delisting

Sepanjang tahun 2023, tidak ada penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham.

Throughout 2023, there was no suspension of shares trading and / or delisting.

Peristiwa Penting
Event Highlights



Reward Tour Dealer ke Thailand
Dealer Reward Tour to Thailand

6-10 Jan 2023

Pada tanggal 6 - 10 Januari 2023, Perseroan menyelenggarakan *reward tour* bertajuk *Amazing Thailand* sebagai bentuk apresiasi bagi 25 agen multiguna terbaik nasional yang telah berkontribusi dan mencapai target pada tahun 2022. *Reward tour* ini diharapkan mampu mempererat hubungan antara agen dengan Perseroan dan dapat meningkatkan kontribusi para agen, serta daya saing terhadap kompetitor.

On January 6 - 10, 2023, the Company organized a reward tour titled *Amazing Thailand* as a form of appreciation for the best 25 multipurpose agents nationwide who have contributed and achieved targets in 2022. This reward tour is expected to strengthen the relationship between agents and the Company and can increase the contribution of agents, as well as competitiveness against competitors.



Gathering Nasional Showroom
Showroom National Gathering

11 - 13 Jan 2023

Gathering Nasional Showroom dilaksanakan di Bali pada tanggal 11 - 13 Januari 2023, yang bertempat di Merusaka Nusa Dua. Acara ini dihadiri oleh para pemilik *showroom* mobil bekas yang bekerjasama dengan Perseroan. Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara peserta dengan Perseroan.

Tidak hanya itu, acara ini juga diisi dengan sesi pemberian *award* untuk *showroom* mobil bekas yang telah memberikan kontribusi yang signifikan. Diharapkan pemilik *showroom* mobil bekas dapat meningkatkan kontribusi serta daya saing terhadap kompetitor.

Showroom National Gathering was held in Bali on January 11 - 13, 2023, at Merusaka Nusa Dua. The event was attended by used car showroom owners which are the partners of the Company. This event was filled with various activities aimed at strengthening the relationship between the participants and the Company.

Furthermore, this event was also filled with awarding sessions for used car showrooms that gave significant contribution to the Company. It is expected that used car showroom owners can increase their contribution and competitiveness against competitors.



Program *Outward Bound Training*
Outward Bound Training Program

24 - 25 Feb 2023

Perseroan melalui *MLI Learning Center* telah melaksanakan Program *MLI Character and Team Building* pada tanggal 24 – 25 Februari 2023.

Pelaksanaan Program *MLI Character and Team Building* bertujuan untuk membangun pribadi yang positif, tangguh, proaktif, kreatif dan percaya diri, membangun tim yang solid dan efektif, membangun komunikasi efektif, strategi yang baik, kecepatan dan ketepatan serta kekompakan tim.

Kepesertaan diikuti oleh *Audit & Internal Control Unit ("ICU") Nasional* bekerja sama dengan pihak eksternal untuk pelaksanaannya.

The Company through *MLI Learning Center* conducted the *MLI Character and Team Building Program* on February 24-25, 2023.

The implementation of the *MLI Character and Team Building Program* aims to build a positive, tough, proactive, creative, and confident person, build a solid and effective team, build effective communication, good strategy, speed and accuracy as well as team solidarity.

Participation is followed by the *National Audit & Internal Control Unit ("ICU")* in collaboration with external parties for its implementation.



Reward Tour Dealer ke Korea
Dealer Reward Tour to Korea

14 - 20 Mar 2023

Pada tanggal 14 - 20 Maret 2023, Perseroan menyelenggarakan *reward tour* bertajuk *Fantastic Korea* sebagai bentuk apresiasi bagi 45 *showroom* mobil bekas terbaik nasional yang telah berkontribusi dan mencapai target pada tahun 2022.

Reward tour ini diharapkan mampu mempererat hubungan antara pemilik *showroom* mobil bekas dengan Perseroan dan dapat meningkatkan kontribusi serta daya saing terhadap kompetitor.

On March, 14 - 20, 2023, the Company organized a reward tour titled *Fantastic Korea* as a form of appreciation for the best 45 used car showroom nationwide who have contributed and achieved targets in 2022.

This reward tour is expected to strengthen the relationship between the owners of the used car showroom and the Company and can increase the contribution as well as competitiveness against competitors.



MLI Learning Center melaksanakan Program *Cybersecurity & Regulatory Awareness* pada tanggal 3 Mei 2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman akan keamanan dalam penggunaan internet bagi karyawan Perseroan dengan narasumber yaitu dari PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia.

MLI Learning Center conducted a *Cybersecurity & Regulatory Awareness* Program on May 3, 2023. This program aims to increase awareness of internet security for the Company's employees with PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia as the speaker.



Pada tanggal 15 - 22 Juni 2023, Perseroan menyelenggarakan *reward tour* bertajuk *Fantastic Japan* sebagai bentuk apresiasi bagi 21 *showroom* mobil bekas terbaik nasional yang telah berkontribusi dan mencapai target pada tahun 2022.

Reward tour ini diharapkan mampu mempererat hubungan antara pemilik *showroom* mobil bekas dengan Perseroan dan dapat meningkatkan kontribusi serta daya saing terhadap kompetitor.

On June, 15 - 22, 2023, the Company organized a reward tour titled *Fantastic Japan* as a form of appreciation for the best 21 used car showroom nationwide who have contributed and achieved targets in 2022.

This reward tour is expected to strengthen the relationship between the owners of the used car showroom and the Company and can increase the contribution as well as competitiveness against competitors.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Annual General Meeting of Shareholders

23 Jun 2023

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") diadakan di Catur Dharma Hall, Menara Astra lantai 5, Jakarta. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, para Pemegang Saham dan Undangan. Risalah RUPST telah dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. Perseroan masih menerapkan protokol kesehatan dan keamanan berdasarkan metode *first in first served*, dengan mengacu kepada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Endemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), kapasitas ruangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dari Manajemen Gedung tempat pelaksanaan RUPST serta *best practice*.

Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") was held at Catur Dharma Hall, Menara Astra 5th floor, Jakarta. The AGMS was attended by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders and Guests. The minutes of the AGMS have been published on the e-RUPS provider's website, the Indonesia Stock Exchange's website, and the Company's website. The Company still applies health and security protocols based on the first in first served method, with reference to Circular Letter Number 1 of 2023 concerning Health Protocols during the Transition Period of the 2019 Corona Virus Disease Endemic (COVID-19), room capacity based on the applicable rules and regulations of the Building Management where the AGMS is held and best practice.



Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme ("APU,PPT")
Anti-Money Laundering and the
Prevention of Terrorism Financing (AML-PTF) Training

5 Jul 2023

Pada tanggal 5 Juli 2023, MLI *Learning Center* telah merealisasikan pelaksanaan APU,PPT kepada seluruh Karyawan dengan narasumber yaitu dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan POJK No 12 /POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

In July 5, 2023, MLI Learning Center realized the implementation of AML-PTF to all employees with external parties namely from the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) as the speaker. in compliance to POJK No 12 /POJK.01/2017, concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering Program and the Prevention of Terrorism Financing in the Financial Services Sector.



Kegiatan CSER
CSER Activities

5 Oct 2023

Sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap sosial dan lingkungan, Perseroan telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 5 Oktober 2023 bertempat di SMA Taman Harapan 1 Bekasi. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ditunjukkan Perseroan adalah memberikan sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pemberian sarana pendukung kegiatan belajar mengajar ini diterima langsung oleh Bapak Cahyono, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Taman Harapan 1 Bekasi.

Perseroan berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia terutama generasi muda.

As a form of the Company's commitment to social and environment, the Company has carried out activity on October 5, 2023 at Taman Harapan 1 Bekasi High School. The social and environmental responsibility shown by the Company was providing facility to support teaching and learning activities at school. The handout of supporting facilities for teaching and learning activities was received directly by Mr. Cahyono, S.Pd., M.Pd as the Principal of SMA Taman Harapan 1 Bekasi.

The Company hopes that through this activity will make a positive contribution to the community, improve the quality of education, and develop the quality of human resources, especially the younger generation.



Literasi Keuangan
Financial Literacy

5 Oct 2023

Dalam menjalankan amanah Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK NO 3 Tahun 2023, Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, MLI *Learning Center*, pada tanggal 5 Oktober 2023 telah menjalankan pelaksanaan Program Sosialisasi Edukasi, Literasi dan Pengelolaan Keuangan dengan peserta dari Siswa/i SMA Taman Harapan-Bekasi dengan Tema bertajuk "Mengenal Usaha Jasa Pembiayaan".

In carrying out the mandate of the Financial Services Authority through POJK NO 3 of 2023, concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Community, MLI *Learning Center*, on October 5, 2023, carried out the implementation of the Education, Literacy, and Financial Management Socialization Program with participants from Taman Harapan-Bekasi High School Students with a theme entitled "Getting to Know the Financing Services Business".



Perseroan melalui MLI *Learning Center* telah merealisasikan pelaksanaan Pelatihan *Sustainable Finance Action Plan* 2023 yang bertema Implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2023, pada tanggal 10 November 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemahaman program keuangan berkelanjutan dengan perkembangan terkini, mengintegrasikan risiko sosial, lingkungan hidup, tata kelola dalam aktivitas bisnis Perusahaan dan memahami dalam mengembangkan produk dan/atau layanan Keuangan Berkelanjutan secara selektif kepada anggota komite kredit Perseroan. Kepesertaan diikuti oleh seluruh karyawan dengan narasumber yaitu dari Trisakti *Sustainability Center*.

The Company through MLI Learning Center has realized the implementation of the Sustainable Finance Action Plan 2023 Training with the theme of Implementation of the Sustainable Finance Action Plan (SFAP) 2023, November 10, 2023. This activity aims to increase knowledge in understanding sustainable finance programs with the latest developments, integrating social, environmental, and governance risks in the Company's business activities, and understanding the development of Sustainable Finance products and/or services selectively to members of the Company's credit committee. Participation was followed by all employees with external parties namely from the Trisakti Sustainability Center.



Pada tanggal 16 - 27 November 2023, Perseroan menyelenggarakan *reward tour* bertajuk *Incredible Europe* sebagai bentuk apresiasi bagi 20 *showroom* mobil bekas terbaik nasional yang telah berkontribusi dan mencapai target pada tahun 2022.

Reward tour ini diharapkan mampu mempererat hubungan antara pemilik *showroom* mobil bekas dengan Perseroan dan dapat meningkatkan kontribusi serta daya saing terhadap kompetitor.

On November, 16 - 27, 2023, the Company organized a reward tour titled *Incredible Europe* as a form of appreciation for the best 20 used car showroom nationwide who have contributed and achieved targets in 2022.

This reward tour is expected to strengthen the relationship between the owners of the used car showroom and the Company and can increase the contribution as well as competitiveness against competitors.



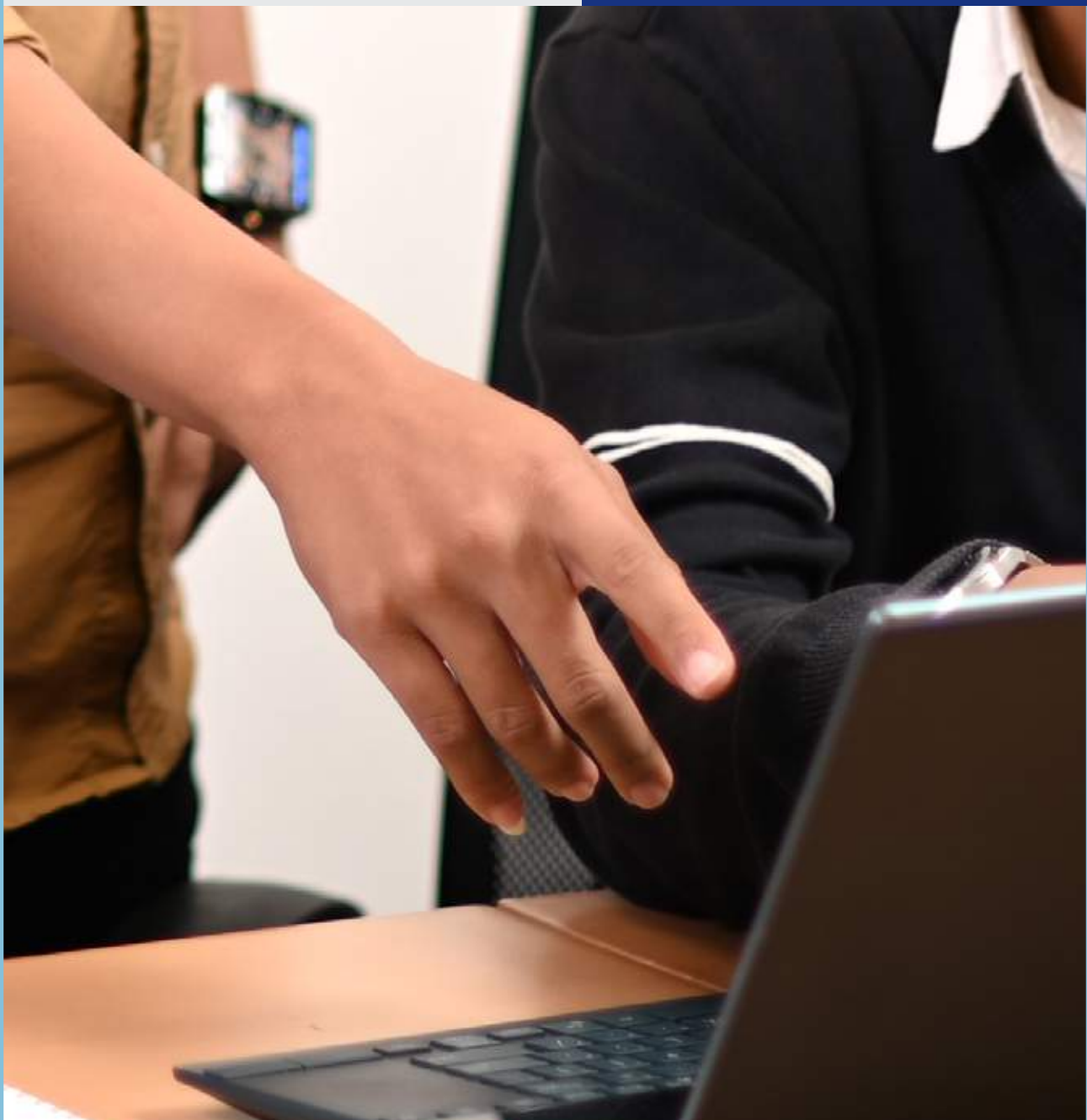
Sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Butir III.3 Tentang Kewajiban *Public Expose* Tahunan, maka Perseroan mengadakan acara *Public Expose* pada tanggal 20 Desember 2023 bertempat di Catur Dharma *Hall* Lantai 5 Menara Astra, Jakarta. Presentasi *Public Expose* Tahunan ini disampaikan oleh anggota Direktur Perseroan.

In accordance with the regulations of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) through the Board of Directors Decree of PT Bursa Efek Indonesia Number: Kep-00066/BEI/09-2022 dated September 30, 2022 Regarding Changes to Regulation Number I-E Regarding the Obligation to Submit Information, Item III.3 Regarding the Obligation of Annual Public Expose, the Company held a Public Expose event on December 20, 2023, located at Catur Dharma Hall, 5th Floor Astra Tower, Jakarta. The Annual Public Expose presentation is delivered by members of the Company’s Board of Directors.

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

MIZUHO





Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Report

Yasuo Imaizumi

Komisaris Utama
President Commissioner

“Berbagai tantangan yang dihadapi dunia pada tahun 2023 turut dirasakan oleh Perseroan. Perseroan senantiasa berupaya menjaga pertumbuhan yang berkualitas dengan senantiasa mengantisipasi tantangan dan mengedepankan budaya risiko. Perseroan juga telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperkuat pengendalian internal, Perseroan menerapkan *Control Self-Assessment* pada setiap fungsi dalam organisasi.

The Company impacted by the various challenges faced by the world in 2023. The Company always strives to maintain quality growth by always anticipating challenges and prioritizing a risk culture. The Company has also implemented Good Corporate Governance in accordance with applicable laws and regulations. To strengthen internal control, the Company applies Control Self-Assessment in every function within the organization. ”

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas dan tanggung jawab pengawasan Perseroan sejalan dengan arahan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2023. Kami juga menyampaikan penilaian kinerja Direksi yang mencakup antara lain, kinerja pengelolaan Perseroan, pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi Perseroan, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi serta pandangan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (“GCG”).

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Tahun 2023, dunia masih dilanda berbagai tantangan yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi global. Mulai dari peningkatan tensi geopolitik yang berujung pada fragmentasi geo-ekonomi, risiko inflasi, dan volatilitas sektor keuangan.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

The Board of Commissioners submitted a report on the duties and responsibilities of the Company’s supervision in line with the direction of the General Meeting of Shareholders and the Articles of Association realized through various activities in 2023. We also submitted an assessment of the performance of the Board of Directors which includes, performance of the Company’s management, supervision of the formulation and implementation of the Company’s strategy, view of business prospects prepared by the Board of Directors and the view of the implementation of Good Corporate Governance (“GCG”).

Assessment of the Performance of the Board of Directors

In 2023, the world was still hit by various challenges that had a direct impact on global economic conditions. Starting from increasing geopolitical tensions which led to geo-economic fragmentation, inflation risks, and financial sector volatility.

Setelah berakhirnya pandemi COVID-19, permintaan kembali tinggi disertai *shock* dari sisi penawaran mengakibatkan melonjaknya inflasi. Kondisi ini diperparah dengan faktor bencana alam dan El Nino yang menyebabkan harga komoditas bergejolak yang selanjutnya memicu kenaikan inflasi. Inflasi tinggi kemudian direspon oleh negara-negara maju dengan menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga acuan tersebut menekan inflasi seiring menurunnya permintaan agregat. Pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia juga cenderung mengalami penurunan.

Rantai pasok global juga terganggu pada tahun 2023 akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih terus berlanjut serta konflik Timur Tengah yang mencuat selama kuartal keempat tahun 2023. Hal ini mengakibatkan merebaknya fenomena fragmentasi negara-negara di dunia. Harga minyak mentah dunia pun mengalami kenaikan seiring dengan kondisi ketidakstabilan ini. Para pelaku pasar pun menunda investasi serta ekspansi. Tingkat konsumsi masyarakat juga mengalami penurunan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan berbagai bauran kebijakan dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN"), Indonesia juga berhasil menghadapi tekanan signifikan akibat moderasi harga komoditas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ("BPS"), pada tahun 2023, ekonomi nasional secara kumulatif mampu tumbuh 5,05% (yoy). Konsistensi pertumbuhan ini menandakan daya tahan dan kinerja perekonomian Indonesia yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain. Sementara di sektor keuangan, di tengah tekanan suku bunga yang masih sangat tinggi di 2023 walaupun inflasi global mereda, nilai tukar Rupiah mampu terjaga baik dan pasar Surat Berharga Negara ("SBN") mengalami tren *inflow* serta penurunan *yield*.

Melalui KTT ASEAN yang berlangsung pada 5-7 September 2023 bertajuk "*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*", Indonesia menyatakan komitmennya untuk memperkuat perannya sebagai pusat ekonomi dan keuangan di Asia Tenggara.

Dari sisi industri Perusahaan Pembiayaan Konvensional, nilai *outstanding* piutang pembiayaan mengalami lonjakan sebesar 12,30% (yoy) pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut didukung oleh pembiayaan multiguna, modal kerja, dan investasi, yang masing-masing tumbuh sebesar 519,58% (yoy), 15,10% (yoy) dan 8,98% (yoy). Profil risiko perusahaan pembiayaan juga terpantau masih terjaga meskipun rasio *Non-Performing Financing - Net* ("NPF - Neto") yang naik menjadi sebesar 2,44% atau naik 0,12% dari tahun 2022 yang berada di angka 2,32%. Begitu pula pada rasio *gearing* perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,26 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Perseroan secara resilien tumbuh ditengah-tengah berbagai kesulitan yang timbul pada tahun 2023 dan Perseroan tetap secara konsisten berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target penyaluran pembiayaan (*disburse*). Perseroan senantiasa meningkatkan pertumbuhan portofolio pembiayaan Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi yang berkualitas berdasarkan prinsip kehati-hatian serta melakukan kajian atas produk-produk

After the end of the COVID-19 pandemic, demand returned to high levels accompanied by a shock on the supply side resulting in soaring inflation. This condition was exacerbated by natural disasters and El Nino which caused commodity prices to fluctuate which in turn triggers an increase in inflation. Developed countries then responded to high inflation by raising benchmark interest rates. The increase in interest rates suppressed inflation as aggregate demand decreases. Economic growth in many countries also tends to decline.

The global supply chain was disrupted in 2023 due to the ongoing geopolitical conflict between Russia and Ukraine as well as Middle East conflict which emerged during the fourth quarter of 2023. This has resulted in the widespread phenomenon of fragmentation of countries in the world. World crude oil prices also increased in line with this unstable condition. Market players also postponed investment and expansion. The level of public consumption has also decreased.

Based on the data from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, with a variety of policy mixes and State Budget ("APBN") support, Indonesia has also managed to face significant pressure due to moderation in commodity prices. Based on data from the Central Statistics Agency ("BPS"), in 2023, the national economy was cumulatively able to grow 5.05% (yoy). This consistent growth indicates the resilience and better performance of the Indonesian economy compared to many other countries. Meanwhile in the financial sector, amidst pressure on interest rates which will still be very high in 2023 even though global inflation has subsided, the Rupiah exchange rate has been able to be maintained well and the State Securities ("SBN") market is experiencing a trend of inflow and decreasing yields.

Through the ASEAN Summit which was held on 5-7 September 2023 entitled "*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*", Indonesia expressed its commitment to strengthening its role as the economic and financial center in Southeast Asia.

From the perspective of conventional financing company industry, the value of outstanding financing receivables has experienced a surge of 12.30% (yoy) in 2023. This growth is supported by multipurpose financing, working capital, and investment financing which each grew by 519.58% (yoy), 15.10% (yoy) and 8.98% (yoy). It was also observed that the risk profile of finance companies was still maintained even though the Non-Performing Financing ("NPF - Net") ratio increased to 2.44% or an increase of 0.12% from 2022 which was at 2.32%. Likewise, the finance company's gearing ratio was recorded at 2.26 times or far below the maximum limit of 10 times.

The Company was resilient in growing amidst various difficulties that arise in 2023 and the Company continues to consistently contribute to move the wheels of the national economy. This is proven by the achievement of the financing disbursement target. The Company continues to increase the growth of its quality financing portfolio for Retail Business Unit and Corporate Business Unit based on the principle of prudence and conducts studies on new products and marketing strategies that suit

baru dan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk Unit Bisnis Ritel, Perseroan terus memperluas kerjasama dengan rekanan *dealer* dan membuka jaringan Kantor Cabang baru.

Sedangkan untuk Unit Bisnis Korporasi, pada Tahun 2023, Perseroan dapat mencapai target penyaluran pembiayaan baru dalam skema pembiayaan investasi sewa pembiayaan dan jual dan sewa balik. Namun, Perusahaan belum mencapai target pembiayaan modal kerja dengan skema pembiayaan tagihan pembelian barang dan/atau jasa yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan para pelanggan korporasi lebih memilih penggunaan dana yang berasal dari arus kas perusahaannya.

Perseroan senantiasa memaksimalkan upaya peningkatan produktivitas karyawan dan efisiensi kerja. Selain itu, potensi kenaikan tingkat suku bunga akan tetap diwaspadai oleh Perseroan di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Jumlah Aset Perseroan pada tahun 2023 mencapai Rp2,79 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 13,25% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Jumlah Liabilitas pada tahun 2023 mencapai Rp2,04 triliun, atau meningkat sebesar 14,99% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Jumlah Ekuitas pada tahun 2023 mencapai Rp750,48 miliar, meningkat sebesar 8,78% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya.

Pada sisi profitabilitas, Jumlah Pendapatan Perseroan selama tahun 2023 tercatat sebesar Rp401,34 miliar, meningkat sebesar 20,50%, dan Jumlah Beban Perseroan sebesar Rp340,10 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 22,46%. Per 31 Desember 2023, Perseroan mencatatkan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp61,15 miliar atau menurun sebesar 1,45% dari tahun sebelumnya. Dari segi kualitas aset, Perseroan masih dapat menjaga kualitas piutang pembiayaan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang berlaku dengan mencatatkan Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (NPF-neto) sebesar 0,19% di tahun 2023 atau mengalami peningkatan kualitas dibandingkan dengan tahun 2022.

Berdasarkan aspek kuantitatif, Dewan Komisaris menilai Direksi telah berhasil mencapai target penyaluran pembiayaan yang telah dicanangkan dalam rencana bisnis tahun 2023. Berdasarkan aspek profil risiko, rentabilitas, dan permodalan, Perseroan mampu mendorong kinerja pertumbuhannya dengan senantiasa menjaga kualitas portofolio yang sehat bagi Perusahaan Pembiayaan. Selanjutnya, Direksi diharapkan memperhatikan kembali kinerja profitabilitas, terutama melalui efisiensi operasional.

Sejalan dengan aspek kuantitatif, berdasarkan aspek kualitatif, Perseroan telah melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan pemenuhan ketentuan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan dalam upaya menjaga pertumbuhan yang berkualitas dengan senantiasa mengantisipasi tantangan dan mengedepankan budaya risiko. Penerapan GCG telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

customer needs. For the Retail Business Unit, the Company continues to expand cooperation with dealer partners and open new Branch Office networks.

Meanwhile, for the Corporate Business Unit, in 2023, the Company achieved its target of disbursing new financing in the investment financing scheme under finance lease and sale and leaseback. However, the Company did not achieve its working capital financing target with a financing scheme for purchasing goods and/or services which has received approval from the Financial Services Authority because corporate customers prefer to use funds originating from their company's cash flow.

The Company always maximized effort in increasing the employee's productivity and work efficiency. In addition, the Company will continue to monitor the potential for interest rate increase amidst uncertain global conditions.

The Company's Total Assets in 2023 reached Rp2.79 trillion, or an increase of 13.25% compared to the position in the previous year. Total Liabilities in 2023 reached Rp2.04 trillion, or an increase of 14.99% compared to the position in the previous year. Meanwhile, Total Equity in 2023 reached Rp750.48 billion, an increase of 8.78% compared to the position in the previous year.

On the profitability side, the Company's Total Revenue for 2023 was recorded at Rp401.34 billion, an increase of 20.50%, and the Company's Total Expense was Rp340.10 billion or an increase of 22.46%. As of 31 December 2023, the Company recorded Profit for the Year of Rp61.15 billion or a decrease of 1.45% from the previous year. In terms of asset quality, the Company can still maintain the quality of financing receivables in accordance with applicable Financial Service Authority (“OJK”) regulations by recording a Non-Performing Financing Receivables Ratio (NPF-net) of 0.19% in 2023 or experiencing an increase in quality compared to 2022.

Based on the quantitative aspect, the Board of Commissioners assesses the Board of Directors has succeeded in achieving the financing disbursement target set out in the 2023 business plan. Based on risk profile aspect, rentability and capital, the Company is able to drive its growth performance by always maintaining a healthy portfolio quality for the Financing Company. Furthermore, the Board of Directors is expected to pay more attention to profitability performance, especially through operational efficiency.

In line with quantitative aspects, based on qualitative aspects, the Company has made policy adjustments based on compliance with applicable regulations and targets that have been set in an effort to maintain quality growth by always anticipating challenges and prioritizing a risk culture. The implementation of GCG has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations.

Penilaian atas Kinerja Komite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk beberapa Komite yang berada di bawahnya yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit secara independen telah melakukan tinjauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal untuk pemeriksaan Laporan Keuangan tahunan.

Komite Audit juga telah senantiasa melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan berkala Perseroan. Selanjutnya, Komite Audit telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan Direksi terhadap hasil pemeriksaan Unit Audit Internal.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah secara independen melakukan penilaian kinerja, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Disamping itu, Komite Pemantau Risiko telah secara independen melakukan pemantauan dan penelaahan atas profil risiko Perseroan dan penerapan kepatuhan Perseroan. Komite Pemantau Risiko juga telah senantiasa melakukan evaluasi Laporan hasil penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perusahaan.

Berdasarkan pembahasan realisasi kerja, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik.

Prospek Usaha 2024

Pada awal tahun 2024, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan global 2024 sebesar 3,10%. Proyeksi IMF didorong oleh resiliensi Amerika Serikat yang di atas ekspektasi dan perkembangan positif beberapa *Emerging Market*. Namun, ketidakpastian perekonomian global yang dipengaruhi oleh krisis geopolitik berkelanjutan berdampak langsung pada lonjakan angka inflasi global di tengah krisis energi yang berkepanjangan.

Disrupsi ekonomi Tiongkok akan berdampak pada ekonomi dunia dikarenakan Tiongkok menyumbang 40% dari Produk Domestik Bruto ("PDB") global. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, hal ini juga akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi menurunnya upah kelompok menengah akibat pelemahan aktivitas ekonomi di sektor-sektor penyerap banyak tenaga kerja seperti manufaktur, pertanian, dan perdagangan sebagai imbas penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama yaitu Tiongkok dapat memperlambat konsumsi kelas menengah tersebut.

Sementara itu, tahun 2024 yang merupakan tahun politik bagi Indonesia memberikan dampak terhadap konsumsi domestik. Diprediksikan Pemilihan Umum ("Pemilu") akan berkontribusi

Committees Performance Assessment

In order to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners established several committees under it, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee and the Risk Monitoring Committee.

Throughout 2023, the Audit Committee independently conducted reviews, evaluations, and provided recommendations for the appointment of external auditors to examine the annual Financial Statements.

The Audit Committee also consistently reviewed the Company's periodic Financial Statements. Furthermore, the Audit Committee monitored the performance of the Internal Audit Unit's duties and responsibilities, overseeing the implementation of follow-up actions taken by the Board of Directors regarding the Internal Audit Unit's findings.

The Nomination and Remuneration Committee independently assessed performance, providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies, and remuneration amounts for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Additionally, the Risk Monitoring Committee independently monitored and reviewed the Company's risk profile and compliance implementation. The Risk Monitoring Committee also consistently evaluated the results of its own assessments of the Company's soundness level.

Based on the discussion of work realization, the Board of Commissioners assessed that all committees under the Board of Commissioners had performed their duties and responsibilities quite well.

Business Prospects 2024

In the early 2024, International Monetary Fund (IMF) projected 2024 global growth of 3.10%. IMF projections was driven by the resilience of the United States which was above expectations and positive developments in several Emerging Markets. However, the global economic uncertainty due to prolonged geopolitical crisis would give a sudden impact on global inflation in the midst of energy crisis.

China's economic disruption will have an impact on the world economy because China contributes 40% of global Gross Domestic Product ("GDP"). As Indonesia's main trading partner, this will also have a significant impact on Indonesia's economic growth. The potential for the decreasing middle class wages due to weakening economic activity in sectors that absorb a lot of labor such as manufacturing, agriculture and trade as a result of decreased demand from the main trading partner country, namely China could slow down middle class consumption.

Meanwhile, in 2024 as Indonesian political year would have an impact on domestic consumption. It is predicted that the National Election ("Pemilu") will contribute Rp294.50 trillion to national

sebesar Rp294,50 triliun terhadap PDB nasional. Usaha mikro mulai bergairah kembali di perhelatan nasional ini, namun secara umum, perhelatan Pemilu cenderung menyebabkan kredit modal kerja dan investasi mengalami penurunan mengingat para pelaku pasar melakukan *wait and see*.

Pada awal tahun 2024, seiring dengan kinerja pertumbuhan yang baik, OJK memproyeksi pertumbuhan aset industri pembiayaan atau *multifinance* yang akan tumbuh 13%-16% di tahun 2024. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan bagi pengembangan bisnis perusahaan pembiayaan terkait dengan sumber pendanaan yang masih bergantung kepada pinjaman perbankan, serta optimalisasi pemanfaatan aset dalam penyaluran pembiayaan yang dapat dilihat dari indikator *Financing to Asset Ratio* (FAR).

Perseroan juga optimis bahwa pada tahun 2024, Perseroan dapat secara konsisten meningkatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan dikelola secara *prudent* sehingga mendorong pertumbuhan Perseroan secara sehat dan berkelanjutan. Perseroan juga memperhatikan dan melakukan evaluasi kesesuaian produk terhadap kebutuhan konsumen dan secara dinamis menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen serta senantiasa menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa rencana bisnis yang telah disusun oleh Direksi tersebut cukup konservatif dan realistis. Namun, Direksi juga perlu memantau secara ketat beban operasional dan terus mengoptimalkan program efisiensi. Dewan Komisaris juga menghimbau Direksi untuk senantiasa melakukan pengendalian internal dengan menerapkan *Control Self-Assessment* ("CSA"). Dewan Komisaris yakin rencana bisnis yang telah disusun tersebut akan menjadi energi pendorong untuk peningkatan kinerja ditengah ketidakpastian ekonomi global. Dewan Komisaris percaya bahwa Direksi akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan strategi yang adaptif dalam menghadapi kondisi kedepan sehingga Perseroan dapat terus berkembang dengan kinerja yang lebih baik.

Penerapan Tata Kelola

Perseroan memiliki komitmen penuh untuk terus meningkatkan penerapan GCG dalam setiap proses bisnis maupun seluruh aspek pengelolaan Perseroan sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan penerapan GCG, Perseroan telah membentuk struktur GCG yang memadai dimana Perseroan mengklasifikasikan 2 (dua) organ yakni organ utama dan organ penunjang. Organ utama merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), yang merupakan organ tertinggi Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi. Sedangkan, organ penunjang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi prinsip-prinsip GCG. Anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, memiliki kompetensi dan

GDP. Micro businesses are starting to get excited again at this national event, but in general, Pemilu tends to cause working capital and investment loan to decline considering that market players would wait and see.

At the beginning of 2024, in line with the good performance, OJK projects that the growth of multifinance industry assets would grow at 13% -16% in 2024. However, there are several challenges for such development of finance company business which related to sources of funding that are still dependent on bank loans, as well as optimization of asset utilization in financing disbursement which can be seen from the Financing to Asset Ratio (FAR) indicator.

The Company is also optimistic that in 2024, the Company can consistently increase the growth of financing disbursement and managed prudently so as to increase the Company's growth in a healthy and sustainable manner. The Company also will pay attention and evaluates the suitability of products to customer needs and dynamically creates products that are relevant to customer needs and always implementing Sustainable Finance principal in its business activities.

The Board of Commissioners also considers that the business plan prepared by the Board of Directors is quite conservative and realistic. However, the Board of Directors should also monitor closely the operational expenses and continue to optimize efficiency program. The Board of Commissioners also urges the Board of Directors to always carry out internal control by implementing Control Self-Assessment ("CSA"). The Board of Commissioners believes that the business plan that has been prepared will be a driving force for improving performance amidst global economic uncertainty. The Board of Commissioners believes that the Board of Directors will continue to take corrective steps and adaptive strategies in facing future conditions so that the Company can continue to develop with better performance.

GCG Implementation

The Company is fully committed to continuously improving the implementation of GCG in every business process and all aspects of the governance of the Company so as to provide added value to all stakeholders.

In GCG implementation, the Company establishes an adequate GCG structure whereas classifies into 2 (two) organs, the main organs and supporting organs. The main organs refer to the provisions of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies consisting of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), which is the highest organ of the Company, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Meanwhile, the supporting organs consist of the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Monitoring Committee.

The implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners has been carried out effectively and fulfills the principles of GCG. Members of the Board of Commissioners are able to act and make decisions independently, have competence

integritas sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu Rapat Rapat Dewan Komisaris, serta Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris terselenggara secara efektif.

Secara berkala, Dewan Komisaris terus melakukan pemantauan untuk meningkatkan penerapan GCG. Perseroan juga secara berkala memantau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjamin terpenuhinya kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Dewan Komisaris mengamanahkan kepada Direksi Perseroan agar memastikan penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tanggal 17 Oktober 2022 sebagai upaya untuk melindungi Data Pribadi dengan menjunjung tinggi GCG di seluruh proses bisnis dan operasional Perseroan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelindungan dan rasa aman secara berkelanjutan kepada pemilik data pribadi.

Pandangan atas Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sebagai bagian dalam penerapan GCG, Perseroan sudah memiliki kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencakup jenis pelanggaran, cara pengaduan, perlindungan, dan jaminan kerahasiaan pelapor, serta penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan yang tepat.

Perseroan menyiapkan tata cara Sistem Pelaporan Pelanggaran untuk mendeteksi adanya pelanggaran, fungsi sistem pelaporan dan pengaduan ini diawasi dan dikelola oleh Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit terkait melakukan pemantauan atas proses dan penyelesaian dari setiap pengaduan atau pelaporan yang ada. Dengan mekanisme dan sistem yang telah diterapkan Perseroan, pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran diharapkan senantiasa mendukung pelaksanaan tugas pengawasan aktif dari Dewan Komisaris.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki dari jabatannya selaku Komisaris Utama. Serta pada tanggal 5 November 2023, anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 18 Ayat 18 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir.

Selanjutnya, RUPS telah menyetujui mengangkat Bapak Yasuo Imaizumi selaku Komisaris Utama yang berlaku efektif pada tanggal 21 Maret 2024 dan menyetujui mengangkat Ibu

and integrity in accordance with the size and complexity of the Company and have fulfilled the applicable regulations. In addition, the Board of Commissioners Meetings, and Joint Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners are effectively organized.

Periodically, the Board of Commissioners continue to monitor to improve the implementation of GCG. The Company also periodically monitors changes in the provisions of the laws and regulations that are set to ensure the fulfillment of the Company's compliance with the applicable laws and regulations.

Furthermore, the Board of Commissioners mandated the Board of Directors of the Company to ensure the implementation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection dated 17th October 2022 as an effort to protect Personal Data by upholding GCG in all business processes and Company's operations. This aims to provide sustainable protection and security to the owner of personal data.

Views on the Implementation of the Whistleblowing System

As part of the implementation of GCG, the Company already has a Violation Reporting System policy which covers the types of violations, complaints methods, protection, and guarantees for the confidentiality of the complainants, as well as handling complaints and proper follow-up on complaints.

The Company prepares the procedures for the Violation Reporting System to detect violations, the function of this reporting and complaint system is supervised and managed by the Internal Audit Unit.

The Board of Commissioners through the relevant Audit Committee monitors the process and resolution of any existing complaints or reports. With the mechanism and system that have been implemented by the Company, the implementation of the Violation Reporting System is expected to always support the implementation of the active supervisory duties of the Board of Commissioners.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") held on March 21 2024, the GMS approved accepting the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as President Commissioner. And on November 5, 2023, a member of the Company's Board of Commissioners, namely Mrs. Roosniati Salihin as Commissioner, passed away, so in accordance with the provisions of Article 18 Paragraph 18 letter a. of the Company's Articles of Association, the term of office of the member of the Board of Commissioners automatically ended.

Furthermore, the GMS has approved to appoint Mr. Yasuo Imaizumi as President Commissioner effective on March 21, 2024 and approved to appoint Mrs. Bhindawati Gunawan as

Bhindawati Gunawan selaku Komisaris yang berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Yasuo Imaizumi
Komisaris	: Bhindawati Gunawan*
Komisaris Independen	: Mohammad Syahril

*) Bahwa pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Frekuensi dan Metode Pemberian Saran Kepada Direksi

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan saran yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk di antaranya pengawasan atas penerapan strategi Perseroan, melalui berbagai forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris;
2. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi; dan
3. Rapat bersama Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Di tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 kali dan juga mengadakan 4 kali rapat gabungan bersama dengan Direksi.

Apresiasi

Akhir kata, perkenankan saya, mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemegang saham atas dukungan dan pengertiannya, serta jajaran manajemen atas dedikasinya. Kami berharap, ditengah pemulihan perekonomian nasional, Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Jakarta, April 2024

Atas nama Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Commissioner effective as of the receipt of approval from the OJK for the fit and proper test and in compliance with applicable laws and regulations.

As of the issuance of this Annual Report, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

President Commissioner	: Yasuo Imaizumi
Commissioner	: Bhindawati Gunawan*
Independent Commissioner	: Mohammad Syahril

*) That the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner of the Company is effective as of the receipt of approval from the OJK for the fit and proper test and in compliance with applicable laws and regulations

Frequency and Method of Advice Submission to the Board of Directors

Throughout 2023, the Board of Commissioners provided direction and advice related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, including supervision of the implementation of the Company's strategy, through various forums as follows:

1. Board of Commissioners Meeting;
2. Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors; and
3. Meeting with the Committees under the Board of Commissioners.

In 2023, the Board of Commissioners held 6 meetings of the Board of Commissioners and also 4 joint meetings with the Board of Directors.

Appreciation

Finally, on behalf of the Board of Commissioners, allow me to express my deepest gratitude to the shareholders for their support and understanding, as well as the management for their dedication. We hope that, amid the recovery of the national economy, the Company can continuously improve its performance in the coming year.

Jakarta, April 2024

On behalf of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk



Yasuo Imaizumi
Komisaris Utama / President Commissioner



Laporan Direksi

The Board of Directors Report

Konosuke Mizuta

Direktur Utama
President Director

“ Konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut, serta konflik Timur Tengah berdampak cukup signifikan pada Perseroan. Namun Perseroan mampu dengan kuat menghadapi tantangan tersebut dan terus mencerminkan pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas. Perseroan secara adaptif dan rasional menetapkan target pertumbuhan usaha, dengan didukung oleh pengendalian internal yang dilakukan dalam setiap unit Perseroan. Insan Perseroan juga menerapkan pendekatan *zero base approach* dan implementasi pemisahan tugas dan tanggung jawab dari setiap fungsi yang ada. Perseroan percaya strategi ini akan memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja usaha Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

The ongoing conflict between Russia and Ukraine, as well as the Middle East conflict has a significant impact on the Company. However, the Company was able to face these challenges and continue to reflect quality financing growth. The Company adaptively and rationally sets business growth targets, supported by internal control carried out in each unit of the Company. The Company's employees also apply a *zero base approach* and implement segregation of duties and responsibilities for each existing function. The Company believes this strategy will make the governance stronger and improve the Company's business performance and provide added value for stakeholders.

”

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh gejolak. Dunia masih dalam masa pemulihan dari pandemi COVID-19 serta perang Rusia – Ukraina yang hingga sekarang masih memanas dan berdampak signifikan terhadap perekonomian global. Pada akhir tahun 2023, kondisi perekonomian global pun terus merosot dipicu oleh konflik Timur Tengah. Hal ini menyebabkan fluktuasi harga minyak dan gas, gangguan pasokan energi, utang publik dan tekanan fiskal, depresiasi/devaluasi mata uang, peningkatan biaya logistik, dan dampak negatif pada pertumbuhan Produk Domestik Produk (“PDB”) secara keseluruhan.

Perang ini mengkhawatirkan para pelaku pasar dan berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dan kelangkaan pasokan minyak dunia. Sebagai negara berkembang yang sangat bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar bersubsidi, Indonesia merasakan dampak langsung dari konflik ini. Hal ini menyebabkan tingkat inflasi mulai merangkak naik. Inflasi yang tinggi akan memberikan pembenaran lebih lanjut untuk terus menaikkan suku bunga acuan. Rupiah telah mencapai level terendah sejak tahun 2020, dipengaruhi oleh kebijakan moneter ketat The Fed dan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi ini menyebabkan menurunnya minat investasi dan ekspansi usaha pelaku pasar.

Hal ini tercermin dari penurunan persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (“BPS”) pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,31% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 5,05% (yoy), namun jika dilihat secara spasial, ekonomi Indonesia masih terus tumbuh.

Untuk Perusahaan Pembiayaan Konvensional, piutang pembiayaan tetap tumbuh positif sepanjang tahun 2023 yaitu sebesar Rp445,95 miliar, dimana pada tahun 2022 piutang pembiayaan yaitu sebesar Rp397,12 miliar, dengan produk multiguna sebagai penyumbang pertumbuhan terbesar.

Ditengah-tengah iklim ekonomi yang masih belum stabil, Perseroan merumuskan beberapa strategi untuk meningkatkan pembiayaan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Beberapa hal strategis yang telah dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2023, diantaranya yaitu :

- Meningkatkan pertumbuhan portofolio pembiayaan Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi yang berkualitas berdasarkan prinsip kehati-hatian serta menciptakan produk-produk baru dan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

2023 was a turbulent year, while the world was still recovering from the COVID-19 pandemic and Russian – Ukraine war which is currently still heating up and has a significant impact on the global economy. At the end of 2023, global economic conditions was continue to decline, triggered by the Middle East conflict. This leads to oil and gas price fluctuations, energy supply disruptions, public debt and fiscal stress, currency depreciation/devaluation, increased logistics costs, and an overall negative impact on the growth of in Gross Domestic Product (“GDP”).

These wars worried market players and had an impact on increasing crude oil prices and scarcity of world oil supplies. As a developing country that is highly dependent on crude oil imports and subsidized fuel, Indonesia felt the direct impact of this conflict. This causes the inflation rate to start to crawl up. High inflation provided further justification for continuing to raise the benchmark interest rate. The Rupiah reached its lowest level since 2020, influenced by the Fed’s tight monetary policy and tensions in the Middle East. This condition caused a decline in investment interest and business expansion of market players.

This was reflected in the decreasing in the percentage of Indonesia’s economic growth in 2023. Based on data from the Central Statistics Agency (“BPS”) in 2022, Indonesia’s economic growth was 5.31%, while in 2023 it was 5.05% (yoy). However, if viewed spatially, the Indonesian economy is still growing.

For Conventional Financing Companies, financing receivables continue to grow positively throughout 2023, amounting to Rp445.95 billion, where in 2022 financing receivables was Rp397.12 billion, with multipurpose products as the largest contributor to the growth.

In the midst of an unstable economic climate, the Company has formulated several strategies to increase financing while still implementing the prudence principle. Several strategic things that have been carried out by the Company in 2023, among others:

- Increasing the growth of quality financing portfolios for Retail Business Unit and Corporate Business Unit based on the principle of prudence and creating new products and marketing strategies that suit customers needs.

- Sehubungan dengan ketidakpastian ekonomi global yang berimbas pada kenaikan harga komoditi global, Perseroan senantiasa berusaha untuk tetap menawarkan suku bunga kompetitif kepada konsumen sejalan dengan peningkatan laba (*earning*) Perseroan. Dimana pangsa pasar Perseroan terhadap industri pembiayaan secara nasional pada bulan Desember 2023 adalah sebesar 0,59%.
- Pembukaan Kantor Cabang baru. Selama tahun 2023, Unit Bisnis Ritel telah merealisasikan 4 Kantor Cabang baru yang berlokasi di kota Banjarmasin, Jakarta Barat, Cimahi dan Balikpapan, dan pada bulan Maret 2024 Perseroan telah merealisasikan pembukaan Kantor Cabang Surakarta. Selain itu, Perseroan juga telah merealisasi perubahan alamat Kantor Cabang Bogor dan Kantor Cabang Depok, dan saat ini masih dalam proses perijinan perubahan alamat Kantor Cabang Jakarta Selatan.
- Selama tahun 2023, Perseroan terus melanjutkan pengawasan intensif terhadap konsumen bermasalah dengan pendekatan persuasif dan tetap melanjutkan program restrukturisasi pembiayaan terhadap konsumen-konsumen yang dianggap layak dan kooperatif.
- Dalam rangka meningkatkan keamanan data dan informasi serta untuk memenuhi ketentuan salah satu persyaratan untuk mengakses data kependudukan (KTP) pada aplikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Perseroan telah memperoleh sertifikasi audit ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Selain itu, Perseroan juga terus meningkatkan kesadaran keamanan siber di kalangan karyawan Perseroan melalui program pelatihan yang telah dilakukan pada bulan Mei 2023 dan bulan November 2023.
- Perseroan mengupayakan perubahan budaya kerja yang positif dengan mengedepankan prinsip *Zero Base Approach* dan senantiasa memperkuat *Control Self Assessment* dalam setiap proses kerja dalam rangka memperkuat pengendalian internal secara keseluruhan.
- Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam Strategi Nasional Pencegahan penyuapan, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan menyusun kebijakan anti penyuapan dan korupsi yang telah diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2023. Selain itu, Perseroan telah melaksanakan programnya sesuai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, diantaranya adalah menerbitkan kebijakan dan prosedur keuangan berkelanjutan serta pelatihan tentang portofolio keuangan berkelanjutan pada bulan November dan Desember 2023.
- Perseroan terus menerapkan strategi penanganan konsumen bermasalah dengan intensif dan melakukan penghapusbukuan piutang pembiayaan setiap 3 bulan untuk Unit Bisnis Ritel dan menyiapkan pencadangan yang cukup untuk Unit Bisnis Korporasi untuk menjaga rasio keuangan yang sehat.
- Dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang sehat, Perseroan senantiasa menghimbau para karyawan Perseroan untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor. Selain itu, Perseroan tetap menyarankan para karyawan untuk menerapkan *work from home* apabila karyawan sedang tidak sehat.
- In connection with global economic uncertainty which has an impact on rising global commodity prices, the Company always strives to continue offering competitive interest rates to customers in line with increasing Company profits (earnings). Where the Company's market share in the national financing industry in December 2023 is 0.59%.
- Opening of new Branch Offices. During 2023, the Retail Business Unit has opened 4 new Branch Offices located in the cities of Banjarmasin, West Jakarta, Cimahi and Balikpapan, and on March 2024, the Company has opened Surakarta Branch Office. Apart from that, the Company has also changed the address of the Bogor Branch Office and Depok Branch Office, and is currently still in licensing process for relocating South Jakarta Branch Office.
- During 2023, the Company continues to intensively monitoring problematic customers with a persuasive approach and continuing the financing restructuring program for customers who are deemed appropriate and cooperative.
- In order to improve data and information security and to comply with one of the requirements for accessing population data (KTP) in Civil Registry Service Office (Dukcapil) application, the Company has obtained an ISO/IEC 27001:2013 audit certification for Information Security Management System. Furthermore, the Company also continues to increase the cyber security awareness among the Company's employees through training program conducted in May and November 2023.
- The Company strives for positive work culture changes by prioritizing the Zero Base Approach principle and continuously strengthening Control Self Assessment in every work process in order to strengthen overall internal control.
- In order to support the government's program in the National Strategy for Preventing Bribery, the Company implements an Anti-Bribery Management System by developing an anti-bribery and corruption policy which was issued on June 26, 2023. Furthermore, the Company has implemented its program in accordance with the Sustainable Finance Action Plan, including issuing sustainable finance policies and procedures as well as training on sustainable finance portfolios in November and December 2023.
- The Company continues to implement an intensive strategy of handling problematic customers and writes off financing receivables every 3 months for Retail Business Unit and prepare sufficient allowance for Corporate Business Unit to maintain a healthy financial ratio.
- In order to support a healthy work environment, the Company always urges Company employees to continue implementing health protocols in the office environment. Apart from that, the Company also continues to advise employees to implement work from home if the employee is unwell.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi

Dalam mengemban fungsi kepengurusan Perseroan, Direksi memiliki peran strategis terkait perumusan dan implementasi strategi Perseroan. Direksi secara konsisten melakukan kajian atas pelaksanaan strategi bisnis dengan mempertimbangkan dinamika yang ada. Selain itu, Direksi juga melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi strategi Perseroan guna mengawal kinerja yang optimal dalam jangka panjang.

Strategi Perseroan dirancang dengan mempertimbangkan berbagai dinamika di industri, guna memastikan perumusan strategi yang relevan dengan perkembangan ekosistem bisnis pembiayaan konsumen. Direksi mengedepankan aspek manajemen risiko yang terukur untuk dapat menjawab setiap tantangan seraya beradaptasi dengan dinamika industri.

Perseroan menetapkan rencana bisnis secara konservatif dan realistis guna memberikan nilai lebih bagi para Pemangku Kepentingan.

Proses yang Dilakukan Direksi dalam Implementasi Strategi

Terkait implementasi strategi bisnis Perseroan, Direksi secara berkala memperhatikan berbagai variabel kunci yang mencerminkan kinerja bisnis Perseroan. Mulai dari perkembangan terkait pencapaian target, laporan keuangan berkala, rasio-rasio keuangan, hingga hasil rapat koordinasi dengan setiap unit bisnis dan fungsi pendukung lainnya. Direksi senantiasa mengupayakan untuk menjalin komunikasi yang baik dan mengawal rantai koordinasi antar unit bisnis guna memastikan implementasi strategi telah berjalan dengan efektif.

Kinerja Perusahaan 2023

Dalam perspektif kinerja keuangan, Jumlah Aset Perseroan pada tahun 2023 mencapai Rp2,79 triliun, mengalami peningkatan sebesar 13,25% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Jumlah Liabilitas pada tahun 2023 mencapai Rp 2,04 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 14,99% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Jumlah Ekuitas pada tahun 2023 mencapai Rp750,48 miliar, meningkat sebesar 8,78% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya.

Selama tahun 2023, Perseroan berhasil membukukan Jumlah Pendapatan sebesar Rp401,34 miliar, jumlah ini meningkat sebesar 20,50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Beban Perseroan selama tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 22,47%. Dengan demikian, Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2023 sebesar Rp61,15 miliar atau menurun sebesar 1,45%.

Pada tahun 2023, jaringan usaha Perseroan didukung oleh 29 Kantor Cabang di beberapa kota besar yang tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera dan Sulawesi.

Strategy Formulation Process by The Board of Directors

In carrying out the management functions of the Company, the Board of Directors conducts a strategic role related to the formulation and implementation of the Company's strategies. The Board of Directors constantly reviews the implementation of business strategies by considering existing industry dynamics. In addition, the Board of Directors has also evaluated the implementation of the Company's strategies to ensure optimal performance in the long term.

The Company's strategies is formulated by considering various dynamics in the industry, in order to ensure the formulation of strategies that are relevant to the development of the consumer finance business ecosystem. The Board of Directors prioritizes measurable risk management aspects to be able to respond every challenge while adapting to industry dynamics.

The Company determines a conservative and realistic business plan by applying the principle of prudence in fulfilling customer's need. This aim is to provide added value to Stakeholders.

The Process Carried Out by The Board of Directors in Implementing Strategies

Regarding the implementation of the Company's business strategies, the Board of Directors regularly pays attention to various key variables that reflect the Company's business performance. Starting from the progress of target achievement, periodic financial reports, financial ratios, to the results of coordination meetings with each business unit and its supporting functions. The Board of Directors always maintains good communication and oversees the coordination chain between business units to ensure strategy implementation runs effectively.

Company Performance 2023

From a financial performance perspective, the Company's Total Assets in 2023 reaching Rp2.79 trillion, increased by 13.25% compared to the position in the previous year. Total Liabilities in 2023 reached Rp2.04 trillion, or an increase of 14.99% compared to the position in the previous year. Meanwhile, Total Equity in 2023 reached Rp750.48 billion, an increase of 8.78% compared to the position in the previous year.

During 2023, the Company managed to record Total Revenue of Rp401.34 billion, this amount increased by 20.50% compared to the previous year. The Company's Total Expenses in 2023 increased by 22.47%. Thus, the Company recorded a Profit for the Year in 2023 of Rp61.15 billion or decreased by 1.45%.

In 2023, the Company's business network is supported by 29 Branch Offices in several major cities spread across the islands of Java, Kalimantan, Bali, Sumatera and Sulawesi.

Target dan Realisasi

Dari sisi neraca, pada tahun 2023 Perseroan mencatatkan Jumlah Aset sebesar Rp2,79 triliun, dengan target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp3,14 triliun. Dari sisi Jumlah Pendapatan Perseroan selama tahun 2023 tercatat sebesar Rp401,34 miliar, melebihi target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp394,01 miliar. Realisasi Profitabilitas Perseroan selama tahun 2023 yang tercatat dalam Laba Tahun Berjalan sebesar Rp61,15 miliar lebih kecil dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp75,92 miliar.

Prospek Usaha 2024

Ketegangan geopolitik berkepanjangan yang masih berlanjut hingga awal tahun 2024 berdampak pada pasar global. Harga minyak mentah diprediksi akan terus meningkat secara moderat imbas dari ketegangan geopolitik ini. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan tercatat menjadi sebesar 3,10%. Lebih lanjut, menurut laporan Prospek Ekonomi Global (GEP) yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Januari 2024, ekonomi global diperkirakan akan mengalami perlambatan pada tahun 2024.

Selain tantangan global, berdasarkan proyeksi dari Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Indonesia menghadapi tantangan domestik khusus pada tahun 2024, di antaranya: 1) Pemilihan umum (Pemilu) presiden dan legislatif yang akan digelar pada tahun 2024; 2) Kenaikan harga pangan dan energi global; 3) Defisit anggaran pemerintah diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 yang disebabkan meningkatnya belanja pemerintah untuk persiapan pemilu dan pembangunan infrastruktur; 4) Rupiah diperkirakan berpotensi melemah terhadap dolar AS pada tahun.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut, pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan seperti: 1) Menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah dan menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil; 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan mendorong ekspor; 3) Melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak perlambatan ekonomi global dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi; dan 4) Melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, yang meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

IMF memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,00% pada tahun 2024, sementara proyeksi Bank Dunia sedikit lebih rendah sebesar 4,90%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan belanja pemerintah. Gubernur Bank Indonesia ("BI"), Perry Warjiyo, mengatakan bahwa konsumsi rumah

Target dan Realization

In terms of the balance sheet, in 2023 the Company recorded Total Assets of Rp2.79 trillion, with the previously set target was Rp3.14 trillion. In terms of the Company's Total Revenue in 2023, it was recorded at Rp401.34 billion, which was above the revenue target set at Rp394.01 billion. The realization of the Company's Profitability in 2023 which was recorded in the Net Profit for the Year amounted to Rp61.15 billion, below the previously set target of Rp75.92 billion.

Business Prospects 2024

The geopolitical tensions that prolong to early 2024 has caused an impact on global markets. Crude oil prices are predicted to continue to increase moderately as a result of geopolitical tensions. International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth will be recorded at 3.10%. Moreover, according to the Global Economic Prospects (GEP) report published by the World Bank in January 2024, the global economy is expected to slowdown in 2024.

Apart from global challenges, based on projections from the Deputy for Economic Affairs, Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, Indonesia will face special domestic challenges in 2024, including: 1) General elections (Pemilu) of The presidential and legislative which will be held in 2024; 2) The increase in global food and energy prices; 3) The government budget deficit is expected to increase in 2024 due to increased government spending for election preparations and infrastructure development; 4) The Rupiah is predicted to have the potential to weaken against the US dollar in 2024.

To face these economic challenges, the government has and will continue to take policy steps such as: 1) Maintaining economic stability by keeping inflation low and keeping the rupiah exchange rate stable; 2) Encourage economic growth by increasing investment and encouraging exports; 3) Protect poor and vulnerable communities from the impact of the global economic slowdown by providing social aid and subsidies; and 4) Carrying out structural reforms to increase Indonesia's economic competitiveness, which includes simplifying regulations, improving the quality of infrastructure, and improving the quality of education and workforce skills.

IMF estimates that the Indonesian economy will grow by 5.00% in 2024, while the World Bank's projection is slightly lower at 4.90%. Indonesia's economic growth will be supported by strong domestic consumption and government spending. The Governor of Central Bank of Republic Indonesia ("BI"), Perry Warjiyo, said that household consumption and non-building investment

tangga dan investasi non-bangunan tetap terjaga, meskipun perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Membaiknya permintaan domestik tercermin dari sejumlah indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Penjualan Riil dan *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur yang berada di zona optimistis. Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia memproyeksikan peningkatan pendapatan rumah tangga didorong oleh kenaikan upah minimum dan bantuan sosial dari pemerintah sedangkan peningkatan kredit konsumsi didorong oleh suku bunga yang rendah dan kemudahan akses kredit. Belanja pemerintah diperkirakan akan meningkat sebesar 6,62% pada tahun 2024, didorong oleh persiapan pemilihan umum dan peningkatan belanja infrastruktur. Peningkatan belanja pemerintah akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut, OJK memperkirakan industri pembiayaan atau *multifinance* akan tetap mengalami pertumbuhan aset di tahun 2024.

Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis ditengah tantangan perekonomian global, Perseroan akan menjalankan strategi membangun portofolio pembiayaan Ritel dan Korporasi yang berkualitas berdasarkan prinsip kehati-hatian serta menciptakan produk baru dan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perseroan juga melakukan pengendalian rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional ("BOPO") dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan bisnis. Dari sisi pendanaan, Perseroan melakukan analisis *Asset Liability Management* dan mengoptimalkan sumber pendanaan dengan suku bunga kompetitif dengan terus memantau tren perkembangan suku bunga serta menjaga ketersediaan likuiditas dan pengelolaan arus kas yang memadai. Perseroan juga akan senantiasa memperkuat pengendalian internal dengan mengaplikasikan *Control Self Assessment* ("CSA") untuk memastikan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Perseroan juga akan senantiasa memperkuat *three lines of defense* berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG").

Direksi akan terus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap target-target yang telah disusun sebelumnya secara konservatif sehingga lebih dinamis, realitis dan adaptif agar dapat diterapkan dalam lingkungan ekonomi yang tidak stabil ini.

remained maintained, although they needed to continue to be encouraged to support the continued recovery of the national economy. The improvement in domestic demand is reflected in a number of indicators such as the Consumer Confidence Index (IKK), Real Sales Index and Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur which are in the optimistic zone. Deputy for Economic Affairs, Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia projected the increase in household income was driven by an increase in the minimum wage and social aid from the government, while the increase in consumer credit was driven by low interest rates and easy access to credit. Government spending is expected to increase by 6.62% in 2024, driven by general election preparations and increased infrastructure spending. Increasing government spending will support Indonesia's economic growth by creating jobs and increasing demand for goods and services. In line with Indonesia's economic growth, OJK projects that the multifinance industry will continue to experience asset growth in 2024.

As an effort to increase business growth amidst global economic challenges, the Company will implement a strategy to build a quality Retail and Corporate financing portfolio based on the principle of prudence as well as creating new products and marketing strategies that suit consumer needs. The Company also controls the ratio of Operating Expenses to Operating Income ("BOPO") in order to optimize business growth. From the funding side, the Company carries out Asset Liability Management analysis and optimizes funding sources with competitive interest rates in facing the potential increase by always monitoring the interest rate development trend as well as maintaining adequate liquidity and cash flow management. The Company will also always strengthen internal control by implementing Control Self Assessment ("CSA") to ensure segregation of duties. The Company will also continue to enhance three lines of defense based on the principles of Good Corporate Governance ("GCG").

The Board of Directors will continue to make adjustments to the previously set targets in a conservative manner so that they are more dynamic, realistic and adaptive so that they can be implemented in this unstable economic environment.

Penerapan Tata Kelola

Perseroan memiliki komitmen penuh untuk terus meningkatkan penerapan GCG dalam setiap proses bisnis maupun seluruh aspek pengelolaan Perseroan sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan penerapan GCG, Perseroan telah membentuk struktur GCG yang memadai dimana Perseroan mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) organ yakni organ utama dan organ penunjang. Organ utama merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), yang merupakan organ tertinggi Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi. Dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi didukung oleh organ pendukung yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi prinsip-prinsip GCG. Anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu Rapat Direksi, serta Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris terselenggara secara efektif.

Secara berkala, Perseroan terus melakukan evaluasi dan langkah perbaikan untuk meningkatkan penerapan GCG. Perseroan juga secara berkala memantau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjamin terpenuhinya kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan. Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Konosuke Mizuta
Direktur	: Shunsuke Kojima
Direktur	: Andi Harjono
Direktur	: Ade Rafida Saulina S
Direktur	: Yudi Gustiawan

GCG Implementation

The Company is fully committed to continuously improving the implementation of GCG in every business process and all aspects of the governance of the Company so as to provide added value to all stakeholders.

In GCG implementation, the Company established an adequate GCG structure that the Company classifies into 2 (two) organs, the main organs and supporting organs. The main organs refer to the provisions of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies consisting of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), which is the highest organ of the Company, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. In supporting the effective implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors is supported by supporting organs, namely the Risk Management Committee and Information Technology Steering Committee.

The implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors has been carried out effectively and fulfills the principles of GCG. Members of the Board of Directors are able to act and make decisions independently, have competence and integrity in accordance with the size and complexity of the Company and have fulfilled the applicable regulations. In addition, the Board of Directors Meetings and Joint Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners are effectively organized.

Periodically, the Company continues to evaluate and take corrective steps to improve the implementation of GCG. The Company also periodically monitors changes in the provisions of the laws and regulations that are set to ensure the fulfillment of the Company's compliance with the applicable laws and regulations.

Changes in the Board of Directors Composition

Throughout 2023, there was no change in the composition of the Company's Board of Directors. As of the publication of this Annual Report, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

President Director	: Konosuke Mizuta
Director	: Shunsuke Kojima
Director	: Andi Harjono
Director	: Ade Rafida Saulina S
Director	: Yudi Gustiawan

Frekuensi Rapat Direksi dan Metode Pengambilan Keputusan Direksi

Untuk pengambilan keputusan yang sah dan mengikat, Direksi dapat mengadakan Rapat Direksi atau dengan cara menandatangani persetujuan tertulis. Keputusan yang diambil secara tertulis mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.

Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi juga diadakan secara berkala untuk memberikan arahan dan saran atas penerapan strategi Perseroan.

Di tahun 2023, Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebanyak 12 kali dan 4 kali rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris.

Apresiasi

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan dan kepada OJK atas pengarahan yang selalu diberikan. Kami percaya dengan dukungan yang positif dan terus-menerus dari seluruh pemangku kepentingan, Perseroan akan terus dapat meningkatkan kinerjanya dan tumbuh secara berkesinambungan di tahun-tahun mendatang dan meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, April 2024
Atas nama Direksi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Board of Directors Meeting Frequency and Method of Decision Making of the Board of Directors

To make valid and binding decisions, the Board of Directors can hold a Board of Directors Meeting or sign a written agreement. Decisions taken in writing have the same force as decisions legally taken at a Board of Directors Meeting.

Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors are also held periodically to provide direction and suggestions on the implementation of the Company's strategy.

In 2023, the Board of Directors held 12 Board of Directors Meetings and 4 joint meetings with the Board of Commissioners.

Appreciation

On this occasion, please allow us to express our gratitude to all Stakeholders for the trust given and to the OJK for the guidance that is always given. We believe that with positive and continuous support from all stakeholders, the Company will continue to be able to improve its performance and grow sustainably in the coming years and improve its performance in the coming years.

Jakarta, April 2024
On behalf of the Board of Directors of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk



Konosuke Mizuta
Direktur Utama / President Director

PROFIL PERSEROAN

COMPANY PROFILE

MIZUHO





Mizuho Leasing Indonesia

Nama Perseroan / Company's Name	PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Tanggal Pendirian / Date of Establishment	21 Juli 1993
Alamat Kantor Pusat / Head Office Address	Menara Astra Lantai 32 Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220
Nomor Telepon / Phone Number	021- 50851848
Fax	021- 50851849
Email	investor@mizuho-ls.co.id
Website	www.mizuho-ls.co.id
Bidang Usaha / Line of Business	Industri Keuangan / Finance Industry Perusahaan Pembiayaan / Financial Institution
Pencatatan Saham / Stock Listing	25 Juni 2008 - Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perseroan") didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance berdasarkan akta No. 43 tanggal 21 Juli 1993 dari Sri Nanning, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 tanggal 29 Oktober 1993 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994, Tambahan No. 8832.

Perseroan telah melakukan perubahan nama beberapa kali, terakhir dari PT Verena Multi Finance Tbk menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Verena Multi Finance Tbk No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068946.AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 24 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Perseroan dengan nama sebelumnya yaitu PT Maxima Perdana Finance memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No.994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993. Perseroan

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk was established under the name PT Maxima Perdana Finance based on deed No. 43 dated July 21, 1993 from Sri Nanning, S.H., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under the Decree No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 dated October 29, 1993 and was reported in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 88 November 4, 1994, Supplement No. 8832.

The Company has changed its name several times, most recently from PT Verena Multi Finance Tbk became PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk based on the deed of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Verena Multi Finance Tbk No. 8 dated 19 September 2022 from Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0068946.AH.01.02.Tahun 2022 dated September 24, 2022 concerning Approval of Amendment to the Articles of Association of a Limited Liability Company.

The Company, under its previous name PT Maxima Perdana Finance, obtained business license for financial institution from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia with Decree No.994/KMK.017/1993 dated December 30, 1993. The Company

mulai beroperasi pada tanggal 21 Juni 2003, dengan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Perseroan pertama kali mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dengan jumlah saham sebanyak 460.000 lembar saham, kemudian pada tahun 2017 melakukan Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dengan jumlah saham sebanyak 1.583.160.556 lembar saham dan pada tanggal 28 Desember 2018, Perseroan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melaksanakan Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD (“PMHMETD II”) sebanyak 3.102.193.089 lembar saham dan pada bulan Januari 2019 Perseroan telah menerbitkan sebanyak 3.102.193.089 saham. Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah saham beredar Perseroan yang beredar adalah sebesar 5.687.353.997 saham.

Perseroan merupakan anak perusahaan dari Mizuho Leasing Co.,Ltd yang merupakan bagian dari Mizuho Financial Group salah satu lembaga keuangan ternama di Jepang. Kepemilikan saham Mizuho Leasing Company, Ltd 31 Desember 2023 yaitu sebesar 67,44%.

Pada tahun 2019, Perseroan juga melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT IBJ Verena Finance menggabungkan diri ke dalam Perseroan dan Perseroan menjadi *surviving entity*. Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan yaitu melakukan pembiayaan dibidang Ritel dan Korporasi.

Kegiatan Usaha Business Activities

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana tersebut dalam Akta No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068946. AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 24 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan utama Perseroan meliputi usaha pembiayaan:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - Pembiayaan Investasi
 - Pembiayaan Modal Kerja
 - Pembiayaan Multiguna
 - Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK
2. Selain kegiatan usaha utama diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan

started operating on June 21, 2003, with a business license based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 dated 4 May 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 dated 9 December 2010 Jo. Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (“OJK”) No.KEP-806/NB.11/2022 dated 12 December 2022.

The Company first listed its shares on the Indonesia Stock Exchange in 2008 with a total of 460,000 shares, then in 2017 the Company conducted a Limited Public Offering I (“PUT I”) and to issue pre-emptive rights (“HMETD”) with a total of 1,583,160,556 shares. On December 28, 2018, the Company obtained effective statement from the Financial Services Authority (“OJK”) to conduct a Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II (“PMHMETD II”) of 3,102,193,089 shares and in January 2019 the Company has issued 3,102,193,089 shares. Therefore, by the end of 2022 the number of outstanding shares of the Company is 5,687,353,997 shares.

The Company was a subsidiary of Mizuho Leasing Co.,Ltd which was part of the Mizuho Financial Group, one of the leading financial institutions in Japan.The share ownership of Mizuho Leasing Company, Ltd as of December 31, 2023 is 67.44%.

In 2019, the Company merged with an associated entity, PT IBJ Verena Finance, where PT IBJ Verena Finance merged into the Company and the Company turn into a surviving entity. Currently, the Company’s main business activity was financing in the Retail and Corporate sectors.

The Company’s Articles of Association have been amended several times. The latest amendment to the Company’s Articles of Association is as stated in Deed No. 8 dated September 19, 2022 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0068946. AH.01.02. Tahun 2022 Dated September 24, 2022 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company.

In accordance with article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of the Company’s main activities includes

1. Main Business Activities
 - Investment Financing
 - Working Capital Financing
 - Multipurpose Financing
 - Other Financing Business Activities Based on OJK Approval
2. In addition to the main business activities above, the Company can carry out supporting business activities to

sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (*fee*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

conduct operating leases and/or fee-based activities as long as they do not conflict with the laws and regulations in the financial services sector.

Perseroan memiliki 2 pilar bisnis, sebagai berikut:

1. Pembiayaan Ritel
2. Pembiayaan Korporasi

The Company has 2 business pillars, as follows:

1. Retail Financing
2. Corporate Financing

Produk & Layanan Products & Services

Perseroan bergerak di bisnis Ritel dan Korporasi dengan layanan Pembiayaan yaitu :

The Company is engaged in Retail and Corporate business with financing services namely:

Pembiayaan Ritel

- **Pembiayaan Mobil Bekas**
Pembiayaan kepemilikan mobil merupakan solusi bagi Pelanggan untuk memiliki mobil impian. Kami memberikan pembiayaan mobil bekas kepada konsumen dengan cara menghubungi dealer yang bekerja sama dengan Perseroan.
- **Pembiayaan Showroom Mobil Bekas**
Perseroan dapat memberikan pembiayaan modal kerja bagi rekanan *showroom* mobil bekas yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya dan menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas penjualan.
- **Pembiayaan Multiguna**
Perseroan dapat memberikan pembiayaan untuk renovasi rumah, biaya perjalanan, biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya kesehatan dan biaya lainnya dengan menjaminkan BPKB mobil.
- **Pembiayaan Alat Pertanian**
Fasilitas Pembiayaan untuk membantu para petani dengan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk para petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengajukan kredit pembelian alat dan mesin pertanian.

Retail Financing

- **Used Car Financing**
Car ownership financing is a solution for Customers to have dream car. The Company provides used car financing to customers by contacting the dealer partners.
- **Used Car Showroom Financing**
The Company can provide working capital financing for used car showroom partners who need funds to develop their business and be solution to increase sales capacity.
- **Multipurpose Financing**
The Company can provide financing for home renovations, travel expenses, education costs, wedding expenses, medical expenses and other costs by pledging car BPKB.
- **Agriculture Financing**
Financing facility to help farmers with the procurement of agricultural tools and machinery for farmers who face difficulties in applying credit for the purchase of agricultural tools and machinery.

Pembiayaan Korporasi

- **Pembiayaan Investasi - Sewa Guna Usaha**
Perseroan memberikan jasa pembiayaan sewa guna usaha baik skema jual beli-langsung atau jual beli sewa balik dengan pembelian asset seperti mesin, peralatan konstruksi, IT, peralatan medis, dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan korporasi (*"corporate customer"*) dari Produsen/Distributor/*Dealer* dan menyewa guna usahakannya kepada pelanggan.

Kelebihan dari skema pembiayaan Sewa Guna Usaha adalah memungkinkan para pelanggan untuk mempercepat penyusutan aktiva tetap.

Corporate Financing

- **Investment Financing – Finance Lease**
The Company provides lease financing through direct lease or sale and lease back by purchases assets such as machinery, construction equipment, IT, medical equipment, and others that are needed by corporate customers from Manufacturers/Distributors/Dealers and lease them to customer.

The advantage of the Finance Lease financing scheme enables our Corporate customers to accelerate the depreciation of fixed assets.

- **Pembiayaan Modal Kerja**
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan korporasi dalam memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek dan mengatur arus kas agar lebih baik. Adapun produk pembiayaan fasilitas bisnis yang kami tawarkan sebagai berikut.
 - i. Pembiayaan piutang/hutang
 - ii. Pembiayaan tagihan
- **Jasa lainnya**
 1. Pembiayaan Pembelian dengan angsuran
 2. Pembiayaan sindikasi

- **Working Capital Financing**
Financing facilities are provided to the corporate customer to meet short-term working capital needs and better manage cash flows. The business facility financing products we offer are as follows.
 - i. Accounts Payable financing / Account Receivable financing
 - ii. Invoice financing
- **Other services**
 1. Purchase with installment payment financing
 2. Syndicated financing

Jaringan Kantor Office Network

Kantor Pusat

Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6,
Jakarta 10220

Telp : 021- 50851848

Faksimili: 021- 50851849

Email : investor@mizuho-ls.co.id

Website : www.mizuho-ls.co.id

Head Office

Menara Astra 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6,
Jakarta 10220

Telp No. : 021- 50851848

Faximile : 021- 50851849

Email : investor@mizuho-ls.co.id

Website : www.mizuho-ls.co.id

Kantor Cabang

Per 31 Desember 2023, Perseroan telah memiliki 29 Kantor Cabang. Selanjutnya, Perseroan telah memperoleh izin pembukaan 1 Kantor Cabang baru pada bulan Maret 2024.

Branch Offices

As of 31 December 2023, the Company has 29 Branch Offices. Furthermore, the Company has obtained a license to open 1 new Branch Office in March 2024.






No.	Lokasi Location	Alamat Address	Kontak Contact	Surat Izin Pembukaan Cabang Permit of Opening Branch
1.	Jakarta Pusat PECENONGAN	Komplek Rukan Red Top Blok A No. 3-3A Jl. Pecenongan 72 Kel. Kebon Kelapa - Kec. Gambir Jakarta Pusat	Telp : 021-352.4243 Fax : 021-352.4969	No.Kep-078/KM.10/2007 18-Apr-07
2.	Jakarta Utara KELAPA GADING	Jl. Bukit Gading Raya Blok A, Kav. No 17 Kel. Kelapa Gading Barat – Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara	Telp : 021-4584.9000 Fax : 021-4584.2200	No.Kep-420/KM.06/2004 11-Oct-04
3.	Jakarta Selatan LEBAK BULUS	Komp. Bona Indah Buss, Centre Jl. Karang Tengah Blk. B/1 No.8-W Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan	Telp : 021-2276.9281	No.Kep-420/KM.06/2004 11-Oct-04
4.	Jakarta Timur BUARAN	Jl. Raden Inten II No. 53D RT.004 / RW.04 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur	Telp : 021-223.221.10	No.Kep-145/KM.10/2012 20-Mar-12
5.	Jakarta Barat JAKARTA BARAT	Jl. Raya Kedoya No. 37 RT.008 / RW.007 Kel.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat	Telp: 021-2228.2023	No. Kep-212/NB.021/2023 11-Jul-23
6.	Banten GADING SERPONG	Ruko Mendrisio 1 Blok E no 09 Kel. Medang - Kec. Pagedangan Tangerang - Banten	Telp : 021-5959.9028	No.Kep-155/KM.10/2010 15-Mar-10
7.	Banten SERANG	Jl. Raya Petir KM. 2 No. 10 Kel. Cipocok Jaya - Kec. Cipocok Jaya Serang - Banten	Telp : 0254-4076.794	No.Kep-148/KM.10/2010 15-Mar-10
8.	Banten TANGERANG	Ruko Tangerang City Business Park Blok B No.18 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Cikokol Kel. Babakan - Kec. Tangerang Tangerang - Banten	Telp : 021-5578.1811 Fax : 021-5578.1774	No.Kep-278/KM.5/2005 29-Aug-05
9.	Jawa Barat BEKASI	Ruko Festival Jl. Sultan Agung Kav. 19, RT 04 / RW 06 Kel. Medan Satria – Kec. Medan Satria Bekasi – Jawa Barat	Telp : 021 2918.2903	No.Kep-084/KM.10/2011 27-Jan-11
10.	Jawa Barat CIKARANG	Komp Ruko CBD Blok E1 Jl. Niaga Raya Kav. AA3, Jababeka Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan – Kab. Bekasi Bekasi - Jawa Barat	Telp : 021-2908.2848 Fax : 021-2908.2849	No.Kep-182/KM.10/2012 20-Apr-12
11.	Jawa Barat DEPOK	Jl. Dewi Sartika No. 33B RT.001 / RW.001 Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok - Jawa Barat	Telp: 021-3875.0030 Telp: 021-3875.0022	No.Kep-70/NB-111/2019 10-May-19
12.	Jawa Barat BOGOR	Jl. Soleh Iskandar No. 89B Kel. Kadung Badak, Kec. Tanah Sareal Bogor - Jawa Barat	Telp: 0251-820.3275 Telp: 0251-820.3515	No.Kep-189/KM.10/2007 01-Oct-07

No.	Lokasi Location	Alamat Address	Kontak Contact	Surat Izin Pembukaan Cabang Permit of Opening Branch
13.	Jawa Barat CIMAHI	Jl. Kota Mas Raya No. 11 Kel. Padasuka, Kel. Cimahi Tengah Kota Cimahi - Jawa Barat	Telp: 022 - 6319.0014	No. Kep-66/PL.02/2023 08-Oct-23
14.	Jawa Barat BANDUNG	Jl. Karawitan No. 27A RT.001 / RW.010 Kel. Turangga, Kec. Lengkong Bandung	Telp : 022-87354632 Telp : 022-87327705	No.Kep-057/KM.5/2006 20-Feb-06
15.	Jawa Timur SURABAYA	Jl. Baratajaya XIX No. 54 B RT 009 / RW 005 Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng Surabaya - Jawa Timur	Telp : 031-9945.3772	No.Kep-420/KM.6/2004 11-Oct-04
16.	Jawa Timur KEDIRI	Jl. Urip Sumoharjo No. 167 B Kel. gronggo, Kec. Kediri, Kota Kediri - Jawa Timur	Telp : 0354.2809.990 Fax : 0354.2809.700	No.Kep-317/NB.111/2021 01-Dec-21
17.	Jawa Timur MALANG	Jl. Letjen S. Parman No. 56 - B3 Kel. Purwantoro – Kec. Blimbing Malang - Jawa Timur	Telp : 0341-479.107	No.Kep-149/KM.10/2010 15-Mar-10
18.	Jawa Timur LAMONGAN	Komp. Ruko Permata Kav. No.27 Jl. Panglima Sudirman. Kel. Sidokumpul, Kec. Lamongan Kab. Lamongan - Jawa Timur	Telp: 0322-3104062	No. Kep-155/NB.111/2022 12-Jul-22
19.	Jambi JAMBI	Jl. Hayam Wuruk No.47 C Kel.Talang Jauh, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi	Telp : 0741 – 3620887 Fax : 0741-3619493	No.Kep-240/NB.111/2021 17-Sep-21
20.	Sumatera Utara MEDAN	Ruko Premiere 9 Jl. Sultan Iskandar Muda No. 83-83 A Kel. Babura - Medan Baru Medan – Sumatera Utara	Telp. : 061-456.2555 Fax. : 061-456.8550	No.Kep-278/KM.5/2005 29-Aug-05
21.	Sumatera Selatan PALEMBANG	Komp. Graha Dempo Mas Blok F5 Jl. Mayor H.M. Rasyad Nawawi No. 549, RT08 RW02, Kel. 9 Ilir - Kec. Ilir Timur II Palembang - Sumatera Selatan	Telp : 0711-359.292 Fax : 0711-366.828	No.Kep-045/KM.10/2007 27-Mar-07
22.	Riau PEKANBARU	Jl. Arifin Achmad No. 75 A-B, RT.001 / RW.015 Kel. Tangkerang Tengah - Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru - Riau	Telp : 0761-841.5689 Fax : 0761-841.7664	No.Kep-189/KM.10/2007 01-Oct-07
23.	Sulawesi Selatan MAKASSAR	Jl. Gunung Latimojong Komp Ruko Metro Square Blok C No. 38 Kel. Lariangbangi - Kec. Makassar Makassar - Sulawesi Selatan	Telp : 0411-363.4355 Fax : 0411-335.562	No.Kep-036/KM.10/2010 08-Jan-10
24.	Bali DENPASAR	Jl. Gatot Subroto Timur No. 323 Ds. Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur Denpasar - Bali	Telp: 0361-4762477	No. Kep-204/NB.111/2022 02-Sep-22
25.	Lampung BANDAR LAMPUNG	Jl. Pangeran Antasari No. 162A Kel. Tanjung Baru, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Telp: 0721 – 5606551	No. Kep-235/NB.111/2022 15-Nov-22
26.	Kalimantan Barat PONTIANAK	Jl. A. Yani, Sentra Bisnis Komplek Ruko Mega Mall, Blok-H No.9, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Pontianak - Kalimantan Barat	Telp: 0561-8242133	No. Kep-2/NB.021/2023 8-Feb-23
27.	Kalimantan Selatan BANJARMASIN	Jl. Pangeran Hidayatullah RT.17 / RW.01 Kel. Banua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin - Kalimantan Selatan	Telp: 0511-6742.011	No. Kep-69/NB.021/2023 10-Apr-23
28.	Kalimantan Timur BALIKPAPAN	Jl. Komp. Balikpapan Permai Blk. F-2 No. 21 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan - Kalimantan Timur	Telp: 0542 - 5463.009 Telp: 0542 - 5463.011	No. Kep-101/PL.021/2023 12-Dec-23
29.	Kalimantan Timur SAMARINDA	Jl. Abdul Wahab Syahrani No 88 A, RT 024 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu Samarinda - Kalimantan Timur	Telp : 0541-2526.384	No.Kep-99/NB.111/2020 27-Mar-20
30.	Jawa Tengah* SURAKARTA	Jl. Dewi Sartika No.23, RT.001 / RW.006 Kel. Danukusuman, Kec. Serengan Kota Surakarta - Jawa Tengah	Telp: 0271 - 6008.033	No.Kep-60/PL.021/2024 19-Mar-24

*) Perseroan menerima Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-60/PL-021/2024 Tanggal 19 Maret 2024 Perihal Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Kota Surakarta.

*) The Company received a copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-60/PL-021/2024 dated March 19, 2024 regarding the Granting of Permission to Open a Branch Office of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Surakarta City.

Jejak Langkah Perseroan Company Milestones

<p>Perseroan didirikan pertama kali sebagai PT Maxima Perdana Finance.</p>		<p>The Company was first established as PT Maxima Perdana Finance.</p>
<p>Perseroan berubah nama menjadi PT Verena Oto Finance dengan fokus pada pembiayaan mobil.</p>		<p>The Company changed its name to PT Verena Oto Finance and focused on car financing.</p>
<p>Perseroan mengadakan Penawaran Umum Perdana, dengan kepemilikan Bank Panin sebesar 42,87%.</p>		<p>The Company conducted an Initial Public Offering, with Bank Panin ownership of 42.87%.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan mengembangkan pembiayaan mesin. Perseroan berubah nama menjadi PT Verena Multi Finance Tbk. 		<ul style="list-style-type: none"> Company expanded to include machinery financing. The Company changed its name to PT Verena Multi Finance Tbk.
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan menerbitkan Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011 sejumlah Rp300 miliar dalam 3 (tiga) seri. Perseroan menerbitkan Medium Term Notes ("MTN") sejumlah Rp200 miliar. 		<ul style="list-style-type: none"> The Company issued 2011 Verena Multi Finance Bond I Year 2011 the amount of Rp300 billion in 3 (three) series. The Company issued Rp200 billion Medium Term Notes (MTN).
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri A sebesar Rp65 miliar. Perseroan mendapatkan izin untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I senilai Rp1 triliun. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp300 miliar dalam 3 (tiga) seri. 		<ul style="list-style-type: none"> The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series A amounting to Rp65 billion. The Company obtained a permit to issue Shelf Registration Bonds I worth Rp1 trillion. The Company issued Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012 amounting to Rp300 billion in 3 (three) series.
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri B sebesar Rp135 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 seri A sebesar Rp50 miliar. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 sebesar Rp153 miliar dalam 2 (dua) seri. 		<ul style="list-style-type: none"> The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series B amounting to Rp135 billion and Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds 1 Year 2012 series A in the amount of Rp50 billion. The Company issued 2013 Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds 1 Year 2013 amounting to Rp153 billion in 2 (two) series.
<ul style="list-style-type: none"> Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri C sebesar Rp300 miliar dan MTN Verena Multi Finance I tahun 2011 sebesar Rp200 miliar. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 sebesar Rp135 miliar dalam 2 (dua) seri. 		<ul style="list-style-type: none"> The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series C in the amount of Rp300 billion and MTN Verena Multi Finance I Year 2011 in the amount of Rp200 billion. The Company issued Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014 in the amount of Rp135 billion in 2 (two) series.

Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri B sebesar Rp135 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 seri B sebesar Rp227 miliar serta Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 seri A sebesar Rp3 miliar.

2015

The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series B in the amount of Rp135 billion and Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012 series B in the amount of Rp227 billion and Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014 series A in the amount of Rp3 billion.

Perseroan melunasi Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 seri C sebesar Rp23 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 seri A sebesar Rp113 miliar.

2016

The Company paid off Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012 series C amounting to Rp23 billion and Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds I Year 2013 series A amounting to Rp113 billion.

- Perseroan melunasi Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 seri B sebesar Rp40 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 seri B sebesar Rp132 miliar.
- Perseroan memperoleh izin dan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan dana yang diperoleh untuk penambahan modal senilai Rp177,3 miliar.
- Penerbitan MTN II Verena Multi Finance Tahun 2017 sebesar Rp100 miliar.

2017

- The Company paid off Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds I Year 2013 series B in the amount of Rp40 billion and Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014 series B in the amount of Rp132 billion.
- The Company obtained a license and carried out a Limited Public Offering I ("PUT I") to issue Pre-emptive Rights ("Rights") with funds obtained for additional capital of Rp177.3 billion.
- Issuance of MTN II Verena Multi Finance Year 2017 amounting to Rp100 billion.

- Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melaksanakan aksi korporasi Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II ("PMHMETD II").
- Susunan pemegang saham Perseroan, pada tanggal 5 Oktober 2018 mengalami perubahan dimana IBJ Leasing Co.,Ltd. (sekarang Mizuho Leasing Co.,Ltd) membeli seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH dengan mekanisme pasar modal melalui Bursa Efek Indonesia.

2018

- The Company obtained an effective statement from the Financial Services Authority ("OJK") to carry out corporate actions of Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II").
- The composition of the Company's shareholders changed on October 5, 2018 in which IBJ Leasing Co.,Ltd. (now Mizuho Leasing Co.,Ltd) bought all shares owned by DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH through a capital market mechanism via the Indonesia Stock Exchange.

- Perseroan melaksanakan PMHMETD II dengan dana yang diperoleh untuk penambahan modal senilai Rp434,3 miliar.
- Mizuho Leasing Co.,Ltd (d/h IBJ Leasing Co.,Ltd) menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 67,44%.
- Penggabungan usaha dengan entitas asosiasi PT IBJ Verena Finance (IBJV), dimana Perseroan menjadi *surviving entity*.
- Perseroan melunasi MTN II Verena Multi Finance Tahun 2017 sebesar Rp100 miliar.

2019

- The Company carried out PMHMETD II with total funding obtained for additional capital of Rp434.3 billion.
- Mizuho Leasing Co.,Ltd (formerly IBJ Leasing Co.,Ltd) became the Controlling Shareholder of the Company with an ownership of 67.44%.
- Merger with associate entity PT IBJ Verena Finance (IBJV), whereas the Company becomes the surviving entity.
- The Company paid off MTN II Verena Multi Finance Year 2017 in the amount of Rp100 billion.

Perseroan berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk dengan alamat Kantor Pusat baru di Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220.

2022

The Company changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk with a new Head Office address at Menara Astra 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220.

Visi Misi, dan Nilai Perseroan
Vision, Mission and Values of The Company



Visi
Vision

**“Menjadi Perusahaan yang Menciptakan
Dunia yang Berkelanjutan”**

“Be a Creator of a Sustainable World”



Misi
Mission

**“Menghubungkan Kebutuhan untuk
Menciptakan Masa Depan”**

“Connect Needs to Create the Future”



Nilai-nilai Perseroan
Company's Values

CHALLENGE

CREATE

CHANGE

COLLABORATE

**Melalui kolaborasi, kami akan menghadapi tantangan, membuat
perubahan, dan mempercepat penciptaan**

Through collaboration, we will take on challenges, enact change and
accelerate creation

Profil Direksi The Board of Directors Profile

KONOSUKE MIZUTA

Direktur Utama
President Director



Warga Negara Jepang, 58 tahun, berdomisili sementara di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali sebagai Direktur Utama untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Kwansai Gakuin University, Hyogo, Jepang, pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Master in Leadership & Strategy dari London Business School Sloan, London, Inggris, pada tahun 2011.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Japanese citizen, 58 years old, domiciled temporarily in Jakarta. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as President Director for the 2022-2024 period. He obtained a Bachelor of Economics degree from Kwansai Gakuin University, Hyogo, Japan in 1990 and obtained a Master in Leadership & Strategy from London Business School Sloan, London, England, in 2011.

The Disclosurement of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

*) Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity*.

*) Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17, 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a business merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	President Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2017 – 2019	Director PT IBJ Verena Finance*
2017	Deputy General Manager, International Division, Tokyo, Head Office IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2015 – 2017	General Manager, International Trade Business Promotion Division, Tokyo, Head Office, Mizuho Bank, Ltd.
2011 – 2015	Deputy General Manager, Global Trade Finance Division, Europe Office, London, Mizuho Bank, Ltd.
2006 – 2009	Senior Manager, Corporate Banking Division No.18, Tokyo, Head Office, Mizuho Corporate Bank, Ltd.
1999 – 2006	Manager Bangkok Branch Mizuho Corporate Bank, Ltd.
1999	Manager International Coordination Division Tokyo, Head Office The Industrial Bank of Japan, Ltd.
1996 – 1999	Corporate Banking No. 9 Tokyo Head Office The Industrial Bank of Japan, Ltd.
1990 – 1996	Osaka Corporate Banking Division No. 3 Osaka Branch The Industrial Bank of Japan, Ltd.



SHUNSUKE KOJIMA

Direktur
Director

Warga Negara Jepang, 57 tahun, berdomisili sementara di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali menjadi Direktur untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Rikkyo, Tokyo, Jepang, pada tahun 1989. Beliau merupakan Direktur yang membawahi fungsi Akunting dan *Finance & Treasury*.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Japanese citizen, 57 years old, residing domiciled in Jakarta. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Director for the 2022-2024 period. Obtained his Bachelor of Economics degree from Rikkyo University, Tokyo, Japan, in 1989. He is the Director in charge of the Accounting and Finance & Treasury functions.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

*) Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity*.

*) Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17, 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2019	Deputy General Manager International Business Administration Department IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2016 – 2019	Deputy General Manager Corporate Business Department (Metropolitan Area No.1), IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2011 – 2016	Deputy General Manager International Department, IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2010 – 2011	Director PT IBJ Verena Finance*
2010	Vice Chairman of Establishment Preparation Committee of PT. IBJ Verena Finance, IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2002 – 2010	Deputy General Manager International Department IBJ Leasing Co., Ltd. Head Office (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2002	Senior Manager International Business Development Department, IBJ Leasing Co., Ltd, Head Office (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
1999 – 2002	Director PT. Bumi Daya - IBJ Leasing
1998 – 1999	General Manager PT Bumi Daya – IBJ Leasing
1994 – 1998	Head Office Computer & OA Business Department Manager IBJ Leasing Co., Ltd (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
1989 – 1994	Osaka Branch IBJ Leasing Co., Ltd (now Mizuho Leasing Co, Ltd)

ANDI HARJONO

Direktur
Director



Warga Negara Indonesia, 54 tahun, berdomisili di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali sebagai Direktur untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Master of International Management dari Thunderbird School of Global Management, Arizona, Amerika Serikat pada tahun 1994. Beliau merupakan Direktur yang membawahi fungsi Sumber Daya Manusia, Bagian Umum dan Teknologi Informasi.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Indonesian citizen, 54 years old, domiciled in Jakarta. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Director for the 2022-2024 period. Obtained a Bachelor of Industrial Engineering degree from Trisakti University, Jakarta, Indonesia, in 1992 and a Master of International Management degree from Thunderbird School of Global Management, Arizona, United States in 1994. He is the Director in charge of Human Resources, General Affair and Information Technology.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2016 – 2019	President Director PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2007 – 2016	Director PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2002 – 2007	Vice President PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills
2001 – 2002	Financial & Operational Advisor for Sekar Group PT Tri Panji Anugrah
1999 – 2001	Manager PT Tunas Sepadan Investama
1998 – 1999	Manager Carbonless Paper Export Marketing Division PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills
1995 – 1998	Finance & Accounting Manager PT Bentala Mahaya
1993	Finance Officer PT Astra Graphia Tbk



ADE RAFIDA SAULINA S

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Tangerang. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali menjadi Direktur untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Nommensen, Medan, Indonesia pada tahun 1987. Beliau merupakan Direktur yang membawahi Unit Bisnis Korporasi.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Indonesian citizen, 59 years old, domiciled in Tangerang. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Director for the 2022-2024 period. She obtained a Bachelor of Accounting degree from Nommensen University, Medan, Indonesia in 1987. She is the Director in charge of the Corporate Business Unit.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2016 – 2019	Director PT IBJ Verena Finance*
2015 – 2016	Business Development General Manager PT IBJ Verena Finance*
2011 – 2015	Business Development Manager PT IBJ Verena Finance*
2006 – 2011	Business Analyst PT Sigma Cipta Caraka
1997 – 2006	Marketing Manager PT GE Finance Indonesia
1995 – 1997	Marketing Senior Executive PT GE Astra Finance
1989 – 1994	Marketing Officer PT Bumi Daya – IBJ Leasing
1986 – 1988	Chief Accountant PT Abdi Rakyat Bakti

*) Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity*.

*) Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

YUDI GUSTIAWAN

Direktur
Director



Warga Negara Indonesia, 50 tahun, berdomisili di Tangerang. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, Beliau diangkat kembali sebagai Direktur untuk periode 2022 - 2024. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi INABA, Bandung, Indonesia, pada tahun 1996 dan memperoleh gelar Sarjana Statistik dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, pada tahun 1999, serta memperoleh gelar Magister Management dari Bina Nusantara Business School, Jakarta, Indonesia pada tahun 2015. Beliau merupakan Direktur yang membawahi Unit Bisnis Ritel.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Indonesian citizen, 50 years old, residing in Tangerang. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Director for the 2022-2024 period. He obtained a Bachelor of Accounting degree from the INABA College of Economics, Bandung, Indonesia, in 1996; obtained a Bachelor of Statistics from Padjadjaran University, Bandung, Indonesia, in 1999; and obtained a Master degree in Management from Bina Nusantara Business School, Jakarta, Indonesia in 2015. He is the Director in charge of the Retail Business Unit.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2018 – 2019	Vice President Director PT Jtrust Olympindo Multifinance
2016 – 2018	President Director PT Olympindo Multifinance (now PT Jtrust Olympindo Multifinance)
2015 – 2016	Operations Director PT Radana Bhaskara Finance Tbk
2012 – 2014	Director of Strategic Support PT HD Finance Tbk (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2011 – 2012	Deputy Director of Strategic Support PT HD Finance Tbk (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2009 – 2011	Head of Business Support Division PT HD Finance Tbk (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2009	Head of Human Resources Division PT HD Finance (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2008 – 2009	Head of Human Resources Division (Caretaker) PT HD Finance (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2005 – 2009	Head of Operation Division PT HD Finance (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2002 – 2005	Accounting Manager PT Arta Boga Cemerlang
2001 – 2002	Regional Internal Auditor for Java Area II PT. Alfa Retailindo Tbk
1999 – 2001	PPIC (Production Planning & Inventory Control) PT. Ateja Tritunggal Corporation Padalarang

Profil Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Profile



**YASUO
IMAIZUMI**

Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Jepang, 58 tahun, berdomisili di Jepang. Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, beliau diangkat sebagai Komisaris Utama untuk periode 2024. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Sophia University, pada tahun 1990 serta memperoleh gelar *Megister of law & Bachelor of law* dari University of Pennsylvania Carey Law School pada tahun 1997.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Japanese citizen, 58 years old, domiciled in Japan. In accordance with the decision of the Extraordinary GMS on March 21 2024, he was appointed as President Commissioner for the period 2024. Obtained a Bachelor of Laws degree from Sophia University in 1990 and obtained a Masters of Laws degree from the University of Pennsylvania Carey Law School in 1997.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2024 – to date	President Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2022 – to date	Director of Overseas Subsidiaries International Business Administration Department Mizuho Leasing Co.,Ltd
2019 – to date	Relationship Manager International Business Development Department Mizuho Leasing Co.,Ltd
2018 – to date	Senior Deputy General Manager in International Business Administration Department Mizuho Leasing Co., Ltd
2013 – 2018	Deputy General Manager Legal Department Mizuho Bank Co., Ltd
2012 – 2013	Deputy General Manager Legal Department Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
2010 - 2012	Deputy General Manager Americas Corporate Finance Div.#2 Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
2008 – 2010	Senior Vice President Credit Engineering Department Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
2008	Senior Vice President Corporate Banking Department. No.14 Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
2002 - 2008	Senior Vice President Corporate Banking Department. No.2 Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
1990 - 2002	Senior Vice President at Legal Department & Vice President at International Business Department Industrial Bank of Japan Co., Ltd.

MOHAMMAD SYAHRIAL

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Warga Negara Indonesia, 57 tahun, berdomisili di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Juli 2019, Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal efektifnya penggabungan usaha yaitu tanggal 23 Juli 2019 untuk periode 2019-2021. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Corporate Finance dari Universitas Florida Atlantic, Florida, Amerika Serikat, pada tahun 1988 dan memperoleh gelar Master of Corporate Finance Investment dari Universitas Golden Gate, San Fransisco, Amerika Serikat, pada tahun 1989.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Indonesian Citizen, 57 years old, domiciled in Jakarta. In accordance with the decision of the Extraordinary GMS on 17 July 2019, he was appointed as Independent Commissioner as of the effective date of the business merger, namely 23 July 2019 for the 2019-2021 period. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Independent Commissioner for the 2022-2024 period. Obtained his Bachelor of Corporate Finance from Florida Atlantic University, Florida, USA, in 1988 and obtained his Master of Corporate Finance Investment from Golden Gate University, San Francisco, USA, in 1989.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

*) Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity*.

*) Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – to date	Independent Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2016 –to date	Chief Executive Officer Moya Holdings Asia Limited
2011 – to date	President Director PT Tamaris Hidro
2008 – to date	Managing Partner PT Nura Kapital
2010 – 2019	Independent Commissioner PT IBJ Verena Finance*
2008 – 2011	Commissioner PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
2004 – 2008	President Director PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
2003 – 2004	Commissioner PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2002 - 2003	Commissioner PT Bank Niaga Tbk
2002	Commissioner PT Bank Permata Tbk
1999 – 2004	Deputy Chairman AMK (2002 – 2004) Senior Vice President (2001 – 2002) Vice President (2000 – 2001) Assistant Vice President (1999 – 2000) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
1997 – 1999	Vice President Research PT Pentasena Artha Sentosa
1996 – 1997	Vice President Research PT Amsteel Securities Indonesia
1992 – 1996	Head Research IBJ Indonesia Bank
1990 - 1992	Analyst PT Sun Hung Kai
1988	Credit Officer Bank of America, San Fransisco (USA)



BHINDAWATI GUNAWAN*

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, berdomisili di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, beliau diangkat sebagai Komisaris untuk periode 2024. Beliau merupakan lulusan jurusan Ekonomi Bisnis dari University of San Fransisco, pada tahun 1983.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Indonesian citizen, 62 years old, domiciled in Jakarta. In accordance with the decision of the Extraordinary GMS on March 21, 2024, he was appointed as Commissioner for the 2024 period. She is a graduate of Business Economics from the University of San Fransisco in 1983.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

Riwayat Pekerjaan Career History

2024 – to date	Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2024 – to date	President Commissioner PT Clipan Finance Indonesia Tbk
2016 – to date	Executive Management/Bancassurance Strategic Advisor PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
2010 – to date	Vice President Director PT Panin Financial Tbk
2008 – 2016	Executive Vice President PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
1992 – 2008	Director PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
1986 – 1992	Deputy General Manager PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
1985 – 1986	Assistant Account Officer Bank of America NT & SA
1984 – 1985	Management Trainee Bank of America NT & SA

- *) Bahwa pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- *) That the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner of the Company is effective as of the receipt of approval from the OJK for the fit and proper test and in compliance with applicable laws regulations.

TAKESHI SASAKI*

Komisaris Utama
President Commissioner



Warga Negara Jepang, 62 tahun, berdomisi di Jepang. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, Beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Utama untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Seikei, Tokyo, Jepang, pada tahun 1984.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Japanese citizen, 62 years old, domiciled in Japan. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as President Commissioner for the 2022-2024 period. He obtained a Bachelor of Economics degree from Seikei University, Tokyo, Japan, in 1984.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.

*) Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") on March 21 2024, the GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as President Commissioner effective from the closing of the Extraordinary GMS.

Riwayat Pekerjaan Career History

2019 – 2024 (March)	International Business Administration Department Mizuho Leasing Co., Ltd
2021 – 2024	President Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2019 – 2021	Commissioner PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2016 – 2019	General Manager of International Dept. IBJ Leasing Co., Ltd (now Mizuho Leasing Co., Ltd)
2009	President & Director Japan-PNP Leasing & Finance Corp. (now PNB-Mizuho Leasing & Finance Corp.)
2006	General Manager of Computer & OA Dept. IBJ Leasing Co, Ltd (now Mizuho Leasing Co., Ltd)
2001	Executive Vice President Krung Thai IBJ Leasing Co, Ltd.
1989	Manager IBJ Leasing (USA) Inc.
1984	IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co., Ltd)



ROOSNIATI SALIHIN*

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, 75 tahun, berdomisili di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat sebagai Komisaris untuk periode 2022-2024. Beliau merupakan lulusan jurusan English Literature dari University of California, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1968 dan jurusan Management dari Tokyo Business of School, Jepang pada tahun 1971.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Indonesian Citizen, 75 years old, domiciled in Indonesia. In accordance with the resolution of the Annual GMS on July 29, 2022, she was appointed as the Commissioner for the 2022-2024 period. She is a graduate of English Literature from University of California, Los Angeles, USA in 1968 and graduate of Management from Tokyo Business of School, Japan in 1971.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

*) Pada tanggal 5 November 2023, Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris Perseroan telah meninggal dunia. Maka sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat 18 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir.

*) On November 5, 2023, Mrs. Roosniati Salihin, as a Commissioner of the Company, passed away. Therefore, in accordance with Article 18 Paragraph 18 letter a of the Company's Articles of Association, the term of office of the Board of Commissioners automatically ended.

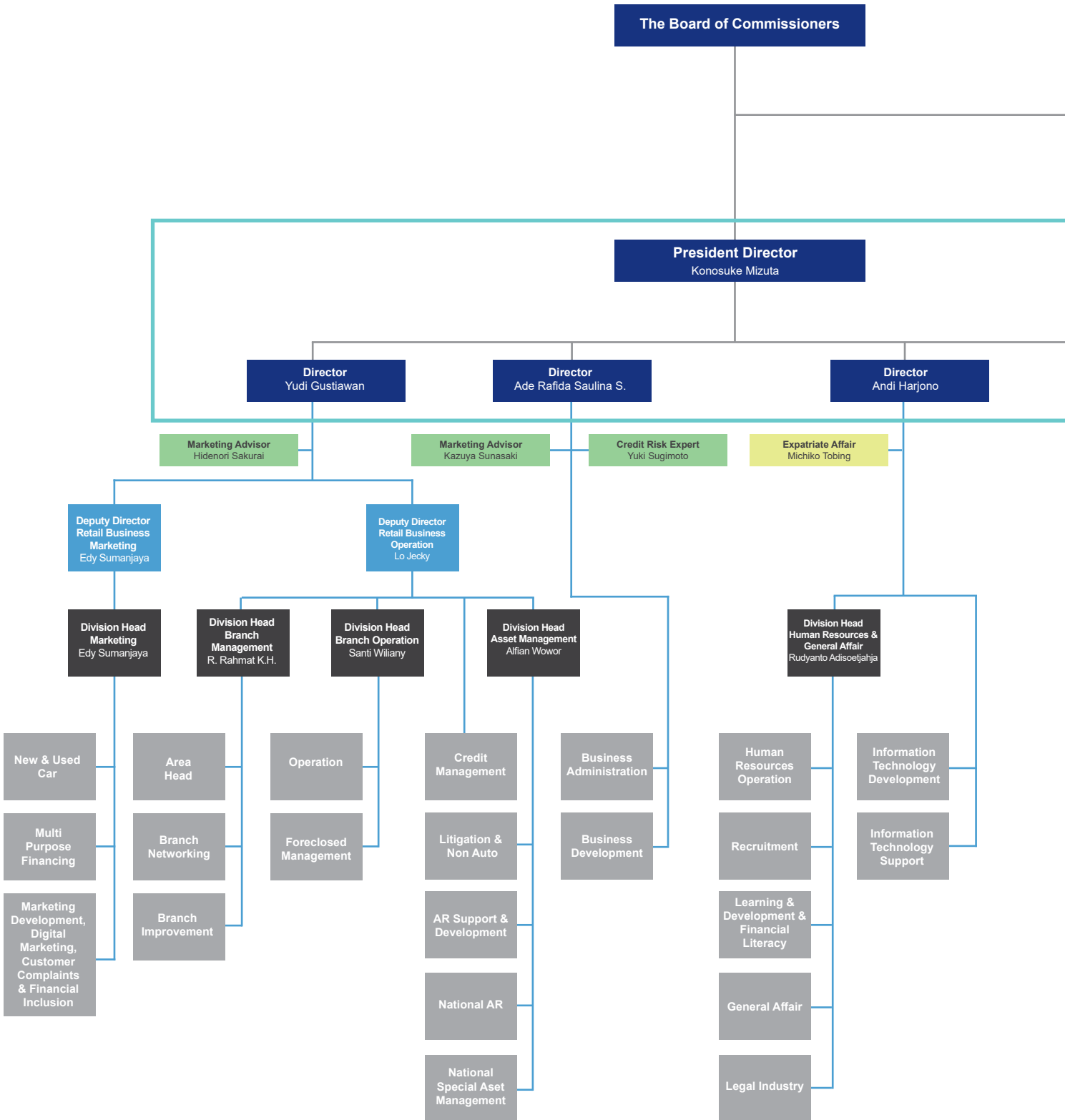
Riwayat Pekerjaan Career History

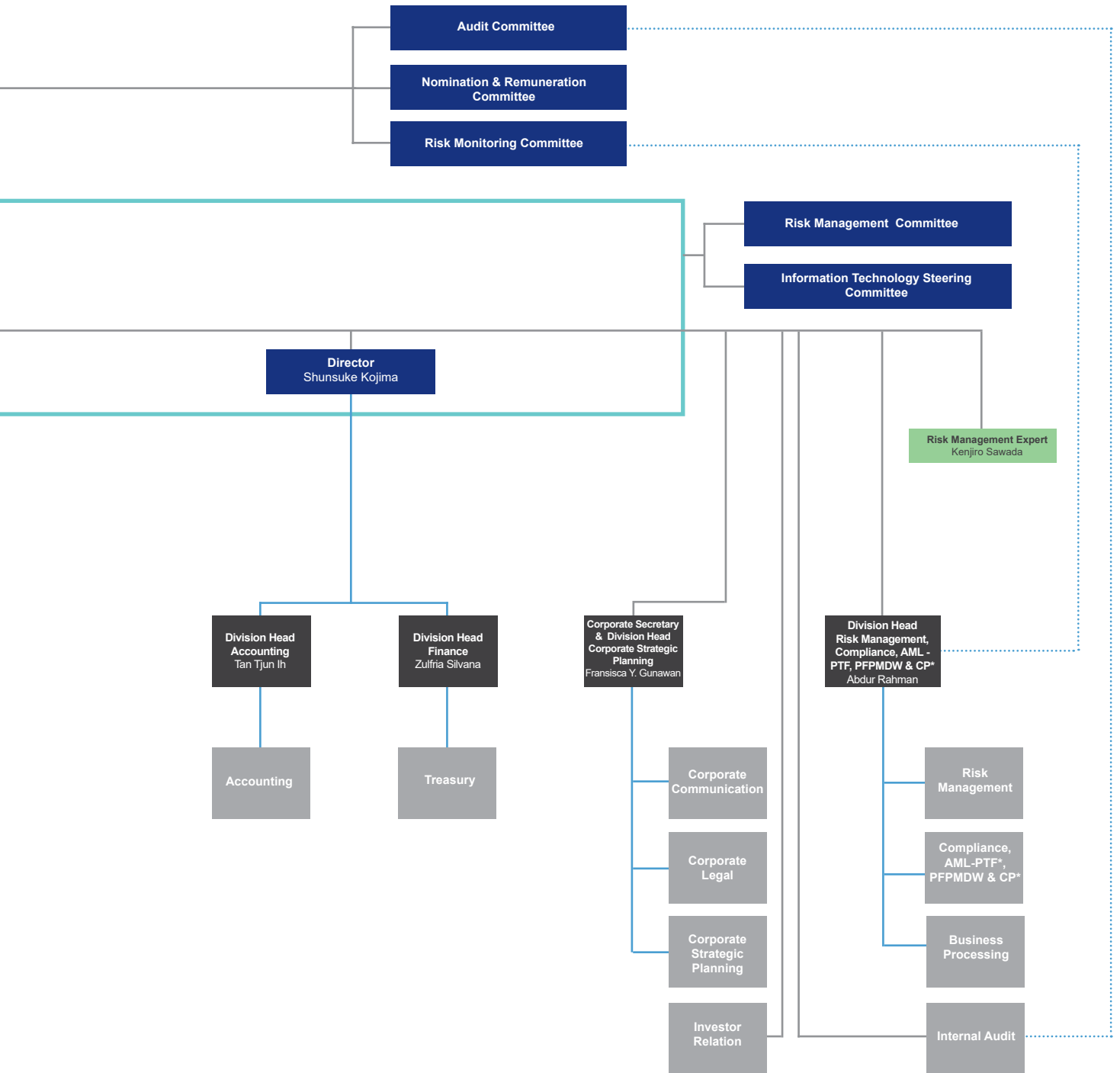
2022 – 2023	Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2020 – 2023	President Commissioner PT Clipan Finance Indonesia Tbk
2007 – 2020	Commissioner PT Clipan Finance Indonesia Tbk
1997 – 2020	Deputy President Director PT Bank Pan Indonesia Tbk
1994 – 1997	Senior Excecutive Vice President PT Bank Pan Indonesia Tbk
1991 – 1994	Excecutive Vice President PT Bank Pan Indonesia Tbk
1986 – 1991	Division Head PT Bank Pan Indonesia Tbk
1983 – 1986	Chief Dealer PT Bank Pan Indonesia Tbk
1980 – 1983	Senior Dealer PT Bank Pan Indonesia Tbk
1977 - 1980	Dealer PT Bank Pan Indonesia Tbk
1974 - 1977	Junior Dealer PT Bank Pan Indonesia Tbk
1971 - 1974	Assistant Dealer PT Bank Pan Indonesia Tbk



Struktur Organisasi Organization Structure

Per 25 Oktober 2023 / As of October 25, 2023





Notes :

*AML-PTF : Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Anti-Money Laundering and Prevention of The Terrorism Financing

*PFPMDW : Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons

*CP : Perlindungan Pelanggan
Customer Protection

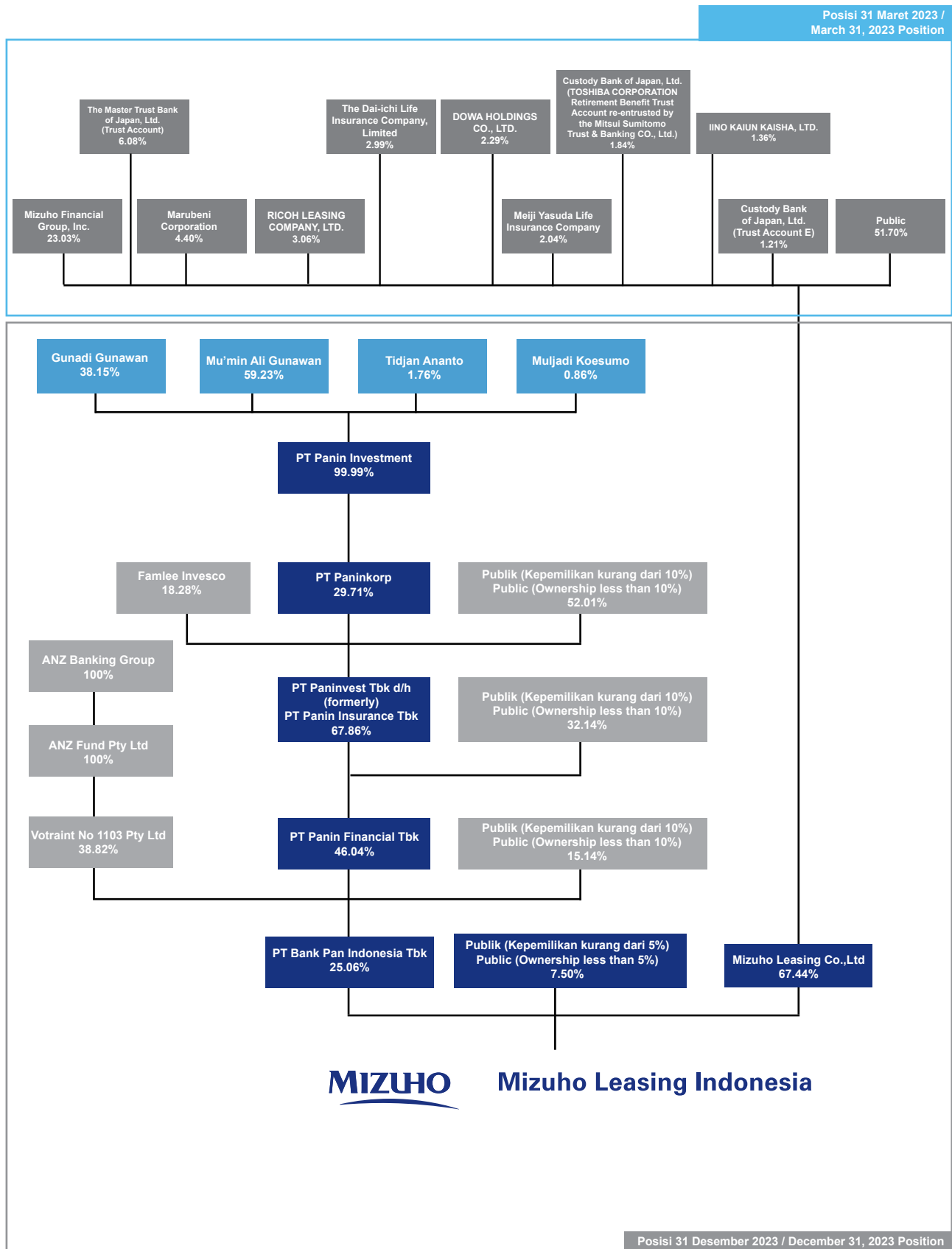
Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Affiliation Relationship of Members of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with								Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris / Board of Commissioners																
Yasuo Imaizumi*	√		√		√		√		√		√		√		√	
Mohammad Syahril	√		√			√		√		√		√		√		√
Bhindawati Gunawan**	√		√		√		√		√		√		√		√	
Takeshi Sasaki***	√		√		√		√		√		√		√		√	
Roosniati Salihin****	√		√		√		√		√		√		√		√	
Direksi / Board of Directors																
Konosuke Mizuta	√		√		√		√		√		√		√		√	
Shunsuke Kojima	√		√		√		√		√		√		√		√	
Andi Harjono	√		√		√		√		√		√		√		√	
Ade Rafida Saulina S	√		√		√		√		√		√		√		√	
Yudi Gustiawan	√		√		√		√		√		√		√		√	

- *) Beliau memiliki hubungan afiliasi yang bersifat keuangan dengan Mizuho Leasing Co., Ltd selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan. Saat ini Beliau menjabat sebagai *Senior Deputy General Manager in International Business Administration Department, Relationship Manager International Business Development Department, Director of Overseas Subsidiaries International Business Administration Department* di Mizuho Leasing Co., Ltd.
- **) He has a financial affiliation with Mizuho Leasing Co., Ltd as the Controlling Shareholder and one of the Main Shareholders of the Company. He currently serves as Senior Deputy General Manager in International Business Administration Department, Relationship Manager International Business Development Department, Director of Overseas Subsidiaries International Business Administration Department at Mizuho Leasing Co., Ltd.
- **) Beliau memiliki hubungan afiliasi yaitu hubungan keluarga dengan Penerima Manfaat Akhir (UBO) PT Bank Pan Indonesia Tbk yang merupakan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan. Pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **) She has affiliation which is family relation with the Ultimate Beneficiary (UBO) of PT Bank Pan Indonesia Tbk which is one of the Company's Main Shareholders. The appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner of the Company is effective as of the approval of the Financial Services Authority ("OJK") on the fit and proper test and in compliance with the prevailing laws and regulations.
- **) Beliau memiliki hubungan afiliasi yang bersifat keuangan dengan Mizuho Leasing Co., Ltd selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan. Beliau menjabat sebagai *International Business Administration Department* di Mizuho Leasing Co., Ltd untuk periode 2019 – 2024 (Maret). Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
- **) He has a financial affiliation with Mizuho Leasing Co., Ltd as the Controlling Shareholder and one of the Main Shareholders of the Company. He served as the International Business Administration Department at Mizuho Leasing Co., Ltd for period 2019 – 2024 (March). Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") dated March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as President Commissioner as of the closing of the Extraordinary GMS.
- **) Pada tanggal 5 November 2023, Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris Perseroan telah meninggal dunia. Maka sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat 18 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir.
- **) On November 5, 2023, Mrs. Roosniati Salihin, as a Commissioner of the Company, passed away. Therefore, in accordance with Article 18 Paragraph 18 letter a of the Company's Articles of Association, the term of office of the Board of Commissioners automatically ended.



Struktur Kepemilikan Saham Shareholding Structure



Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions & Professionals

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik / Public Accountant and Public Accountant Firm Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia Pacific dan Jaringan Deloitte)

Bayu M Dayat and Public Accountant Firm Imelda & Partners
(Member Firm of Deloitte Asia Pacific and Deloitte Network)
Kantor Pusat / Head Office
The Plaza Office Tower, Lantai 32,
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30,
Jakarta Pusat 10350 - Indonesia
Telp. : +6221-50818000
Fax. : +6221-29928300

Notaris / Notary Fathiah Helmi, SH

Graha Irama Lt.6 – Blok C
Jl. H.R Rasuna Said Kav 1–2 Blok X–1
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Telp. : +6221-52907304

Berikut ini adalah data jasa berkala yang diberikan oleh lembaga dan profesi penunjang sepanjang tahun 2023.

Biro Administrasi Efek / Share Registrar PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47–48.
Jakarta Selatan 12930 - Indonesia
Telp. : +6221-2525666
Fax. : +6221-2525028
Email : rrsbae@registra.co.id
Website : www.registra.co.id

Kustodian / Custodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Telepon: (+62 21) 515 2855
Fax: (+62 21) 5299 1199
Website : www.ksei.co.id

The following data concerns regular services provided by supporting institutions and professions during 2023.

Profesi Penunjang Supporting Professions	Jasa Yang Diberikan Services Provided	Imbal Jasa Fee	Periode Penugasan Period of Duty
Akuntan Publik Public Accountant	<ul style="list-style-type: none"> Audit Laporan Keuangan Posisi Desember 2023 Audit Financial Report Position December 2023 	Rp1,776,000,000	2023
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPKK). Report on Implementing the Prudential Principal. 	Rp55,500,000	2023
Notaris / Notary	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Akta Berita Acara & Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Deed Preparation of Minutes of Annual General Meeting of Shareholder & Declaration of the Annual General Meeting of Shareholder Resolution 	Rp24,420,000	2023
	<ul style="list-style-type: none"> Pengurusan ke Kementerian Hukum & HAM RI Preparations to Indonesian Ministry of Law and Human Rights 		
Biro Administrasi Efek Share Registrar	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemeliharaan data saham Maintenance of share data Biaya administrasi e-RUPS e-GMS administration fee 	Rp60,000,000	2023

Informasi Entitas Anak Subsidiary Information

Per 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak.

As of December 31, 2023, The Company did not have any Subsidiaries.

Informasi Kepemilikan Saham Share Ownership Information

Informasi kepemilikan saham per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

Information on share ownership per December 31, 2023, was as follows:

Nama Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Mizuho Leasing Co.,Ltd.	3,835,346,804	67.44
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1,425,455,604	25.06
Masyarakat	426,551,589	7.50
Total	5,687,353,997	100.00

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership

Per 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023, tidak ada kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris maupun Direksi yang menjabat pada saat buku Laporan Tahunan ini diterbitkan.

As of January 1, 2023 to December 31, 2023, there was no ownership of the Company's shares by the Board of Commissioners or Board of Directors who served at the time this Annual Report was published.

Daftar Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi Shareholders List Based on Classification

Pemegang Saham Lokal Local Shareholders	Jumlah Pemegang Efek Number of Securities Holders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Individu Individual	1,202	115,858,059	2,04%
Institusi Institution	9	1,734,898,644	30,50%
Sub Total	1,211	1,850,756,703	32.54%
Pemegang Saham Asing Foreign Shareholders	Jumlah Pemegang Efek Number of Securities Holders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Individu Individual	1	23,000	0.00%
Institusi Institution	5	3,836,574,294	67.46%
Sub Total	6	3,836,597,294	67.46%
TOTAL	1,217	5,687,353,997	100.00%

Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Shares Listing

Perseroan melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 25 Juni 2008 sejumlah 1.002.000.000 lembar saham melalui Penawaran Umum Perdana atas 460.000.000 lembar saham Perseroan kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp100,-. Penawaran Umum Perdana tersebut juga disertai dengan penerbitan 46.000.000 Waran Seri I. Berikut ini adalah kronologis pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hingga akhir tahun buku.

The Company listed its initial shares on the Indonesia Stock Exchange on June 25, 2008 totaling 1,002,000,000 shares through an Initial Public Offering of 460,000,000 shares of the Company to the public with a nominal value of Rp100.- per share and an offer price of Rp100.-. The Initial Public Offering was also accompanied by the issuance of 46,000,000 Series I Warrants. The following is a chronology of the listing of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange until the end of the fiscal year.

Tanggal Date	Aksi Korporasi Corporate Actions	Nominal Nominal	Harga Pelaksanaan Exercised Price	Saham Tambahan Additional Shares	Jumlah Saham Number of Shares
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Before Initial Public Offering	Rp100	-	Rp100	542,000,000
25 Jun 2008	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	Rp100	Rp100	460,000,000	1,002,000,000
4 Sep 2009	Konversi Waran Warrant Conversion	Rp100	Rp110	20	1,002,000,020
24 Jun 2010	Konversi Waran Warrant Conversion	Rp100	Rp110	332	1,002,000,352
18 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	18,590	1,002,018,942
19 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	101,958	1,002,120,900
22 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	872,367	1,002,993,267
23 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	4,702,146	1,007,695,413
24 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	213,918,728	1,221,614,141
26 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	467,477,166	1,689,091,307
29 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	896,069,601	2,585,160,908
15 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	283	2,585,161,191
16 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	2,491	2,585,163,682
18 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	2,522,210,381	5,107,374,063
21 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	20	5,107,374,083
24 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	579,979,914	5,687,353,997

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Listings

Pada tahun 2023, Perseroan tidak menerbitkan atau mencatatkan efek lainnya. Berikut ini adalah kronologis pencatatan efek lainnya.

In 2023, the Company did not issue or list any other securities. The chronology of other securities listings were as follow.

No.	Obligasi Bonds	Seri Series	Nilai Amount	Bunga Interest	Jangka Waktu Tenor	Peringkat Rating	Jatuh Tempo Due Date	Status Status	Bursa Stock Exchange
1	Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011 Verena Multi Finance Bond I Year 2011	A	Rp65 miliar/billion	9.5%	370 hari/days	idA (Single A)	22 Mar 2012	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		B	Rp135 miliar/billion	10.5%	24 bulan/months	idA (Single A)	18 Mar 2013	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		C	Rp300 miliar/billion	11.25%	36 bulan/months	idA (Single A)	18 Mar 2014	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
Total Rp500 miliar/billion									
2	Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012	A	Rp50 miliar/billion	7.25%	370 hari/days	idA (Single A)	21 Dec 2013	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		B	Rp227 miliar/billion	9.00%	36 bulan/months	idA- (Single A Minus)	11 Dec 2015	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		C	Rp23 miliar/billion	9.05%	48 bulan/months	idA- (Single A Minus)	11 Dec 2016	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
Total Rp300 miliar/billion									
3	Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds I Year 2013	A	Rp113 miliar/billion	11.84%	36 bulan/months	idA- (Single A Minus; Stable Outlook)	24 Dec 2016	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		B	Rp40 miliar/billion	12.15%	48 bulan/months	idA- (Single A Minus; Stable Outlook)	24 Dec 2017	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
Total Rp153 miliar/billion									
4	Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014	A	Rp3 miliar/billion	11.00%	370 hari/days	idA- (Single A Minus)	29 Mar 2015	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		B	Rp132 miliar/billion	12.55%	36 bulan/months	idA- (Single A Minus)	19 Mar 2017	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
Total Rp135 miliar/billion									

No.	Medium Term Notes (MTN)	Nilai Amount	Bunga Interest	Jangka Waktu Tenor	Peringkat Rating	Jatuh Tempo Due Date	Status Status	Bursa Stock Exchange
1	Medium Term Notes I Verena Multi Finance Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap	Rp200 miliar/billion	11.00%	3 tahun/years	idA- (Single A Minus)	15 Dec 2014	Sudah Lunas /Paid	-
2	Medium Term Notes II Verena Multi Finance Tahun 2017	Rp.100 miliar/billion	10.00%	2 tahun/years	idA (Single A)	5 Dec 2019	Sudah Lunas /Paid	-

Sumber Daya Manusia Human Resources

Kunci sukses Perseroan untuk terus tumbuh dan menciptakan nilai jangka panjang secara maksimal terletak pada kemampuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta-talenta kompeten dan memiliki loyalitas tinggi.

Karena itu, Perseroan menyadari rekrutmen, pengembangan Sumber Daya Manusia (“SDM”) dan kesempatan berkarir sangatlah penting dan memiliki peran penting dengan pertumbuhan dan kesuksesan Perseroan.

Untuk itu, penerapan budaya perusahaan dalam bentuk penanaman nilai dan prinsip serta pelaksanaannya akan membawa manfaat tidak hanya terhadap Perseroan tetapi juga bagi individu karyawan. Perseroan secara terencana dan berkesinambungan melakukan pengembangan SDM dan potensi-potensinya, yaitu:

Perencanaan SDM

- Rekrutmen
- Pelatihan dan pengembangan potensi karyawan
- Kaderisasi dan *talent management*
- Penilaian pekerjaan, penghargaan, dan sanksi

Komposisi dan Jenjang Karyawan

Pada 2023, jumlah karyawan Perseroan bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 711 orang dari sebelumnya 664 orang. Detail dari struktur karyawan pada 2021, 2022 dan 2023 tersaji dalam gambaran di bawah ini:

The key factors toward the Company’s success in maintaining its growth and creating maximum long-term values were based on the ability to attract, develop, and retain competent personnels with high loyalty.

Therefore, the Company realized that Recruitment, Human Resource (“HR”) development, and career opportunities are essential and played a major role to the Company’s development and success.

For such objectives, the implementation of corporate culture by instilling values and principles, would bring benefits not only for the Company but also to them as individuals. The Company had planned and continuously developed HR and their potentials, namely:

HR Planning

- Recruitment
- Training and developing employee potential
- Regeneration and talent management
- Job assessments, rewarding and sanctioning

Employee Composition and Level

In 2023, the number of the Company’s employees increased from the previous year, namely to 711 people from the previous 664 people. The details of the employee structure in 2021, 2022 and 2023 are presented in the picture below:

Komposisi Menurut Jabatan Composition Based on Positions							
Jabatan	2021		2022		2023		Position
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	
<i>Deputy Director</i>	3	0.5%	3	0.5%	2	0,3%	<i>Deputy Director</i>
<i>General Manager</i>	10	1.6%	10	1.5%	11	1,6%	<i>General Manager</i>
<i>Manager</i>	51	8.3%	56	8.4%	58	8,2%	<i>Manager</i>
<i>Supervisor</i>	130	21,2%	145	21.8%	166	23,3%	<i>Supervisor</i>
<i>Officer</i>	380	61.9%	410	61.7%	431	60,6%	<i>Officer</i>
<i>Staff</i>	40	6.5%	40	6.0%	43	6,0%	<i>Staff</i>
Total	614	100.0%	664	100.0%	711	100,0%	Total

Komposisi Menurut Jenjang Pendidikan Composition Based on Academic Backgrounds							
Pendidikan	2021		2022		2023		Academic Backgrounds
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	
S2	5	0.8%	5	0.8%	5	0,7%	Master
S1	372	60.6%	419	63.1%	453	63,7%	Bachelor
DIPLOMA	91	14.8%	84	12.7%	93	13,1%	DIPLOMA
SMU/SMK /SMEA/STM	144	23.5%	154	23.2%	158	22,2%	High School/Vocational School/Economic Vocational School/ Technical High School
SMP/SD	2	0.3%	2	0.3%	2	0,3%	Junior High School/ Elementary School
Total	614	100.0%	664	100.0%	711	100,0%	Total

Komposisi Menurut Jenjang Usia Composition Based on Ages							
Usia	2021		2022		2023		Ages
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	
18 - 25	62	10.1%	59	8.9%	70	9,8%	18 - 25
26 - 35	251	40.9%	285	42.9%	294	41,4%	26 - 35
36 - 45	237	38.6%	247	37.2%	269	37,8%	36 - 45
> 45	64	10.4%	73	11.0%	78	11,0%	> 45
Total	614	100.0%	664	100.0%	711	100,0%	Total

Komposisi Menurut Status Kepegawaian Composition Based on Employment Status							
Status	2021		2022		2023		Status
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	
Pegawai Tetap	496	80.8%	502	75.6%	563	79,2%	Permanent Employee
Pegawai Kontrak	118	19.2%	162	24.4%	148	20,8%	Contract Employee
Total	614	100.0%	664	100.0%	711	100,0%	Total

Komposisi Menurut Jenis Kelamin Composition Base on Gender							
Jenis Kelamin	2021		2022		2023		Gender
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	
Laki-laki	485	79.0%	526	79.2%	565	79,5%	Male
Perempuan	129	21.0%	138	20.8%	146	20,5%	Female
Total	614	100.0%	664	100.0%	711	100,0%	Total

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Perseroan senantiasa mengembangkan materi dan sarana pelatihan untuk semua pekerja. Beberapa metode yang digunakan dalam penyampaian materi-materi pelatihan, yaitu melalui *video learning*, *video conference*, dan *e-learning*. Pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pelatihan tatap muka, baik secara langsung maupun virtual, namun juga melalui *on job training*, *tutoring*, *rotasi*, *coaching*, *counseling*, dan *mentoring*. Materi-materi yang disiapkan tidak hanya berorientasi pada industri pembiayaan saja, namun juga materi *soft skills* seperti kepemimpinan, pengembangan kepribadian, dan komunikasi. Media *e-learning* menjadi salah satu solusi dan strategi yang ditempuh untuk pembelajaran yang berkelanjutan.

Perseroan senantiasa menyelenggarakan kegiatan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) kepada Tenaga Kerja Lokal lainnya guna proses didalam Alih Pengetahuan (*Transfer Knowledge*).

Berikut adalah program pelatihan yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2023:

Employee Development Trainings

The Company continues to develop training materials and tools for all employees. Several methods are used in the delivery of training materials, namely through video learning, video conferencing, e-learning. HR development is not only done through face-to-face training, both in person and virtual, but also through on-job training, tutoring, rotation, coaching, counseling, and mentoring. The materials prepared are not only oriented towards the financing industry, but also soft skills materials such as leadership, personality development, and communication. e-learning media is one of the solutions and strategies adopted for continuous learning.

The Company always organizes knowledge transfer activities for foreign workers (“TKA”) to other local workers for the process of Transfer Knowledge.

These were the training programs that had been carried out throughout the year of 2023:

No.	Klasifikasi Training Training Classification	Program	Peserta Participant	Klasifikasi Classification
1	Pelatihan Perkenalan	39	196	Induction Training
2	Pelatihan Teknis	32	637	Technical Training
	Pelatihan <i>Soft Skill</i> (Manajerial dan Kepemimpinan)	1	34	Soft Skill Training (Managerial & Leadership)
3	Program Sertifikasi :			Certification Program
4	4.1. Refreshment Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (“SPPI”) Dewan Komisaris dan Direksi	13	22	4.1. Refreshment - SPPI BOC & BOD
	4.2. Sertifikasi Dasar Manajerial SPPI	8	28	4.2. Basic Certification - SPPI Management
	4.3. Sertifikasi Profesi Penagihan SPPI	12	74	4.3. Professional Certification - SPPI Collection
	4.4. Sertifikasi Program Perencanaan Pengembangan Individu (“P3I”)	15	161	4.4. Certification - P3I
5	Pelatihan Karakter & Budaya Perusahaan	7	175	Character & Company Culture Training
6	<i>Program Development Management</i>	10	40	<i>Program Development Management</i>
7	Program Alih Pengetahuan <i>expatriate</i> (<i>Transfer of Knowledge</i>)	8	48	Expatriate Knowledge Transfer Program (Transfer of Knowledge)
	Jumlah	145	1415	Total

Teknologi Informasi Information Technology

Dukungan Teknologi Informasi

Seiring dengan bisnis Perseroan yang terus tumbuh, pengembangan Teknologi Informasi ("TI") memberikan keunggulan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dan berinovasi pada produk yang sudah ada serta mengefisienkan dan mengefektifkan proses bisnis. Selain itu, pengembangan TI turut serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan Perseroan. Untuk itu, Perseroan selalu mengupayakan pengembangan TI yang didasari oleh kebutuhan sekaligus sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku. Saat ini pengembangan TI memiliki peran dalam beberapa aspek Perseroan, yaitu:

- Mengoptimalkan dan mengefisienkan proses kerja serta meminimalisasi terjadinya kesalahan akibat kelalaian maupun penyalahgunaan wewenang.
- Informasi bisnis, baik data konsumen maupun data-data yang berhubungan dengan pihak ketiga, dapat tercatat secara benar dan tepat, yang berujung memberikan informasi secara *real time* sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan secara tepat dan cepat.
- Sebagai alat membantu menjaga kepatuhan Perseroan terhadap berbagai peraturan-peraturan terutama pada proses inisiasi pembiayaan, proses penanganan konsumen dan berikutnya perlindungan data pribadi baik data konsumen maupun data karyawan.

Pengembangan Teknologi Informasi

Saat ini, pengembangan TI yang dilakukan Perseroan disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan bisnis, serta merupakan bagian dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Pengembangan TI yang dilakukan Perseroan adalah untuk mengembangkan sistem TI yang dapat mendukung bisnis yang dijalankan oleh Perseroan sebagai langkah menuju transformasi digital. Juga Perseroan mendukung dan melengkapi karyawan untuk dapat melakukan pekerjaan dari rumah (*Work From Home* – WFH) selama pandemi berlangsung.

Pengembangan 2023

Seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan terhadap kebutuhan bisnis dimana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan profit terhadap Perseroan, IT dan *stakeholder* bersama-sama melakukan perubahan (*Continuous Improvement*) baik secara proses dan prosedur yang didukung oleh Teknologi Informasi, dimana setiap pihak melakukan pendekatan *Zero-based-approach*, dan dalam hal ini telah melakukan beberapa implementasi baik produk baru, pengembangan, dan juga perbaikan:

1. Aplikasi Android *mobile* untuk menunjang proses integrasi dan kecepatan informasi terhadap mitra jasa penagihan yang bernama *RepoLink*.

Information Technology Support

As the Company's business continues to grow, the development of Information Technology ("IT") provides advantages in providing services to customers and innovating existing products as well as streamlining business processes. In addition, IT development provides security and comfort guarantees for the Company's customers. For this reason, the Company strives for IT development that is based on needs in accordance with applicable provisions, regulations and laws. Currently, IT development has a role in several aspects of the Company, namely:

- Optimizing and streamlining work processes and minimizing errors due to negligence or abuse of authority.
- Business information, both customer data and data related to third parties can be recorded correctly and precisely, will provide real time information so that it can be the basis for making accurate and fast decisions.
- As a tool to help maintain the Company's compliance with various regulations, especially in the financing initiation process, customer handling process and subsequent protection of personal data, both consumer data and employee data.

Information Technology Development

Currently, IT development carried out by the Company is adjusted to the needs and business development and is part of the provisions of the Financial Services Authority ("OJK"). The IT development carried out by the Company is to develop an IT system that can support the business run by the Company as a step towards digital transformation. The Company also supports and equips employees to be able to do *Work From Home* (WFH) during the pandemic.

2023 Development

Along with the development of technology and also the development of business needs which aims to increase efficiency, effectiveness, and profit for the Company, IT and stakeholders together make changes (*Continuous Improvement*) both in processes and procedures supported by Information Technology, where each party takes a *Zero-based approach*, and in this case has made several implementations of both new products, development, and also improvements:

1. Android mobile application to support the integration process and speed of information to collection service partners called *RepoLink*.



2. Pengembangan pelayanan terhadap konsumen mobil bekas yaitu garansi mesin.
3. Mengembangkan penerimaan angsuran melalui *payment channel*, dimana ditambahkan pembayaran minimal denda dalam tagihan.
4. Pengembangan proses internal dalam menyediakan fasilitas *Top-Up* maupun *Multi-Agunan* yang dimulai dari penerimaan *Mobile Order-Survey* sampai dengan *Core System*.
5. Pengembangan proses internal dimana diharapkan untuk meningkatkan *Service Level Agreement* ("SLA") *Credit* dalam melakukan proses persetujuan dengan menerapkan *Non-Revert Back Data Correction*.
6. Melakukan evaluasi kembali terhadap dokumen-dokumen dan informasi yang menjadi mandatory yang berdampak pada *mobile survey*.
7. Perseroan telah mendapatkan ISO 27001 dengan *Scope of certification: Processing of data population verification through web service API*.

Pengembangan ke Depan

Sesuai dengan prinsip perbaikan berkesinambungan (*Continuous Improvement*) yang disertai dengan *Zero-based-approach*, Perseroan memiliki rencana pengembangan, yaitu:

1. *CI/CD (Continuous Improvement/Continuous Development)* pada:
 - a. *Core System*
 - b. *Mobile Order - Survey - Collection*
 - c. *Telephony System: Service - Marketing - Verification - Collection*.
 - d. *RepoLink*
2. Pengembangan untuk pemantauan asset Perseroan (*Mobile Asset Management*).

2. Development of services for used car customers, namely engine warranty.
3. Developing installment receipts through payment channels, where a minimum payment penalty is added to the bill.
4. Internal process development in providing *Top-Up* and *Multi-Collateral* facilities starting from the acceptance of *Mobile Order-Survey* to the *Core System*.
5. Internal process development which is expected to improve *Credit's Service Level Agreement* ("SLA") in the approval process by implementing *Non-Revert Back Data Correction*.
6. Re-evaluation of mandatory documents and information that impact the *mobile survey*.
7. The Company has obtained ISO 27001 with *Scope of certification: Processing of data population verification through web service API*.

Future Development

In accordance with the principle of *Continuous Improvement* accompanied by *Zero-based-approach*, the Company has a development plan, namely:

1. *CI/CD (Continuous Improvement/Continuous Development)* on:
 - a. *Core System*
 - b. *Mobile Order - Survey - Collection*
 - c. *Telephony System: Service - Marketing - Verification - Collection*
 - d. *RepoLink*
2. Development for the Company's asset monitoring (*Mobile Asset Management*).



3. Pengembangan B2C terhadap konsumen dengan menerapkan komunikasi melalui *Rich-Communication-Service* ("RCS") seperti *WhatsApp*.
4. Pengembangan *channel* untuk *payment point* melalui bank-bank yang mempunyai jumlah nasabah yang besar.
5. Pengembangan terhadap fitur PEFINDO baik secara laporan maupun proses integrasi diharapkan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penilaian.
6. Meningkatkan keamanan sistem Perseroan dengan mengaplikasikan *Zero Trust Network Access*.

3. B2C development towards consumers by implementing communication through *Rich-Communication-Service* ("RCS") such as *WhatsApp*.
4. Channel development for payment points through banks that have a large number of customers.
5. Development of PEFINDO features both in terms of reports and integration process is expected to increase efficiency and accuracy in assessment.
6. Improving the Company's system security by applying *Zero Trust Network Access*.

Keanggotaan Pada Asosiasi Association Membership

No.	Nama Asosiasi Association Name	Keterangan Description
1.	APPI	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Sebagai anggota No. 1191/JKT/05 Association of Indonesian Financing Companies As member No. 1191/JKT/05
2.	RAPINDO	PT. Rapi Utama Indonesia Sebagai anggota No.041/Rapindo-1/12/2023 PT. Rapi Utama Indonesia As member No.041/Rapindo-1/12/2023
3.	ICSA	Indonesia Corporate Secretary Association Sebagai anggota No. 28417 Indonesia Corporate Secretary Association As member No. 28417
4.	LAPS SJK	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Sebagai anggota No. K/157/IX/2023 Alternative Institution for Dispute Resolution in the Financial Service Sector No. K/157/IX/2023

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS

MIZUHO



Uraian Per Segmen Description Per Segment

Ruang lingkup kegiatan utama Perseroan meliputi:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - Pembiayaan Investasi
 - Pembiayaan Modal Kerja
 - Pembiayaan Multiguna
 - Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Peretujuan OJK
2. Selain kegiatan usaha utama diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (*fee*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perseroan memiliki 2 pilar bisnis, sebagai berikut:

1. Unit Bisnis Ritel
2. Unit Bisnis Korporasi

Izin usaha sebagai lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.994/ KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 yang kemudian telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nasional, Perseroan dapat meningkatkan kinerjanya secara signifikan pada tahun 2023 yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah piutang dan pendapatan per uraian segmen usaha yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

The scope of the Company's main activities includes:

1. Main Business Activities
 - Investment Financing
 - Working Capital Financing
 - Multipurpose Financing
 - Other Financing Business Activities Based on OJK Approval
2. In addition to the main business activities above, the Company can carry out supporting business activities to conduct operating leases and/or fee-based activities as long as they do not conflict with the laws and regulations in the financial services sector.

The Company has 2 business pillars, as follows:

1. Retail Business Unit
2. Corporate Business Unit

The business license as a financial institution owned by the Company is as stated in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.994 / KMK.017 / 1993 dated December 30, 1993 which has subsequently been amended by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-161 / KM.6 / 2004 dated 4 May 2004 Jo. Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-654 / KM.10 / 2010 dated 9 December 2010 Jo. Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022.

In the midst of global and national economic uncertainty, the Company can significantly improve its performance in 2023 which can be seen from the increase in total receivables and income per business segment description which can be seen in the table below.

Total Piutang Pembiayaan / Total Financing Receivables

Keterangan	2021	2022	2023	Description
Piutang Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)	2,089.64	2,183.49	2,615.29	Financing Receivables (in billion Rupiah)
Volume (dalam unit)	15,208	17,089	18,327	Volume (in units)
Pendapatan Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)	254.26	270.35	320.91	Financing Revenues (in billion Rupiah)

Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing

Keterangan	2021	2022	2023	Description
Piutang Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah)	1,233.49	1,472.68	1,764.76	Consumer Financing Receivables (in billion Rupiah)
Volume (dalam unit)	14,691	16,768	18,069	Volume (units)
Pendapatan Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah)	189.38	224.00	265.37	Consumer Financing Revenues (in billion Rupiah)

Sewa Pembiayaan / Finance Lease

Keterangan	2021	2022	2023	Description
Piutang Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)	856.15	710.81	850.53	Consumer Financing Receivables (in billion Rupiah)
Volume (dalam unit)	517	321	258	Volume (units)
Pendapatan Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)	64.88	46.35	55.54	Consumer Financing Revenues (in billion Rupiah)

Uraian Kinerja Keuangan Perseroan

Description of Company Financial Performance

Aset

Per 31 Desember 2023, Perseroan mencatat total aset sebesar Rp2.793,58 miliar, naik sebesar 13,25% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 Rp2.466,67 miliar. Kenaikan aset terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan. Di sisi lain, kas dan setara kas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, demikian juga aset derivatif.

Piutang pembiayaan konsumen - bersih naik sebesar 20,30% dari Rp1.438,26 miliar naik menjadi Rp1.730,18 miliar sejalan dengan peningkatan piutang pembiayaan konsumen baru Unit Bisnis Ritel di tahun 2023. Piutang sewa pembiayaan - bersih naik sebesar 20,51% dari Rp674,83 miliar naik menjadi Rp813,26 miliar sejalan dengan peningkatan piutang sewa pembiayaan baru Unit Bisnis Korporasi di tahun 2023. Kas dan setara kas turun sebesar 50,92% dari Rp102,60 miliar menjadi Rp50,36 miliar. Aset derivative turun sebesar 54,65% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp17,53 miliar menjadi Rp7,95 miliar per 31 Desember 2023.

Rincian dan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Asset

As of December 31, 2023, the Company recorded total assets of Rp2.793,58 billion, an increase of 13.25% compared to the previous year as of December 31, 2022 Rp2,466.67 billion. The increase in assets was mainly due to an increase in consumer financing receivables and finance lease receivable. On the other hand, cash and cash equivalents decreased compared to 2022, as well as derivative assets.

Consumer financing receivables - net increased by 20.30% from Rp1,438.26 billion to Rp1,730.18 billion in line with the increasing in new consumer financing receivables of Retail Business Unit in 2023. Finance lease receivables - net increased by 20.51% from Rp674.83 billion to Rp813.26 billion in line with the increasing in new Finance lease receivables of Corporate Business Unit in 2023. Cash and cash equivalents increased by 50.92% from Rp102.60 billion to Rp50.36 billion. Derivative assets decreased by 54.65% compared to the previous year as of December 31, 2022, which was Rp17.53 billion become Rp7.95 billion as of 31 December 2023.

Details and composition of the Company's assets as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Aset / Assets	2022	2023	Perubahan / Changes
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	102.60	50.36	(50.92)%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih / Consumer Financing Receivables - Net	1,438.26	1,730.18	20.30%
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih / Finance Lease Receivables - Net	674.83	813.26	20.51%
Piutang lain-lain - Bersih / Other Receivables - Net	79.06	82.48	4.33%
Biaya Dibayar di Muka / Prepaid Expenses	1.75	2.61	49.14%
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	11.58	11.66	0.69%
Aset Tetap - Bersih / Property and equipment - Net	53.03	51.81	(2.32)%
Aset Derivatif / Derivative Assets	17.53	7.95	(54.65)%
Aset Hak Guna - Bersih / Right-of-Use Assets - Net	33.76	32.11	(4.89)%
Aset Lain-lain / Other Assets	54.27	11.16	(79.42)%
Jumlah Aset / Total Assets	2,466.67	2,793.58	13.25%

Liabilitas dan Ekuitas

Per 31 Desember 2023, Perseroan mencatat total liabilitas sebesar Rp2.043,10 miliar, naik sebesar 14.99% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.776,77 miliar. Kenaikan liabilitas terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank sebesar 16.76% dari Rp1.661,38 miliar menjadi Rp1.939,81 miliar sejalan dengan kenaikan piutang pembiayaan. Di sisi lain, utang lain-lain turun sebesar 17,36% dari Rp56,11 miliar menjadi Rp46,37 miliar. Total ekuitas sebesar Rp750.48 miliar juga mengalami kenaikan sebesar 8,78% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp689.90 miliar. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sehubungan dengan laba bersih tahun berjalan tahun 2023.

Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Liability and equity

As of 31 December 2023, the Company recorded total liabilities of Rp2,043.10 billion, an increase of 14.99% compared to the previous year as of 31 December 2022 of Rp1,776.77 billion. The increase in liabilities was due to the 16.76% increase in bank loan from Rp1,661.38 billion to Rp1,939.81 billion which in line with increasing in financing receivables. On the other hand, other payables decrease by 17.36% from Rp56.11 billion to Rp46.35 billion. Total equity, which is Rp750.48 billion as of December 31, 2023 also increasing by 8.78% compared to the previous year as of December 31, 2022, which was Rp689.90 billion. The increasing equity was mainly due to an increasing in connection with net profit for the year 2023.

Details of the Company's total liabilities as of December 31 2023 and 2022 as follows:

Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	2022	2023	Perubahan Changes
Utang Bank / Bank Loans	1,661.38	1,939.81	16.76%
Utang Usaha / Trade Payables	0.71	0.97	36.62%
Liabilitas Derivatif / Derivative Liabilities	0	0.23	-
Utang Lain-lain / Other Payables	56.11	46.37	(17.36)%
Biaya masih harus dibayar / Accrued Expenses	14.37	11.90	(17.19)%
Utang Pajak / Taxes Payable	2.25	2.05	(8.89)%
Liabilitas Sewa / Lease Liabilities	29.54	27.30	(7.58)%
Liabilitas Imbalan pasca-Kerja / Post-employment Benefits Liabilities	12.41	14.47	16.60%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	1,776.77	2,043.10	14.99%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	689.90	750.48	8.78%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	2,466.67	2,793.58	13.25%

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Jumlah laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp60,59 miliar, turun sebesar 6,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 laba sebesar Rp64,65 miliar. Penurunan terutama disebabkan penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3,17 miliar dan penurunan laba bersih Perseroan sebesar Rp0,90 miliar.

Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

The Company's total comprehensive income for the year ended December 31, 2023 was Rp60.59 billion, a decrease of 6.28% compared to the year ended December 31, 2022 which was net profit Rp64.65 billion. The decrease was mainly due to the decrease in other comprehensive income of Rp3.17 billion and an decrease in the Company's net profit of Rp0.90 billion.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income			
Pendapatan Revenues	2022	2023	Perubahan Changes
Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing	224.00	265.37	18,47%
Sewa Pembiayaan / Finance Lease	46.35	55.54	19,83%
Administrasi dan provisi / Administration and provision	32.45	45.41	39,94%
Penalti / Penalty	14.58	20.75	42,32%
Bunga / Interest	0.39	0.33	(15,38)%
Pendapatan Lain-lain / Other Income	15.29	13.94	(8,83)%
Jumlah / Total	333.06	401.34	20,50%
Beban Expenses	2022	2023	Perubahan Changes
Bunga dan keuangan / Interest and financing charges	59.24	105.23	77,63%
Umum dan administrasi / General and administrative	63.90	69.64	8,98%
Kepegawaian / Personnel	102.96	112.20	8,97%
Penyisihan kerugian penurunan nilai / Provision for impairment losses	49.55	52.16	5,27%
Beban lain-lain / Other expenses	2.07	0.88	(57,49)%
Jumlah beban / Total Expenses	277.72	340.11	22,47%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / Profit (loss) before income tax	55.34	61.23	10,64%
(Beban) Manfaat pajak penghasilan / Income Tax (Expense) Benefit	6,71	(0.08)	(101,19)%
Laba (rugi) tahun berjalan Net (loss) profit for the year	62.05	61.15	(1,45)%

Beban Expenses	2022	2023	Perubahan Changes
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain Total Other comprehensive income (loss)	2.60	(0.56)	(121,46%)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan Total Comprehensive (Loss) Income for the Year	64.65	60.59	(6,28%)
Laba (rugi) per saham (dalam Rupiah penuh) Basic earning per share (in full Rupiah)	10.91	10.75	(1,47%)

Pendapatan

Pendapatan Perseroan berasal dari pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, pendapatan administrasi, pendapatan penalti, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain.

Per 31 Desember 2023, Perseroan mencatat total pendapatan sebesar Rp401,34 miliar, naik sebesar 20,50% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp333,06 miliar. Kenaikan pendapatan terutama disebabkan kenaikan pendapatan pembiayaan konsumen sebesar 18,47% dari Rp224,00 miliar menjadi Rp265,37 miliar sejalan dengan kenaikan piutang pembiayaan konsumen. Selain itu pendapatan sewa pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 19,83% dari Rp46,35 miliar menjadi Rp55,54 miliar sejalan dengan kenaikan piutang sewa pembiayaan. Pendapatan administrasi juga mengalami kenaikan sebesar 39,94% dari Rp32,45 miliar menjadi Rp45,41 miliar karena pendapatan administrasi dari pembiayaan baru di tahun 2023.

Beban

Beban Perseroan berasal dari penyisihan kerugian penurunan nilai, bunga dan keuangan, kepegawaian, umum dan administrasi, dan beban lain-lain.

Per 31 Desember 2023, Perseroan mencatat total beban Rp340,11 miliar naik sebesar 22,47% dibandingkan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp277,72 miliar. Kenaikan total beban terutama disebabkan oleh beban bunga dan keuangan sebesar 77,63% menjadi Rp105,23 miliar dari Rp59,24 miliar terutama karena kenaikan tingkat bunga di tahun 2023.

Beban umum & administrasi dan beban kepegawaian juga mengalami kenaikan. Beban umum & administrasi naik sebesar 8,98% dan beban kepegawaian naik sebesar 8,97% masih sejalan dengan kenaikan piutang pembiayaan.

Revenues

The Company's revenues is derived from consumer financing, finance leases, administration, penalty, interest income and other revenues.

As of December 31, 2023, the Company recorded total revenue of Rp401.34 billion, an increase of 20.50% compared to the previous year as of December 31, 2022 of Rp333.06 billion. The increase in revenue was mainly due to increased of consumer financing revenues increase by 18.47% from Rp224.00 billion to Rp 265.37 billion inline with the increase in consumer financing receivables. In addition, finance lease revenues increase by 19.83% from Rp46.35 billion to Rp 55.54 billion inline with the increase in finance lease receivables. Administration income also increase by 39.94% from Rp32.45 billion to Rp45.41 billion due to administration income from new financing in 2023.

Expenses

The Company's expenses come from provision for impairment losses, interest and financing charge, personnel, general and administration, and other expense.

As of December 31, 2023, the Company recorded total expenses of Rp340.11 billion, an increase of 22.47% compared to December 31, 2022, which was Rp277.72 billion. The increase in total expenses was mainly due to increase of interest and financial charges, which rise 77.63% become Rp105.23 billion from Rp59.24 billion due to increasing interest rate in 2023.

General & administration expense and personnel expense also increased. General & administration expense increased by 8.98% and personnel expense increased by 8.97% is still inline with increase in financing receivables.

Arus Kas

Analisa arus kas untuk aktivitas operasi pada perusahaan pembiayaan berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya, yang mana nilai negatif atau penggunaan kas yang berlebihan terutama untuk pembiayaan baru menunjukkan kemampuan dari perusahaan pembiayaan tersebut dalam mendapatkan pembiayaan baru. Atau dengan kata lain, semakin besar penggunaan kas dari aktivitas operasi terutama pada pembiayaan baru mencerminkan pertumbuhan perusahaan tersebut semakin baik.

Cash Flows

Analysis of cash flows for operating activities in finance companies is different from other companies in general, where the negative value or excessive use of cash, especially for new financing shows the ability of the finance company to acquire new financing. In other words, the bigger the use of cash from operating activities, especially in new financing reflects better growth of the company.

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Arus Kas / Cash Flows	2022	2023	Perubahan / Changes
Arus kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi / Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities	(3.65)	(310.99)	8,420.27%
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi / Cash Flows Used in Investing Activities	(24.04)	(9.57)	(60.19%)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities	34.65	268.32	674.37%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	6.96	(52.24)	(850.57%)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	95.64	102.60	7.28%
Kas dan Setara Kas pada Akhir tahun / Cash and Cash Equivalents at End of the Year	102.60	50.36	(50.92%)

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp310,99 miliar naik 8.420,27% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3,65 miliar.

Kenaikan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp9,57 miliar turun 60,19% dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp24,04 miliar.

Penurunan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi terutama disebabkan penurunan perolehan aset tetap dan aset hak-guna.

Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities

Net cash flows have used in operating activities for the year ended December 31, 2023 was Rp310.99 billion, an increase of 8,420.27% compared to net cash flows used in operating activities for the year ended December 31, 2022 of Rp3.65 billion.

The increase in net cash flows used in operating activities was mainly due to the increased in cash paid in new consumer financing and finance lease.

Net Cash Flows Used in Investing Activities

Net cash flows used in investing activities for the year ended December 31, 2023 was Rp 9.57 billion, decrease of 60.19% compared to net cash flows used in investing activities for the year ended December 31, 2022 of Rp24.04 billion.

The decrease in net cash flows used in investing activities was mainly due to a decline in acquisition of fixed asset and right-of-use asset.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp268,32 miliar naik 674,37% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp34,65 miliar.

Peningkatan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama karena penerimaan utang bank lebih besar daripada pembayaran utang bank, sejalan dengan kenaikan piutang pembiayaan.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Ability to Pay Liabilities and Receivables Collectability

Perseroan selalu memantau proyeksi arus kas dan ketersediaan dana untuk melunasi utang jangka pendek dan jangka panjang. Selama tahun 2023, Perseroan tidak memiliki tunggakan pembayaran pokok, bunga, ataupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan utang bank. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai dan agunan yang diterima dari *customer* telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Rincian umur piutang pembiayaan tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities

Net cash flows provided by financing activities for the year ended December 31, 2023 was Rp268.32 billion, an increase of 674.37% compared to net cash flows used in financing activities for the year ended December 31, 2022 of Rp34.65 billion.

The increase in net cash flows provided by financing activities was mainly due to receipt from bank loans is bigger than payment of bank loans, in line with the increase in financing receivables.

The Company always monitors cash flow projections and the availability of funds to pay off short-term and long-term debt. During 2023, the Company did not have arrears in payment of principal, interest, or other violations relating to bank loans. Management believes that the allowance for impairment losses and collateral received from costumers are adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

The details of the aging of financing receivables in 2023 and 2022 were as follows:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Umur	2022		2023		Age
	Jumlah Amount	Persentase Percentage	Jumlah Amount	Persentase Percentage	
Belum Jatuh Tempo	2,588.87	99.01%	3,169.63	98.72%	Not yet due
1-30 Hari	1.34	0.05%	1.66	0.05%	1-30 Days
31-60 Hari	1.29	0.05%	1.60	0.05%	31-60 Days
61-90 Hari	0.80	0.03%	0.82	0.03%	61-90 Days
Lebih dari 90 Hari	20.06	0.77%	36.86	1.15%	Over 90 Days
Jumlah	2,612.36	100.00%	3,210.56	100.00%	Total

Rasio Keuangan Yang Relevan Lainnya

Perseroan secara konsisten menjalankan aktivitas bisnis pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan taat kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mampu memenuhi rasio-rasio keuangan yang diatur oleh regulator.

Perbandingan kinerja rasio keuangan utama Perseroan dibandingkan dengan kinerja industri pembiayaan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Other Relevant Financial Ratios

The Company consistently runs financing business activities in accordance with the principle of prudence and comply to the Financial Services Authority regulations and applicable laws. The Company is able to meet financial ratios set by the regulator.

The comparison of the performance of the Company's main financial ratios compared to the performance of the industry in 2023 is as follows:

Rasio / Ratio	Industri / Industry	Perseroan / The Company
Financing Asset Ratio (FAR)	85.16%	91.05%
Rasio Gearing / Gearing Ratio	2.26x	2.59x
Rasio Modal Sendiri – Modal Disetor (MSMD) / Paid-up Capital - Equity Ratio	315.04%	131.87%
NPF- Net	2.44%	0.19%
Return on Asset (ROA)	5.58%	2.33%
Return on Equity (ROE)	14.96%	8.47%
Beban Operasional – Pendapatan Operasional (BOPO) / Operational Efficiency Ratio	76.89%	85.38%

Struktur Modal Capital Structure

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tahun 2023 sebesar Rp568,74 miliar, tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.

The Company's issued and paid-up capital in 2023 amounted to Rp568.74 billion, did not increase compared to 2022.

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Keterangan / Information	2022	2023	Perubahan / Changes
Utang Bank / Bank Loans	1,661.38	1,939.81	16.76%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid	568.74	568.74	-
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	97.58	97.58	-
Komponen Ekuitas Lain / Other Equity Components	1.03	0.47	(54.37%)
Saldo Laba / Retained Earnings	22.55	83.70	271.18%

Kebijakan Struktur Modal Capital Structure Policy

Manajemen Perseroan merancang struktur modal yang optimal dalam proses perencanaan modal dan memantau kebutuhan permodalan secara rutin. Struktur modal yang optimal akan senantiasa dipertahankan untuk memastikan tingkat permodalan yang kuat dan pada saat bersamaan tetap menyediakan ruang yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

The Company's management designs an optimal capital structure in the capital planning process and regularly monitors capital requirements. The optimal capital structure will always be maintained to ensure a strong capital level while at the same time providing adequate space to support business growth.

Dalam mengelola struktur modal, Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, di antaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

In managing capital structure, the Company refers to the applicable Financial Services Authority Regulation, which regulates the following:

- Ekuitas minimum Rp200 miliar;
- Ekuitas minimum 50% dari jumlah modal disetor; dan
- Rasio *Gearing*, yaitu rasio seluruh pinjaman terhadap ekuitas dikurangi pinjaman subordinasi dan penyertaan sebesar maksimal 10 kali.

- Minimum equity of Rp200 billion;
- Minimum equity of 50% of the total paid-up capital; and
- Gearing Ratio, the ratio of all loans to equity minus subordinated loans and investments, a maximum of 10 times.

Perseroan telah memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana telah ditetapkan oleh regulasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

The Company has fulfilled the capital requirements as stipulated by the regulation, which are as follows:

Keterangan	2022	2023	Information
Ekuitas	Rp689.90 miliar / billion	Rp750.48 miliar / billion	Equity
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor	121.12%	131.87%	Equity Ratio to Paid-up Capital
Rasio <i>Gearing</i>	2.42x	2.59x	<i>Gearing ratio</i>

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments to Capital Goods Investment

Pada tahun 2023, Perseroan tidak mempunyai ikatan material terkait investasi barang modal.

In 2023, the Company has no material commitments related to capital goods investment.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Material Facts That Occured After The Date of The Accountant's Report

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak memiliki informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

As of the issuance date of this Annual Report, the Company has no material information and facts that occurred after the date of accountant's report.

Prospek Usaha Business Prospect

Ketegangan geopolitik berkepanjangan yang masih berlanjut hingga awal tahun 2024 berdampak pada pasar global. Harga minyak mentah diprediksikan akan terus meningkat secara moderat imbas dari ketegangan geopolitik ini. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan tercatat menjadi sebesar 3,10%. Lebih lanjut, menurut laporan Prospek Ekonomi Global (GEP) yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Januari 2024, ekonomi global diperkirakan akan mengalami perlambatan pada tahun 2024.

The geopolitical tensions that prolong to early 2024 has caused an impact on global markets. Crude oil prices are predicted to continue to increase moderately as a result of geopolitical tensions. International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth will be recorded at 3.10%. Moreover, according to the Global Economic Prospects (GEP) report published by the World Bank in January 2024, the global economy is expected to slowdown in 2024.

Selain tantangan global, berdasarkan proyeksi dari Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Indonesia menghadapi tantangan domestik khusus pada tahun 2024, di antaranya: 1) Pemilihan umum (Pemilu) presiden dan legislatif yang akan digelar pada tahun 2024; 2) Kenaikan harga pangan dan energi global; 3) Defisit anggaran pemerintah diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 yang disebabkan meningkatnya belanja pemerintah untuk persiapan pemilu dan pembangunan infrastruktur; 4) Rupiah diperkirakan berpotensi melemah terhadap dolar AS pada tahun.

Apart from global challenges, based on projections from the the Deputy for Economic Affairs, Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, Indonesia will face special domestic challenges in 2024, including: 1) General elections (Pemilu) of The presidential and legislative which will be held in 2024; 2) The increase in global food and energy prices; 3) The government budget deficit is expected to increase in 2024 due to increased government spending for election preparations and infrastructure development; 4) The Rupiah is predicted to have the potential to weaken against the US dollar in 2024.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut, pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan seperti: 1) Menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah dan menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil; 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan mendorong ekspor; 3) Melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak perlambatan ekonomi global dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi; dan 4) Melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, yang meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

To face these economic challenges, the government has and will continue to take policy steps such as: 1) Maintaining economic stability by keeping inflation low and keeping the rupiah exchange rate stable; 2) Encourage economic growth by increasing investment and encouraging exports; 3) Protect poor and vulnerable communities from the impact of the global economic slowdown by providing social aid and subsidies; and 4) Carrying out structural reforms to increase Indonesia's economic competitiveness, which includes simplifying regulations, improving the quality of infrastructure, and improving the quality of education and workforce skills.

IMF memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,00% pada tahun 2024, sementara proyeksi Bank Dunia sedikit lebih rendah sebesar 4,90%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan belanja pemerintah. Gubernur Bank Indonesia ("BI"), Perry Warjiyo, mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi non-bangunan tetap terjaga, meskipun perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Membaiknya permintaan domestik tercermin dari sejumlah indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Penjualan Riil dan *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur yang berada di zona optimistis. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia memproyeksikan peningkatan pendapatan rumah tangga didorong oleh kenaikan upah minimum dan bantuan sosial dari pemerintah sedangkan peningkatan kredit konsumsi didorong oleh suku bunga yang rendah dan kemudahan akses kredit. Belanja pemerintah diperkirakan akan meningkat sebesar 6,62% pada tahun 2024, didorong oleh persiapan pemilihan umum dan peningkatan belanja infrastruktur. Peningkatan belanja pemerintah akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut, OJK memperkirakan industri pembiayaan atau *multifinance* akan tetap mengalami pertumbuhan aset di tahun 2024.

Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis ditengah tantangan perekonomian global, Perseroan akan menjalankan strategi membangun portofolio pembiayaan Ritel dan Korporasi yang berkualitas berdasarkan prinsip kehati-hatian serta menciptakan produk baru dan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perseroan juga melakukan pengendalian rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional ("BOPO") dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan bisnis. Dari sisi pendanaan, Perseroan melakukan analisis *Asset Liability Management* dan mengoptimalkan sumber pendanaan dengan suku bunga kompetitif dengan terus memantau tren perkembangan suku bunga serta menjaga ketersediaan likuiditas dan pengelolaan arus kas yang memadai. Perseroan juga akan senantiasa memperkuat pengendalian internal dengan mengaplikasikan *Control Self Assessment* ("CSA") untuk memastikan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Perseroan juga akan senantiasa memperkuat *three lines of defense* berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG").

Direksi akan terus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap target-target yang telah disusun sebelumnya secara konservatif sehingga lebih dinamis, realistik dan adaptif agar dapat diterapkan dalam lingkungan ekonomi yang tidak stabil ini.

IMF estimates that the Indonesian economy will grow by 5.00% in 2024, while the World Bank's projection is slightly lower at 4.90%. Indonesia's economic growth will be supported by strong domestic consumption and government spending. The Governor of Central Bank of Republic Indonesia ("BI"), Perry Warjiyo, said that household consumption and non-building investment remained maintained, although they needed to continue to be encouraged to support the continued recovery of the national economy. The improvement in domestic demand is reflected in a number of indicators such as the Consumer Confidence Index (IKK), Real Sales Index and Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur which are in the optimistic zone. Deputy for Economic Affairs, Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia projected the increase in household income was driven by an increase in the minimum wage and social aid from the government, while the increase in consumer credit was driven by low interest rates and easy access to credit. Government spending is expected to increase by 6.62% in 2024, driven by general election preparations and increased infrastructure spending. Increasing government spending will support Indonesia's economic growth by creating jobs and increasing demand for goods and services. In line with Indonesia's economic growth, OJK projects that the multifinance industry will continue to experience asset growth in 2024.

As an effort to increase business growth amidst global economic challenges, the Company will implement a strategy to build a quality Retail and Corporate financing portfolio based on the principle of prudence as well as creating new products and marketing strategies that suit consumer needs. The Company also controls the ratio of Operating Expenses to Operating Income ("BOPO") in order to optimize business growth. From the funding side, the Company carries out Asset Liability Management analysis and optimizes funding sources with competitive interest rates in facing the potential increase by always monitoring the interest rate development trend as well as maintaining adequate liquidity and cash flow management. The Company will also always strengthen internal control by implementing Control Self Assessment ("CSA") to ensure segregation of duties. The Company will also continue to enhance three lines of defense based on the principles of Good Corporate Governance ("GCG").

The Board of Directors will continue to make adjustments to the previously set targets in a conservative manner so that they are more dynamic, realistic and adaptive so that they can be implemented in this unstable economic environment.

Unit Bisnis Korporasi & Unit Bisnis Ritel Corporate Business Unit & Retail Business Unit

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting, baik untuk memperluas kegiatan usaha maupun untuk mempertahankan pangsa pasar dalam industri pembiayaan. Langkah-langkah pemasaran yang dilakukan Perseroan diklasifikasikan berdasarkan 2 (dua) pilar bisnis yaitu Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi.

Marketing activities play an important role, both to expand business activities and to maintain market share in the financing industry. The marketing steps taken by the Company are classified based on 2 (two) business pillars, namely the Retail Business Unit and the Corporate Business Unit.

Unit Bisnis Korporasi

Langkah dan strategi Unit Bisnis Korporasi pada tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan domestik, peraturan pemerintah, dan sektor industri yang konsisten melakukan pengembangan usaha. Ada beberapa strategi umum yang dipertimbangkan oleh Unit Bisnis Korporasi:

1. **Diversifikasi Portofolio:** Perusahaan dapat mengurangi risiko dengan mendiversifikasi portofolio mereka. Ini dapat dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan seperti sewa guna usaha (*leasing*) baik secara pembiayaan langsung (*direct lease*) atau pembiayaan *sale and lease back*, pembiayaan pembelian secara angsuran dan pembiayaan modal usaha.
2. **Analisis Risiko yang Lebih Baik:** Melakukan analisa data keuangan dari pelanggan korporasi yang lebih baik sehingga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi risiko dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih informasional dalam memberikan pinjaman.
3. **Fokus pada Layanan Pelanggan:** Memperkuat hubungan dengan pelanggan dan memberikan layanan yang unggul dapat membantu perusahaan pembiayaan mempertahankan basis pelanggan yang loyal dan meningkatkan retensi pelanggan. Ini termasuk menyediakan layanan pelanggan yang responsif, proses aplikasi yang mudah, dan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
4. **Fleksibilitas dan Responsivitas:** Di tengah perubahan cepat dalam kondisi ekonomi dan pasar, penting bagi Unit Bisnis Korporasi untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Ini mungkin melibatkan penyesuaian cepat terhadap strategi bisnis, kebijakan pinjaman, atau produk dan layanan yang ditawarkan.
5. **Kemitraan Strategis:** Membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan lainnya, menjalin kerjasama dengan berbagai penyedia (*supplier*) untuk peralatan berat, peralatan informasi teknologi, dan penyedia mesin-mesin, atau bahkan dengan bisnis-bisnis di sektor lain dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi.
6. **Peningkatan Kepatuhan Regulasi:** Perusahaan perlu memastikan bahwa dalam pelaksanaan operasional selalu mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku. Ini termasuk peraturan terkait privasi data, perlindungan konsumen, dan peraturan yang berkaitan dengan produk pembiayaan.

Unit Bisnis Ritel

Langkah pemasaran untuk segmen Unit Bisnis Ritel adalah dengan terus meningkatkan jalinan kerja sama dengan dealer, mitra strategis pembiayaan, dan pembukaan jaringan cabang baru.

Langkah pemasaran lainnya adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen dengan berbagai metode peningkatan pelayanan yang bertujuan agar konsumen merasakan banyak keuntungan dan kemudahan yang dapat diperoleh melalui pembiayaan di Perseroan.

Adapun strategi pemasaran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Corporate Business Unit

The steps and strategies of Corporate Business Unit in 2023 are greatly influenced by global and domestic economic conditions, government regulations, and the industrial sector which consistently carries out business development. There are several general strategies considered by Corporate Business Units:

1. **Portfolio Diversification:** Corporate business units can reduce their risk by diversifying their portfolios. This can be done by offering various types of financing products such as leasing, both direct financing and sale and leaseback financing, installment purchase financing, and business capital financing.
2. **A Better Risk Analysis:** Conducting a more thorough financial data analysis of corporate clients to help the company better identify risks and make more informed decisions when providing loans.
3. **Customer Service Focus:** Strengthening relationships with customers and delivering excellent service can help financing companies maintain a loyal customer base and enhance customer retention. This includes providing responsive customer service, easy application processes, and financing solutions tailored to customer needs.
4. **Flexibility and Responsiveness:** Amid rapid changes in economic conditions and markets, it's crucial for Corporate Business Units to remain flexible and responsive to change. This may involve quickly adjusting business strategies, loan policies, or the products and services offered.
5. **Strategic Partnerships:** Building strategic partnerships with other financial institutions, collaborating with various suppliers for heavy equipment, information technology, and machinery, or even with businesses in other sectors can open up new opportunities for growth and innovation.
6. **Regulatory Compliance Enhancement:** Companies need to ensure that in their operational execution, they consistently adhere to all applicable rules and regulations. This encompasses regulations concerning data privacy, consumer protection, and those related to financing products.

Retail Business Unit

The marketing step for the Retail Business Unit segment is to continue to improve cooperation with dealers, strategic financing partners, and open new branch networks.

Another marketing step is to establish good relations with consumers with various methods of service improvement aimed at making consumers feel the many advantages and conveniences that can be obtained through financing at the Company.

The marketing strategies undertaken are as follows:

1. Fokus Kepada Portofolio Dengan Tingkat Pengembalian yang Wajar Sesuai Dengan Tingkat Risiko yang Ditentukan.

Perseroan memfokuskan aktivitas pembiayaannya pada aset yang memiliki tingkat pengembalian yang wajar sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditentukan oleh Perseroan, namun dengan tetap memperhatikan kualitas dari aset tersebut.

2. Komitmen untuk Produktifitas dan Efisiensi

Penyempurnaan sistem dan prosedur secara terus menerus untuk meningkatkan produktifitas, mendukung aktivitas keuangan dan meningkatkan efisiensi.

3. Hubungan yang Kuat dan Erat

Perseroan sangat menyadari bahwa hubungan yang kuat dan erat dengan konsumen dan rekan usaha merupakan salah satu kunci kesuksesan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menjaga hubungan baik serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan baik bagi konsumen maupun rekan usaha.

4. Perluasan Layanan Usaha

Dalam upaya untuk menjangkau dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan rekan usaha, Perseroan terus mengembangkan layanan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan konsumen dan rekan usaha.

5. Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia

Perseroan sangat memahami bahwa teknologi informasi dan sumber daya manusia memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa berupaya untuk mengembangkan teknologi informasi dan sumber daya manusianya secara berkesinambungan.

6. Pengembangan Pemasaran Digital

Dalam upaya meningkatkan kegiatan pemasaran yang lebih efektif dan efisien, Perusahaan mempersiapkan langkah menuju pemasaran digital, baik secara langsung untuk pembiayaan konsumen maupun berkolaborasi dengan beberapa *marketplace* yang ada di Indonesia.

1. Focus on Portfolios with Reasonable Returns in Accordance with Specified Risk Levels.

The Company focuses its financing activities on assets that have a reasonable rate of return in accordance with the risk levels determined by the Company, while still paying attention to the quality of these assets.

2. Commitment to Productivity and Efficiency

Continuous improvement of systems and procedures to increase productivity, support financial activities and improve efficiency.

3. Strong and Tight Relationships

The Company is very aware that a strong and close relationship with consumers and business partners is one of the keys to the success of the Company. Therefore, the Company always strives to maintain good relations and increase the trust and satisfaction of both consumers and business partners.

4. Business Service Expansion

In an effort to reach and provide the best service for consumers and business partners, the Company continues to develop its business services in order to meet the financial needs of consumers and business partners.

5. Development of Information Technology and Human Resources

The Company fully understands that information technology and human resources play an important role in supporting the growth of the Company. Therefore, the Company always strives to develop its information technology and human resources on an ongoing basis.

6. Digital Marketing Development

In an effort to improve marketing activities that are more effective and efficient, the Company is preparing steps towards digital marketing, both directly for consumer financing and in collaboration with several marketplaces in Indonesia.

Pangsa pasar Perseroan terhadap industri pembiayaan secara nasional selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

The Company's market share in the national financing industry for the last 3 (three) years is as follows:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Keterangan	2021	2022	2023	Information
Total Aset				
Industri Pembiayaan (triliun)	Rp433.11	Rp487.92	Rp552.89	Financing Industry (trillion)
Perseroan (triliun)	Rp2.32	Rp2.47	Rp2.79	The Company (trillion)
Pangsa Pasar*	0.54%	0.51%	0.50%	Market Share
Total Piutang Pembiayaan - Bersih				
Industri Pembiayaan (triliun)	Rp350.56	Rp397.12	Rp470.86	Financing Industry (trillion)
Perseroan (triliun)	Rp2.03	Rp2.11	Rp2.54	The Company (trillion)
Pangsa Pasar*	0.58%	0.53%	0.54%	Market Share*

* Sumber: Statistik Lembaga Pembiayaan periode Desember 2023 dan diolah oleh Perseroan (Tanpa jenis Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah)

* Source: Multifinance Statistic for December 2023 and prepared by the Company (Excluding Sharia Financing)

Target dan Realisasi Tahun Buku

Targeted and Realization for the Fiscal Year

Di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik, risiko inflasi, dan perubahan iklim, ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tumbuh 5,05%, lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31%. Industri pembiayaan juga tumbuh lebih rendah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Seperti halnya industri pembiayaan, pertumbuhan Perseroan tidak sesuai dengan yang diproyeksikan sebelumnya. Pencapaian target dan proyeksi kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

Amid global economic slowdown, rising geopolitical tension, inflation risk, and climate change, Indonesia's economy in 2023 grew by 5.05%, lower than the achievement in 2022, which grew by 5.31%. The financing industry also grew at a lower rate in 2023 compared to 2022. Like the financing industry, the Company's growth did not match what was previously projected. Target achievement and projections of the Company's performance are as follows:

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan	Target 2023	Realisasi 2023 2023 Realization	Information
Piutang Pembiayaan - Bersih	2,576.71	2,543,44	Financing Receivables - Net
Total Aset	3,144.55	2,793.58	Total Assets
Total Liabilitas	2,378.53	2,043.10	Total Liabilities
Pendapatan	394,01	401,34	Revenues
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	75.92	60.59	Total Comprehensive Income for The Year
Modal Ditempatkan & Disetor	568.74	568.74	Paid-up Capital
Tambahan Modal Disetor	97.58	97.58	Additional Paid-up Capital
Total Ekuitas	766.01	750.48	Total Equity

Target 2024

Manajemen Perseroan telah menyusun rencana untuk tahun 2024 dengan mempertimbangkan perkembangan industri otomotif, kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian baik dari segi makro maupun mikro.

2024 Targets

The Company's management has drawn up a plan for 2024 by considering the development of the automotive industry, current economic conditions and economic projections both in macro and micro terms.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan	Target 2024	Information
Piutang Pembiayaan - Bersih	3,127.98	Financing Receivables - Net
Total Aset	3,463.05	Total Assets
Total Liabilitas	2,698.04	Total Liabilities
Pendapatan	496.89	Revenues
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	14.51	Total Comprehensive Income for The Year
Modal Ditempatkan & Disetor	568.74	Paid-up Capital
Tambahan Modal Disetor	97.58	Additional Paid-up Capital
Total Ekuitas	765.01	Total Equity

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir

Capital Goods Investment Realized at the End of Fiscal Year

Investasi barang modal yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2023 dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional. Investasi barang modal tersebut berupa bangunan, prasarana, kendaraan, peralatan, perabotan kantor, dan komputer. Adapun nilainya mencapai sebesar Rp10,46 miliar.

Capital goods investments made by the Company throughout 2023 were carried out to support operational activities. The investment in capital goods is in the form of buildings, infrastructure, vehicles, equipment, office furniture, and computers. The value reached Rp10.46 billion.

Dividen Dividend

Memperhatikan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha maka Perseroan tidak membagikan dividen selama 2 tahun terakhir. Hal ini telah disetujui masing-masing dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 29 Juli 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2023.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan dividen kas atas laba bersih Perseroan mulai tahun buku 2018 setelah ketentuan-ketentuan diatas terpenuhi yaitu minimal 20% dari Laba Bersih setelah pajak.

In regard to funding requirements needed for investment and working capital in the context of business development, the Company has not distributed dividends for the past 2 years. This was approved at the Annual General Meetings of Shareholders on 29 July 2022, and the Annual General Meetings of Shareholders on 23 June 2023.

The Company has a policy to pay dividends in cash to all Shareholders of the Company at least once in 1 (one) year. By taking into account the profit and / or financial condition of the Company in the relevant fiscal year and by taking into account the funding requirements that will be needed for investment in the context of business development as long as it does not conflict with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, without prejudice to the right of the Company's GMS to determine others in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. The Company has a cash dividend policy on the Company's net income starting in the fiscal year 2018 after the provisions of the above conditions are met, namely at least 20% of net profit after tax.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of The Use of Funds from Public Offering

Pada tahun 2023, Perseroan tidak melakukan penawaran umum dan sudah tidak ada kewajiban penyampaian realisasi penggunaan dana.

In 2023, the Company does not do a public offering and there is no obligation to submit the realization of the use of funds.

Informasi Material Lainnya Other Material Information

Informasi material terkait transaksi afiliasi sepanjang tahun 2023 telah dipaparkan di dalam Laporan Keuangan 31 Desember 2023 (Audited) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Material information related to affiliated transactions throughout 2023 had been presented in the Financial Statements of 31 December, 2023 (Audited) which was an integral part of this Annual Report.

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat informasi material lainnya terkait dengan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Throughout 2023, there was no other material information related to investments, expansions, divestments, business mergers/consolidations, acquisitions, debt/capital restructuring, and transactions containing conflicts of interest.

Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Changes to Laws and Regulation with Significant Effects

Sepanjang tahun 2023, tidak ada perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

Throughout 2023, there was no change of regulation with significant effects toward the financial report.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; dan

Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan perusahaan, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 73 (amendemen) Sewa: Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- PSAK 2 (amendemen) Laporan arus kas dan PSAK 60 (amendemen) Instrumen Keuangan: Pengungkapan: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 10 (amendemen) Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing : Kekurangan Ketertukaran

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK - IAI”).

In the current year, the Company has applied a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2023.

- Amendment to PSAK 1 “Presentation of Financial Statement” related to Liabilities Classification as Short or Long-term and Disclosure of Accounting Policies;
- Amendment to PSAK 25 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” related to Definition of Accounting Estimates;
- Amendment of PSAK 46 “Income Tax” on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and;

The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Company’s accounting policies and has no material effect on the amounts reported in these financial statements.

At the date of authorization of these company financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted, as follows:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2024

- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current
- PSAK 73 (amendment) Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback
- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Non-current Liabilities with Covenants
- PSAK 2 (amendment) Statement of cash flows and PSAK 60 (amendment) Financial Instruments: Disclosures: Supplier Finance Arrangements

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 10 (amendment) The effects of changes in foreign exchange rates: Lack of Exchangeability

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs will be changed as published by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (“DSAK - IAI”).

TATA KELOLA

CORPORATE GOVERNANCE

MIZUHO



Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) **General Meeting of Shareholders (“GMS”)**

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menguraikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Peraturan mengenai RUPS juga terdapat di dalam UUPT Bab VI mengenai RUPS Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.

Pemegang Saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan berkaitan tentang Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang keterangan yang diminta tersebut berhubungan dengan mata acara rapat dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Mata acara rapat lain-lain tidak berhak disetujui oleh RUPS, kecuali semua pemegang saham yang hadir atau wakilnya menyetujui adanya penambahan mata acara rapat.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2023 **The Implementation of 2023 GMS**

Pada tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS. Pelaksanaan RUPS tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **(“RUPS Tahunan”)**

RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2023 diselenggarakan di Catur Dharma 1, Menara Astra, Lantai 5 – Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 pada pukul 14.07 – 15.04 WIB. RUPST telah memenuhi korum karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 5.261.269.715 saham atau 92,50821590% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Hasil RUPST tanggal 23 Juni 2023, pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member firm* of Deloitte Asia Pacific dan Jaringan Deloitte) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00049/2.1265/AU.1/09/1626-1/1/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 dengan “pendapat Wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung

Article 1 point 4 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies (“UUPT”) describes the General Meeting of Shareholders (GMS) as a Company Organ that has authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in this Law and/or the Articles of Association. Regulations regarding the GMS are also contained in the UUPT Chapter VI regarding GMS Article 75 through Article 91.

Shareholders have the right to obtain information related to the Company from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as long as the information requested is related to the agenda meeting in the GMS and does not conflict with the interests of the Company. Other meeting agenda items are not entitled to be approved by the GMS, unless all shareholders present or their representatives agree to the addition of meeting agenda.

In 2023, the Company held 1 (one) GMS. The details of 2023 GMS are as follows:

Annual General Meeting of Shareholders **(“Annual GMS”)**

The Annual GMS on 23 June 2023 was held at Catur Dharma 1, Menara Astra, Floor 5 – Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 at 14.07 – 15.04 WIB. The AGMS met the quorum because it was attended by Shareholders representing 5,261,269,715 shares or 92.50821590% of all shares with valid voting rights that had been issued by the Company.

The results of the AGMS on 23 June 2023, basically approved to the following matters:

First Meeting Agenda:

1. Well receive and approve the Company’s Annual Report for the fiscal year of 2022, including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company;
2. Approve the ratification of the Financial Report for the fiscal year of 2022 which was audited by Public Accountant Bayu M Dayat and Public Accountant Firm Imelda & Partners (member firm of Deloitte Asia Pacific and Deloitte Global Network) as contained in its report No.: 00049/2.1265/AU.1/09/1626-1/1/III/2023 dated 14 March 2023 with “opinion of present fairly in all material respects”, thus releasing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of responsibility and any dependents

jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2022, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp62.045.787.545,- (enam puluh dua miliar empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah) digunakan untuk:

1. sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
2. sisanya sebesar Rp61.745.787.545,- (enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian untuk tahun buku 2022 Perseroan tidak membagikan dividen.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (*member firm* of Deloitte Asia Pacific dan Jaringan Deloitte Global), masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu Mizuho Leasing

(*acquit et de charge*) for the actions of management and supervision taken during the fiscal year of 2022, as long as all of their actions were reflected in the Financial Report for the fiscal year of 2022 except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

Second Meeting Agenda:

To determine the use of the Company's net profit for the Fiscal Year of 2022 amounted to Rp62,045,787,545.- (sixty two billion forty-five million seven hundred eighty-seven thousand five hundred forty-five Rupiah) for:

1. The amount of Rp300,000,000.- (three hundred million Rupiah) determined as a reserve, in accordance with the provisions of Article 23 of the Articles of Association of the Company and Article 70 of the the Law Number: 40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies ("UUPT");
2. The remaining amount of Rp61,745,787,545.- (sixty one billion seven hundred forty-five million seven hundred eighty-seven thousand five hundred forty-five Rupiah) determined as retained earnings.

Thus, for the fiscal year of 2022 the Company does not distribute dividend.

Third Meeting Agenda:

1. Approve to appoint Public Accountant Bayu M Dayat and Public Accountant Firm Imelda & Partners (*member firm* of Deloitte Asia Pacific and Deloitte Global Network), respectively as the Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Financial Report of the Company for the fiscal year of 2023.
2. Approve to provide proxy and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements, with respect to the appointment of the pertinent Public Accountant and Public Accountant Firm.
3. Approve to authorize the Board of Commissioners to appoint other Public Accountant and Public Accountant Firm in the event of the appointed Public Accountant and Public Accountant Firm for any reason unable to perform their duties, provided that in appointing the Public Accountant and the Public Accounting Firm, the Board of Commissioners must observe the Recommendations from the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated in POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Fourth Meeting Agenda:

1. Approve to authorize the Controlling Shareholders of the Company, namely Mizuho Leasing Company Limited with

Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 67,44% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :

- Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau Masyarakat melalui penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Rapat ini, merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas, untuk tahun buku 2023.
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.

a stake of 67.44% of all shares issued by the Company, to determine the amount of honorarium, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year of 2023 with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee.

- Approve to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Directors for the fiscal year of 2023 with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee.

Fifth Meeting Agenda:

- Approve to pledge more than 50% (fifty percent) or all of the net assets of the Company in order to obtain a loan facility that will be received by the Company from a bank, a venture capital company, a finance company, or an infrastructure financing company both domestically or overseas or Public through the issuance of securities other than equity type securities through a public offering on loans received directly by the Company or Controlled Company. With regard to the terms and condition of the prevailing laws and regulations, especially Capital Market regulations. The guarantee for the Company's assets as referred to in this Meeting Agenda, is an exception to Material Transactions as specified in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and are not Affiliated Transactions or Conflict of Interest Transactions in Certain Transactions as stipulated in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
- Granting of the approval as referred to in number 1 above, for the fiscal year of 2023.
- Approve to authorize the Board of Directors to carry out any and all actions needed in connection with the said action in number 1 above, with regard to the approval of the Company's Board of Commissioners, with regard to the terms and conditions of the Capital Market provisions and the prevailing laws and regulations, especially the Capital Market Regulations.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2022 The Implementation of 2022 GMS

Pada tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan 1 kali RUPST. Seluruh keputusan pada RUPS tahun 2022 telah direalisasikan.

In 2022, the Company organized 1 AGMS. All decisions taken at the 2022 GMS were realized.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan badan Perseroan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan baik secara khusus maupun umum sesuai dengan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris juga berwenang memberi nasihat kepada Direksi dalam segala hal terkait pengelolaan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk dan diberhentikan melalui RUPS. Masa jabatan setiap anggota Dewan Komisaris berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatannya.

The Board of Commissioners is a body of the Company that has the duty and authority to supervise both specifically and generally in accordance with the Articles of Association, the Board of Commissioners is also authorized to advise the Board of Directors in all matters related to the management of the Company. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed through the GMS. The term of office of each member of the Board of Commissioners ends at the closing of the third Annual GMS after the date of appointment by taking into account the Capital Market regulation, without prejudice to the right of the GMS to dismiss any member of the Board of Commissioners at any time before the end of his/her term of office.

Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan & Kepatutan Fit & Proper Test
Yasuo Imaizumi	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 48/PL.02/2024 7 Feb 2024
Mohammad Syahril	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-358/NB.11/2019 27 Jun 2019
Bhindawati Gunawan*	Komisaris Commissioner	
Takeshi Sasaki**	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-189/NB.11/2021 31 Mar 2021
Roosniati Salihin***	Komisaris Commissioner	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-718/NB.11/2022 11 Nov 2022

*) Bahwa pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) That the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner of the Company is effective as of the receipt of approval from the OJK for the fit and proper test and in compliance with applicable laws regulations.

**) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.

**) Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") on March 21 2024, the GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as President Commissioner effective from the closing of the Extraordinary GMS.

***) Pada tanggal 5 November 2023, Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris Perseroan telah meninggal dunia. Maka sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat 18 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir.

***) On November 5, 2023, Mrs. Roosniati Salihin, as a Commissioner of the Company, passed away. Therefore, in accordance with Article 18 Paragraph 18 letter a of the Company's Articles of Association, the term of office of the Board of Commissioners automatically ended.

Pedoman Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman yang dikaji ulang secara periodik atau dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Dasar penyusunan Pedoman Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Board of Commissioners Charter

The Board of Commissioners has Charter which will be reviewed periodically or updated in accordance with the applicable laws and regulations. That Charter is binding for each members of the Board of Commissioners.

The basis for the preparation of the Board of Commissioners Charter are as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Company;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Juncto Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
3. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, dengan susunan 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang merupakan Komisaris Independen.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang maka jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain, dan
 - anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
9. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada Nomor (8) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan

2. Financial Services Authority (“OJK”) Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company Juncto OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation Number 30/POJK.05/ 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company;
3. OJK Circular Letter Number 15/SEOJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation Report for Financing Company;
4. OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and
5. The Company’s Articles of Association.

Structure and Membership of the Board of Commissioners

1. The number of Commissioners shall be at least 2 (two) persons, the composition of 1 (one) President Commissioner and 1 (one) Independent Commissioner.
2. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) people the number of Independent Commissioners shall be at least 30% (thirty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners.
3. At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must reside in the territory of the Republic of Indonesia.
4. Any proposal for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must consider the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.
5. Each member of the Board of Commissioners must meet the mandatory requirements to pass a fit and proper assessment in accordance with OJK Regulations regarding fit and proper assessment.
6. Members of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as:
 - as a member of the Board of Directors at most 2 (two) other Issuers or Public Companies, and
 - as a member of the Board of Commissioners at most 2 (two) other Issuers or Public Companies.
7. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent position as a member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners concerned may concurrently serve as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 3 (three) other Companies.
8. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as committee members in no more than 5 (five) committees in the Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.
9. Concurrent positions as a member of the committee as referred to in Number 8 can only be carried out as long as they do not conflict with other laws and regulations.
10. Members of the Board of Commissioners are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed the members of the Board of Commissioners at the end of 1 (one) term of office as

ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

11. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - Meninggal dunia;
 - Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
4. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
5. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
6. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
9. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

referred to provisions 1 (one) term of office for a member of the Board of Commissioners is 3 (three) years, taking into account the laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Commissioners at any time before his term of office ends, taking into account the applicable laws and regulations and the provisions of the Company's Articles of Association.

11. After their term of office end, the member of the Board of Commissioners may be re- appointed in accordance with a resolution of the GMS.
12. The term of office of a member of the Board of Commissioners automatically ends, if the member of the Board of Commissioners:
 - Pass away;
 - Be placed under interdiction based on a court decision; or
 - No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the Capital Market.

Duties, Responsibility and Authorities of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners is in charge of supervising and is responsible for supervising management policies and providing advice to the Board of Directors.
2. Under certain conditions, the Board of Commissioners is required to hold an annual GMS and other GMS in accordance with their authority as stipulated in laws and regulations and the Articles of Association.
3. Supervise the Board of Directors in maintaining a balance of the interests of all parties.
4. Prepare reports on the activities of the Board of Commissioners which are part of the report on the implementation of Good Corporate Governance.
5. Monitor the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance.
6. Members of the Board of Commissioners must carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility, and prudence.
7. In order to support the effectiveness of carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish:
 - Audit Committee
 - Risk Monitoring Committee
 - Remuneration and Nomination Committee
8. The Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the committees that assist in carrying out their duties and responsibilities at the end of each financial year.
9. The Board of Commissioners together with the Board of Directors must prepare:
 - guidelines that bind each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
 - code of ethic that applicable for all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, employees/worker, as well as supporting organs owned by the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

10. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
 11. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka (10), apabila dapat membuktikan:
 - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 12. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 13. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
 14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
 15. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan berlaku pula baginya.
 16. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:
 - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
10. Each member of the Board of Commissioners is fully and jointly responsible for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.
 11. Members of the Board of Commissioners cannot be held accountable for the Company's losses as referred to in point (10), if they can prove:
 - the loss was not due to his fault or negligence;
 - has conducted management in good faith, full of responsibility and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company;
 - has no conflict of interest, either directly or indirectly, for management actions that result in losses; and
 - has taken action to prevent the loss from arising or continuing.
 12. The Board of Commissioners at any time during office hours of the Company has the right to enter building and yards or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence, examine and match the condition of cash and others and has the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.
 13. The Board of Commissioners are entitled to request an explanation from the Board of Directors regarding all matters that are asked and each member of the Board of Directors is obliged to provide an explanation regarding all matters that are asked by the Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners are entitled to obtain information from the Board of Directors regarding the Company in a complete and timely manner.
 14. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or if for any reason the Company does not have a single member of the Board of Directors, the Board of Commissioners are temporarily obliged to manage the Company. In such case the Board of Commissioners are entitled to grant temporary powers to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.
 15. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in the Company's Articles of Association shall also apply to him.
 16. At any time the Board of Commissioners based on a decision of the Board of Commissioners Meeting may temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from his position (their position) by stating the reasons, taking into account the provisions of The Company's Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations.
 17. The Independent Commissioner is required to report to OJK no later than 10 (ten) calendar days after the discovery of:
 - violation of laws and regulations in the field of financing; and/or
 - circumstances or estimates of conditions that may endanger the continuity of the Company's business.

Transparansi

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

1. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/ atau pemegang saham Perseroan.
3. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perseroan.
4. Jabatan mereka di perusahaan lain.

Nilai-Nilai

1. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib mempunyai akhlak dan moral yang baik, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan di nyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Persyaratan Komisaris Independen

Sesuai dengan yang diatur pada Peraturan OJK No.30/POJK.05/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan juncto Peraturan OJK No.29/POJK.05/2020 Tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.30/POJK.05/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, diatur bahwa Komisaris Independen wajib memiliki persyaratan, sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.

Transparency

Members of the Board of Commissioners are required to disclose:

1. Its share ownership which reaches 5% (five percent) both in the Company and in other companies, which domiciled inside and outside the country.
2. Financial and family relationship with other members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company.
3. Remuneration and facilities received from the Company.
4. Their positions in other companies.

Values

1. Members of the Board of Commissioners must have high integrity, ability, knowledge, experience according to their field of work and be able to communicate well.
2. Members of the Board of Commissioners must have good characters and morals, are able to carry out legal actions, have never been declared bankrupt or become members of the Board of Directors or Board of Commissioners who are found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment and have never been punished for commit a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment.
3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Commissioners serves.
4. Members of the Board of Commissioners are prohibited from using their positions in the Company where the said member of the Board of Commissioners serve for personal, family, and/or other party' interests that may harm or reduce the profits of the Company where the said member of the Board of Commissioners serve.
5. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.
6. Members of the Board of Commissioners are prohibited from interfering with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors.

Independent Commissioner Requirements

As is stipulated in the OJK Regulation No.30/POJK.05/2014 dated November 19, 2014 regarding Good Corporate Governance for Financing Companies juncto OJK Regulation No.29/POJK.05/2020 dated April 29, 2020 regarding Amendments to OJK Regulation No.30/POJK.05/2014 dated November 19, 2014 regarding Good Corporate Governance for Financing Companies, it is regulated that Independent Commissioners must have the following requirements:

1. is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perseroan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
3. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
4. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Perseroan.
5. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
7. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.
8. memiliki kewarganegaraan Indonesia.
9. berdomisili di Indonesia.
10. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Fungsi dan Tugas Pokok Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki fungsi dan tugas, sebagai berikut:

1. Menjabat sebagai Ketua Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarkan kepentingan debitor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

Kebijakan tentang Penilaian terhadap Kinerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja
 - a. **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
Prosedur penilaian dilakukan dengan penilaian mandiri oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b. **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi**
Proses penilaian Direksi dilakukan secara kolektif dan individual dengan mempertimbangkan beberapa indikator dan kriteria penilaian *Key Performance Indicators* ("KPI") yang disepakati oleh anggota Direksi Perseroan. Sistem penilaian dilakukan

2. has never served as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board (DPS) or held a position 1 (one) level below the Board of Directors in another company affiliated with the Company within the last 6 (six) month.
3. does not own shares either directly or indirectly of the Company.
4. does not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the shareholder of the Company.
5. does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.
6. understand the laws and regulations in the financing field and other relevant laws and regulations.
7. have sufficient knowledge of the financial condition of the Company where the said Independent Commissioner serves.
8. have Indonesian citizenship.
9. domiciled in Indonesia.
10. In the event that an Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the relevant Independent Commissioner can only be reappointed to the Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Committee.

Independent Commissioners Functions and Duties

The Independent Commissioner has the following functions and duties:

1. Serves as Chair of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee.
2. Perform supervisory functions to voice the interests of debtors, creditors, and other stakeholders.
3. Independent Commissioners must report to OJK no later than 10 (ten) calendar days from the discovery of violations of laws and regulations in the field of financing and/or circumstances or estimates of circumstances that may jeopardize the Company's business continuity.

Performance Assessment of the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners

1. Performance Appraisal Implementation Procedure
 - a. **Procedures for the Implementation of the Board of Commissioners Performance Assessment**
The assessment procedure is carried out by using self-assessment method by the Board of Commissioners with due observance of recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
 - b. **Procedures for the Implementation of the Board of Directors Performance Assessment**
The Board of Directors assessment process is carried out collectively and individually by taking into account several indicators and assessment criteria for Key Performance Indicators ("KPI") agreed upon by members of the Company's Board of Directors.

bersama seluruh anggota Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Kriteria yang digunakan

a. Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

- Kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Komite;
- Kehadiran dalam rapat Komite; dan
- Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

b. Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

- Pelaksanaan dari Visi dan Misi Perseroan;
- Terlaksananya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan;
- Terlaksananya pencapaian Rencana Bisnis Tahunan ("RBT"); dan
- Terlaksananya pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi audit internal, auditor eksternal atau pengawasan OJK.

3. Pihak yang melakukan penilaian Dewan Komisaris

- Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Direksi

- Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Direksi adalah Direksi, Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.

The assessment system is carried out with all members of the Board of Directors to be submitted to the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

2. Criteria used

a. Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

Assessment of the performance of the Board of Commissioners includes the following matters:

- Attendance at internal Board of Commissioners meetings;
- Attendance at Board of Commissioners meetings with the Board of Directors;
- Attendance at Board of Commissioners meetings with Committees;
- Attendance at Committee meetings; and
- Implementation of the principles of Good Corporate Governance.

b. Board of Directors Performance Assessment Criteria

Assessment of the performance of the Board of Directors includes the following matters:

- Implementation of the Company's Vision and Mission;
- Implementation of Good Corporate Governance in every business activity of the Company;
- Achievement of the Annual Business Plan ("RBT"); and
- Implementation of supervision on the follow-up of internal audit recommendations, external auditors or supervision of the OJK.

3. The party conducting the assessment Board of Commissioners

- The parties involved in evaluating the performance of the Board of Commissioners are the Board of Commissioners with due observance of recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

Board of Directors

- The parties involved in evaluating the performance of the Board of Directors are the Board of Directors, the Board of Commissioners with due observance of recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

Board of Commissioners Meetings

- Meetings of the Board of Commissioners can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or at a written request from the Board of Directors or at the request of 1 (one) or more Shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the total all shares that have been issued by the Company with valid voting rights.
- Meetings of the Board of Commissioners are held regularly at least 1 (one) time in 2 (two) months.
- Members of the Board of Commissioners must attend at least 75% (seventy five percent) of the Board of Commissioners' meetings in a period of 1 (one) year.

- d. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b) dan butir (c) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- e. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- f. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b), butir (c) dan butir (e) wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- g. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan butir (e) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- h. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir (g) bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- i. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir (g), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- j. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
- k. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
- l. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- m. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perusahaan dicatatkan, atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- n. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
- o. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
- d. The Board of Commissioners meeting referred to in point (a), point (b) and point (c) can be held if it is attended by a majority of all members of the Board of Commissioners.
- e. The Board of Commissioners must hold regular meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months.
- f. The presence of members of the Board of Commissioners at the meetings referred to in points (a), points (b), points (c) and points (e) must be disclosed in the Company's Annual Report.
- g. The Board of Commissioners must schedule the meeting referred to in point (b) and point (e) for the following year before the end of the financial year.
- h. At the scheduled meeting as referred to in point (g), the meeting materials shall be submitted to the participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.
- i. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in point (g), the meeting materials shall be submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.
- j. Invitation to the meeting of the Board of Commissioners is carried out by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Commissioners has the right and authority to call for a meeting of the Board of Commissioners.
- k. Invitations to the meeting of the Board of Commissioners are sent by any means in written form, which summons must be sent to members of the Board of Commissioners no later than 5 (five) calendar days before the meeting is held or in a shorter time in urgent circumstances, namely no later than 1 (one) year calendar day before the Meeting excluding the date of the summons and the date of the Meeting, the urgency is determined by the President Commissioner. If all members of the Board of Commissioners are present at the meeting, no prior summons is required
- l. The summons for the meeting must include the meeting agenda, date, time and place of the meeting.
- m. Meetings of the Board of Commissioners are held at the domicile of the Company or at the place of business activity or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other places within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Commissioners are present or represented and the results of the Meeting are approved by all members of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners' meeting can be held at another place as determined by the Board of Commissioners and the meeting has the right to make valid and binding decisions.
- n. The meeting of the Board of Commissioners is chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is absent or unable to attend the meeting which does not need to be proven to a third party, then the meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is elected by and from the members of the Board of Commissioners present at the meeting.
- o. A member of the Board of Commissioners can only be represented at a meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.

- p. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
- q. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- r. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- s. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- t. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (a), butir (b) dan butir (c) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- u. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (e) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- v. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
- w. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.
- x. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir (t) dan butir (u), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- y. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (t) dan butir (u) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- p. Each member of the Board of Commissioners has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners he represents.
- q. Each member of the Board of Commissioners who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a proposed transaction, contract or contract, in which the Company becomes one of the parties must state the nature of the interest in a Board of Commissioners Meeting and is not entitled to participate in voting on matters related to the transaction or contract, unless the meeting of the Board of Commissioners determines otherwise.
- r. Voting regarding individuals is carried out by means of closed ballots without a signature, while voting on other matters is carried out verbally unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without any objection from those present.
- s. Decision-making at the Board of Commissioners' meeting must be made based on deliberation for consensus. In the event that a consensus decision is not reached, the decision is made based on the majority vote.
- t. The results of the meeting referred to in point (a), point (b) and point (c) must be recorded in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Commissioners who are present, and submitted to all members of the Board of Commissioners.
- u. The results of the meeting referred to in point (e) must be recorded in the minutes of the meeting, signed by the attending members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
- v. Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Commissioners Meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Commissioners meeting along with the reasons for the dissenting opinions.
- w. Members of the Company's Board of Commissioners who are present or not present at the meeting of the Board of Commissioners are entitled to receive a copy of the minutes of the meeting of the Board of Commissioners.
- x. In the event that a member of the Board of Commissioners does not sign the results of the meeting referred to in point (t) and point (u), the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.
- y. The minutes of meeting referred to in point (t) and point (u) must be documented by the Company.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023**Frequency of Board of Commissioners Meeting
Year 2023**

Nama Name	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting		Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Board of Commissioners Meeting with Board of Directors	
	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Takeshi Sasaki*	6/6	100.00%	4/4	100.00%
Roosniati Salihin**	1/6	20.00%	1/4	25%
Mohammad Syahrial	6/6	100.00%	4/4	100.00%

- *) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
- *) Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on March 21, 2024, the EGMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as the President Commissioner, effective from the closing of the EGMS.
- **) Pada tanggal 5 November 2023, Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris Perseroan telah meninggal dunia. Maka sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat 18 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir.
- **) On November 5, 2023, Mrs. Roosniati Salihin, as a Commissioner of the Company, passed away. Therefore, in accordance with Article 18 Paragraph 18 letter a of the Company's Articles of Association, the term of office of the Board of Commissioners automatically ended.

Pelatihan Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, maka sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan-pelatihan, antara lain:

Board of Commissioners Trainings

In order to expand their knowledge and competence, throughout 2023, the Board of Commissioners had participated in several trainings, including:

Nama Name	Pelatihan Dewan Komisaris / The Board of Commissioners Trainings		
	Pelatihan / Trainings	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Takeshi Sasaki*	<i>Multifinance Indonesia: Welcoming The Great Opportunities After Pandemic.</i>	15 Dec 23	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ("APPI")
Roosniati Salihin**	<i>Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023.</i>	10 Jan 23	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Mohammad Syahrial	<i>Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan di Tengah Tahun Politik.</i>	31 Jan 23	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ("APPI")

- *) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
- *) Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on March 21, 2024, the EGMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as the President Commissioner, effective from the closing of the EGMS.
- **) Pada tanggal 5 November 2023, Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris Perseroan telah meninggal dunia. Maka sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat 18 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir.
- **) On November 5, 2023, Mrs. Roosniati Salihin, as a Commissioner of the Company, passed away. Therefore, in accordance with Article 18 Paragraph 18 letter a of the Company's Articles of Association, the term of office of the Board of Commissioners automatically ended.

Penilaian Kinerja Komite-Komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk beberapa Komite yang berada di bawahnya yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko.

Performance Assessment of Committees Under The Board of Commissioners

In order to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners established several Committees under it, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee and the Risk Monitoring Committee.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit secara independen telah melakukan tinjauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal untuk pemeriksaan Laporan Keuangan tahunan.

Komite Audit juga telah senantiasa melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan berkala Perseroan. Selanjutnya, Komite Audit telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan Direksi terhadap hasil pemeriksaan Unit Audit Internal.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah secara independen melakukan penilaian kinerja, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Disamping itu, Komite Pemantau Risiko telah secara independen melakukan pemantauan dan penelaahan atas profil risiko Perseroan dan penerapan kepatuhan Perseroan. Komite Pemantau Risiko juga telah senantiasa melakukan evaluasi Laporan hasil penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perusahaan.

Berdasarkan pembahasan realisasi kerja, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik.

Throughout 2023, the Audit Committee independently conducted reviews, evaluations, and provided recommendations for the appointment of external auditors to examine the annual Financial Statements.

The Audit Committee also consistently reviewed the Company's periodic Financial Statements. Furthermore, the Audit Committee monitored the performance of the Internal Audit Unit's duties and responsibilities, overseeing the implementation of follow-up actions taken by the Board of Directors regarding the Internal Audit Unit's findings.

The Nomination and Remuneration Committee independently assessed performance, providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies, and remuneration amounts for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Additionally, the Risk Monitoring Committee independently monitored and reviewed the Company's risk profile and compliance implementation. The Risk Monitoring Committee also consistently evaluated the results of its own assessments of the Company's soundness level.

Based on the discussion of work realization, the Board of Commissioners assessed that all committees under the Board of Commissioners had performed their duties and responsibilities quite well.

Direksi Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court, in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Komposisi Direksi

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan & Kepatutan Fit & Proper Test
Konosuke Mizuta	Direktur Utama President Director	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-354/NB.11/2019 tanggal 27 Jun 2019
Shunsuke Kojima	Direktur Director	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-363/NB.11/2019 tanggal 27 Jun 2019
Andi Harjono	Direktur Director	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-355/NB.11/2019 tanggal 27 Jun 2019
Ade Rafida Saulina S.	Direktur Director	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-361/NB.11/2019 tanggal 27 Jun 2019
Yudi Gustiawan	Direktur Director	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-653/NB.11/2019 tanggal 5 Nov 2019

Board of Directors Composition

Pedoman Direksi

Direksi memiliki Pedoman yang dikaji ulang secara periodik atau dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

Dasar penyusunan Pedoman Direksi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Juncto Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
3. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
4. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Direksi

1. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. Dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi).
4. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
5. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
6. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
7. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain.
8. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain;
 - b. sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;
9. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat mereka pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa

Board of Directors Charter

The Board of Directors has Charter which will be reviewed periodically or updated in accordance with the applicable laws and regulations. That Charter is binding for each members of the Board of Directors.

The basis for the preparation of the Board of Directors Charter are as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Company;
2. OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company Juncto OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation Number 30/POJK.05/ 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company;
3. OJK Circular Letter Number 15/SEOJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation Report for Financing Company
4. OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and
5. The Company's Articles of Association.

Directors Structure and Membership

1. The number of members of the Board of Directors is at least 3 (three) people. With the composition of 1 (one) President Director and 2 (two) Directors.
2. All members of the Board of Directors must be domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.
3. The majority of members of the Board of Directors must be Indonesian citizens (more than 50% of the total members of the Board of Directors).
4. Any proposed appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.
5. All members of the Board of Directors must have relevant knowledge to their position.
6. Each member of the Board of Directors must meet the requirements to pass the fit and proper test in accordance with OJK Regulations regarding the fit and proper test.
7. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as Directors in other companies.
8. Members of the Board of Directors may hold concurrent positions:
 - a. as a member of the Board of Commissioners in at most 3 (three) other companies;
 - b. as a member of the Committee in at most 5 (five) committees in the Issuer or Public Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Commissioners;
9. Members of the Board of Directors are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed them at the end of 1 (one) term of office as referred to provisions 1 (one) term of office

jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar.

10. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
11. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
12. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan yang berlaku, Anggota Direksi memiliki Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang sebagai berikut :

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan internal Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

of members of the Board of Directors is 3 (three) years, taking into account of laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Directors at any time before his term of office ends, taking into account the the applicable laws and regulations and the provisions of the Company's Articles of Association.

10. After their term of office end, the member of the Board of Directors may be reappointed in accordance with a resolution of the GMS.
11. The term of office of a member of the Board of Directors automatically ends, if the member of the Board of Directors:
 - a. Pass away;
 - b. Be placed under interdiction based on a court resolution or
 - c. No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the Capital Market.
12. If the position of a member of the Board of Directors is vacant due to any reason that causes the number of members of the Board of Directors to be less than 3 (three) people, then at the latest 90 (ninety) calendar days after the vacancy, a GMS must be held for filling the vacancy, taking into account the prevailing laws and regulations in the Capital Market.

Duties , Responsibility and Authorities

Referring to the Company's Articles of Association and the provisions of the applicable laws and regulations, members of the Board of Directors have the following Duties, Responsibilities and Authorities:

1. The Board of Directors is in charge of carrying out and being responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company set out in the Articles of Association.
2. Members of the Company's Board of Directors must comply with laws and regulations, the Company's Articles of Association and the Company's internal regulations. In carrying out the duties and responsibilities of management, the Board of Directors is required to hold an annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.
3. Each member of the Board of Directors must carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.
4. In order to support the effectiveness of carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors may form a committee.
5. In the event that a committee is formed, the Board of Directors is required to evaluate the performance of the committee at the end of each financial year.
6. The Board of Directors together with the Board of Commissioners must prepare:
 - a. Guidelines that bind each member of the Board of Directors and Board of Commissioners, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
 - b. The code of ethics that applies to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/employees, and supporting organs of the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka (7), apabila dapat membuktikan:
- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka (10) di bawah ini.
10. Direksi mewakili Perseroan sebagaimana yang terdapat pada angka (9), akan tetapi dengan pembatasan untuk:
- menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
 - mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
 - menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah;
 - memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk kepentingan pihak lain;
 - menerima pinjaman uang dari siapapun;
 - memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- Harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan pada angka (10) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam angka (11) dibawah ini.
11. Perbuatan hukum untuk (1) mengalihkan atau melepaskan hak atau (2) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik
7. Each member of the Board of Directors is fully and jointly responsible for the Company's losses caused by errors or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties.
8. Members of the Board of Directors cannot be held accountable for the Company's losses as referred to in number (7), if they can prove:
- the loss was not due to his fault or negligence.
 - has conducted management in good faith, full of responsibility and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company.
 - has no conflict of interest, either directly or indirectly, for management actions that result in losses, and
 - has taken action to prevent the loss from arising or continuing.
9. The Board of Directors represents the Company legally and directly both inside and outside the court on all matters and in all events, binds the Company with other parties and other parties with the Company and carries out all actions, both regarding management and ownership, with the limitations as specified in number (10) below.
10. The Board of Directors represent the Company as referred to in point (9), but with limitation for:
- deleting or removal the Company's receivables from the books exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or
 - transferring or releasing the Company's right to collect the Company's written-off receivables, exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or
 - selling or transferring or relinquishing the rights, or pledge/guarantee the Company's assets, either in one transaction or in several independent transactions or related transactions, in the exceeding amount of as determined from time to time by the Board of Commissioners;
 - obtaining by any means immovable property, including land rights;
 - obtaining or releasing equity participation in other companies;
 - Providing a corporate guarantee for the benefit of another party;
 - receiving the loan from anyone;
 - providing the loan to anyone except in the context of carrying out the Company's business activities.
- Shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions in point (10) do not reduce what is specified in point (11) below.
11. Legal actions to (1) transfer or release rights or (2) make debt guarantees for all or most of the Company's assets, namely with a value of more than 50% (fifty percent) of the total net worth of the Company in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not and the transaction referred to is a

yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

12. Perbuatan hukum:
 - a. untuk melakukan transaksi material, tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. untuk melakukan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana angka (16) diatas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) financial year, must obtain approval from the GMS with the terms and conditions that apply.

12. Legal action:
 - a. to carry out Material Transactions, comply with OJK Regulations governing Material Transactions and changes in business activities with due observance of the provisions in the applicable laws and regulations.
 - b. to carry out affiliated transactions and conflicts of Interest subject to OJK Regulations governing affiliated transactions and conflicts of Interest and with due observance of the provisions in the applicable laws and regulations.
13. a. The President Director has the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company;
 - b. In the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason whatsoever, which does not need to be proven to the third party, then 2 (two) other members of the Board of Directors has the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
14. Distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS, in the event that the GMS does not determine, then distribution of duties and authorities of each member of the Directors is determined based on the resolution of Meeting of the Board of Directors.
15. If something is occurred where the Company's interests conflict with the personal interests of a member of the Board of Directors, then the Company will be represented by another member of the Board of Directors who has no conflict of interest and in the event that the Company has conflict of interest with the interests of all members of the Board of Directors, then in this case the Company will be represented by the Board of Commissioners or someone who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that there is no member of the Board of Commissioners, the GMS appoints one or more persons to represent the Company in performing the tasks as mentioned above.
16. The member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if:
 - a. there is a case in the court between the Company and the relevant member of the Board of Directors; and
 - b. the relevant member of the Board of Directors concerned has a conflict of interests with the Company's interest.
17. In the event that there is a conditions as referred to number (16) above, those entitled to represent the Company are:
 - a. other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
 - b. the Board of Commissioners in case all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or
 - c. other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners have conflict of interest with the Company.

Transparansi

Anggota Direksi wajib mengungkapkan :

1. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perseroan.
3. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perseroan.
4. Jabatan mereka di perusahaan lain.

Nilai-Nilai

1. Anggota Direksi wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota Direksi wajib mempunyai akhlak dan moral yang baik, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
4. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perseroan maupun anak perusahaannya.
5. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

Rapat Direksi

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
3. Anggota Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
4. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada nomor (1), nomor (2) dan nomor (3) dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
5. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
6. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada nomor (1), nomor (2), nomor (3) dan nomor (5) wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Transparency

Members of the Board of Directors are required to disclose:

1. Its share ownership which reaches 5% (five percent) both in the Company and in other companies, domiciled inside and outside the country.
2. Financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company.
3. Remuneration and facilities received from the Company.
4. Their position in other companies.

Values

1. Members of the Board of Directors must have high integrity, ability, knowledge, experience according to their field of work and be able to communicate well.
2. Members of the Board of Directors must have good characters and morals, are able to carry out legal actions, have never been declared bankrupt or become members of the Board of Directors or Board of Commissioners who are found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment and has never been convicted for committing an act crimes that was detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment.
3. Members of the Board of Directors are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Directors serves.
4. Members of the Board of Directors are prohibited from using their positions in the Company for personal, family, and/or other party' interests that may harm or reduce the profits and reputation of the Company and its subsidiaries.
5. Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.

The Board of Directors Meetings

1. Meetings of the Board of Directors can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors or at a written request from the Board of Commissioners or at the written request of 1 (one) or more Shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.
2. Meetings of the Board of Directors are held regularly at least 1 (one) time every month.
3. Members of the Board of Directors must attend at least 50% (fifty percent) of the Board of Directors meetings in a period of 1 (one) year.
4. The Board of Directors meeting as referred to in number (1), number (2) and number (3) can be held, valid and has the right to make binding decisions if attended by more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Directors present or represented at the meeting .
5. The Board of Directors must hold regular meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.
6. The presence of members of the Board of Directors at the meeting referred to in number (1), number (2), number (3) and number (5) must be disclosed in the Company's Annual Report.

7. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor (2) dan nomor (5) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 8. Bahan rapat yang sudah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada nomor (7) harus dibagikan kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan.
 9. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada nomor (7) , bahan rapat harus dibagikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 10. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 11. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
 14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
 15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
7. The Board of Directors must schedule the meeting referred to in number (2) and number (5) for the following year before the end of the financial year.
 8. Scheduled meeting materials as referred to in number (7) must be distributed to meeting participants at least 5 (five) days before the meeting is held.
 9. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in number (7), meeting materials must be distributed to participants no later than before the meeting is held.
 10. Invitation to the meeting of the Board of Directors is carried out by the President Director. In the event that the President Director is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Directors has the right and authority to call for a meeting of the Board of Directors. Invitations for the Board of Directors. Meeting must be submitted by any means in written form delivered to each member of the Board of Directors no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held, excluding the date of the Invitation and the date of the Meeting. If all members of the Board of Directors are present or represented, then the summons is not required and the meeting of the Board of Directors has the right to make valid and binding decisions.
 11. The summons must include the meeting agenda, date, time and place of the meeting.
 12. Meetings of the Board of Directors are held at the domicile of the Company or at the place of business activity or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other places within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Directors are present or represented and the results of the meeting are approved by all members of the Board of Directors, the Board of Directors meeting can be held at another place as determined by the Board of Directors and the meeting has the right to make valid and binding decisions.
 13. The Board of Directors meeting is chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or unable to attend the Board of Directors Meeting for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Directors who is present and elected at the Board of Directors Meeting may chair the Board of Directors Meeting.
 14. A member of the Board of Directors can be represented at a meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.
 15. a. Each member of the Board of Directors present has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors he represents.
b. Each member of the Board of Directors who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a proposed transaction, contract or contract, in which the Company is one of the parties must state the nature of the interest in a Board of Directors Meeting and is not entitled to participate in voting on matters related to the transaction or contract, unless the Board of Directors Meeting determines otherwise.

16. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
17. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam nomor (1), nomor (2) dan nomor (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
18. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
19. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi, maka yang bersangkutan wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada nomor (17) dan nomor (18), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
21. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada nomor (17) dan nomor (18) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
22. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
23. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
24. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
16. The decision making of the Board of Directors meeting is carried out based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, decisions are made based on a majority vote, which is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the members of the Board of Directors present.
17. The results of the Board of Directors meeting as referred to in number (1), number (2) and number (3) must be recorded in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors who are present and submitted to all members of the Board of Directors.
18. The results of the meeting with the Board of Directors and the Board of Commissioners must be recorded in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who are present and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
19. Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Directors Meeting, the parties concerned must be clearly stated in the minutes of the Board of Directors meeting along with the reasons for the dissenting opinions.
20. In the event that a member of the Board of Directors and/ or member of the Board of Commissioners does not sign the results of the meeting referred to in number (17) and number (18), the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.
21. The minutes of meeting referred to in number (17) and number (18) must be documented by the Company.
22. The minutes of the Board of Directors' meeting are valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Board of Directors meeting, both for members of the Board of Directors and for third parties.
23. The Board of Directors can also make valid and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing about the proposals concerned and all members of the Board of Directors give their approval regarding the proposals submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same legal force as decisions taken legally at a meeting of the Board of Directors.
24. Board of Directors Meetings can also be held via teleconference, video conference, or other electronic media facilities that allow all Board of Directors Meeting participants to see and/or hear each other directly and participate in the Board of Directors Meeting, provided that the minutes of the Meeting using a conference telephone or equipment similar communications will be made in writing and circulated among all members of the Board of Directors participating in the meeting to be signed. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at a Board of Directors Meeting.

Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2023

Frequency of Board of Directors Meeting Year 2023

Nama Name	Rapat Direksi Board of Directors Meeting		Rapat Cabang Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Board of Directors Meeting with Board of Commissioners	
	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Konosuke Mizuta	12/12	100.00%	6/6	100.00%
Shunsuke Kojima	12/12	100.00%	6/6	100.00%
Andi Harjono	12/12	100.00%	6/6	100.00%
Ade Rafida Saulina S.	12/12	100.00%	6/6	100.00%
Yudi Gustiawan	11/12	91.67%	6/6	100.00%

Pelatihan Direksi

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, maka sepanjang tahun 2023, Direksi telah mengikuti pelatihan-pelatihan, antara lain:

Board of Directors Trainings

In order to expand their knowledge and competence, throughout 2023, the Board of Directors had participated in several trainings, including:

Nama / Name	Pelatihan Direksi / The Board of Directors Trainings		
	Pelatihan / Trainings	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Konosuke Mizuta	<i>The Role of GRC in Supporting Financial Sector Performance.</i>	23 Feb 2023	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
	<i>How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry.</i>	15 Jun 2023	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Andi Harjono	Seminar Pengalihan dan Pengakuan Sertifikasi Manajemen Risiko. Risk Management Certification Transfer and Recognition Seminar.	7 Nov 2023	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ("APPI")
	<i>Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023.</i> Financial Services Industry Outlook in 2023.	10 Jan 2023	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
	Implementasi <i>Artificial Intelligence</i> di Industri Jasa Keuangan. Implementation of Artificial Intelligence in the Financial Services Industry.	02 Feb 2023	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
	Pemanfaatan Analisis <i>Big Data</i> Dalam Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan. Utilization of Big Data Analysis in Improving the Performance of the Financial Services Industry.	30 Mar 2023	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
	Mengatasi Tantangan dan Menghadapi Perubahan Dalam Sektor Jasa Keuangan. Overcoming Challenges and Facing Changes in the Financial Services Sector.	13 Apr 2023	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
	<i>Cybersecurity & Regulatory Awareness.</i>	3 May 2023	Sarana Mutu Edukasi Indonesia
	Peluang <i>Metaverse</i> di Industri Jasa Keuangan. Metaverse Opportunities in the Financial Services Industry.	11 May 2023	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
	<i>How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry.</i>	15 Jun 2023	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Industri Keuangan Non-Bank ("IKNB"). Get to Know More about the Regulation of UU P2SK in the Context of Strengthening the Non-Bank Financial Industry ("IKNB").	10 Aug 2023	Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")	

Pelatihan Direksi / The Board of Directors Trainings			
Nama / Name	Pelatihan / Trainings	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Ade Rafida Saulina S.	<i>Leadership In Changing Atmosphere</i>	24 Aug 2023	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>Enhancing Financial Performance Through Data Analytics.</i>	31 Aug 2023	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	Seminar Pengalihan dan Pengakuan Sertifikasi Manajemen Risiko. Risk Management Certification Transfer and Recognition Seminar.	7 Nov 2023	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (“APPI”)
	<i>Indonesia Sector Briefing 2023.</i>	21 Nov 2023	<i>Fitch Corporate Headquarters</i>
	<i>Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023.</i> Financial Services Industry Outlook in 2023.	10 Jan 2023	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>Prospek Insurtech di Indonesia.</i> Insurtech Prospects in Indonesia.	2 Mar 2023	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>Pemanfaatan Analisis Big Data dalam Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan.</i> Utilization of Big Data Analysis in Improving the Performance of the Financial Services Industry.	30 Mar 2023	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Shunsuke Kojima	<i>Lesson Learned Kasus Silicon Valley Bank (SVB).</i>	6 Apr 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (“LPPI”)
	<i>Cybersecurity & Regulatory Awareness.</i>	3 May 2023	Sarana Mutu Edukasi Indonesia
	<i>Sustainable Finance Action Plan Training Program.</i>	10 Nov 2023	Trisakti Sustainable Center (“TSC”)
Yudi Gustiawan	<i>Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023.</i> Financial Services Industry Outlook in 2023.	10 Jan 2023	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK dalam Rangka Penguatan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).</i> Getting to Know More about the Regulation of UU P2SK in the Context of Strengthening the Non-Bank Financial Industry (IKNB).	10 Aug 2023	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023.</i> Financial Services Industry Outlook in 2023.	10 Jan 2023	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>The Role of GRC in Supporting Financial Sector Performance.</i>	23 Feb 2023	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>Pemanfaatan Analisis Big Data dalam Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan.</i> Utilization of Big Data Analysis in Improving the Performance of the Financial Services Industry.	30 Mar 2023	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
	<i>Cybersecurity & Regulatory Awareness.</i>	3 May 2023	Sarana Mutu Edukasi Indonesia
	<i>Seminar Nasional Economic Outlook 2024.</i> National Seminar on Economic Outlook 2024.	3 Oct 2023	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (“APPI”)
<i>Seminar Pengalihan dan Pengakuan Sertifikasi Manajemen Risiko.</i> Risk Management Certification Transfer and Recognition Seminar.	7 Nov 2023	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (“APPI”)	
<i>Sustainable Finance Action Plan Training Program.</i>	10 Nov 2023	Trisakti Sustainable Center (“TSC”)	

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedure and Basis for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur dan dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menelaah remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri pembiayaan.
2. Dengan memperhitungkan kinerja Perseroan dan melakukan penilaian secara mandiri oleh Dewan Komisaris, selanjutnya disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dilakukan pembahasan dan menyiapkan rekomendasi.
3. Rekomendasi disampaikan kepada Komisaris Utama untuk dibahas lebih lanjut dan disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Keputusan RUPST memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sudah termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura.

Procedure and Basis for Determination of Commissioners Remuneration

The procedure and basis for determining the remuneration of the Board of Commissioners are as follows:

1. Review the remuneration prevailing in the industry in accordance with the business activities of similar companies and the business scale of the Company in the financing industry.
2. By taking into account the Company's performance and conducting an independent assessment by the Board of Commissioners then, submitted to the Nomination and Remuneration Committee for discussion and preparing recommendations.
3. Recommendations are submitted to the President Commissioner for further discussion and approval by the Controlling Shareholders based on the AGMS Resolution authorizing the Controlling Shareholders.

The Board of Commissioners Remuneration Structure

Remuneration for all members of the Board of Commissioners includes other facilities in kind.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration Structure		
Jumlah Dewan Komisaris Number of the Board of Commissioners	Remunerasi*) Remuneration*)	Fasilitas lain dalam bentuk Natura**) Benefit in Kind**)
3	Rp1,031,716,539	Rp44,193,400

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura.

***) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.

Description:

*) Includes salaries and other fixed income: benefits, stock-based compensation, bonus and other remuneration in form of benefit in kind.

***) Housing, transportation, health insurance, etc.

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam satu tahun Remuneration Amount Per Person in one year	Jumlah Dewan Komisaris Number of the Board of Commissioners
Di atas Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Above Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah)	-
Di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Above IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah)	-
Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) From Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) to Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah)	1
Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke bawah Below Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah)	2

Remunerasi yang diperoleh oleh Dewan Komisaris sudah meliputi fasilitas lain dalam bentuk natura, ada 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di bawah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun dan ada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam satu tahun.

The remuneration received by the Board of Commissioners includes other benefit in kind, there are 2 (two) members of the Board of Commissioners who receive remuneration with a value below Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) in one year and there are 1 (one) member of the Board of Commissioners who receive remuneration with a value above Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) up to Rp1,000,000,000 (one billion rupiah) in one year.

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Direksi

Prosedur dan dasar penetapan remunerasi Direksi adalah sebagai berikut:

- Menelaah remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri pembiayaan.
- Dengan memperhatikan inflasi, kondisi keuangan Perseroan dan memperhitungkan kinerja dan kontribusi tiap-tiap individu, dilakukan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyiapkan rekomendasi.
- Rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas lebih lanjut dan disetujui, berdasarkan Keputusan RUPST, dimana memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris.

Struktur Remunerasi Direksi

Remunerasi bagi seluruh anggota Direksi sudah termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura.

Procedure and Basis for Determination of the Board of Directors Remuneration

The procedure and basis for determining the remuneration of the Board of Directors are as follows:

- Review the prevailing remuneration in the industry in accordance with the business activities of similar companies and the business scale of the Company in the financing industry.
- By taking into account inflation, the Company's financial condition and taking into account the performance and contribution of each individual, a discussion is conducted by the Nomination and Remuneration Committee to prepare recommendations.
- Recommendations are submitted to the Board of Commissioners for further discussion and approval, based on the AGMS Resolution authorizing the Board of Commissioners.

The Board of Directors Remuneration Structure

Remuneration for all members of the Board of Directors includes other facilities in kind.

Struktur Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration Structure		
Jumlah Direksi Number of the Board of Directors	Remunerasi*) Remuneration*)	Fasilitas lain dalam bentuk Natura**) Benefit in Kind**)
5	Rp8.423.217.047,-	Rp469.976.966 ,-

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura.

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.

Description:

*) Includes salaries and other fixed income: benefits, stock-based compensation, bonus and other remuneration in form of benefit in kind.

**) Housing, transportation, health insurance, etc.

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam satu tahun Remuneration Amount Per Person in one year	Jumlah Direksi Number of the Board of Directors
Di atas Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Above Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah)	2
Di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Above IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah)	1
Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) From Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) to Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah)	2
Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke bawah Below Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah)	-

Remunerasi yang diperoleh oleh anggota Direksi sudah meliputi fasilitas lain dalam bentuk natura, ada 2 orang anggota Direksi yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di atas Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dalam satu tahun dan 1 orang anggota Direksi yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam satu tahun, serta 2 orang anggota Direksi yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Remuneration obtained by members of the Board of Directors includes other benefit in kind, there are 2 members of the Board of Directors who receive remuneration with a value above Rp2,000,000,000 (two billion rupiah) in one year and 1 member of the Board of Directors who receive remuneration with a value above Rp1,000,000,000 (one billion rupiah) in one year and 2 members of the Board of Directors who receive remuneration with a value above Rp500,000,000, - (five hundred million rupiah) up to Rp1,000,000,000, - (one billion rupiah).

Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris Committees under the Board of Commissioners

Dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Risiko

Sepanjang 2023, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

In supporting the effective implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners is supported by supporting organs, namely:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Risk Monitoring Committee

Throughout 2023, the Committees under the Board of Commissioners have performed their work well, in accordance with their respective functions and duties.

Komite Audit Audit Committee

Komite Audit adalah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

Persyaratan Keanggotaan

Berpatokan pada Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris, anggota Komite Audit memiliki beberapa persyaratan, sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut

The Audit Committee is a committee tasked with assisting the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of the duties of internal auditors and external auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits in order to assess the adequacy of internal controls including the financial reporting process.

Member's Requirements

Based on the Audit Committee Charter established by the Board of Commissioners, the Audit Committee members have several requirements, as follows:

1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well.
2. Must understand financial reports, company business especially those related to the services or business activities of Issuers or Public Companies, audit processes, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector as well as other relevant laws and regulations.
3. Willing to improve competency continuously through education and training.
4. Must have at least 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance.
5. Not working in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or other party providing assurance services, non assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Issuer or Public Company concerned within 6 (six) last month.
6. Not working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for the Independent Commissioner.
7. Does not own shares directly or indirectly in Issuers or Public Companies.
8. In the event that a member of the Audit Committee acquires shares of an Issuer or Public Company, either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be

wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut.

9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the shares were acquired.

9. Does not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Controlling Shareholders of Issuers or Public Companies.
10. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.

Susunan, Profil dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/BOC-VMF/LEGAL/III/21 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit maka susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

Composition, Profile and Work Experience of Audit Committee Members

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners of No. 003/BOC-VMF/LEGAL/III/21 concerning the Determination of the Audit Committee Membership, the composition of the Audit Committee members is as follows:

MOHAMMAD SYAHRAL

Ketua Komite Audit / Chairman of the Audit Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.

His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

GREGORY O.K. ONGKO

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Memperoleh gelar sarjana B.SB.A. *Accounting dari Creighton University, Amerika* pada tahun 1982, memperoleh gelar master M.B.A Business Management dari Creighton University, Amerika pada tahun 1984, dan memperoleh gelar master M.B.A *Management Information System* dari University of Dallas, Amerika pada tahun 1986.

Indonesian citizen, 64 years old. He/She obtained a B.SB.A. degree in Accounting at Creighton University, USA in 1982. He obtained an M.B.A Business master's degree in Management at Creighton University, USA in 1984, and finally he obtained an M.B.A master's degree in Management Information System at University of Dallas, USA in 1986.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2020 - to date	<i>Member of the Audit Committee</i> PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	1998	<i>Operation Director</i> PT Hexa Prakarsa Utama
2012 - to date	<i>Co-Founder</i> Vickery Christian Academy Yayasan Pendidikan Vickery	1986 - 1998	<i>General Manager - Marketing Division</i> Bentala Sanggrahan Group
2011	<i>VP, Finance Accounting, HRD GA</i> PT Kabelindo Murni Tbk	1995 - 1996	<i>Marketing Director</i> Rainbow Hills Development
2002 - 2010	<i>Co-Founder</i> Morning Star Academy Yayasan Bintang Pagi PT Trivium Konsultan Pendidikan	1994 - 1995	<i>Administration & Resources Manager</i> Mega Guna Group, Holding Company
2003 - 2006	<i>Property Consultant, Franchise Owner</i> Paddy's Property	1988 - 1994	<i>Market Development Representative</i> IBM Indonesia
2002 - 2004	<i>Co-Owner</i> Eurocafe Restaurant Food Outlet	1988	<i>Internal Auditor</i> Arco Indonesia Incorporated
1999 - 2001	<i>Division Head - Investor Relations</i> PT Tunas Sepadan Investama	1987 - 1988	<i>Financial Officer</i> Robert S. Allan and Associates, Inc
1999	<i>General manager/Division Head</i> Asia Plup & Paper Company	1985 - 1987	<i>Auditor</i> Hawthorne Suites

BONDAN ANUGRAH*

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Trisakti, pada tahun 1998.

Indonesian citizen, 45 years old. Obtained a degree in economics from Trisakti University, in 1998.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2016 – 2023	<i>Member of the Audit Committee</i> PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk**	2008 – 2011	<i>Finance & Accounting Manager</i> PT Global Madya Kencana
2013 – to date	<i>Finance, Tax & Accounting Manager</i> PT Sekawan Intiperkasa	2004 – 2008	<i>Accounting Section Head</i> PT Verena Oto Finance
2011 – 2013	<i>Finance & Accounting Manager</i> PT Cendana Wangi Energy	2000 – 2004	<i>Accounting Supervisor</i> PT Dos Ni Roha

*) Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit yang berlaku efektif sejak 1 April 2023

*) The term of office has ended effectively from 1 April 2023 in accordance with the Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Audit Committee

**) Terhitung sejak tanggal 24 September 2022, PT Verena Multi Finance Tbk telah berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

**) As of September 24 2022, PT Verena Multi Finance Tbk has changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Pada tanggal 31 Maret 2023 telah terjadi perubahan susunan anggota Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit yang berlaku efektif sejak 1 April 2023, maka susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

On March 31, 2023 there has been a change in the composition of the members of the Audit Committee in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 concerning the appointment of members of the Audit Committee which is effective from April 1, 2023, then The composition of the members of the Audit Committee is as follows:

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Audit / Chairman of the Audit Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.

His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

BRANTAS*

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STEI Indonesia, pada tahun 2007.

Indonesian citizen, 40 years old. Obtained his Bachelor of Accounting degree from STEI Indonesia, in 2007.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2023 – to date	<i>Member of the Audit Committee</i> PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	2011 – 2012	<i>Audit Manager</i> Apotek Roxy Group
2021 – to date	<i>Investigation Auditor Manager</i> PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2010 – 2010	<i>Credit Marketing Officer</i> PT Summit Oto Finance
2017 – 2021	<i>Investigation Auditor Manager</i> PT Bank Syariah Mandiri	2007 – 2010	<i>Senior Independent Control Unit</i> PT Summit Oto Finance
2013 – 2016	<i>General Auditor</i> PT Bank Syariah Mandiri	2007 – 2007	<i>Junior Auditor</i> Public Accountant Firm Dolly Bambang Sudarmadji & Dadang
2012 – 2013	<i>Supervisor Internal Auditor</i> PT Graha Kerindo Utama		

*) Anggota Komite Audit yang efektif menjabat sejak tanggal 1 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit

*) Member of the Audit Committee who have served effectively since April 1, 2023 based on a Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOCMLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Audit Committee

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Ketentuan yang berlaku menjelaskan bahwa masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 dan Piagam Komite Audit, serta dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Masa tugas anggota komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Independensi Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta bekerja berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Audit Perseroan, dapat dilihat dari data hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan saham pada perusahaan pembiayaan lainnya dari tiap-tiap anggota Komite Audit, dimana tiap-tiap anggota tidak memiliki hubungan afiliasi.

Period and Term of Office of the Audit Committee Members

The applicable provisions explain that the term of office of the Audit Committee may not exceed the term of office of the Board of Commissioners in accordance with POJK No. 55/POJK.04/2015 and the Audit Committee Charter, and may be re-elected for only one subsequent period. The term of office of committee members appointed between the terms of office of the Board of Commissioners will end at the same time as the end of the term of office of the Board of Commissioners.

Audit Committee Independence

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities and works based on the Audit Committee Charter been approved by the Board of Commissioners. The independence of members of the Company's Audit Committee is proven with the data of family relations, finance, management, and share ownership in other financing companies that shows that all members of the Committee have no affiliation.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahril		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√
Bondan Anugrah*		√		√		√		√
Brantas**		√		√		√		√

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahril		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√
Bondan Anugrah*		√		√		√		√
Brantas**		√		√		√		√

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan di Perusahaan Pembiayaan lain Management and Ownership in Other Financing Companies							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahril		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√
Bondan Anugrah*		√		√		√		√
Brantas**		√		√		√		√

- *) Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit yang berlaku efektif sejak 1 April 2023
- *) The term of office has ended effectively from 1 April 2023 in accordance with the Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Audit Committee
- **) Anggota Komite Audit yang efektif menjabat sejak tanggal 1 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit
- **) Member of the Audit Committee who have served effectively since April 1, 2023 based on a Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Audit Committee

Piagam Komite Audit

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Komite Audit, maka Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan.

Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit

Terkait fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi :
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

Audit Committee Charter

In supporting the implementation of the duties of the Audit Committee, the Company has prepared an Audit Committee Charter based on the Board of Commissioners Decree Number 009/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 dated 26 September 2022 which can be accessed through the Company's website.

Legal Basis

- POJK No. 55 / POJK.04 / 2015 concerning the Formation and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee.
- POJK No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- The Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 concerning Good Corporate Governance for finance company jo. the Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 dated 29 April 2020 concerning Changes of The Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 concerning Good Corporate Governance for finance company
- The Company's Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.

Duties, Responsibilities and Authority of the Audit Committee

Regarding its function, the Audit Committee has duties and responsibilities, as follows:

1. The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.
2. In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities that at least include :
 - a. Reviewing the financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or the authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company.
 - b. Reviewing compliance with laws and regulations related to the activities of the Issuer or Public Company.
 - c. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the accountant on the services provided.
 - d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment, and service fees.
 - e. Reviewing the implementation of the audit by the internal auditor and supervising the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor.

- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
 - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang, sebagai berikut:
- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
 - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 - c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
 - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Komite Audit pada tahun 2023, Komite Audit Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan atas peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas hasil audit.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun 2023 tertuang dalam rapat-rapat berkala dan telah dipaparkan didalam pembahasan mengenai Rapat Komite Audit.

Rapat Komite Audit

Kebijakan mengenai pelaksanaan Rapat Audit dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

- f. Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Issuer or Public Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.
- g. Reviewing complaints related to the accounting and financial reporting processes of Issuers or Public Companies.
- h. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in Issuers or Public Companies.
- i. Maintain the confidentiality of documents, data and information of Issuers or Public Companies.

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities

- a. Access documents, data, and information of Issuers or Public Companies regarding employees, funds, assets, and necessary company resources.
- b. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and Accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
- c. Involve independent parties other than members of the Audit Committee as needed to assist in carrying out their duties (if needed).
- d. Carry out other powers given by the Board of Commissioners.

Education and/or Training

To improve the knowledge and quality of Audit Committee members in 2023, the Company's Audit Committee continues to keep abreast of applicable regulations. This is done to continuously improve the quality of audit results.

Implementation of Audit Committee Activities

The implementation of Audit Committee activities in 2023 is contained in regular meetings and has been described in the discussion of Audit Committee Meetings.

Audit Committee Meeting

The policy regarding the implementation of the Audit Meeting can be described as follows:

1. The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.
2. Audit Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the total members.
3. Audit Committee meeting decisions are taken based on deliberation for consensus.
4. Each meeting of the Audit Committee is stated in the minutes of the meeting, including if there is a difference of opinion, which is signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Frequency

Rapat Komite Audit / Audit Committee Meetings			
Nama / Name	Kehadiran / Attendance	Frekuensi / Frequency	Rasio Kehadiran / Attendance Ratio
Mohammad Syahril	6	6	100%
Gregory O.K. Ongko	6	6	100%
Bondan Anugrah*	2	2	100%
Brantas**	4	4	100%

*) Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit yang berlaku efektif sejak 1 April 2023

*) The term of office has ended effectively from 1 April 2023 in accordance with the Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Audit Committee

*) Anggota Komite Audit yang efektif menjabat sejak tanggal 1 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/LEGAL III/23 tentang penetapan anggota Komite Audit

**) Member of the Audit Committee who have served effectively since April 1, 2023 based on a Board of Commissioners Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI LEGAL/III/23 regarding the appointment of members of the Audit Committee

Uraian Rapat Komite Audit / Audit Committee Meetings Description		
No.	Tanggal / Date	Agenda / Program
1.	17 Feb 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pemaparan dan Pembahasan hasil pemeriksaan Audit Eksternal – Deloitte untuk tahun pemeriksaan 2022. Presentation and discussion of the results of the External Audit - Deloitte for the 2022 audit year.
2.	28 Mar 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil Audit Eksternal 2022 yang tertuang dalam <i>Management Letter</i>. Discussion of the 2022 External Audit results contained in the Management Letter. Pembahasan dan penyusunan Evaluasi atas pemeriksaan eksternal Audit tahun pemeriksaan 2022. Discussion and preparation of Evaluation of the external Audit examination for the year 2022. Pembahasan hasil pemeriksaan Internal Audit per akhir Februari 2023. Discussion of the results of the Internal Audit examination as of the end of February 2023. Pembahasan Laporan Keuangan per akhir Februari 2023. Discussion of Financial Statements as of the end of February 2023. Pembahasan rencana penggantian Anggota Komite Audit. Discussion of the plan to replace Audit Committee Members.
3.	09 May 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan dan penyusunan Rekomendasi Audit Komite atas penggunaan AP & KAP 2023. Discussion and preparation of Audit Committee Recommendations on the use of AP & KAP 2023. Pembahasan Laporan Keuangan per akhir Maret 2023. Discussion of Financial Statements as of the end of March 2023. Pembahasan hasil pemeriksaan Internal Audit per akhir April 2023. Discussion of the results of the Internal Audit examination as of the end of April 2023.
4.	18 Jul 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil pemeriksaan Internal Audit per 18 Juli 2023. Discussion of the results of the Internal Audit examination as of July 18, 2023. Pembahasan Laporan Keuangan per akhir Juni 2023. Discussion of Financial Statements as of the end of June 2023. Penyampaian singkat terkait kasus Cabang Makassar. Brief submission related to the Makassar Branch case. Update progress follow up perbaikan atas hasil <i>Management Letter</i> - Audit Eksternal. Update on the progress of follow-up improvements on the results of the Management Letter - External Audit.
5.	26 Sep 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil pemeriksaan Internal Audit per 25 September 2023. Discussion of the results of the Internal Audit examination as of September 25, 2023. Pembahasan Laporan Keuangan per Akhir Agustus 2023. Discussion of Financial Statements as of the end of August 2023.
6.	27 Oct 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pemaparan dan pembahasan persiapan pemeriksaan Audit Eksternal – Deloitte untuk tahun pemeriksaan 2023. Presentation and discussion on the preparation of the External Audit - Deloitte for the 2023 audit year.

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi & Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Persyaratan Keanggotaan

Berpatokan pada Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
- b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 1. anggota Dewan Komisaris;
 2. pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
 3. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Susunan, Profil dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/BOC-VMF/LEGAL/III/21 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi maka susunan anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah sebagai berikut :

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

The Nomination & Remuneration Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting to carry out the functions and duties of the Board of Commissioners regarding the Nomination and Remuneration of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Member's Requirements

Based on the Nomination & Remuneration Committee Charter established by the Board of Commissioners, The Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members, with the following provisions:

- a. 1 (one) chairman and member, who is an Independent Commissioner; And
- b. Other members can come from:
 1. members of the Board of Commissioners;
 2. parties from outside the Issuer or Public Company concerned; or
 3. parties who hold managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources.

Composition, Profile and Work Experience of Nomination & Remuneration Committee Members

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 004/BOC-VMF/LEGAL/III/21 dated 31 March 2021 concerning Determination of Composition of Members of the Nomination & Remuneration Committee, the composition of members of the Nomination & Remuneration Committee is as follows:

TAKESHI SASAKI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
Her profile is available in the Board of Commissioners Profile.

RUDYANTO ADISOETJAHJA

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga negara Indonesia, 54 tahun, memperoleh gelar sarjana Arsitektur dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1993.

Indonesian citizen, 54 years old, obtained a bachelor's degree in Architecture from the Indonesian Christian University in 1993.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2021 – to date	Head of Human Resources & General Affair Division PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	2013 – 2015	Head of Human Resources & General Affair Division PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2018 – 2021	Head of Human Resources Operation & General Affair Division PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)	2011 – 2012	Head of Human Resources & General Affair Division PT HD Finance (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2017 – 2018	Head of Human Resources & General Affair Division PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)	2008 – 2011	Human Resources & General Affair Manager PT Tumbakmas Niagasakti
2015 – 2017	Head of Marketing & Business Development Division PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)	1994 – 2007	Regional Manager Indonesia Bagian Barat & Human Resources Development Manager PT Rodamas

Pada tanggal 21 Maret 2024 telah terjadi perubahan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.003/BOC-MLI/III/24 tertanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, maka susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

On March 21, 2024, there was a change in the composition of the Nomination and Remuneration Committee members in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 003/BOC-MLI/III/24 dated March 21, 2024, concerning the Determination of the Composition of the Nomination and Remuneration Committee Members. Therefore, the composition of the Nomination and Remuneration Committee members was as follows:

YASUO IMAIZUMI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
Her profile is available in the Board of Commissioners Profile.

RUDYANTO ADISOETJAHJA

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga negara Indonesia, 54 tahun, memperoleh gelar sarjana Arsitektur dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1993.

Indonesian citizen, 54 years old, obtained a bachelor's degree in Architecture from the Indonesian Christian University in 1993.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2021 – to date	<i>Head of Human Resources & General Affair Division PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk</i>	2013 – 2015	<i>Head of Human Resources & General Affair Division PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)</i>
2018 – 2021	<i>Head of Human Resources Operation & General Affair Division PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)</i>	2011 – 2012	<i>Head of Human Resources & General Affair Division PT HD Finance (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)</i>
2017 – 2018	<i>Head of Human Resources & General Affair Division PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)</i>	2008 – 2011	<i>Human Resources & General Affair Manager PT Tumbakmas Niagasakti</i>
2015 – 2017	<i>Head of Marketing & Business Development Division PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)</i>	1994 – 2007	<i>Regional Manager Indonesia Bagian Barat & Human Resources Development Manager PT Rodamas</i>

Periode Masa Jabatan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Ketentuan yang berlaku menjelaskan bahwa masa jabatan Komite Nominasi & Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 dan Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi, serta dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Period and Term of Office of The Nomination & Remuneration Committee

The applicable provisions explain that the term of office of the Nomination & Remuneration Committee may not exceed the term of office of the Board of Commissioners in accordance with POJK No. 34/POJK.04/2014 and the Nomination & Remuneration Committee Charter, and may be re-elected for only one subsequent period. The term of office of Committee members appointed between the terms of office of the Board of Commissioners will end at the same time as the end of the term of office of the Board of Commissioners.

Independensi Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi & Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta bekerja berdasarkan Pedoman Kerja Komite Nominasi & Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan, dapat dilihat dari data hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan saham pada perusahaan pembiayaan lainnya dari tiap-tiap anggota Komite Nominasi & Remunerasi dimana tiap-tiap anggota tidak memiliki hubungan afiliasi.

Nomination & Remuneration Committee Independence

Nomination & Remuneration Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities and works based on the Nomination & Remuneration Committee Charter been approved by the Board of Commissioners. The independence of members of the Company's Nomination & Remuneration Committee is proven with the data of family relations, finance, management, and share ownership in other financing companies that shows that all members of the Committee have no affiliation.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrrial		√		√		√		√
Takeshi Sasaki*		√		√	√		√	
Rudyanto Adisoetjahja		√		√		√		√
Yasuo Imaizumi**		√		√	√		√	

- *) Takeshi Sasaki memiliki hubungan afiliasi yang bersifat keuangan dengan Mizuho Leasing Co., Ltd., selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu Pemegang Saham Utama. Saat ini Beliau menjabat sebagai International Business Administration Department di Mizuho Leasing Co., Ltd. untuk periode 2019 – 2024 (Maret). Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
- *) Takeshi Sasaki has a financial affiliation relationship with Mizuho Leasing Co., Ltd, as the Controlling Shareholder and one of the Main Shareholders. Currently he serves as International Business Administration Department at Mizuho Leasing Co., Ltd. for period 2019-2024 (March) Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") dated March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as President Commissioner as of the closing of the Extraordinary GMS.
- **) Yasuo Imaizumi memiliki hubungan afiliasi yang bersifat keuangan dengan Mizuho Leasing Co., Ltd., selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu Pemegang Saham Utama. Saat ini Beliau menjabat sebagai Senior Deputy General Manager in International Business Administration Department, Relationship Manager International Business Development Department, Director of Overseas Subsidiaries International and Business Administration Department di Mizuho Leasing Co., Ltd.
- **) Yasuo Imaizumi has a financial affiliation with Mizuho Leasing Co., Ltd., as the Controlling Shareholder and one of the Major Shareholders. Currently, he holds positions as Senior Deputy General Manager in the International Business Administration Department, Relationship Manager in the International Business Development Department, and Director of Overseas Subsidiaries in the International and Business Administration Department at Mizuho Leasing Co., Ltd.

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrrial		√		√		√		√
Takeshi Sasaki*		√		√		√		√
Rudyanto Adisoetjahja		√		√		√		√
Yasuo Imaizumi		√		√		√		√

- *) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
- *) Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") held on March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as the President Commissioner, effective from the closing of the Extraordinary GMS.

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan di Perusahaan Pembiayaan lain Management and Ownership in Other Financing Companies							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrrial		√		√		√		√
Takeshi Sasaki*		√		√		√		√
Rudyanto Adisoetjahja		√		√		√		√
Yasuo Imaizumi		√		√		√		√

- *) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
- *) Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") held on March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as the President Commissioner, effective from the closing of the Extraordinary GMS.

Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Komite Nominasi & Remunerasi, maka Perseroan telah menyusun Pedoman Nominasi & Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan.

Dasar Hukum

- POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 Tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2020 Tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 Tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
- Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki rincian tugas dan tanggung jawab sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Komite Nominasi, sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan fungsi Komite Nominasi, sebagai berikut:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Nomination & Remuneration Committee Charter

In supporting the implementation of the duties of the Nomination & Remuneration Committee, the Company has prepared the Nomination & Remuneration Guidelines based on the Decree of the Board of Commissioners Number 007/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 dated September 26, 2022 which can be accessed through the Company's website.

Legal Basis

- POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- The Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Company jo. the Financial Services Authority Regulation No.29/POJK.05/2020 dated 29 April 2020 concerning Changes of The Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.05/2014 dated November 19, 2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Company
- The Company's Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Nomination & Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee shall act independently in carrying out its duties. In carrying out its duties, this committee is responsible to the Board of Commissioners.

In the mechanism of implementing its duties, the Nomination and Remuneration Committee has detailed duties and responsibilities as also stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 Dated December 8, 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, as follows:

Related to the functions of the Nomination Committee, as follows:

1. The Nomination and Remuneration Committee is required to act independently in carrying out its duties.
2. In carrying out its duties, this committee is responsible to the Board of Commissioners.
3. In the mechanism of carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee has detailed duties and responsibilities as follows:
 - a. Related to the function of the Nomination Committee, as follows:
 1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Composition of the positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - b. Policies and criteria required in the nomination process; and
 - c. Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 2. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board

Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Komite Remunerasi, sebagai berikut:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi;
 - b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) Besaran atas Remunerasi.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang di terima tiap – tiap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan atas peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi

Pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi pada tahun 2023 tertuang dalam rapat-rapat berkala dan telah dipaparkan didalam pembahasan mengenai Rapat Komite Nominasi & Remunerasi.

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

3. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib

of Directors and/or members the Board of Commissioners is based on the benchmarks that have been prepared as evaluation material;

3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capability development programs members of the Board of Directors and/ or members of the Board of Commissioners; and
 4. Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board Commissioner to be submitted to the GMS.
- b. In relation to the functions of the Remuneration Committee, as follows:
1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a) Remuneration Structure;
 - b) Policy on Remuneration; and
 - c) Amount of Remuneration.
 2. Assist the Board of Commissioners in assessing performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.

Education and /or Training

To improve the knowledge and quality of the Nomination and Remuneration Committee members in 2023, the Company's Nomination and Remuneration Committee continues to follow the development of applicable regulations. This is done to continuously improve the quality of the resulting performance.

The Implementation of Nomination & Remuneration Committee Activities

The implementation of the Nomination & Remuneration Committee activities in 2023 is contained in periodic meetings and has been described in the discussion of the Nomination & Remuneration Committee Meeting.

Nomination & Remuneration Committee Meeting

3. Nomination and Remuneration Committee meetings are held periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.
4. The Nomination and Remuneration Committee meeting can only be held if:
 - a. Attended by a majority of the members of the Nomination and Remuneration Committee;
 - b. and one of the majority of the members of the Nomination and Remuneration Committee as referred to in letter a is the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.
3. Nomination and Remuneration Committee meeting decisions are made based on deliberation and consensus.
4. In the event that a decision based on deliberation and consensus is not reached, the decision is made based on a majority vote.
5. If in the decision making by voting occurs the same number of votes, decisions are taken through the mechanism regulated in the charter of the Nomination and Remuneration Committee.
6. In the event that there is a dissenting opinion in the decision-making process, the dissenting opinion must be contained

dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinion.

7. The results of the Nomination and Remuneration Committee meeting must be stated in the minutes of the meeting and documented by the Issuer or Public Company
8. Minutes of the Nomination and Remuneration Committee meetings must be submitted in writing to the Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee Meeting Frequency

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi / Nomination & Remuneration Committee Meetings			
Nama / Name	Kehadiran / Attendance	Frekuensi / Frequency	Rasio Kehadiran / Attendance Ratio
Mohammad Syahrial	4	4	100%
Takeshi Sasaki	4	4	100%
Rudyanto Adisoetjahja	4	4	100%

Uraian Rapat Komite Nominasi & Remunerasi / Nomination & Remuneration Committee Meetings Description		
No.	Tanggal / Date	Agenda / Program
1.	09 Feb 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi bonus untuk Anggota Dewan Komisaris. Bonus recommendation for members of the Board of Commissioners. 2. Rekomendasi bonus untuk Anggota Direksi. Bonus recommendation for members of the Board of Directors. 3. <i>Point refreshment</i> Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Point refreshment for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners. 4. Program pengembangan kemampuan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2023. Capacity building program for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners in 2023. 5. Lainnya. Others.
2.	22 May 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar penetapan nilai dan struktur : Basis for determining the value and structure: <ol style="list-style-type: none"> i. Honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dan; Honorarium for members of the Board of Commissioners and; ii. Upah untuk anggota Direksi Wages for members of the Board of Directors 2. <i>Point refreshment</i> Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Point refreshment for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. 3. Lainnya. Others.
3.	10 Jul 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), tanggal 23 Juni 2023, Mata acara rapat no.4. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), dated June 23, 2023, meeting agenda no.4. 2. Rekomendasi : Recommendation: <ol style="list-style-type: none"> i. Honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan; Honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and; ii. Gaji dan tunjangan anggota Direksi. Salary and benefits of members of the Board of Directors. 3. <i>Poin refreshment</i> Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Point refreshment for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. 4. Lainnya. Others.

Uraian Rapat Komite Nominasi & Remunerasi / Nomination & Remuneration Committee Meetings Description

No.	Tanggal / Date	Agenda / Program
4.	7 Nov 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar penentuan struktur bonus untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. Basis for determining the bonus structure for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners for the financial year 2023. 2. <i>Poin refreshment</i> anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Point refreshment for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. 3. Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2024. Capacity building program for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners in 2024. 4. Kewajiban pelatihan atau seminar bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2024. Training or seminar obligations for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in 2024. 5. Rencana tugas Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2024. Planned duties of the Nomination and Remuneration Committee in 2024. 6. Lainnya. Others.

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait penerapan Manajemen Risiko.

Persyaratan Keanggotaan

Berpatokan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta *best practices* yang diterapkan di Perusahaan Pembiayaan, anggota Komite Pemantau Risiko memiliki beberapa persyaratan, sebagai berikut:

- a. Persyaratan Umum
 1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 2. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan OJK, Pasar Modal, dan peraturan lainnya yang relevan.
 3. Mampu bekerja sama dan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 4. Tidak memiliki keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
- b. Persyaratan Kompetensi
 1. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai Ketua.
 2. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.

Susunan, Profil dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak 1 April 2023, maka susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

The Risk Monitoring Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the functions and duties of the Board of Commissioners regarding the implementation of Risk Management.

Member's Requirements

Based on the prevailing rules and regulations as well as best practices applied in Financing Companies, members of the Risk Monitoring Committee have several requirements, as follows:

- a. General Requirements
 1. Have good integrity, character and morals, adequate skills, knowledge and experience in accordance with their educational background, and be able to communicate well.
 2. Have adequate knowledge of the regulations of the OJK, Capital Markets, and other relevant regulations.
 3. Able to cooperate and devote sufficient time to the task.
 4. Has no personal relationship that may cause a conflict of interest with the Company.
- b. Competency Requirements
 1. (one) Independent Commissioner who serves as Chairman.
 2. (one) independent party with expertise in finance and/ or risk management who serves as a member.

Composition, Profile and Work Experience of Risk Monitoring Committee Members

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 concerning the determination of members of the Risk Monitoring Committee which is effective from April 1, 2023, then the composition of the members of the Risk Monitoring Committee is as follows:

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

GREGORY O.K. ONGKO

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Komite Audit.
His profile is available in the Audit Committee Profile.

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketentuan yang berlaku menjelaskan bahwa masa jabatan Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, serta dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Period and Term of Office of The Risk Monitoring Committee Member

The prevailing regulations clarify that the term of office of the Risk Monitoring Committee shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners, and may be re-elected only for one subsequent period. The term of office of Committee members appointed between the terms of office of the Board of Commissioners will end at the same time as the end of the term of office of the Board of Commissioners.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta bekerja berdasarkan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan, dapat dilihat dari data hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan saham pada perusahaan pembiayaan lainnya dari tiap-tiap anggota Komite Pemantau Risiko dimana tiap-tiap anggota tidak memiliki hubungan afiliasi.

Risk Monitoring Committee Independence

Risk Monitoring Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities and works based on the Risk Monitoring Committee Charter been approved by the Board of Commissioners. The independence of members of the Company's Risk Monitoring Committee is proven with the data of family relations, finance, management, and share ownership in other financing companies that shows that all members of the Committee have no affiliation.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrrial		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrrial		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrrial		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√

Pedoman Komite Pemantau Risiko

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Komite Pemantau Risiko, maka Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 008/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan.

Dasar Hukum

- Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan OJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
- Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan.
- Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan.
 - b. Melakukan evaluasi Pedoman Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
 - c. Melakukan evaluasi Laporan hasil penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perusahaan.

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2023, Komite Pemantau Risiko Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan atas peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko pada tahun 2023 tertuang dalam rapat-rapat berkala dan telah dipaparkan di dalam pembahasan mengenai Rapat Komite Pemantau Risiko.

Risk Monitoring Committee Charter

In supporting the implementation of the Risk Monitoring Committee's tasks, the Company had drafted the Risk Monitoring Committee Guidelines based on the Board of Commissioners' Decree Number 008/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 dated September 26, 2022, which could be accessed through the Company's website.

Legal Basis

- OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Governance for Financing Companies.
- OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Governance for Financing Companies.
- OJK Regulation Number 44/POJK.05/2020 concerning Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions.
- OJK Regulation Number 28/POJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness of Non-Bank Financial Services Institutions.
- OJK Circular Letter Number 11/SEOJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.
- OJK Circular Letter Number 7/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management for Financing.
- The Company's Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Risk Monitoring Committee

1. The Risk Monitoring Committee is required to act independently in carrying out its duties.
2. In carrying out its duties, this committee is responsible to the Board of Commissioners.
3. In the mechanism of carrying out its duties, the Risk Monitoring Committee has detailed duties and responsibilities as follows:
 - a. Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of Company policies.
 - b. Evaluating the Risk Management Charter prepared by the Board of Directors.
 - c. Evaluating the self-assessment report on the Company's soundness level.

Education and/or Training

To improve the knowledge and quality of members of the Risk Monitoring Committee in 2023, the Company's Risk Monitoring Committee continues to follow developments in applicable regulations. This is done to continuously improve the quality of the resulting performance.

Implementation of Risk Management Committee Activities

The implementation of the Risk Monitoring Committee activities in 2023 is contained in regular meetings and has been described in the discussion of the Risk Monitoring Committee Meeting.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan mengenai pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko harus terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko harus dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
7. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
8. Risalah rapat Komite Pemantau Risiko wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Risk Monitoring Committee Meeting

The policy regarding the implementation of the Risk Monitoring Committee Meeting can be described as follows:

1. Risk Monitoring Committee meetings are held periodically at least 4 (four) times a year.
2. Meetings of the Risk Monitoring Committee can only be held if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total members of the Risk Monitoring Committee.
3. Risk Monitoring Committee meeting decisions are made based on deliberation and consensus.
4. In the event that a decision based on deliberation and consensus is not reached, the decision is made based on the majority vote.
5. The results of the meeting of the Risk Monitoring Committee must be stated in the minutes of the meeting and documented in accordance with the laws and regulations.
6. Dissenting opinions that occur in the Risk Monitoring Committee meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.
7. The results of the meeting of the Risk Monitoring Committee must be stated in the minutes of the meeting and documented by the Company.
8. Minutes of the Risk Monitoring Committee meeting must be submitted in writing to the Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Meeting Frequency

Rapat Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee Meetings			
Nama / Name	Kehadiran / Attendance	Frekuensi / Frequency	Rasio Kehadiran / Attendance Ratio
Mohammad Syahrial	4	4	100%
Gregory O.K. Ongko	4	4	100%

Uraian Rapat Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee Meetings Description		
No.	Tanggal / Date	Agenda / Program
1.	06 Apr 2023	• Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan. Soundness Level Report.
2.	18 Jul 2023	• Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat (POJK No.3 Tahun 2023). Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and Society (POJK No.3 of 2023).
3.	26 Sep 2023	• POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Dalam Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan PPPSPM) . POJK No. 8 of 2023 concerning Implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing and Funding for Prevention of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector (APU, PPT and PPPSPM).
4.	19 Dec 2023	• Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) di PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Implementation of Implementation of Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CFT), and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPF) at PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.

○ Komite Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Supporting Committee for Implementing the Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh organ pendukung yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

In supporting the effective implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors is supported by supporting organs, namely the Risk Management Committee and Information Technology Steering Committee.

○ Penilaian Kinerja Komite dan Unit Kerja yang Berada di Bawah Direksi Performance Assessment of Committees and Work Units Under the Board of Directors

Direksi membentuk komite-komite di bawah Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas kepengurusannya. Komite-komite yang dibentuk diaktifkan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi operasional. Direksi menilai bahwa selama 2023 komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif.

The Board of Directors established committees under the Board of Directors to support the implementation of its management duties. The established committees are activated in accordance with the Company's business needs and regulatory requirements, which are expected to create operational effectiveness and efficiency. The Board of Directors considers that during 2023 the committees have carried out their duties and responsibilities effectively.

Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melakukan tinjauan dan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko serta menerima laporan profil risiko yang disusun dan disampaikan oleh fungsi manajemen risiko.

Throughout 2023, the Risk Management Committee has conducted a review and evaluating the implementation of Risk Management as well as receiving risk profile reports prepared and delivered by the risk management function.

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan program pengembangan Teknologi Informasi serta melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.

The Information Technology Steering Committee has implemented an Information Technology development program and monitored Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance.

○ Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee

Sebagai implementasi dari POJK NO.44/POJK.05/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, maka pada tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor DIR-0013/SKD/VIII/2021 telah dibentuk Komite Manajemen Risiko Perseroan dengan keanggotaan sebagai berikut :

As an implementation of POJK NO.44/POJK.05/2020 dated August 28, 2020 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, in 2021 through the Decree of the Board of Directors Number DIR-0013/SKD/VIII/2021, the Company's Risk Management Committee was formed with the following membership:

Ketua

Direktur Utama

Chairman

President Director

Anggota Tetap

- Seluruh anggota Direksi selain Direktur Utama
- Senior Manager Manajemen Risiko, Kepatuhan, APU, PPT, IA & IC
- Kepala Divisi Manajemen Risiko & *Compliance*
- Kepala Departemen Manajemen Risiko
- Kepala Departemen Audit Internal & IC

Permanent Member

- All members of the Board of Directors other than the President Director
- Senior Manager Risk Management, Compliance, AML-PTF, IA & IC
- Head of Risk Management & Compliance Division
- Head of Risk Management Department
- Head of Internal Audit & IC Department

Anggota Tidak Tetap

- Deputi Direktur terkait
- Kepala Divisi dan Departemen terkait

Non-Permanent Member

- Related Deputy Director
- Head of related Divisions and Departments

Pada tanggal 4 Maret 2024 telah terjadi perubahan susunan anggota Komite Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.DIR-001/SKD-MLI/III/2024 tentang Komite Manajemen Risiko, maka susunan anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua

Direktur Utama

Anggota Tetap

- Seluruh anggota Direksi selain Direktur Utama
- Risk Management Expert
- Kepala Divisi Manajemen Risiko & Compliance
- Kepala Departemen Manajemen Risiko
- Kepala Departemen Audit Internal & Internal Control Unit

Anggota Tidak Tetap

- Deputy Direktur terkait
- Kepala Divisi terkait
- Kepala Departemen terkait yang ditunjuk oleh Direktur, deputy Direktur, Senior Manager atau Kepala Divisi untuk topik – topik tertentu.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi :

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, termasuk tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Melakukan perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko, antara lain menyempurnakan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil risiko Perseroan, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi;
3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti penyaluran pembiayaan yang dilakukan, pengambilan posisi risiko, atau pengambilan eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan; dan
4. Menerima laporan profil risiko yang disusun dan disampaikan oleh fungsi manajemen risiko.

Selanjutnya pada tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor DIR-0014/SKD/VIII/2021 tertanggal 1 September 2021 Perseroan telah menetapkan Pemberlakuan Pedoman Manajemen Risiko yang akan menjadi panduan bagi penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko di Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2023 Komite telah melakukan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota tetap sebesar 100%.

On March 4, 2024 there was a change in the composition of the members of the Risk Management Committee in accordance with the Decree of the Directors of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.DIR-001/SKD-MLI/III/2024 concerning the Risk Management Committee, so the composition of the members of the Risk Management Committee is as follows :

Chairman

President Director

Permanent Member

- All members of the Board of Directors other than the President Director
- Risk Management Expert
- Head of Risk Management & Compliance Division
- Head of Risk Management Department
- Head of Internal Audit & Internal Control Unit Department

Non-Permanent Member

- Related Deputy Director
- Head of related Divisions
- Head of the relevant Department appointed by the Director, deputy Director, Senior Manager or Head of Division for certain topics.

The authority and responsibility of the Risk Management Committee is to provide recommendations to the President Director regarding risk management, which at least includes:

1. Develop policies, strategies, and guidelines for the implementation of Risk Management, including the level of Risk taken (*risk appetite*) and Risk tolerance (*risk tolerance*), risk management framework and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions;
2. Make improvements or adjustments to the implementation of risk management based on the results of the evaluation of the implementation of risk management, including improving the risk management process periodically or incidentally as a result of a change in the Company's external and internal conditions that affect the adequacy of funding, the Company's risk profile, and ineffective implementation risk management based on evaluation results;
3. Determine matters related to business decisions that deviate from normal procedures, such as disbursing financing, taking risk positions, or taking risk exposures that exceed the predetermined limit; and
4. Receive risk profile reports compiled and submitted by the risk management function.

Furthermore, in 2021 through the Decree of the Board of Directors Number DIR-0014/SKD/VIII/2021 dated September 1, 2021 the Company has determined the Implementation of Risk Management Guidelines which will serve as a guide for those in charge of implementing Risk Management at the Company in carrying out their duties and responsibilities.

Risk Management Committee Meetings

During 2023 the Committee has conducted 4 (four) meetings with a permanent member attendance rate of 100%.

Uraian Rapat Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee Meetings Description

No.	Tanggal / Date	Agenda / Program
1.	12 Apr 2023	• <i>Business Continuity Management</i>
2.	26 Jul 2023	• POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Dalam Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan PPPSPM). POJK No. 8 of 2023 concerning Implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing and Funding for Prevention of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector (APU, PPT and PPPSPM).
3.	25 Sep 2023	• <i>Governance Risk / Best Practice for Corporate Governance.</i>
4.	29 Nov 2023	• <i>Time Plan PSAK 71 – Macro economic Model</i>

Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee

Sebagai implementasi dari POJK NO.4/POJK.05/2021 tertanggal 9 Maret 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, maka pada tahun 2022 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor No. DIR-001/SKD-LEGAL/II/2022 Tanggal 10 Februari 2022 telah dibentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua

Direktur Utama

Anggota

- Seluruh Direktur
- Seluruh Deputi Direktur
- Senior Manager Manajemen Risiko, Kepatuhan, APU-PPT, IA & IC
- Seluruh Kepala Divisi
- Kepala Departemen Teknologi Informasi
- Kepala Departemen Manajemen Risiko
- Kepala Departemen Audit Internal & IC

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Teknologi Informasi, yang paling sedikit meliputi :

1. Rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha perusahaan;
2. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi;
3. Memastikan kesesuaian proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan Teknologi Informasi;
4. Memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan proyek Teknologi Informasi yang disetujui;
5. Memastikan kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan;
6. Memastikan efektivitas mitigasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Perseroan pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perseroan;

As the implementation of POJK NO. 4/POJK.05/2021 dated March 9, 2021 concerning Implementation of Risk Management on the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions, then in 2022 through the Decree of the Board of Directors Number DIR- 001/SKD/II/2022 a Company Information Technology Steering Committee has been established with the following memberships :

Chairman

President Director

Member

- All Director
- All Deputy Director
- Senior Manager Risk Management, Compliance, APU-PPT, IA & IC
- All of the Division Head
- Head of Information Technology Department
- Head of Risk Management Department
- Head of Internal Audit & IC Department

The authority and responsibility of the IT Steering Committee is to provide recommendations to the Board of Directors related to Information Technology, which at least includes:

1. Information Technology development plans that are in line with the company's business activities;
2. Formulation of Information Technology policies and procedures;
3. Ensure the conformity of the approved Information Technology projects with Information Technology development plans;
4. Ensure the conformity of the implementation of Information Technology projects with the approved Information Technology projects;
5. Ensure the conformity of Information Technology with the needs of management information systems as well as the needs of Company's business activities;
6. Ensure the effectiveness of risk mitigation on the company's investment in the Information Technology sector so that the Company's investment in the Information Technology sector will contribute to the achievement of Company's business objectives;

7. Melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi;
8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
9. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya Teknologi Informasi yang dimiliki Perseroan.

7. Monitoring of Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance;
8. Make efforts to resolve various problems related to Information Technology that cannot be resolved by Information Technology operator and user work units in and effective, efficient and timely manner; and
9. Ensure the adequacy and allocation of Information Technology resources owned by the Company.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pada tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan 4 (empat) kali rapat komite yang dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota komite sebagai berikut :

Information Technology Steering Committee Meetings

In 2023, the Information Technology Steering Committee has conducted 4 (four) committee meetings which were attended by the chairman and all committee members as follows:

Uraian Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi / Information Technology Steering Committee Description		
No.	Tanggal / Date	Agenda / Program
1.	12 Apr 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek Selesai Finished Projects <ul style="list-style-type: none"> • Motadata 2. Proyek Berjalan Running Projects <ul style="list-style-type: none"> • HRIS • ISO 27001:2013 • MJP 3. Integrasi Sistem System Integration 4. Rencana Proyek S1 – 2023 Project Plan S1 – 2023 5. Lain - Lain Others
2.	26 Jul 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek Selesai Finished Projects <ul style="list-style-type: none"> • ISO 27001:2013 • MJP → Repolink 2. Proyek Berjalan Running Projects <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan HRIS HRIS Enhancement • <i>Approval Non-Revert Back</i> 3. Rencana Proyek S2 – 2023 Project Plan S2 – 2023 4. Lain - Lain Others
3.	25 Sep 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek Selesai Finished Projects <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mobile Order & Survey Enhancement - Top Up And Multi-Collateral Features</i> • Sertifikat Iso 27001:2013 Telah Diterima Certificate of ISO 27001:2013 was received 2. Proyek Berjalan Running Projects <ul style="list-style-type: none"> • <i>Approval Non-Revert Back</i> • Pengembangan HRIS HRIS Enhancement 3. Rencana Proyek S2 – 2023 Project Plan S2 - 2023 4. Lain – Lain Others
4.	29 Nov 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek Selesai Finished Projects <ul style="list-style-type: none"> • <i>Approval Non-Revert Back</i> 2. Proyek Berjalan Running Projects <ul style="list-style-type: none"> • HRIS Enhancement • BRI Virtual Account • BNI Virtual Account • Adjustment of Budget Realization of Branch Expenses 3. Project Plan 2024 4. Lain – Lain Others

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direksi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi atas permasalahan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal, dan kegiatan lain yang merupakan agenda kegiatan resmi dari Perseroan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan surat penunjukan No. DIR-001/TK-CORSEC/SKD/XII/21 tertanggal 1 Desember 2021, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Fransisca Yuliana Gunawan.

Corporate Secretary is an individual in charge of a work unit that carries out the function of Corporate Secretary. The Corporate Secretary is appointed and dismissed based on the decision of the Board of Directors. The Corporate Secretary is subordinate to the Board of Directors and is responsible for the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors on issues related to Good Corporate Governance and compliance with the provisions of applicable laws and regulations, particularly Capital Market regulations, and other activities that constitute the official agenda of the Company.

Corporate Secretary Profile

In accordance to letter of appointment No. DIR-001/TK-CORSEC/SKDXII/21 dated December 1, 2021, Corporate Secretary is held by Fransisca Yuliana Gunawan.

FRANSISCA YULIANA GUNAWAN

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 1 Desember 2021. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, pada tahun 2006. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain, dan Pemegang Saham.

Indonesian citizen, 41 years old, domiciled in Jakarta. She has been appointed as Corporate Secretary since 1 December 2021. She obtained Bachelor of Economic from Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia, in 2006. She has no affiliation with other Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and Shareholders.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2021 – to date	<i>Corporate Secretary, Corporate Strategic Planning Division Head & Investor Relation</i> PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	2012	<i>Corporate Finance</i> PT Victoria Securities Indonesia
2021	<i>Corporate Strategic Planning Department Head & Investor Relation</i> PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)	2011 – 2012	<i>Corporate Finance</i> PT Victoria Investama Tbk (f.k.a PT Victoria Sekuritas)
2016 – 2021	<i>Investor Relation</i> PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)	2007 – 2011	<i>Corporate Finance</i> PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
2013 – 2015	<i>Corporate Secretary Section Head</i> PT Bank Victoria International Tbk		

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan tugas, di antaranya:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Functions and Duties of the Corporate Secretary

Referring to the OJK Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the Corporate Secretary has functions and duties, including:

1. Keeping abreast of Capital Market developments, especially the prevailing laws and regulations in the Capital Market.

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs *website* Perseroan.
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
 5. Memelihara dan menjamin komunikasi yang intensif dengan para investor.
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market.
 3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of corporate governance which includes:
 - Information disclosure to the public, including the availability of information on the Company's website.
 - Timely submission of reports to OJK.
 - Organization and documentation of the GMS.
 - Organization and documentation of Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings.
 - Implementation of orientation program for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
 4. As a liaison between the Company and shareholders, OJK, and other stakeholders.
 5. Maintain and ensure intensive communication with investors.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan, di antaranya:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 23 Juni 2023.
2. Menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan pada tanggal 20 Desember 2023.
3. *Review* dan melakukan sosialisasi peraturan baru yang diterbitkan oleh regulator di tahun 2023 (OJK dan BEI) dalam penerapan peraturan tersebut di Perseroan.
4. Memantau dan memperbaharui *website* Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan dan keterbukaan informasi kepada publik.
5. Menyiapkan dan melaporkan laporan berkala Perseroan, baik melalui surat maupun Laporan elektronik (*e-reporting* IDXnet dan SPE-OJK), kepada regulator (OJK dan BEI), *website* Perseroan, serta kepada para pihak terkait.
6. Penyampaian keterbukaan informasi kepada publik yang disampaikan melalui surat, laporan elektronik (*e-reporting* IDXnet dan SPE-OJK)

Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2023, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut :

Activities of the Corporate Secretary in 2023

Throughout 2023, the Corporate Secretary has carried out several activities, including:

1. Annual General Meeting of Shareholders on June 23, 2023.
2. Held the Annual Public Expose on December 20, 2023.
3. Reviewed and socialized new regulations issued by regulators in 2023 (OJK and IDX) in the application of these regulations in the Company.
4. Monitored and updated the Company's website in accordance with regulatory requirements and information disclosure to the public.
5. Prepared and reported the Company's periodic reports, both by mail and electronic reports (*e-reporting* IDXnet and SPE-OJK), to regulators (OJK and IDX), the Company's website and to related parties.
6. Submission of information disclosure to the public submitted by mail or electronic reports (*e-reporting* IDXnet and SPE-OJK)

Education and Training of Corporate Secretary

Throughout 2023, in order to improve knowledge and understanding in order to assist the implementation of duties and responsibilities, the Corporate Secretary has attended the following trainings:

Pelatihan Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary Trainings		
Pelatihan / Trainings	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Pendalaman POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Examining POJK Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.	12 Jan 2023	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
Indonesia <i>Economic Outlook 2023: Opportunities & Challenges</i> .	26 Jan 2023	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
Pendalaman SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Examining SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.	28 Feb 2023	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
Pelaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI. GMS implementation through eASY.KSEI.	14 Mar 2023	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
Mengenal ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i> ("ACGS"): Peran dan Lingkupnya dalam Tata Kelola Perusahaan. Introducing the ASEAN Corporate Governance Scorecard ("ACGS"): Its Role and Scope in Corporate Governance.	28 Mar 2023	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
Pendalaman Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E: tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Examination of Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-E: regarding Obligation to Submit Information.	05 Apr 2023	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
Strategi Ketahanan Perlindungan Data pada Perusahaan. Enterprise Data Protection Resiliency Strategy.	02 Aug 2023	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
<i>CG Officer Workshop Series Investor Relations Batch 3</i> .	19-20 Sep 2023	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
Pendalaman POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Examination of POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.	23 Nov 2023	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")
"Economic Outlook 2024: Penguatan Ekonomi Indonesia" "Economic Outlook 2024: Strengthening the Indonesian Economy"	14 Dec 2023	Indonesia Corporate Secretary Association ("ICSA")

Unit Audit Internal Internal Audit Unit

Unit Audit Internal merupakan unit independen internal yang membantu Dewan Komisaris dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, serta memastikan manajemen yang efektif dan transparan. Unit tersebut melakukan pemeriksaan, penilaian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan kegiatan unit usaha dan sistem pengendalian internal.

Profil Kepala Audit Internal

Berdasarkan surat penunjukan oleh Direksi Perseroan No.002/HRD&GA/SKD//2020 tertanggal 15 Januari 2020, Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh:

The Internal Audit Unit is an internal independent unit that assists the Board of Commissioners in implementing GCG principles, as well as ensuring effective and transparent management. The unit conducts inspection, assessment, evaluation, and provides recommendations related to business unit activities and internal control systems.

Head of Internal Audit Profile

Based on the appointment letter by the Company's Board of Directors No.002/HRD&GA/SKD//2020 dated January 15, 2020, the Head of Internal Audit Unit is held by:

GUNTUR SUNARYO PUTRO

Kepala Unit Audit Internal / Head of Internal Audit

Warga negara Indonesia, 33 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta tahun 2013.

Indonesian citizen, 33 years old, domiciled in Jakarta. Obtained a bachelor's degree in Economics from the Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta in 2013.

Riwayat Pekerjaan Career History

2020 – to date	<i>Audit Internal Department Head</i> PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	2014 – 2016	<i>Audit Officer</i> PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2019 – to date	<i>Independent Control Department Head</i> PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)	2014	<i>Audit Officer</i> PT Ahad Detha Utama
2016 – 2019	<i>Internal Audit Section Head</i> PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)		

Pendidikan dan Pelatihan Internal Audit

Sepanjang tahun 2023, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Internal Audit telah mengikuti pelatihan/ seminar/workshop sebagai berikut:

Internal Audit Education and Training

Throughout 2023, in order to improve knowledge and understanding in order to assist the implementation of duties and responsibilities, Internal Audit has participated in the following training/seminars/workshops:

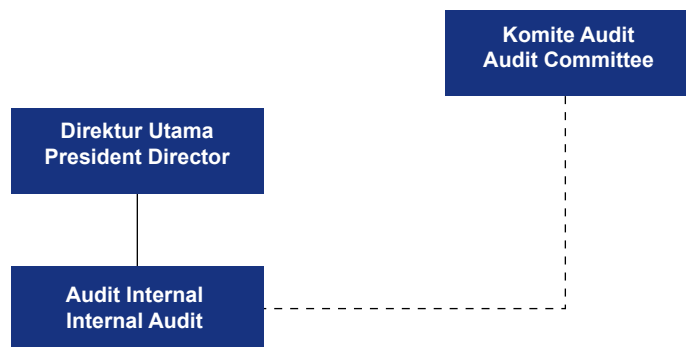
Pelatihan Unit Audit Internal / Internal Audit Unit Trainings		
Pelatihan / Trainings	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Sertifikasi Dasar Managerial	15 – 17 Mar 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (LSPPI)
ISO 27001 – 2013	09 May 2023	PT Lemti Unindo Inovasi
Forum Penguatan Audit Internal	12 Oct 2023	OJK
<i>Anti Fraud Investigation Training</i>	18 Oct 2023	MLI Learning Center

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Internal Audit Unit Structure and Position

The Structure and Position of the Internal Audit Unit Company Tbk are as follows:



Piagam, Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Sesuai ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Piagam Audit Internal Perseroan telah diperbaharui dan ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 26 September 2022.

Unit ini memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana kerja Audit tahunan yang fleksibel dengan menggunakan metode perencanaan berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan control yang diidentifikasi oleh Manajemen dan disetujui oleh Direktur Utama.
2. Melaksanakan perencanaan audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas khusus yang diminta oleh manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Menjaga staf audit sehingga senantiasa profesional, memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memadai.
4. Melaksanakan jasa konsultasi, selain dari jasa assurance audit internal, untuk membantu manajemen dalam upaya mencapai tujuannya.
5. Mengevaluasi dan menilai penggabungan/ konsolidasi fungsi, perubahan jasa, proses, operasi, dan proses pengendalian sehubungan dengan Standar Profesional Audit Internal dari Institute Internal Audit (IPPF/IIA) serta selaras dengan peraturan OJK.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit.
8. Menetapkan dan memastikan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memonitor dan memastikan bahwa proses perbaikan telah dilakukan secara efektif dan efisien.
9. Melakukan investigasi terhadap dugaan fraud yang terjadi di dalam Perseroan termasuk koordinasi dengan unit kerja lain dalam melakukan investigasi.

Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal

Selama tahun 2023, Unit Audit Internal telah melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian internal dalam rangka tata kelola Perusahaan sesuai SOP, Kebijakan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku;
2. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap efektivitas sistem dan prosedur sehubungan dengan risiko Perseroan;
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa;
4. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit;
5. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan, menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilaksanakan;

Charter, Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority regulation No.56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charter, the Company's Internal Audit Charter has been ratified by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners on September 26, 2022.

This unit has the following duties and responsibilities:

1. Prepare and develop a flexible annual Audit work plan utilizing appropriate risk-based planning methods, including risks and controls identified by Management and approved by the President Director.
2. Carry out the approved annual audit plan, including special assignments requested by the management and Board of Commissioners through the audit committee.
3. Maintain audit staff to be professional, possess adequate knowledge, skills, and experience.
4. Perform consulting services, other than internal audit assurance services, to assist management in achieving its objectives.
5. Evaluate and assess the possibility of merging/ consolidating functions, changing services, processes, operations, and control processes in relation to the Internal Audit Professional Standards from Institute of Internal Audit (IPPF/IIA) and follow OJK regulation.
6. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management.
7. Prepare an audit report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
8. Establish and ensure a follow-up process for inspection results to monitor and ensure that the improvement process has been carried out regularly effective and efficient.
9. Conducting investigations into alleged fraud that occurred within the Company, including coordinating with other work units in carrying out investigations.

Implementation of Internal Audit Unit Duties

During 2023, the Internal Audit Unit has carried out the following tasks:

1. Carry out checks/audits on the operation of the internal control system in the context of corporate governance in accordance with the applicable SOPs, Company policies and regulations;
2. To analyze and evaluate the effectiveness of systems and procedures in relation to the Company's risks;
3. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined;
4. Prepare an Audit Report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners and/ or Audit Committee;
5. Monitor, analyze and report on the implementation of follow-up improvements that have been suggested, develop a program to evaluate the quality of internal audit activities that was carried out;

6. Bekerja sama dengan Komite Audit; dan
7. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal Perseroan yang ditugaskan Direktur Utama.

6. Cooperate with the Audit Committee; and
7. Carry out special tasks within the scope of the Company's internal control assigned by the President Director.

Pengendalian Internal Internal Control

Uraian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal bagi Perseroan adalah suatu mekanisme yang diterapkan oleh Perseroan yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan Perseroan agar melakukan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Perseroan sehingga efisiensi dan kebijakan manajemen terpenuhi.

Sistem pengendalian internal yang efektif bagi Perseroan merupakan unsur penting yang dapat membantu manajemen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan, dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha.

Pengendalian internal diterapkan oleh Perseroan untuk menjamin tercapainya, sebagai berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Efektivitas dan efisiensi operasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut dicapai oleh Perseroan dengan tujuan, sebagai berikut:

- **Kepatuhan**
Menjamin bahwa semua kegiatan usaha Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Perseroan.
- **Informasi**
Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Operasional**
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Perseroan dari risiko kerugian.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perseroan terus berupaya untuk memastikan sistem pengendalian sudah berjalan secara efektif. Untuk itu Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing individu.
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
3. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan.

Description of the Internal Control System

The internal control system for the Company is a mechanism implemented by the Company which includes organizational structure, methods and measures to maintain and direct the Company to carry out activities in accordance with the Company's Vision and Mission so that efficiency and management policies are met.

An effective internal control system for the Company is an important element that can help management to increase compliance with applicable laws and regulations, ensure the availability of correct, complete and timely financial reports and management reports, as well as meet the efficiency and effectiveness of business activities.

Internal control is implemented by the Company to ensure the achievement of the following:

1. Reliability of financial reporting.
2. Effectiveness and efficiency of operations.
3. Compliance with applicable laws and regulations.

This is achieved by the Company with the following objectives:

- **Compliance**
Ensures that all of the Company's business activities have been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, both provisions determined by the government and internal policies and procedures established by the Company.
- **Information**
Providing correct, complete, timely, and relevant reports required in order to make informed and accountable decisions.
- **Operational**
Improve effectiveness and efficiency in using assets and other resources in order to protect the Company from the risk of loss.

Effectiveness of the Internal Control System

The Company continues to strive to ensure that the control system is running effectively. For that, the Company does the following:

1. An organizational structure that clearly describes the duties and responsibilities of each individual.
2. Establishment of authority and responsibility for monitoring compliance with policies, procedures and limits.
3. Adequacy of procedures to ensure compliance with applicable laws and regulations.
4. The suitability of the internal control system with the type and level of risk inherent in the Company's business activities.

5. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
 6. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
 7. Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Perseroan.
 8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.
 9. Dokumentasi prosedur operasional, temuan audit serta tanggapan pengurus Perseroan terhadap hasil audit.
 10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Perseroan yang bersifat material dan tindakan pengurus Perseroan untuk memperbaikinya.
5. Establishment of reporting lines and clear segregation of functions from operational work units with work units that carry out control functions.
 6. Accurate and timely reporting of financial and operational activities.
 7. Effective, independent and objective review of the Company's operational policies, framework and procedures.
 8. Adequate testing and review of management information systems.
 9. Documentation of operational procedures, audit findings and the Company's management response to the audit results.
 10. Periodic and continuous verification and review of the handling of the Company's material weaknesses and the actions of the Company's management to correct them.

Sistem Manajemen Risiko Risk Management System

Manajemen risiko merupakan aspek yang penting dalam memastikan kelangsungan usaha. Terkait hal itu, Perseroan terus meningkatkan kebijakan manajemen risiko dalam identifikasi, pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan risiko. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah untuk menjaga dan melindungi Perseroan melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitas usaha, serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Perseroan senantiasa berusaha membentuk dan mengembangkan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik GCG dan kepatuhan terhadap regulasi, yang tentunya harus didukung infrastruktur yang memadai serta proses bisnis yang terstruktur dan sehat.

Pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan merujuk kepada Peraturan OJK No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko di Perseroan meliputi:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kecukupan kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.

Risk management is an important aspect in ensuring business continuity. In this regard, the Company continues to improve its risk management policies in identifying, monitoring, controlling and managing risks. The main purpose of implementing risk management is to maintain and protect the Company through managing the risk of losses that may arise from business activities, as well as maintaining the risk level in accordance with the predetermined provisions.

The Company strives to establish and develop a strong risk culture, GCG practices and compliance with regulations, which must be supported by adequate infrastructure and healthy business processes.

The implementation of the Company's Risk Management refers to OJK Regulation No.44/POJK.05/2020 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions and OJK Circular Letter No.7/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Companies and Sharia Financing Companies.

Risk Management Implementation at the Company are as follow:

1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Adequacy of risk management policies and procedures as well as risk limit setting.
3. Adequacy of risk identification, measurement, control, and monitoring processes, as well as risk management information system.
4. Comprehensive internal control system.

Compliance Risk

Compliance Risk is the risk that the Company does not comply with and/or does not implement what is regulated by the laws and regulations applicable to the Company.

Perseroan mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mitigasi Risiko Kepatuhan

1. Perseroan memastikan tidak ada perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang dari atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan memastikan tidak ada perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Kelemahan aspek yuridis tersebut disebabkan antara lain oleh:

1. Kelemahan perjanjian akibat tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian dan pengikatan jaminan secara sempurna.
2. Ketidadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Adanya tuntutan hukum.

Mitigasi Risiko Hukum

1. Secara periodik Perseroan melakukan evaluasi *Legal document* untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
2. Perseroan sudah memiliki Departemen Litigasi untuk menangani kasus-kasus hukum.

Risiko Strategis

Risiko strategis adalah potensi kegagalan dalam mencapai tujuan Perseroan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya terhadap perubahan eksternal.

Mitigasi Risiko Strategis

1. Pengelolaan risiko strategis dimulai dengan pembuatan rencana bisnis untuk mengoptimalkan potensi pendapatan Perseroan.
2. Perseroan memastikan bahwa struktur organisasi, infrastruktur, kondisi keuangan, permodalan, SDM dan kompetensi manajerial, serta sistem dan pengendalian yang ada telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi dan rencana bisnis Perseroan. Secara berkala dilakukan analisis pencapaian target-target yang telah ditetapkan untuk dapat ditentukan tindak lanjutnya.
3. Setiap Divisi/Departemen memiliki rencana bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Melakukan evaluasi atas strategi pembiayaan dan pemasaran, operasi, teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi karyawan.

The Company has a strong commitment to comply with the laws and regulations and always takes preventive measures to prevent the violation of the applicable laws and regulations.

Compliance Risk Mitigation

1. The Company ensures that there is no behavior or activity of the Company that deviates from or violates the prevailing laws and regulations.
2. The Company ensures that there is no behavior or activity that deviates or violates the generally accepted standards.

Legal Risk

Legal risk is the risk that arises as a result of lawsuits and/or the weakness of the juridical aspect.

The weakness of the juridical aspect is caused by the following:

1. Weaknesses in the agreement due to not fulfilling the legal requirements of an agreement and binding collateral perfectly.
2. The absence and/or changes in laws and regulations that cause a transaction that has been carried out by the Company to be against the law.
3. A Lawsuit.

Legal Risk Mitigation

1. The company periodically evaluates Legal documents to ensure compliance with applicable regulations.
2. The Company has formed a Litigation Department to handle legal cases.

Strategic Risk

Strategic risk is the potential failure to achieve the Company's objectives due to inadequacy or failure in planning, determining and implementing strategies, making appropriate business decisions, and/or being less responsive to external changes.

Strategic Risk Mitigation

1. Strategic risk management begins with drawing up a business plan to optimize the Company's income potential.
2. The Company ensures that the organizational structure, infrastructure, financial condition, capital, HR and managerial competence, as well as the existing systems and controls are adequate to support the implementation of the Company's strategies and business plans. The Company also periodically carries out an analysis of the targets to determine the follow-up actions.
3. Each Division/Department has a business plan prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.
4. Evaluate the strategy of financing and marketing, operations, information technology, and improve employee competence.

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perseroan.

Penanganan risiko operasional dalam Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan.

Mitigasi Risiko Operasional

1. Pengertian yang jelas oleh semua lini yang terkait terhadap risiko yang melekat pada setiap tahapan proses kegiatan operasional yang berhubungan terutama dengan persetujuan dan pencairan pembiayaan, pelayanan konsumen, pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan.
2. Pembagian tugas yang jelas dan terpisah antara pelaksana dan kontrol. Sebagai pelaksana, aktivitas yang dikerjakan berdasarkan *Standard Operating Procedures* (SOP) baku Perseroan, sedangkan fungsi kontrol memastikan aktivitas sudah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh SOP.
3. Perseroan menggunakan Sistem Teknologi Informasi yang handal agar kelangsungan dan kelancaran pengoperasian sistem dapat terjamin. Perseroan sudah menerapkan sistem *online* dan *real time* sehingga dengan demikian pihak manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional secara langsung, dan dengan cepat dapat mengambil keputusan strategis dan tepat untuk memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi akibat kelalaian, tidak berfungsinya sistem, maupun penyimpangan dari pelaksanaan SOP dan/atau kebijakan Perseroan.
4. Perseroan menerapkan *Risk Control Self Assessment* ("RCSA"), suatu konsep manajemen risiko yang dibentuk berdasarkan SOP yang berlaku dalam Perseroan, untuk menelaah dan mengukur besarnya potensi risiko-risiko yang berlangsung selama proses internal untuk menghasilkan status risiko operasional, dan dilaporkan secara periodik.
5. Perseroan senantiasa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan karyawannya dengan berbagai pelatihan melalui MLI *Learning Center* agar dapat menekan seminimal mungkin frekuensi *human error* dan sistem operasional serta dampak kerugian finansial yang mungkin terjadi.
6. Memastikan bahwa semua lini yang terkait telah memahami risiko pada setiap tahap kegiatan operasional terutama yang berhubungan dengan persetujuan dan pencairan kredit, pelayanan konsumen, pembukuan, dan penyusunan laporan.
7. Pemisahan tugas antara pelaksana dan kontrol secara tegas berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksana bekerja berdasarkan SOP, sedangkan kontrol memastikan bahwa aktivitas pelaksanaan telah sesuai dengan SOP.

Operational Risk

Operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations.

The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- Risk identification
- Risk measurement
- Risk management, supervision and control

The three steps above are inseparable unified processes.

Operational Risk Mitigation

1. A clear understanding by all lines concerned regarding the risk inherent in each stage of the processes of operational activities relating primarily to the approval and disbursement of financing, customer service, book keeping and reporting.
2. A clear segregation of duties between executors and controller. Executors, carry out activities based on the Company's Standard Operating Procedures (SOP), while the control functions ensure that the activities are done in accordance with the requirements outlined by the SOP.
3. The Company uses a reliable Information Technology System so that the continuity and smooth operation of the system can be guaranteed. The Company has implemented an online and real time system so that management can monitor all operational activities directly, and can quickly make strategic and appropriate decisions to mitigate possible risks that occur due to negligence, system malfunctions, or deviations from SOP implementation and/or Company policy.
4. The Company implements a Risk Control Self Assessment (RCSA), a concept of risk management, which was established based on applicable SOP in the Company, to examine and measure the extent of potential risks occurring throughout the internal processes in order to generate operational risk status, and is reported periodically.
5. The Company always develops the skills and knowledge of its employees with various trainings through the MLI Learning Center in order to minimize the frequency of human errors and operational systems as well as the impact of possible financial losses.
6. Ensure that all related lines understand the risks that may occur at every stage of operational activities, especially those related to credit approval and disbursement, customer service, bookkeeping, and reporting.
7. Segregation of duties between executor and control is strictly based on their respective duties and responsibilities. Executors work based on SOPs, while controls ensure that implementation activities are in accordance with SOPs.

8. Proses pencatatan transaksi keuangan (*accounting*) dilakukan melalui sistem *built in control* yang berjenjang dan terintegrasi.
9. Membuat *back-up* melalui *Disaster Recovery Center* ("DRC") atas data-data operasional untuk menghindari terganggunya kegiatan operasional jika seluruh data hilang akibat gangguan sistem, kebakaran, banjir, huru-hara, atau gempa bumi.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan / atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko ekuitas. Manajemen risiko pada risiko pasar dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perseroan.

Mitigasi Risiko Pasar

1. Perseroan menerapkan *natural hedging* untuk antisipasi pinjaman dan pembiayaan dengan mata uang yang sama. *Natural hedging* adalah menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran sehingga tidak terjadi lonjakan keperluan kas. Salah satu cara untuk mengimbangi *long exposure* terus menerus yang sudah diantisipasi terhadap mata uang tertentu adalah mendapatkan utang berdenominasi mata uang tersebut.
2. Perseroan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap cross currency* untuk meminimalisir risiko nilai tukar. Melalui *swap cross currency*, Perseroan setuju untuk mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut memenuhi kriteria dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.
3. Perseroan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap suku bunga* untuk meminimalisir risiko suku bunga. Kontrak *swap suku bunga* mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada akun aset ataupun liabilitas Perseroan akibat perubahan suku bunga. Perseroan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap suku bunga*. Melalui *swap suku bunga*, Perseroan setuju untuk mempertukarkan selisih antara suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang yang dihitung sesuai dengan nilai nosional yang telah disepakati. Nilai wajar dari *swap suku bunga* pada akhir periode pelaporan ditentukan dengan mendiskonto nilai arus kas di masa yang akan datang dengan menggunakan kurva pada akhir periode pelaporan dan risiko kredit yang melekat pada kontrak. Nilai rata-rata suku bunga ditentukan dari nilai saldo pada akhir periode pelaporan. Kontrak *swap suku bunga* mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

8. The process of recording financial transactions (*accounting*) is carried out through a tiered and integrated built-in control system.
9. Make backups through the Disaster Recovery Center ("DRC") of operational data to avoid disruption of operational activities if all data is lost due to system disruption, fire, flood, riot or earthquake.

Market Risk

Market risk is risk in the position of assets, liabilities, equity, and / or administrative accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions. Market risk includes, among others, interest rate risk, exchange rate risk and equity risk. Market risk management is carried out to minimize the possibility of negative impacts due to changes in market conditions on the Company's assets and capital.

Market Risk Mitigation

1. The Company applies natural hedging to anticipate loans and financing in the same currency. Natural hedging is balancing income and expenses so there is no spike in cash needs. One way to offset the anticipated continuous long exposure to a particular currency is to acquire debt denominated in that currency.
2. The Company uses derivative instruments called cross currency swaps to minimize exchange rate risk. Through cross currency swaps, the Company agreed to exchange loans in foreign currency with loans in Rupiah using a specific exchange rate on the transaction date, in which the contract meets the criteria and is effective as a cash flow hedging instrument.
3. The Company uses derivative instruments called interest rate swaps to minimize interest rate risk. Interest rate swap contracts exchange a floating interest rate with a fixed rate, in which the contract is intended and effective as a cash flow hedging instrument.

Interest Risk

Interest risk is the risk of loss in the Company's financial assets or liabilities due to changes in interest rates. The Company manages interest rate risk using derivative instruments, which is interest rate swaps. Through an interest rate swap, the Company agrees to exchange the difference between a fixed interest rate and a floating interest rate calculated according to the agreed notional value. The fair value of interest rate swaps at the end of the reporting period is determined by discounting the value of future cash flows using a curve at the end of the reporting period and credit risk attached to the contract. The average value of the interest rate is determined from the balance value at the end of the reporting period. An interest rate swap contract exchanges a floating interest rate with a fixed rate, which is designated and effective as a cash flow hedge instrument.

Risiko Mata Uang

Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penyaluran piutang pembiayaan dan penerimaan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Perseroan mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokkan sebanyak mungkin penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang.

Risiko nilai tukar terhadap mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas di masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi dikarenakan adanya perubahan nilai tukar terhadap mata uang asing. Eksposur risiko Perseroan terhadap nilai tukar berasal dari kas di bank, piutang sewa pembiayaan, aset lain-lain, utang bank, utang pemegang saham, biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Pada risiko ini, Perseroan mengelola risiko dengan menyesuaikan kondisi mata uang piutang sewa pembiayaan dengan mata uang pendanaan pinjaman yang ditetapkan oleh bank. Perseroan mengelola risiko nilai tukar dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap cross currency*.

Melalui *swap cross currency*, Perseroan setuju untuk mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut memenuhi kriteria dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Manajemen risiko pada risiko likuiditas dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Mitigasi Risiko Likuiditas

1. Mempererat hubungan dengan sumber dana, yaitu bank-bank pemerintah, swasta, dan asing, serta menjaga kredibilitasnya dan dapat memperoleh dana yang lebih besar dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif.
2. Bekerja sama dengan beberapa bank nasional, bank pemerintah, dan bank asing untuk memperoleh berbagai fasilitas pinjaman termasuk pinjaman dalam skema *demand loan* dan *term loan*. Perseroan mengharuskan plafon pinjaman sebesar minimal 110% (seratus sepuluh persen) dari jumlah dana yang dibutuhkan.
3. Menjaga saldo kas yang memadai setiap hari untuk menutupi kebutuhan dana pada hari tersebut, serta memperoleh dana dari Pinjaman Rekening Koran ("PRK") untuk memenuhi kebutuhan dana selama 5 (lima) hari kerja.
4. Menerapkan kebijakan pengaturan arus kas yang ketat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dana.
5. Menagih pinjaman secara efektif untuk meminimalkan tunggakan dan menjaga perputaran kas yang sesuai dengan rencana operasional.

Currency Risk

The Company is exposed to the effects of fluctuations in foreign exchange rates mainly due to transactions of denominated foreign currencies such as distribution of finance lease receivables and receipt of loans denominated in foreign currencies. The Company manages foreign currency exposure by matching receipts and payments in each individual currency, as much as possible.

Exchange rate risk against foreign currencies is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in the exchange rate of foreign currencies. The Company's risk exposure to the exchange rate comes from cash in banks, finance lease receivables, other assets, bank loans, loan from shareholder, accrued expenses and other payables.

At this risk, the Company manages risk by adjusting the condition of the finance lease receivables with the loan funding currency specified by the bank. The Company manages exchange rate risk by using a derivative instrument, namely cross currency swap.

Through cross currency swaps, the Company agrees to exchange loans received in foreign currencies for loans in Rupiah using a specific exchange rate at the date of commencement of the transaction, where the contract meets the criteria and is effective as a cash flow hedge instrument.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk due to the Company's inability to meet its maturing liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.

Risk Management on liquidity risk is carried out to minimize the possibility of the Company's inability to obtain cash flow funding sources.

Liquidity Risk Mitigation

1. Strengthen relationships with sources of funds, namely state, private, and foreign banks, as well as maintaining their credibility to obtain larger funds with more competitive interest rates.
2. Cooperate with national banks, state banks, and foreign banks to obtain loan facilities including demand loans and term loans scheme. The Company requires a loan plafond of at least 110% (one hundred and ten percent) of the required amount of funds.
3. Maintain an adequate cash balance every day to cover the need for funds on that day, and obtain funds from an Overdraft Loan ("PRK") to meet the need for funds for 5 (five) working days.
4. Implement a strict cash flow regulation policy so that there is no excess or shortage of funds.
5. Collect loans effectively to minimize overdue and maintain cash flow in accordance with operational plans.

6. Menerapkan jadwal pembayaran yang optimal kepada vendor sehingga arus kas tidak terganggu.
7. Menganalisis dan memantau pengeluaran dana untuk kegiatan operasional dan belanja modal.
8. Melakukan efisiensi biaya di setiap bagian tanpa mengurangi efektivitas kegiatan operasional.
9. Menyediakan Metode Pembayaran :
 - *Payment Point Virtual Account*
 - Transfer
 - *Autodebet*
 - *Post-dated Cheque (Cek / Bilyet Giro)*
10. Merencanakan dan mengatur pemasukan dana dari angsuran konsumen dan pencairan dana bank dan pengeluaran dana ke *dealer/showroom/vendor/supplier*, pembayaran kewajiban ke bank, dan meminimalisasi dana yang tidak digunakan.
11. Perseroan mengelola risiko likuiditas untuk memastikan bahwa Perseroan akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para Pemegang Saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Risiko kredit terdapat pada seluruh aktivitas Perseroan yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*). Secara langsung, Perseroan menghadapi risiko seandainya debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara debitur dengan Perseroan.

Mitigasi Risiko Kredit

1. Perseroan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang ketat antara lain survei calon konsumen, verifikasi data konsumen dan persyaratan uang muka yang berlaku. Prinsip 5C dan 1P (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral dan Purpose*) sudah merupakan standar setiap analisis kelayakan konsumen. Juga pemilihan dan analisis *dealer/showroom/ vendor* merupakan kesatuan dari analisis persetujuan proses pembiayaan.
2. Analisis calon *customer* dan pemantauan *customer* secara menyeluruh. Perseroan menggunakan jasa survei eksternal untuk validasi informasi calon *customer* dan survei yang telah dilakukan oleh *Credit Marketing Officer* ("CMO") tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perseroan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari *customer*, status jaminan, dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan *customer* sehingga *customer* yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal.

6. Implement optimal payment schedules to vendors so that cash flow is not disrupted.
7. Analyze and monitor the expenditure of funds for operational activities and capital expenditures.
8. Carry out cost efficiency in each section without reducing the effectiveness of operational activities.
9. Providing Payment Methods:
 - *Payment Point Virtual Account*
 - Transfer
 - *Autodebet*
 - *Post-dated Cheque (Check/Giro Bill)*
10. Plan and manage the inflow of funds from customer installments and disbursement of bank funds and disbursement of funds to dealers/showrooms/vendors, payment of obligations to banks of the Company, and minimize unused funds.
11. The Company manages liquidity risk to ensure their sustainability in addition to maximizing Shareholder returns through optimizing debt and equity balances.

Credit Risk

Credit risk is the risk due to the failure of other parties to fulfill their obligations to the Company, including credit risk due to debtor failure, such as credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.

Credit risk exists in all of the Company's activities whose performance depends on the performance of the debtor, the counterparty, and/or the issuer. The Company directly faces the risk if debtors are unable to fulfill their obligations in repaying the credit in accordance with the agreement.

Credit Risk Mitigation

1. The Company prioritizes the aspect prudence of in giving a strict credit process, including surveys of prospective customers, verification of consumer data and applicable down payment requirements. The Principles 5C and 1P (*Character, Capacity, Capital, Economic Conditions, Collateral and Purpose*) has become the standard in every consumer feasibility analysis. Also, *dealer/ showroom/ vendor* selection and analysis is an integral part of the financing approval process analysis.
2. Analysis of potential customer and thorough customer monitoring. The Company uses external survey services to validate prospective customer information and surveys carried out *Credit Marketing Officer* ("CMO") without reducing the speed in making financing approval decisions. The Company also monitors the characteristics of installment payments from customer, collateral status, and conditions that can affect customer' sources of income so that problematic customer can be anticipated early.

3. Untuk pembiayaan *retail* dan *corporate*, proses pembiayaan yang dijalankan ketat, mulai dari survei calon *customer*, verifikasi data *customer*, hingga pemberian uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, agar risiko yang mungkin timbul dapat dikendalikan dengan baik.
 4. Perseroan juga melakukan analisa terhadap *dealer/showroom/vendor*. Setiap *dealer/showroom/vendor* yang menjadi rekanan Perseroan dibuatkan perjanjian kerja samanya.
 5. Melaksanakan strategi penagihan yang efektif dan efisien dengan mewajibkan *customer* untuk melakukan pembayaran angsuran melalui metode pembayaran yang telah ditetapkan, serta mengingatkan *customer* atas tagihan yang akan jatuh tempo melalui *Short Message Service* ("SMS"). Perseroan melakukan penagihan (*desk collection, field collection, remedial*) jika *customer* melanggar kontrak pembiayaan dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, untuk mengantisipasi dan mencegah piutang yang tidak tertagih yang dapat menurunkan *margin* usaha.
 6. Memperkuat pengawasan internal dengan mendayagunakan tim audit internal dan *Independent Control Unit* untuk memantau seluruh aktivitas di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Setiap penyimpangan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai peraturan Perseroan dan dicegah dengan menyesuaikan SOP.
 7. Menganalisis dan memantau calon *customer* secara menyeluruh, baik dengan tim survei internal maupun eksternal, melakukan validasi informasi dari calon *customer* dan survei yang telah dilakukan tanpa mempengaruhi proses persetujuan kredit, serta karakteristik pembayaran angsuran oleh *customer*, status jaminan dan kondisi-kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan *customer* sehingga masalah dideteksi lebih dini.
 8. Untuk pembiayaan korporasi, Perseroan menerapkan kebijakan hanya akan bertransaksi dengan rekanan yang memiliki kelayakan kredit dan mendapatkan jaminan yang memadai, bila sesuai, sebagai sarana mengurangi risiko kerugian atau tunggakan. Perseroan hanya bertransaksi dengan entitas, tergantung pada rating kreditnya, yang mana pemegang saham melakukan bisnis, entitas yang memberikan jaminan memadai, induk perusahaan, pelanggan prospektif dan entitas-entitas yang ditunjuk oleh Mizuho Leasing Co., Ltd.
 9. Perseroan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
3. For the retail and corporate, the financing process is very strict, starting from surveys of potential customers, verification of customers data, to providing advances according to applicable regulations, so that risks that may arise can be properly controlled.
 4. The Company also conducts analysis on dealers/showrooms/vendors. Each dealer/showroom/vendor partnering with the Company has a cooperation agreement.
 5. Implement an effective and efficient collection strategy by requiring customers to make installment payments through predetermined payment methods, as well as reminding customers of bills that will be due through the Short Message Service ("SMS"). The Company collects (*desk collection, field collection, remedial*) if the customers violates the financing contract and does not have good faith to settle their obligations, to anticipate and prevent uncollectible receivables that can reduce operating margins.
 6. Strengthen internal control by utilizing the internal audit team and Independent Control Unit to monitor all activities at the Head Office and Branch Offices. Every violation is followed up and sanctioned according to the Company's regulations and prevented by complying with the SOPs.
 7. Analyze and monitor prospective customers thoroughly, both with internal and external survey teams, validate information from prospective customers and surveys carried out without affecting the credit approval process, as well as the characteristics of installment payments by customers, collateral status and other conditions that may affect sources of customers income so that problems are detected early.
 8. For corporate financing, the Company implements a policy of only transacting with partners that have credit worthiness and obtain adequate collateral, if suitable, as a means of reducing the risk of loss or arrears. The Company only transacts with entities, depending on their credit rating, in which the shareholders do business, entities providing adequate collaterals, holding companies, prospective customers and entities appointed by Mizuho Leasing Co., Ltd.
 9. The Company also implements the Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction program as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 8 of 2023 concerning Implementation of Anti- Money Laundering Prevention of Terrorism Financing, and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction program in the Financial Services Sector.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko reputasi timbul karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perseroan yang kurang efektif.

Mitigasi risiko reputasi:

1. Perseroan memiliki fungsi pengaduan konsumen dengan standar maksimal penyelesaian keluhan 10 hari kerja.
2. Perseroan mempunyai unit yang bertugas melakukan monitoring pemberitaan terkait Perseroan di media.

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perseroan terus berupaya untuk penerapan manajemen risiko Perseroan berjalan secara efektif. Perseroan memandang pengelolaan risiko sangatlah penting. Tugas utama dari Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah melakukan analisa untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi Perseroan, merumuskan tingkat risiko serta kebijakan pengelolaan risiko untuk menjaga tingkat risiko Perseroan.

Untuk itu Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan melakukan penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perseroan berdasarkan POJK No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan NonBank dan SEOJK No.11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Salah satu faktor dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan adalah penilaian Faktor Profil Risiko. Penilaian Profil Risiko ini di klasifikasikan berdasarkan 8 (delapan) tipe risiko yang kemudian dilaporkan kepada regulator setiap tahunnya. Penilaian ini mencakup penilaian Risiko Inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.
2. Perseroan membentuk Komite Manajemen Risiko sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko di Perseroan. Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan penerapan manajemen risiko dilakukan secara konsisten dan efektif di Perseroan.
3. Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab mengevaluasi pengelolaan risiko serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sanksi Administratif Administrative Sanction

Pada tanggal 1 Maret 2023 Perseroan mendapatkan Surat Teguran Tertulis atas tidak disampaikannya Laporan Perubahan Rencana Utang Luar Negeri (RULN) Periode Tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Pelaporan Kegiatan lalu Lintas Devisa, Perseroan wajib menyampaikan seluruh laporan RULN dan perubahan RULN secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Batas waktu penyampaian Laporan Perubahan Rencana Utang Luar Negeri tersebut yaitu pada tanggal 15 Juni 2022. Perseroan telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan teguran tertulis tersebut.

Reputational Risk

Reputational risk is the risk due to a decrease in the level of stakeholder trust originating from negative perceptions of the Company. Reputation risk arises due to negative media coverage and/or rumors about the Company, as well as the Company's ineffective communication strategy

Reputational risk mitigation:

1. The Company has consumer complaints function with a maximum standard of complaint resolution of 10 working days.
2. The Company has a unit tasked with monitoring news related to the company in the media.

Effectiveness of Risk Management System

The Company strives to implement risk management effectively. To the Company, risk management is very important. The main task of the Risk Management Unit is to conduct analysis to identify the risks faced by the Company, formulate risk levels and risk management policies to maintain the Company's risk levels.

To that end, the Company does the following:

1. The Company conducts its own soundness assessment based on OJK Regulation No.28/POJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness of the NonBank Financial Services Institutions and OJK Circular letter No.11/SEOJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness of Financing Companies and Sharia Financing Companies. One of the factors used in the Company's Soundness Assessment is the assessment of the Risk Profile Factor. This Risk Profile Assessment is classified based on 8 (eight) types of risk which are then reported to the regulator every year. This assessment includes an assessment of Inherent Risk and an assessment of the Quality of Risk Management Implementation.
2. The Company established a Risk Management Committee as a form of implementation of the active supervision of the Board of Directors on the implementation of risk management in the Company. The Risk Management Committee was formed to ensure the implementation of risk management is carried out consistently and effectively in the Company.
3. The Risk Monitoring Committee has duties and responsibilities to evaluate risk management and provide recommendations to the Board of Commissioners.

On March 1, 2023, the Company received a Written Reprimand Letter for Failure to Submit the Report on Changes to the Foreign Debt Plan (RULN) for the 2022 Period. Following Bank Indonesia Regulation Number 21/2/PBI/2019 dated January 7, 2019, regarding Foreign Exchange Activity Reporting, the Company is required to submit all RULN and RULN amendment reports completely, correctly, and on time. The deadline for submitting the Foreign Debt Plan Amendment Report was June 15, 2022. The Company has completed its obligations based on the written warning.

Litigasi Litigation

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum yang berdampak material.

As of the issuance date of this Annual Report, the Company has not faced any legal cases with any material impact.

Kode Etik Code of Conducts

Kode etik dan budaya Perseroan merupakan bagian dari prioritas utama bagi insan Perseroan dalam menjaga tanggung jawab dan profesionalisme kerja serta kepercayaan dari konsumen. Pelaksanaan kode etik merupakan bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Kode etik menjadi pedoman dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis yang antara lain mengatur tentang, sebagai berikut:

The Company's code of conduct and culture are top priority for the Company's employees in maintaining work responsibilities and professionalism to gain the trust of the consumers. The code of conduct is part of the implementation of Good Corporate Governance. The code of conduct serves as a guideline for actions that adhere to the Company's values and business ethics, which regulates the following:

Nepotisme

Karyawan Perseroan dilarang untuk melibatkan diri dalam suatu transaksi apabila memiliki hubungan saudara/keluarga dengan rekan usaha, konsumen atau karyawan lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Jika karyawan memiliki hubungan saudara/keluarga dengan karyawan lain, maka karyawan tersebut wajib untuk melaporkan hal tersebut kepada Divisi HR & GA untuk menghindari benturan kepentingan.

Nepotism

The Company's employees are prohibited from engaging in a transaction if they have a family relationship with business partners, customers or other employees involved in the transaction. If the employee has a family relationship with another employee, the employee is required to report the matter to the HR & GA Division to avoid conflicts of interest.

Usaha Pribadi

Karyawan dilarang untuk terlibat dalam usaha pribadi di lingkungan kantor karena mengganggu aktivitas kerja dan dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

Personal Business

Employees are prohibited from engaging in personal business in the office environment because it interferes with work activities and can lead to abuse of authority and office facilities for personal gain.

Kerahasiaan

Karyawan wajib untuk menjaga dan merahasiakan seluruh informasi milik Perseroan, termasuk rencana dan strategi Perseroan, informasi mengenai pemasaran, keuangan, kegiatan operasional dan informasi strategis lainnya, sejak bergabung sebagai karyawan hingga tidak lagi bekerja sebagai karyawan Perseroan.

Confidentiality

Employees are obliged to maintain and keep confidential all information belonging to the Company, including the Company's plans and strategies, information regarding marketing, finance, operational activities, and other strategic information, from joining as an employee until no longer working as an employee of the Company.

Persaingan yang Sehat

Perseroan selalu mendukung persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya. Seluruh kegiatan usaha dan kegiatan karyawan harus berdasarkan persaingan yang sehat yang berlandaskan etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Seluruh karyawan wajib untuk mengupayakan agar hal tersebut dilaksanakan dan diwujudkan karena akan berdampak terhadap reputasi dan pertumbuhan Perseroan. Ketentuan mengenai kode etik memuat tentang:

Fair Competition

The Company always supports fair business competition in carrying out all its business activities. All business activities and employee activities must be based on fair competition based on ethics and morals prevailing in society. All employees are obliged to strive for this to be implemented and realized because it will have an impact on the Company's reputation and growth. The provisions of the code of ethics contain:

1. Saluran Komunikasi.
2. Tanggung Jawab Karyawan Utama.
3. Perlindungan terhadap Harta Milik Perusahaan.
4. Hubungan dengan Pemasok, Pelanggan, dan Mitra Usaha.
5. Interaksi dengan Pemerintah.
6. Menerapkan Kode Etik pada setiap aktivitas Pekerja.
7. Budaya anti korupsi.
8. Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik.

1. Communication Channels.
2. Key Employee Responsibilities.
3. Protection of Company Property.
4. Relationship with Suppliers, Customers, and Business Partners.
5. Interaction with the Government.
6. Applying the Code of Ethics to Every Worker Activity.
7. Anti-corruption culture.
8. Sanctions for violations of the Code of Ethics.

Ketentuan mengenai penerapan kode etik ini berlaku bagi seluruh jajaran Direksi, dan karyawan. Guna mendukung penerapan Kode Etik, Perseroan telah melakukan sosialisasi Peraturan Perusahaan beserta Etika Bisnis dan Etika Perilaku kepada seluruh karyawan Perseroan dan bagi karyawan baru di sosialisasikan pada saat *training* orientasi karyawan baru.

Seluruh karyawan wajib mematuhi semua isi dan ketentuan dari Peraturan Perusahaan beserta Etika Bisnis dan Etika Perilaku tersebut, dan apabila ada Pelanggaran yang dilakukan maka akan menerima sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan apabila diperlukan bila pelanggaran itu menyangkut hal yang masuk kategori tindakan melawan hukum akan diserahkan/dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Provisions regarding the implementation of this code of ethics apply to all levels of the Board of Directors, and employees. To support the implementation of the Code of Ethics, the Company has socialized the Company Regulations along with the Business Ethics and Code of Conduct to all employees of the Company, and new employees are socialized during the New Employee Orientation training.

All employees are required to comply with all contents and provisions of the Company's Regulations along with the Business Ethics and Code of Conduct, and if there is a violation committed, they will receive sanctions following the applicable rules and if necessary, if the violation involves matters that fall into the category of illegal acts, it will be submitted/reported to the competent authorities.

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan Direksi Share Ownership Program by Employees and Board of Directors

Pada tahun 2023, belum terdapat kajian terkait program kepemilikan saham oleh pegawai dan Direksi.

In 2023, there are no study of share ownership program by employees and the Board of Directors yet.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Untuk merealisasikan upaya penegakan prinsip GCG dan menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab Perseroan, pada tanggal 29 Agustus 2017 telah menyediakan media komunikasi untuk pelaporan *fraud* dengan nama *Whistleblowing System* (WBS) dan diterbitkan pedoman terkait WBS melalui Surat Keputusan Direksi Nomor DIR-0007/SKD/V/2020 tertanggal 1 November 2020 dan diperbaharui melalui Surat Keputusan Direksi dengan Nomor DIR-001/TK-CORSEC/SKD/IX/22 tertanggal 26 September 2022 tentang Mekanisme Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System*.

WBS merupakan bagian dari pengendalian internal Perseroan untuk mengurangi risiko terhadap adanya pelanggaran dan sebagai salah satu media pelaporan dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran etika dan hukum di Perseroan. Informasi yang disampaikan dalam WBS akan dijamin kerahasiaan baik berupa identitas pelapor maupun informasi yang dilaporkan. Untuk itu akses terhadap WBS dibatasi dan hanya bisa diakses oleh penanggung jawab yaitu Kepala satuan unit Internal Audit dan Direktur Utama Perseroan.

Media / sarana untuk penyampaian informasi yang disediakan adalah:

- **Mailbox** : Menara Astra Lt.32
Jl. Jendral Sudirman
Kaveling 5-6
Jakarta 10220
- **Email** : Whistle@mizuho-ls.co.id
- **Mobile Phone (WhatsApp)** : 0811.1262003

Pada tahun 2023, jumlah pengaduan yang masuk dan diproses sebagai berikut:

To realize efforts to uphold GCG principles and create a clean and responsible work situation. The Company, on August 29, 2017 has provided communication media for fraud reporting with the name Whistleblowing System (WBS) and issued guidelines related to WBS through the Board of Directors Decree Number DIR-0007/SKD/V/2020 dated November 1, 2020 and updated through the Decree of the Board of Directors with Number DIR-001/TK-CORSEC/SKD/IX/22 dated September 26, 2022 concerning Whistleblowing Mechanism.

WBS is part of the Company's internal control to reduce the risk of violations and as one of the reporting media in preventing and detecting potential violations of ethics and law in the Company. Information submitted in the WBS will be guaranteed confidentiality both in the form of the identity of the reporter and the information reported. For this reason, access to the WBS is limited and can only be accessed by the person in charge, namely the Head of the Internal Audit unit and the President Director of the Company.

The media / means for delivering information provided are:

- **Mailbox** : Menara Astra 32nd Floor
Jl. Jendral Sudirman
Kaveling 5-6
Jakarta 10220
- **Email** : Whistle@mizuho-ls.co.id
- **Mobile Phone (WhatsApp)** : 0811.1262003

In 2023, the number of reports received and processed is as follows:

Parameter Parameters	Jumlah Pengaduan Total Complaints	Diproses Processed	Laporan Terbukti Proven Report
Pengaduan Yang Masuk Reports Received	7	4	1

○ Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Guidelines on The Implementation of Good Corporate Governance

Peseroan menerapkan dan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG") sebagaimana diwajibkan oleh OJK dalam Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, sebagai mana telah diubah melalui Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perseroan melaporkan Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi aspek :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
3. Penanganan benturan kepentingan.
4. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
5. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal.
6. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai.
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
8. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
9. Pengungkapan kepemilikan saham bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.
10. Pengungkapan hal-hal penting lainnya.
11. Laporan Strategi *Anti Fraud*.
12. Sistem *Whistleblowing*.

Hasil Laporan Penerapan Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, tidak terdapat kekurangan sehingga tidak memerlukan rencana tindak (*action plan*) atas kekurangan penerapan tata kelola.

Tingkat Kesehatan Perusahaan Faktor Tata Kelola

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian

The Company implements and implements Good Corporate Governance ("GCG") as required by the OJK in the OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, as amended through the OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.

Transparency Implementation of Good Corporate Governance

In accordance with OJK Circular No. 15/SEOJK.05/2016 Concerning Reports on the Implementation of Good Corporate Governance for Finance Companies, the Company reports Transparency on the Implementation of Good Corporate Governance, covering aspects of:

1. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Completion and implementation of duties of the Audit Committee or functions that assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the Internal Control System.
3. Handling conflict of interest.
4. Implementation of the compliance function, internal auditors and external auditors.
5. Implementation of Risk Management and Internal Control Systems.
6. Implementation of remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees.
7. Transparency of the company's financial and non-financial conditions that have not been disclosed in other reports.
8. Long term plan as well as work plan and annual budget.
9. Disclosure of share ownership for members of the Board of Directors and Board of Commissioners who reach 5% (five percent) or more, which includes the type and number of shares.
10. Disclosure of other important matters.
11. Anti-fraud Strategy Report.
12. Whistleblowing System.

The results of the Report on the Implementation of Transparency in the Implementation of Good Corporate Governance, there are no deficiencies so that there is no need for an action plan for deficiencies in the implementation of governance.

Soundness Level the Company GCG Factor

In accordance with OJK Regulation No. 28/POJK.05/2020 concerning Soundness Level Assessment of Financial Services Institutions and OJK Circular Letter No. 11/SEOJK.05/2020

Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan telah melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan untuk posisi 31 Desember 2023 dengan Risk Based Non-Bank Rating (RBNBR) dan hasil nilai Peringkat Komposit, yaitu PK-1.


Nilai ini membuktikan kesehatan Perseroan yang sangat baik sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif signifikan yang disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari faktor penilaian, antara lain penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Dari aspek faktor Tata Kelola, Pelaksanaan Tata Kelola dinilai pada peringkat 1 yang mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang secara umum sangat baik.

concerning Soundness Level Assessment of Financing Companies and Sharia Financing Companies, the Company has conducted a Soundness level self-assessment for the position of December 31, 2023 with Risk Based Non-Bank Rating (RBNBR) and the resulting Composite Rating value, namely PK-1.

This score proves the Company's soundness is very good so that it is considered very capable of facing significant negative influences caused by changes in business conditions and other external factors. This is reflected in the assessment factors, including the implementation of Good Corporate Governance, risk profile, profitability, and capitalization which are generally very good. In the event that there are weaknesses, they are generally not significant.

From the aspect of Governance factor, the Governance Implementation is rated at 1 which reflects that the Company's management has implemented good corporate governance which is generally very good.

Hasil Penilaian Sendiri Untuk Tata Kelola Perusahaan / Self Assessment on Corporate Governance	
Peringkat / Rank	Keterangan / Description
 Sangat Baik / Excellent	<p>Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan kriteria/indikator. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.</p> <p>Implementation of Good Corporate Governance in accordance with the criterias / indicators. If there were any problems in the implementation, they were insignificant and can be immediately resolved with the normal actions by the Company's Management.</p>

Penetapan peringkat faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan berdasarkan analisis atas:

- a. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan;
- b. Kecukupan Tata Kelola atas struktur (*governance structure*), proses (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) pada Perseroan; dan
- c. Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Parameter atau indikator penilaian faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemegang Saham atau yang setara.
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
5. Penanganan benturan kepentingan.
6. Penerapan fungsi kepatuhan Perseroan.
7. Penerapan fungsi audit internal .
8. Penerapan fungsi audit eksternal.
9. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.

The determination of the Good Corporate Governance factor rating is based on the above analysis:

- a. Implementation of Good Corporate Governance principles in the Company;
- b. The adequacy of governance structure, governance process, and governance outcome of the implementation of governance in the Company; and
- c. Other information related to the Company's governance based on relevant data and information.

Parameters or indicators of assessment of Good Corporate Governance factors include:

1. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors.
2. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
3. Implementation of duties and responsibilities of Shareholders or equivalent.
4. Completeness and implementation of the Committee's duties.
5. Handling conflict of interest.
6. Implementation of the Company's compliance function.
7. Implementation of internal audit function.
8. Implementation of external audit function.
9. Implementation of risk management including internal control system.

10. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik dan pelaporan internal.
11. Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perseroan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat sesuai dengan kriteria/indikator.

Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

Analisis

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi prinsip-prinsip GCG. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, serta Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris terselenggara secara efektif.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dinilai baik mengingat pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dan fungsi lain telah berjalan efektif, rekomendasi Komite Audit dan fungsi lain bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan keputusan Dewan Komisaris, serta pelaksanaan rapat-rapat Komite Audit dan fungsi lainnya telah berjalan sesuai pedoman kerja masing-masing.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal. Fungsi kepatuhan telah memenuhi kriteria kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Perseroan telah memiliki pedoman audit internal sesuai yang ditetapkan OJK serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan audit eksternal telah berjalan efektif, hal ini tercermin dari pelaksanaan audit oleh Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia *Pacific* dan Jaringan Deloitte) telah sesuai dengan persyaratan umum yang ditetapkan dalam ketentuan serta kualitas dan cakupan hasil audit yang sangat baik. Selain itu, Kantor Akuntan Publik bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya sesuai kriteria yang ditetapkan.
4. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal telah berjalan baik dan efektif sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan, serta risiko-risiko yang dihadapinya. Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

10. Transparency of financial and non-financial conditions, reports on the implementation of good corporate governance and internal reporting.
11. The results of the self-assessment analysis by the Company show that the implementation of Good Corporate Governance is in accordance with the criteria/indicators.

This is reflected in the very adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there are weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, then in general these weaknesses are not significant and can be immediately resolved with normal actions by the Company's Management.

Analisis

1. The implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners has been carried out effectively and fulfills the principles of GCG. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners are able to act and make decisions independently, have competence and integrity in accordance with the size and complexity of the Company and have fulfilled the applicable regulations. In addition, the Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings, and Joint Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners are effectively organized.
2. The completeness and implementation of the duties of the Audit Committee or functions that assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system is considered good considering that the implementation of the duties of the Audit Committee and other functions has been effective, the recommendations of the Audit Committee and other functions are useful and can be used as a reference for the Board of Commissioners' decisions, and the implementation of Audit Committee meetings and other functions has been carried out in accordance with their respective work guidelines.
3. Implementation of compliance function, internal auditor, and external auditor. The compliance function has met the compliance criteria in accordance with the prevailing laws and regulations. The Company has an internal audit guideline as stipulated by OJK and is implemented effectively and efficiently. The implementation of external audits has been effective, this is reflected in the implementation of audits by Bayu M Dayat and Public Accountant Firm Imelda & Partners (Member Firm of Deloitte Asia Pacific and Jaringan Deloitte) in accordance with the general requirements set out in the provisions as well as the excellent quality and coverage of the audit results. In addition, the Public Accounting Firm acted independently in carrying out its duties in accordance with the established criteria.
4. The implementation of risk management and internal control systems has been running well and effectively in accordance with the objectives, size and complexity of the Company's business, as well as the risks it faces. The Board of Commissioners and Board of Directors have actively supervised the implementation of risk management policies and strategies.

5. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 6. Perseroan selalu transparan dalam menyampaikan kondisi keuangan dan non-keuangan Perseroan. Laporan tersebut disampaikan secara lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
 7. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
 8. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih.
 9. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, sehingga setiap pengambilan keputusan Direksi dilaksanakan secara independen dan profesional serta sesuai ketentuan yang berlaku.
 10. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, sehingga setiap pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan secara independen dan profesional serta sesuai ketentuan yang berlaku.
 11. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada OJK telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Implementation of remuneration policies and other facilities has been well implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.
 6. The Company is always transparent in conveying the Company's financial and non-financial conditions. The report is submitted in a complete, accurate, relevant and timely manner in accordance with applicable regulations.
 7. Long-term plans and annual work plans and budgets are prepared by taking into account external and internal factors, aspect of prudence, and applicable regulatory provisions.
 8. Disclosure of share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners reaching 5% (five percent) or more.
 9. All members of the Board of Directors do not have financial and family relationships with the other member of the Board of Directors, so that every decision-making of the Board of Directors is carried out independently and professionally and in accordance with applicable regulations.
 10. All members of the Board of Commissioners have no financial and family relationships with the other member of the Board of Commissioners, so that any decision making by the Board of Commissioners is carried out independently and professionally and in accordance with applicable regulations.
 11. Disclosure of other important matters to the OJK has been carried out properly in accordance with applicable rules and regulations.

Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM)

Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons (AML-PTF and PFPMDW)

Pada tanggal 14 Juni 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM). Dengan diberlakukannya POJK APU, PPT dan PPPSPM ini maka POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Direktur Utama sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU, PPT dan PPPSPM melakukan penunjukan kembali kepada unit satuan kerja Kepatuhan guna menyesuaikan POJK APU, PPT dan PPPSPM.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan menugaskan unit satuan kerja Kepatuhan sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT dan PPPSPM. Pejabat Program APU, PPT dan PPPSPM dibantu oleh Kepala Kantor Cabang dalam penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di Kantor Cabang. Pejabat Program APU, PPT dan PPPSPM ditetapkan bagian dari struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

On June 14, 2023 the Financial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 8 of 2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons (AML-PTF and PFPMDW). With the enactment of this, AML-PTF and PFPMDW POJK, POJK Number 12/POJK.01/2017 concerning Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons by Financial Service Providers in the Financial Services Sector and POJK Number 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons by Financial Service Providers in the Financial Services Sector are declared no longer valid.

The President Director as the Director that is responsible for implementing the AML-PTF and PFPMDW programs reappoints the Compliance work unit to adjust the POJK AML-PTF and PFPMDW.

In its implementation, the Company assigns the Compliance work unit as the person in charge of implementing the AML-PTF and PFPMDW program. The AML-PTF and PFPMDW Program Officer is assisted by the Head of Branch Office in implementing the AML-PTF and PFPMDW program at the Branch Office. The AML-PTF and PFPMDW Program Officer is established as part of the organizational structure and is responsible to the President Director.

Sesuai dengan POJK APU, PPT dan PPPSPM tugas dari penanggung jawab penerapan program APU, PPT dan PPPSPM adalah:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang ("TPPU"), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("TPPT"), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("PPPSPM") terkait dengan *customer*, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Menyusun, melakukan pengkinian, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1, untuk dimintakan pertimbangan Direksi;
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh *customer*;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam angka 2, telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi Perseroan, dan/atau modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSM;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan *customer* telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
6. Memantau rekening *customer* dan pelaksanaan transaksi *customer*;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi *customer* untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
8. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
9. Memastikan pengkinian data dan profil *customer* serta data dan profil transaksi *customer*;
10. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur POJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
11. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
12. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait;
13. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
14. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;

In accordance with POJK AML-PTF and PFPMDW, the duties of the person in charge of implementing the AML-PTF and PFPMDW program are:

1. Performing periodic risk assessments of Money Laundering Crimes ("TPPU"), Terrorism Financing Crimes ("TPPT"), and/or Mass Destruction Weapons Proliferation Financing ("PFPMDW") related to customers, countries or geographic areas, products, services, transactions, or distribution networks (*delivery channels*), at least once a year.
2. Compile, update, and propose policies and procedures for the implementation of AML-PTF and PFPMDW programs that have been prepared to manage and mitigate risks based on the risk assessment as referred to in number 1, for consideration by the Board of Directors;
3. Ensure the existence of a system that can identify, analyze, monitor and provide reports effectively regarding the profile, characteristics, or habitual transaction patterns carried out by the customer;
4. Ensure that the policies and procedures prepared as referred to in number 2, are in accordance with changes and developments which include, among others, products, services and technology in the financial services sector, activities, business scale, business complexity, business characteristics, volume of FSI transactions, and/or the mode of TPPU, TPPT and/or PFPMDW;
5. Ensuring that forms relating to Customers have accommodated the data required in the implementation of AML-PTF and PFPMDW programs;
6. Monitoring Customer accounts and the execution of customer transactions;
7. Evaluate the results of monitoring and analysis of customer transactions to ensure the presence or absence of Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, and/or financial transactions transferring funds from and to overseas;
8. Organize the results of monitoring and evaluation;
9. Ensuring the updating of customer data and profile as well as customer transaction data and profile;
10. Ensuring that business activities with a high risk of TPPU, TPPT and/or PFPMDW are effectively identified in accordance with the policies and procedures of the POJK and the provisions referred to in this OJK Regulation;
11. Ensure that there is a good communication mechanism from each related work unit to the special work unit or official responsible for the implementation of the AML-PTF and PFPMDW program by maintaining the confidentiality of information and taking into account anti-tipping-off provisions;
12. Conduct supervision related to the implementation of AML-PTF, and PFPMDW programs to related work units;
13. Ensure the identification of high-risk areas related to the implementation of AML-PTF and PFPMDW programs by referring to laws and regulations and adequate sources of information;
14. Receive, analyze, and compile Suspicious Financial Transaction and/or Cash Financial Transaction reports submitted by the work unit;

15. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri:
16. Memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ("DTTOT") dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("DPPSPM") telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPPSPM;
17. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai Perseroan;
18. Memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan
19. Melakukan tugas lain untuk penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.

Sepanjang tahun 2023, beberapa langkah dan kebijakan dalam implementasi APU, PPT dan PPPSPM, yaitu :

1. Ikut mengimplementasikan aplikasi elektronik GoAML untuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ("LTKM") dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai ("LTKT") kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK").
2. Pelaporan penyaluran pembiayaan setiap triwulan kepada PPATK ("SIPESAT").
3. Melakukan pelaporan rencana dan realisasi pengkinian data *customer* sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan sistem pelaporan APOLO.
4. Menindaklanjuti permintaan dari Mabes Polri dan OJK terkait DTTOT untuk memastikan apakah ada debitur Perseroan yang masuk dalam DTTOT.
5. Menindaklanjuti permintaan dari PPATK terkait dengan PPPSPM memastikan apakah ada debitur Perseroan yang tercantum dalam daftar PPPSPM.
6. Melakukan pengayaan pada daftar *watchlist* pada aplikasi SIPENDAR (Sistem Informasi Terduga Pendanaan Teroris) setiap triwulan.
7. Mengadakan pelatihan pada tanggal 5 Juli 2023 berkerja sama dengan PPATK dengan materi penerapan program APU, PPT. Pelatihan dan sosialisasi ini diikuti oleh karyawan Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
8. Menyempurnakan Formulir Aplikasi Pembiayaan yang akan digunakan oleh *Frontliner* dalam melakukan *Customer Due Diligence* (CDD).
9. Berkerja sama dengan Divisi HR & GA dalam menyempurnakan prosedur penyaringan untuk memastikan standar yang tinggi pada penerimaan pegawai baru (*pre-employee screening*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, dan pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (*know your employee*) untuk mencegah Perseroan digunakan sebagai media atau tujuan TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM.

15. Compile reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, and/or fund transfer financial transactions from and to overseas:
16. Periodically monitor and ensure that the follow-up to List of Suspected Terrorist and Terrorist Organization ("DTTOT") and List of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons ("DPPSPM") is in accordance with laws and regulations regarding the prevention and eradication of TPPT and regulations regarding the prevention and eradication of PFPMDW;
17. Monitor, analyze and recommend training needs on the implementation of AML-PTF and PFPMDW programs for officials and/or employees of the Company;
18. Ensuring all activities for the implementation of AML-PTF, and PFPMDW programs are carried out properly; and
19. Perform other tasks for the implementation of AML-PTF, and PFPMDW programs.

Throughout 2023, several steps and policies in implementation of AML-PTF and PFPMDW, namely:

1. Implementing GoAML electronic application for Suspicious Financial Transaction Report ("LTKM") and Cash Financial Transaction Report ("LTKT") to Financial Transaction Reporting and Analysis Center ("PPATK").
2. Reporting quarterly financing disbursements to PPATK ("SIPESAT").
3. Reporting the plan and realization of customer data updates in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation using the APOLO reporting system.
4. Follow up requests from the National Police Headquarters and OJK regarding DTTOT to ascertain whether any of the Company's debtors are included in DTTOT.
5. Following up on requests from PPATK related to the PFPMDW to ascertain whether any of the Company's debtors are included in the PFPMDW list.
6. Enrich the watchlist in the SIPENDAR application (Suspected Financing of Terrorism Information System) every quarter.
7. Conducted training on July 5, 2023 in collaboration with PPATK on the implementation of AML-PTF program. This training and socialization was attended by Head Office and Branch Office employees.
8. Improved the Financing Application Form that will be used by Frontliners in conducting Customer Due Diligence (CDD).
9. Collaborate with the HR & GA Division in refining screening procedures to ensure high standards in the recruitment of new employees (pre-employee screening), both permanent and non-permanent employees, and the introduction and monitoring of employee profiles (know your employee) to prevent the Company from being used as a medium or purpose for TPPU, TPPT, and/or PFPMDW.

Kebijakan Antikorupsi Anti-Corruption Policy

Korupsi merupakan tindak pidana dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu, Perseroan mendukung penuh ketegasan Pemerintah untuk memberantas korupsi di segala lini. Kebijakan anti korupsi merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk memperkuat dukungan anti korupsi, Perseroan telah mengatur larangan korupsi dalam Kode Etik Perseroan, yang di dalamnya antara lain mengatur kebijakan tentang hadiah dan sumbangan (donasi) yang tidak dibenarkan. Untuk itu, seluruh pengurus dan karyawan Perseroan tidak dibenarkan secara hukum dan etika usaha menerima dan memberi hadiah, sumbangan dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang diterima di dalam maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik sesuai Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1).

Sejalan dengan dukungan terhadap anti korupsi, Perseroan juga memiliki kebijakan terkait anti suap yang tertuang didalam kebijakan nomor P-RCA 009/VI/23 tentang Anti Penyuapan dan Korupsi. Dalam hal ini, Perusahaan mendefinisikan Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima, baik dengan atau tanpa mengharapkan imbal balik, oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap) serta pihak eksternal termasuk namun tidak terbatas pada konsultan, *advisor*, *outsourced*, vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan. sementara Korupsi didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Didalam kebijakan tersebut tertuang prinsip, komitmen, program-program Perseroan yang berkaitan dengan anti korupsi dan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan Perseroan.

Perlindungan Konsumen Customer Protection

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan tanggal 18 April 2022. Peraturan ini menggantikan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

POJK tersebut di atas bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, perlu mendorong konsumen sektor jasa keuangan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang baik, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan. Saat ini sektor jasa keuangan yang dalam perkembangannya semakin kompleks dan dinamis, memerlukan penguatan pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan.

Corruption is a criminal acts and an extraordinary crime that is very detrimental to state finances. Therefore, the Company fully supports the government's firmness to eradicate corruption on all fronts. The anti-corruption policy refers to Law No. 20 of 2001 concerning the Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. To strengthen anti-corruption support, the Company has regulated the prohibition of corruption in the Company's Code of Conduct, which among others regulates the policy on gifts and donations that are not justified. For this reason, all management and employees of the Company are not allowed by law and business ethics to receive and give gifts, donations in the form of money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, medical treatment, and other facilities (gratuities) received inside or outside the country and which are carried out using electronic means or without electronic means in accordance with Law No. 20 of 2001 Article 12 B paragraph (1).

In line with the support for anti-corruption, the Company also has a policy related to anti-bribery as stated in policy number P-RCA 009/VI/23 on Anti-Bribery and Corruption. In this case, the Company defines Gratification as all gifts received, either with or without expectation of return, by members of the Board of Commissioners, Directors and employees of the Company (both permanent, contract and non-permanent employees) as well as external parties including but not limited to consultants, advisors, outsourced, vendors or other parties working for and on behalf of the Company. while Corruption is defined as every person who unlawfully commits an act of enriching himself or herself or another person or a corporation that can harm state finances or the state economy.

The policy contains principles, commitments, the Company programs related to anti-corruption and strict sanctions for those who violate the Company's provisions.

The Financial Services Authority (OJK) has issued OJK Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector which on April 18, 2022. This regulation replaces OJK Regulation Number 1/POJK .07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.

The POJK mentioned above aims to create a financial system that grows in a sustainable, stable manner and is able to protect the interests of customers and society. it is necessary to encourage customers in the financial services sector to create a good customers protection system, increase customers and community empowerment, and raise awareness of financial service business actors. Currently, the financial services sector, which is developing increasingly complex and dynamic, requires strengthening of regulations on the protection of customers and the public in the financial services sector.

Dalam rangka mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang efektif, menjaga kepercayaan Konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Penyedia Jasa Keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut dilakukan dalam kegiatan desain, penyediaan dan penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan dan sengketa Konsumen. Sepanjang tahun 2023 Fungsi Perlindungan Konsumen telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan penilaian sendiri Perlindungan Konsumen secara tepat waktu melalui sistem Sipeduli OJK.
2. Memastikan bahwa pada bagian Marketing Perseroan dalam menawarkan produk melalui sarana komunikasi pribadi kepada calon debitur pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu diluar hari libur Nasional dan pada jam yang telah di tentukan oleh POJK 6/POJK.07/2022 dan telah dibakukan dalam Pedoman Perlindungan Konsumen Perseroan.
3. Memastikan bahwa pada bagian Penagihan Perseroan selalu mengedepankan cara-cara yang baik dan sopan saat melakukan penagihan kepada debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran.
4. Memastikan bahwa pada bagian penerimaan pengaduan debitur selalu melayani dengan baik terhadap debitur yang sedang melakukan pengaduan.

Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Sepanjang tahun 2023 Penanggung Jawab Fungsi Perlindungan Konsumen mengikuti Sosialisasi Perlindungan Konsumen, antara lain :

No.	Tema Sosialisasi / Socialization Theme	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
1	Sosialisasi Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di Perusahaan Pembiayaan. Socialization of Consumer Protection Portal Application (APPK) in Financing Companies.	2 Aug 2023	Otoritas Jasa Keuangan "OJK".
2	Pengawasan <i>Market Conduct</i> dan Perlindungan Konsumen di SJK Pasca Penerbitan POJK 6/POJK.07/2022 dan UU P2SK. Market Conduct Supervision and Consumer Protection in Financial Services After the Issuance of POJK 6/POJK.07/2022 and the P2SK Law.	10 Nov 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia "LPPI".
3	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan, Literasi Inklusi dan Perlindungan Konsumen. Get to Know More about the P2SK Law Arrangements in the Context of Strengthening, Inclusion Literacy and Consumer Protection.	23 Nov 2023	Otoritas Jasa Keuangan "OJK Institute".

Kemudian di akhir tahun 2023 OJK kembali menerbitkan Peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, yaitu Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 ("POJK 22/2023") tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023 OJK. POJK 22/2023 ini menggantikan POJK 6/POJK.07/2022.

In order to realize effective Consumer and Community Protection, maintain Consumer trust, and ensure compliance with statutory provisions, Financial Service Providers must comply with the principles of consumer and public protection, namely adequate education, information disclosure and transparency, fair treatment and responsible business conduct, asset protection, privacy and Customers data, as well as effective and efficient handling of complaints and dispute resolution.

Fulfillment of these principles is carried out in design activities, providing and delivering information, marketing, drafting agreements, providing services for the use of products and/or services, as well as handling and resolving consumer complaints and disputes. Throughout 2023 the Consumer Protection Function has carried out the following activities:

1. Submitting Consumer Protection self-assessment reports in a timely manner through the OJK Sipeduli system.
2. Ensuring that the Company's Marketing department offers products through personal communication facilities to prospective debtors from Monday to Saturday excluding national holidays and at hours determined by POJK 6/POJK.07/2022 and has been standardized in the Company's Consumer Protection Guidelines.
3. Ensure that the Company's Collection Department always prioritizes good and polite ways when collecting from debtors who experience delays in payment.
4. Ensure that the debtor complaint reception section always serves well to debtors who are making complaints.

Consumer Protection Socialization

Throughout 2023, the person in charge of the Consumer Protection Function participated in Consumer Protection Socialization, including:

Then at the end of 2023, OJK issued another OJK Regulation relating to Consumer Protection, namely OJK Regulation Number 22 of 2023 ("POJK 22/2023") concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector which came into force on December 22, 2023. POJK 22/2023 replaces POJK 6/POJK.07/2022.

POJK 22/2023 tersebut adalah tindak lanjut dari Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) dimana terdapat kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan dalam rangka Pelindungan Konsumen di Sektor Keuangan yang memiliki implikasi dilakukannya penyesuaian beberapa pengaturan antara lain:

1. Pencantuman 7 (tujuh) prinsip Pelindungan Konsumen;
2. Penegasan dan penambahan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan serta hak, kewajiban, dan larangan bagi PUJK;
3. Penambahan cakupan klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian baku;
4. Penegasan pelindungan data Konsumen dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber;
5. Pelaksanaan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan oleh PUJK;
6. Kewajiban melaksanakan penanganan Pengaduan; serta
7. Tata cara penerapan dan batas pemenuhan sanksi.

Dan Perseroan pada saat ini sedang melakukan penyesuaian untuk pelaksanaan POJK 22/2023 ini.

Informasi terkait pengaduan konsumen dapat diakses melalui media publikasi Perseroan dari waktu ke waktu.

POJK 22/2023 is a follow-up to the Financial Sector Development and Strengthening Law (“P2SK Law”) where there is OJK’s authority in regulating and supervising in the context of Consumer Protection in the Financial Sector which has implications for adjusting several arrangements, among others:

1. Inclusion of 7 (seven) principles of Consumer Protection;
2. Affirmation and addition of rights and obligations of Consumers in the financial services sector as well as rights, obligations, and prohibitions for PUJK;
3. Addition of the scope of standard clauses that are prohibited to be included in the standard agreement;
4. Affirmation of consumer data protection and the obligation to ensure information system security and cyber resilience;
5. Implementation of Financial Literacy and Financial Inclusion by PUJK;
6. Obligation to carry out Complaint handling; and
7. Procedures for imposing and limits to the fulfillment of sanctions.

And the Company is currently making adjustments to the implementation of POJK 22/2023.

Information related to customer complaint can be accessed through the Company’s publication media from time to time.



Rekomendasi dalam Penerapan Pedoman GCG Recommendation on GCG Guidelines Implementation

Berikut ini adalah status rekomendasi dalam Penerapan Pedoman GCG Perusahaan Terbuka sesuai Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

The following is the recommendation status in the Implementation of GCG Guidelines for Public Company in accordance with OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines for Public Company.

Hubungan Perseroan Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham The relationships between The Company with Shareholders In Ensuring the Rights of Shareholders	
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Increased the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Implementation	
Rekomendasi / Recommendation	
<p>Perusahaan memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Keterangan : TELAH DITERAPKAN Perseroan telah memiliki prosedur pengambilan suara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 13 butir 10 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan. Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan, dan Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dinyatakan sebagai menyetujui usul keputusan RUPS dan kepada mereka tidak dimintakan untuk mengangkat tangan. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan menyampaikan kepada Pemimpin Rapat. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, tapi tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 	<p>The Company had methods or technical procedures for poll (<i>voting</i>), either open or closed that promoted the independence and the interests of shareholders.</p> <p>Description : APPLIED The Company has the following voting procedures:</p> <ol style="list-style-type: none"> In accordance with Article 12 paragraph 13 number 10 of the Company's Articles of Association, every share gives the owner the right to issue 1 (one) vote. Decision making is carried out with deliberations for consensus. If there are shareholders or their proxies who do not agree, then the decision will be decided with voting. If voting is called, it will be carried out verbally, by raising hands with the following procedure: <ol style="list-style-type: none"> First, those who disagree will be asked to raise their hands. Second, those who vote abstained will be asked to raise their hands, and Those who did not raise their hands in the first and second stages were declared as agreeing to the GMS decision and they were not asked to raise their hands. The notary will carry out the calculation and report the results of the vote in accordance with the Company's Articles of Association and submit it to the Chairperson of the Meeting. Shareholders with voting rights who attend the meeting but do not vote (abstain) are considered to vote the same as the majority vote of shareholders who vote.
Rekomendasi / Recommendation	
Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan.	All members of both the Board of Directors and the Board of Commissioners attended the Annual General Meeting of Shareholders.
<p>Keterangan : DIJELASKAN RUPS Tahunan yang diadakan oleh Perseroan di tahun 2023, dihadiri oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi.</p>	<p>Description : ELABORATED The Annual GMS held by the Company in 2023 was attended by 2 (two) members of the Board of Commissioners and all of the members of the Board of Directors.</p>
Rekomendasi / Recommendation	
Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Minutes of meeting of the GMS were available in the website of the Company for at least one (1) year.
<p>Keterangan : TELAH DITERAPKAN Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan.</p>	<p>Description : APPLIED A summary of the GMS minutes is available on the Company's website.</p>

Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan dengan Pemegang Saham atau Investor
Improved the Quality of Company Communications with Shareholders or investors

Rekomendasi / Recommendation

Perseroan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.

The Company had methods or a policy of communication with shareholders or investors.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Saat ini, komunikasi dengan pemegang saham atau investor seperti laporan keuangan berkala, laporan tahunan, keterbukaan informasi, pelaksanaan tata kelola melalui situs web Perseroan.

Description : **APPLIED**

At present, communication with shareholders or investors such as periodic financial reports, annual reports, information disclosure, governance implementation is carried out through the Company's website.

Rekomendasi / Recommendation

Perseroan mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.

The Company revealed its communication policy with Shareholders or investors in website.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Untuk kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor, maka komunikasi dilakukan melalui situs web Perseroan.

Description : **APPLIED**

For equality to all shareholders or investors, communication is carried out through the Company's website.

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
The Functions and Roles of the Board of Commissioners

Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
Strengthened the Membership and Compositions of the Board of Commissioners

Rekomendasi / Recommendation

Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan.

Determination of the number of members of the Board of Commissioners considered the condition of the Company.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki dari jabatannya selaku Komisaris Utama. Serta pada tanggal 5 November 2023, anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 18 Ayat 18 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir.

Description : **APPLIED**

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") held on March 21 2024, the GMS approved accepting the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as President Commissioner. And on November 5, 2023, a member of the Company's Board of Commissioners, namely Mrs. Roosniati Salihin as Commissioner, passed away, so in accordance with the provisions of Article 18 Paragraph 18 letter a. of the Company's Articles of Association, the term of office of the member of the Board of Commissioners automatically ended.

Selanjutnya, RUPS telah menyetujui mengangkat Bapak Yasuo Imaizumi selaku Komisaris Utama yang berlaku efektif pada tanggal 21 Maret 2024 dan menyetujui mengangkat Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris yang berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Furthermore, the GMS has approved to appoint Mr. Yasuo Imaizumi as President Commissioner effective on March 21, 2024 and approved to appoint Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner effective as of the receipt of approval from the OJK for the fit and proper test and in compliance with applicable laws and regulations.

Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

As of the issuance of this Annual Report, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Komisaris Utama : Yasuo Imaizumi
 Komisaris : Bhindawati Gunawan*
 Komisaris Independen : Mohammad Syahrial

President Commissioner : Yasuo Imaizumi
 Commissioner : Bhindawati Gunawan*
 Independent Commissioner : Mohammad Syahrial

*) Bahwa pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) That the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner of the Company is effective as of the receipt of approval from the OJK for the fit and proper test and in compliance with applicable laws and regulations

Rekomendasi / Recommendation

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.

Determination of the composition of the Board of Commissioners by considering the competence, knowledge and experience required.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Dengan latar belakang industri otomotif dan perbankan, maka keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dari anggota Dewan Komisaris Perseroan sudah memenuhi kebutuhan bisnis pembiayaan.

Description : **APPLIED**

With backgrounds in automotive and banking industry, the expertise, knowledge and experience of members of the Company's Board of Commissioners fulfilled the financing business needs.

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Improved the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Rekomendasi / Recommendation

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Perseroan sudah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, yang telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegal.

Description : **APPLIED**

The Company has a Nomination and Remuneration Committee, which has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners collegially.

Rekomendasi / Recommendation

Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan.

Self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners was disclosed in the Annual Report of the Company.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Perseroan sudah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Dewan Komisaris.

Description : **APPLIED**

The Company has designed a self-assessment policy for the Board of Commissioners.

Rekomendasi / Recommendation

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

The Board of Commissioners had a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners when involved in financial crimes.

Keterangan : **DIJELASKAN**

Perseroan memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Description : **ELABORATED**

The Company has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes as stated in the Company's Articles of Association.

Rekomendasi / Recommendation

Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

The Board of Commissioners or committee that ran the Nomination and Remuneration function developed succession policies in the Nomination process of members of the Board of Directors.

Keterangan : **TELAH DITERAPKAN**

Salah satu tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.

Description : **APPLIED**

One of the tasks of the Company's Nomination and Remuneration Committee is to review and propose candidates who qualify as members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be presented at the GMS.

Fungsi dan Peran Direksi Functions and Role of The Board of Directors	
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Strengthened Membership and Composition of the Board of Directors	
Rekomendasi / Recommendation	
<p>Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Keterangan : TELAH DITERAPKAN Jumlah anggota Direksi Perseroan adalah 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Konosuke Mizuta • Direktur : Shunsuke Kojima • Direktur : Andi Harjono • Direktur : Ade Rafida Saulina S • Direktur : Yudi Gustiawan <p>Jumlah Direksi sudah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta mempertimbangkan kondisi Perseroan, pemenuhan kebutuhan bisnis dan efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p>Determination of the number of Board of Directors members by considering the condition of the Company and decision making effectiveness.</p> <p>Description : APPLIED The number of members of the Company's Board of Directors is 5 (five) people, with the following composition:</p> <ul style="list-style-type: none"> • President Director : Konosuke Mizuta • Director : Shunsuke Kojima • Director : Andi Harjono • Director : Ade Rafida Saulina S • Director : Yudi Gustiawan <p>The number of Directors is in accordance with POJK No. 33/POJK.04/2014 Concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and taking into account the condition of the Company, fulfillment of business needs and effectiveness of the Board of Directors decision making.</p>
Rekomendasi / Recommendation	
<p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Keterangan : TELAH DITERAPKAN Dengan latar belakang dari industri otomotif, pembiayaan ritel, pembiayaan korporasi, dan keuangan, maka keahlian, pengetahuan dan pengalaman dari anggota Direksi Perseroan sudah memenuhi kebutuhan bisnis pembiayaan.</p>	<p>Determination of the composition of the Board of Directors members considering the diversity of skills, knowledge and experience required.</p> <p>Description : APPLIED With a background in automotive, retail financing, corporate financing, and finance, the expertise, knowledge and experience of the Company's Board of Directors fulfilled the financing business needs.</p>
Rekomendasi / Recommendation	
<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Keterangan : TELAH DITERAPKAN Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki pengetahuan di bidang akuntansi.</p>	<p>Member of the Board of Directors were in charge in accounting or financial has expertise and / or knowledge in the field of accounting.</p> <p>Description : APPLIED Member of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance has expertise in accounting.</p>
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Improved the Quality of Duties and Responsibilities of Board of Directors	
Rekomendasi / Recommendation	
<p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Keterangan : DIJELASKAN Perseroan sudah memiliki Komite Nominasi & Remunerasi, yang telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi secara kolegial sehingga tiap-tiap anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p>	<p>The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</p> <p>Description : ELABORATED The Company already has a Nomination & Remuneration Committee, which has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors in a collegial manner so that each member of the Board of Directors can contribute to improving the performance of the Board of Directors on an ongoing basis.</p>

<p>Rekomendasi / Recommendation</p>	
<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perseroan.</p> <p>Keterangan : DIJELASKAN Kinerja Direksi selalu diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan dan berdasarkan kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi yang diungkapkan pada Laporan Tahunan Perseroan.</p>	<p>Policy assessment (<i>self-assessment</i>) to assess the performance of the Board of Directors expressed through the annual report of the Company.</p> <p>Description : ELABORATED The performance of the Board of Directors is always disclosed through the Company's Annual Report and is based on a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors as disclosed in the Company's Annual Report.</p>
<p>Rekomendasi / Recommendation</p>	
<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Keterangan : DIJELASKAN Perseroan memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>The Board of Directors had policies related to the resignation of the Board of Directors members if they were involved in financial crimes.</p> <p>Description : ELABORATED The Company has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes as stated in the Company's Articles of Association</p>
<p>Partisipasi Pemangku Kepentingan Participation of Stakeholders</p> <p>Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Increased Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation</p>	
<p>Rekomendasi / Recommendation</p>	
<p>Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Keterangan : TELAH DITERAPKAN Untuk meminimalisasi terjadinya <i>insider trading</i>, melalui kebijakan pencegahan, dimana Perseroan menunjuk fungsi tertentu yang mengelola data/informasi yang bersifat rahasia.</p>	<p>The Company had a policy to prevent insider trading.</p> <p>Description : APPLIED To minimize insider trading through preventive policies, where the Company appoints certain functions that manage confidential data/information.</p>
<p>Rekomendasi / Recommendation</p>	
<p>Perseroan memiliki kebijakan anti-korupsi dan anti-<i>fraud</i>.</p> <p>Keterangan : TELAH DITERAPKAN Perseroan sudah memiliki kebijakan terhadap <i>fraud</i>, gratifikasi, serta praktik korupsi, baik memberi maupun menerima dari pihak lain.</p>	<p>The Company had a policy of anti-corruption and anti-fraud.</p> <p>Description : APPLIED The Company has made a policy on fraud, gratuity, and corrupt practices, both giving and receiving from other parties.</p>
<p>Rekomendasi / Recommendation</p>	
<p>Perseroan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>.</p> <p>Keterangan : TELAH DITERAPKAN Kebijakan tersebut tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Perseroan mempunyai komitmen yang kuat untuk bekerja sama dengan <i>Dealer/Showroom/Vendor</i> dan mitra usaha secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika bisnis, dengan senantiasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan cara-cara yang benar sesuai dengan ketentuan hukum dalam bertransaksi dengan <i>Dealer/ Showroom/Vendor</i>; Menghormati dan mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati. 	<p>The Company has a policy regarding the selection and capacity building of the suppliers or vendors.</p> <p>Description : APPLIED The policy is stated in the Corporate Governance Guidelines. The Company has a strong commitment to collaborate with Dealers/ Showrooms/Vendors and business partners responsibly and uphold business ethics, by always:</p> <ul style="list-style-type: none"> Use methods in accordance with legal provisions in dealing with Dealers/Showrooms/Vendors; Respect and comply with all provisions in the agreed cooperation agreement.

Rekomendasi / Recommendation	
Perseroan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor.	The Company had a policy on the fulfillment of the rights of creditors.

Keterangan : TELAH DITERAPKAN
Kebijakan tersebut tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Kerja sama dengan kreditor sebagai mitra usaha dilaksanakan dengan prinsip saling percaya, kesamaan hak, dan saling menguntungkan.

Description : APPLIED
The policy is stated in the Corporate Governance Guidelines. Cooperation with creditors as business partners is carried out with the principles of mutual trust, equal rights, and mutual benefit.

Rekomendasi / Recommendation	
Perseroan memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	The Company had a policy of whistleblowing systems.

Keterangan : TELAH DITERAPKAN
Perseroan sudah memiliki kebijakan sistem *whistleblowing* yang mencakup jenis pelanggaran, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, dan tindak lanjut pengaduan.

Description : APPLIED
The Company has a whistleblowing system policy that covers the types of violations, procedures of complaints, protection and guarantee of reporters confidentiality, complaints handling, and follow-up on complaints.

Rekomendasi / Recommendation	
Perseroan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	The Company had a policy of long-term incentives for Board of Directors and employees.

Keterangan : TELAH DITERAPKAN
Perseroan telah memiliki kebijakan pemberian insentif bagi karyawan yang telah bekerja 5 (lima) tahun dan kelipatannya.

Description : APPLIED
The Company has a policy of providing incentives for employees who have worked 5 (five) years and its multiples.

Keterbukaan Informasi Information Disclosure	
Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Improved the Implementation of Information Disclosure	

Rekomendasi / Recommendation	
Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	The Company utilized the use of information technology more widely besides Website as a media openness of The Company.

Keterangan : TELAH DITERAPKAN
Keterbukaan informasi dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia ("IDXnet") dan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Description : APPLIED
Disclosure of information is carried out through the Company's website, website of the Indonesia Stock Exchange ("IDXnet") and Indonesian Central Securities Depository ("KSEI").

Rekomendasi / Recommendation	
Laporan Tahunan Perseroan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Annual Report had disclosed the ultimate beneficiary owners in the ownership of Company shares at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the Company's ownership through the main shareholder and controller.

Keterangan : TELAH DITERAPKAN
Dalam Laporan Tahunan Perseroan telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan Perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Description : APPLIED
In the Annual Report the Company revealed the final beneficial owner in the ownership of a public company share of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the ownership of a publicly listed company through the main and controlling shareholders.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

MIZUHO



○ **Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan** Corporate Social and Environmental Responsibility Commitment and Policy

Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor, Perseroan senantiasa berusaha melindungi dampak keuangan, lingkungan dan sosial dengan bantuan kebijakan yang relevan. Perseroan memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”), yang secara khusus memandu berbagai langkah perlindungan lingkungan dan sosial serta memastikan bahwa para pemangku kepentingan dapat benar-benar merasakan manfaat berkelanjutan dari operasi dan bisnis Perseroan.

The Company is committed to always run its business by maintaining the balance on economic, social and environmental aspects. Therefore, in carrying out its business, the Company always tries to maintain economic, environmental and social impacts with the help of relevant policies. The company has a Sustainable Finance Action Plan (“RAKB”), which specifically guides various environmental and social protection measures and ensures that stakeholders can truly experience sustainable benefits from the Company’s operations and business.

○ **Visi, Misi dan Nilai Perseroan** Vision, Mission and Values of The Company

Visi

Vision

“Menjadi Perusahaan yang Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan”
“Be a Creator of a Sustainable World”

Misi

Mission

“Menghubungkan Kebutuhan untuk Menciptakan Masa Depan”
“Connect Needs to Create the Future”

Nilai-nilai Perseroan

Company’s Values

CHALLENGE

CREATE

CHANGE

COLLABORATE

Melalui kolaborasi, kami akan menghadapi tantangan, membuat perubahan, dan mempercepat penciptaan

Through collaboration, we will face challenges, enact change and accelerate creation

○ **Profil Perseroan** Company Profile

Data profil Perseroan dapat ditemukan pada halaman 32.

The Company profile data can be found on page 32.

Penjelasan Strategi Keberlanjutan Elaboration on Sustainability Strategy

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan kondisi sosial dan lingkungan yang dialami secara global saat ini telah merubah paradigma pembangunan bangsa-bangsa yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga perlu memperhatikan aspek sosial, pemerataan kesejahteraan serta kelangsungan lingkungan hidup yang menjadi dambaan manusia.

Sejalan dengan hal itu Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") sebagai salah satu sektor yang berkontribusi dalam pembangunan nasional perlu juga berpartisipasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Pengembangan sistem perekonomian yang selaras tersebut membutuhkan dukungan pendanaan dari LJK.

Sehubungan dengan hal tersebut OJK sebagai institusi yang melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerbitkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia tahun 2015 – 2019* pada bulan Desember 2014.

Sebagai kelanjutan, di tahun 2021 OJK telah menerbitkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025)* sebagai panduan untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya melalui Siaran Pers tanggal 5 Oktober 2021 Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengumumkan pembentukan *Task Force Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan ("SJK")*.

Perseroan sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan dan sekaligus Perusahaan Publik menyadari pentingnya masalah pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip *triple bottom line (profit-people-planet)* dalam kegiatan usahanya, dimana antara kepentingan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, ketiganya perlu berjalan dengan selaras. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya.

Sebagai Implementasi Perseroan telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB") untuk Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 yang telah disampaikan kepada OJK serta menyusun Laporan Keberlanjutan untuk Tahun 2020 dan 2021 serta Laporan Keberlanjutan yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan (*Integrated Report*) 2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia serta di-*upload* di *website* Perusahaan.

Executive Summary

The development of social and environmental conditions experienced globally at this time has changed the paradigm of development of the nations that are not only based on economic growth, but also needs to pay attention to the social aspects, equitable distribution of welfare and environmental sustainability which are human desires.

In line with the above, Indonesia has committed to develop a national economic system that promotes harmony between economic, social and environmental aspects. Financial Services Institutions ("LJK") as one of the sectors that contribute to national development also need to participate in the implementation of sustainable finance. The development of a harmonized economic system requires funding support from LJK.

In connection with this the OJK as an institution that conducts regulation and supervision in the financial services sector has issued OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. Previously, the Financial Services Authority had also issued a Sustainable Finance Roadmap in Indonesia for 2015 – 2019 in December 2014.

As a continuation, in 2021 the Financial Services Authority (OJK) has issued a Phase II Sustainable Finance Roadmap (2021 – 2025) as a guide to accelerate the application of environmental, social and governance principles in Indonesia which focuses on creating a comprehensive sustainable financial ecosystem, involving all parties related and encourage the development of cooperation with other parties. Furthermore, through a Press Release on 5 October 2021, the Financial Services Authority (OJK) has also announced the formation of a Sustainable Finance Task Force in the Financial Services Sector (SJK).

The Company as one of the Financial Services Institutions and at the same time a Public Company realizes the importance of sustainable financial management issues by applying the triple bottom line (profit-people-planet) principle in its business activities, where the interests of economic, social and environmental aspects, all three need to work in harmony. The Company is committed to implementing Sustainable Finance in its business activities.

As Implementation The Company has prepared a Sustainable Finance Action Plan ("SFAP") for 2020, 2021, 2022 and 2023 which has been submitted to the OJK and prepared a Sustainability Report for 2020 and 2021 as well as the Sustainability Report which is part of the 2022 Annual Report (Integrated Report) which has been submitted to the OJK and PT Bursa Efek Indonesia and also uploaded on the Company's website.

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Achievements of Sustainable Finance Action Plan

Pencapaian RAKB di tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 Perseroan adalah sebagai berikut:

The achievements of the SFAP in 2020, 2021, 2022 and 2023 of the Company are as follows:

Rencana Aktivitas Activity Plan	Indikator Pencapaian Achievement Indicator	Realisasi Waktu Pelaksanaan Actual Implementation Time	Pencapaian Actual Achievement
<p>Seminar konsep dasar Keuangan Berkelanjutan kepada sebagian besar pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dan karyawan di tingkat manajerial/ pengambil keputusan.</p> <p>Seminar on the basic concepts of Sustainable Finance to most of the management (Board of Commissioners and Directors) and employees at the managerial/decision-making level.</p>	<p>80% dari Dewan Komisaris, Direksi, Deputi Direktur dan Kepala Divisi telah mengikuti seminar Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>80% of the Board of Commissioners, Directors, Deputy Directors and Division Heads have attended the Sustainable Finance seminar.</p>	<p>Triwulan III 2020 Quarter III 2020</p>	<p>100% dari Dewan Komisaris, Direksi, Wakil Direktur dan Kepala Divisi telah mengikuti seminar Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>100% of the Board of Commissioners, Directors, Deputy Directors and Division Heads have attended the Sustainable Finance seminar.</p>
<p>Pelaksanaan edukasi internal kepada karyawan kunci di Kantor Pusat bekerja sama dengan pihak eksternal.</p> <p>Implementation of internal education for key employees at the Head Office in collaboration with external parties.</p>	<p>75% dari <i>Department Head</i> dan <i>Section Head</i> telah mengikuti training Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>75% of Department Heads and Section Heads have attended Sustainable Finance training.</p>	<p>Triwulan IV 2020 Quarter IV 2020</p>	<p>100% dari <i>Department Head</i> dan <i>Section Head</i> telah mengikuti training Keuangan Berkelanjutan (hanya dilakukan oleh pihak internal tanpa melibatkan pihak eksternal).</p> <p>100% of Department Heads and Section Heads have participated in Sustainable Finance training (only carried out by internal parties without involving external parties).</p>
<p>Melakukan program pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan kepada Kantor Cabang.</p> <p>Conduct training programs related to Sustainable Finance for Branches Office.</p>	<p>Sebanyak 50% dari Cabang telah mengikuti pelatihan Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>50% of the Branches have attended Sustainable Finance training.</p>	<p>Triwulan III 2021 Quarter III 2021</p>	<p>Pelatihan <i>awareness</i> Keuangan Berkelanjutan telah dilakukan kepada 18 orang kepala cabang (100% dari Kantor Cabang) pada bulan September 2021 melalui media Zoom.</p> <p>Sustainable Finance awareness training was conducted for 18 branch heads (100% of branches Office) in September 2021 via Zoom media.</p>
<p>Peningkatan kapasitas manajemen risiko analis kredit untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup yang tinggi bagi anggota Komite Kredit.</p> <p>Increasing the risk management capacity of credit analysts for business sectors that have high social and environmental risks for members of the Credit Committee.</p>	<p>Sebanyak 50% dari anggota Komite Kredit telah mengikuti <i>training</i> terkait manajemen risiko sosial dan lingkungan.</p> <p>As many as 50% of the members of the Credit Committee have attended training related to social and environmental risk management.</p>	<p>Triwulan IV 2022 Quarter IV 2022</p>	<p>Telah dilakukan <i>training</i> analisa kredit terkait manajemen risiko sosial dan lingkungan terhadap 31 (tiga puluh satu) orang dari unit bisnis korporasi dan unit bisnis ritel, termasuk Kantor Cabang pada bulan November 2022 melalui media Zoom.</p> <p>Credit analysis training has been carried out related to social and environmental risk management for 31 (thirty- one) people from the corporate business unit and retail business unit, including Branches Office in November 2022 via Zoom media.</p>

Rencana Aktivitas Activity Plan	Indikator Pencapaian Achievement Indicator	Realisasi Waktu Pelaksanaan Actual Implementation Time	Pencapaian Actual Achievement
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan yang mendukung praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan. Preparation of Guidelines for Sustainable Finance Companies that support environmentally friendly practices in company operations. Penyusunan SOP Keuangan Berkelanjutan.. Preparation the SOP of Sustainable Finance. 	<ul style="list-style-type: none"> Disusunnya pedoman internal terkait praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional Perusahaan. Perusahaan Developed internal guidelines related to environmentally friendly practices in the Company's operational activities. Standard Operasional Procedure (SOP) Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi. The Standard Operating Procedure (SOP) for Sustainable Finance has been approved by the Board of Directors. 	Triwulan III 2023 Quarter III 2023	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan yang telah disahkan oleh Direksi.</p> <p>Kebijakan dan prosedur tersebut terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Strategi Keuangan Berkelanjutan SOP Keuangan Berkelanjutan dalam proses pembiayaan <p>The Company has Sustainable Finance policies and procedures that have been approved by the Board of Directors.</p> <p>The policy and procedures consist of :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sustainable Finance Policy Sustainable Finance Strategy SOP Sustainable Finance in the Financing Process
<p>Inisiasi portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>Initiation of portfolio of Sustainable Finance products and/or services.</p>	<p>Peluncuran produk pembiayaan berkelanjutan.</p> <p>Launcing of the sustainable finance products.</p>	Triwulan III 2023 Quarter III 2023	<p>Perseroan saat ini telah memiliki portofolio yang dapat dikelompokkan ke dalam pembiayaan Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>The Company currently has a portfolio that can be classified into financing of Sustainable Finance.</p> <p>Pembiayaan dalam kategori Keuangan Berkelanjutan telah dimasukkan dalam laporan bulanan.</p> <p>The financing in the Sustainable Finance category has been included in the monthly report.</p>
<p><i>Refreshment</i> Program Keuangan Berkelanjutan kepada anggota Komite Kredit.</p> <p>Sustainable Finance Refreshment to Credit Committee members.</p>	<p>Sebanyak 50% dari anggota Komite Kredit telah mengikuti <i>refreshment program</i>.</p> <p>50% of Credit Committee member have attended the refreshment program.</p>	Triwulan IV 2023 Quarter IV 2023	<p>Telah dilakukan training kepada 63 peserta yang terdiri dari unit bisnis retail dan unit bisnis korporasi di kantor pusat dan cabang-cabang.</p> <p>Training has been conducted for 63 participants from of retail business units and corporate business units at the head office and branches.</p> <p>Materi <i>training</i> antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Refreshment</i> tentang <i>sustainable finance</i> Pengenalan analisa risiko <i>Environmental Social Governance</i> ("ESG") pada pengambilan keputusan pembiayaan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Taksonomi Hijau. <p>materials include:</p> <ul style="list-style-type: none"> Refreshment on sustainable finance ESRA – Environmental and Social Risk Analysis Sustainable Finance Business Category Green Taxonomy

Rencana Aktivitas Activity Plan	Indikator Pencapaian Achievement Indicator	Realisasi Waktu Pelaksanaan Actual Implementation Time	Pencapaian Actual Achievement
<p>Pelatihan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan kepada <i>Credit Marketing Officer</i> di Kantor cabang.</p> <p>Training in Sustainable Finance products and/or services to Credit Marketing Officers in Branches Office.</p>	<p>80% dari total <i>Credit Marketing Officer</i> telah mengikuti pelatihan produk dan/jasa Keuangan Berkelanjutan di Kantor Cabang.</p> <p>80% of total Credit Marketing Officers have attended the training on Sustainable Finance products and/or services in Branches Office.</p>	<p>Triwulan IV 2023 Quarter IV 2023</p>	<p>Pada akhir November 2023 atau awal Desember 2023, Perusahaan akan melakukan <i>training/pelatihan</i> tentang portofolio produk keuangan berkelanjutan kepada <i>Credit Marketing Officer</i> di Kantor Cabang.</p> <p>At end of November 2023 or beginning of December 2023, the Company plans to conduct a training on the sustainable financial product portfolio for Credit Marketing Officers at Branches Office.</p>

Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Objective of Sustainable Finance Action Plan

Berkaitan dengan komitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, Perusahaan menargetkan untuk mencapai Visi Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun faktor internal seperti kondisi keuangan, kapasitas teknis dan kapasitas organisasi.

Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan adalah sebagai berikut :

“Menjadi Perusahaan yang Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan dengan menyelaraskan aspek sosial dan lingkungan”

Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan mengimplementasikan strategi antara lain:

- Dukungan penuh manajemen dalam penerapan keuangan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam kegiatan usaha Perusahaan;
- Peran aktif karyawan yang memiliki *skill* yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maupun kompetensi penerapan keuangan berkelanjutan sesuai jenjang tugasnya;
- Memperhatikan aspek sosial baik secara internal untuk mewujudkan misi Perseroan dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, maupun secara eksternal lingkungan sosial Kantor Pusat dan Kantor Cabang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Perseroan dan menjaga risiko reputasi;
- Memperhatikan aspek ramah lingkungan di internal Perseroan dengan berbagai upaya untuk efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, kertas dan plastik.

In relation to the commitment to implement sustainable finance, Company targeted to achieve the sustainable finance vision in the year of 2024 by considering internal and external factors such as financial condition, technical capacity, and the organization capacity.

The objective of The Company's Sustainable Finance Action Plan are as follows :

“Be a Creator of a Sustainable World by Aligning Social and Environmental Aspects”

To achieve this goal, the Company implements strategies as follows:

- Full support of Managements in implementing sustainable finance by balancing economic, social, environmental and governance aspects in Company's business activities;
- The active role of employees who have the skills needed to carry out their duties and responsibilities as well as the competence in the implementation of sustainable finance in accordance with their level of duties;
- Paying attention to social aspects and internally to realize the Company's mission in developing competent human resources, as well as externally the social environment of the Head Office and Branches Office to increase public trust in the Company and maintain reputation risk;
- Paying attention to environmental friendly aspects within the Company with various efforts for energy efficiency, efficient use of water, paper and plastic.

Program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Action Plan Program

Langkah strategis Perseroan dalam upaya internalisasi prinsip keuangan Keuangan Berkelanjutan dalam rencana, kegiatan usaha dan dan pengembangan produk secara umum dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap Persiapan : Selama 2 (dua) tahun, yaitu 2020 - 2021
- b. Tahap Implementasi Awal : Selama 2 (dua) tahun, yaitu 2022 - 2023
- c. Tahap Implementasi Lanjutan : Selama 1 (satu) tahun, yaitu 2024

The strategic steps of The Company in an effort to internalize financial principles of Sustainable Finance in plans, business activities and product development in general are divided into 3 (three) stages, namely:

- a. Preparation Phase : For 2 (two) years, 2020 – 2021
- b. Initial Implementation Phase : For 2 (two) years, 2022 – 2023
- c. Advance Implementation Phase : For 1 (one) year, 2024

Tema dan program pada setiap tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Themes and programs at each of these phases can be described as follows:

Tema Utama Main Themes	Tahap Persiapan Preparation Phase		Tahap Implementasi Awal Initial Implementation Phase		Tahap Implementasi Lanjutan Advanced Implementation Phase
	2020	2021	2022	2023	2024
	Persiapan Dasar untuk Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Basic Preparations for Sustainable Finance Implementation.		Persiapan Infrastruktur Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Infrastructures Preparation		Pengembangan Portfolio Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Portfolio Development
Program	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan kepada sebagian besar pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dan karyawan di tingkat manajerial / pengambil keputusan Capacity building related to Sustainable Finance to most of the management (BOC and BOD) and employees at managerial/decision-making level • Pelaksanaan edukasi internal kepada karyawan kunci di Kantor Pusat bekerja sama dengan pihak eksternal Implementation of internal education to key employees at Head Office in collaboration with external parties 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian dalam rangka penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan Carrying out assessment in term of preparation of Company's Guidelines for Sustainable Finance • Peningkatan kapasitas manajemen risiko analis kredit untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup yang tinggi bagi kepada Anggota Komite Kredit Improving risk management capacity of credit analysts for business sectors with high social and environmental risk to Credit Committee Member • Melakukan program pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan kepada Kantor Cabang. Conducting training programs related to Sustainable Finance to Branches Office. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan berbagai kajian antara lain : Carrying out various assessments, including : <ul style="list-style-type: none"> v Permintaan pasar terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan Market demand for Sustainable Finance products and/or services v Kesesuaian produk dan/ atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan Conformity of existing products and/ or services with the sustainable business activity criteria v Pengembangan produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan Development of Sustainable products and/or finance services v Integrasi manajemen risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Refreshment Program Keuangan Berkelanjutan di cabang kepada anggota Komite Kredit Sustainable Finance Refreshment Program in branches to Credit Committee members • Inisiasi portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Initiation of portfolio of Sustainable Finance products and/or services • Risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola telah terintegrasi dalam aktivitas bisnis Perseroan Social, environmental and governance risk has been integrated into Company's business activities • Pelaksanaan edukasi customer terkait produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan Conducting customer education related to Sustainable Finance products and/or services 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Increasing portfolio of Sustainable Finance products and/or services • Pengembangan sistem pelaporan Keuangan Berkelanjutan Development of Sustainable Finance Reporting System

Tema Utama Main Themes	Tahap Persiapan Preparation Phase		Tahap Implementasi Awal Initial Implementation Phase		Tahap Implementasi Lanjutan Advanced Implementation Phase
	2020	2021	2022	2023	2024
	Persiapan Dasar untuk Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Basic Preparations for Sustainable Finance Implementation.		Persiapan Infrastruktur Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Infrastructures Preparation		Pengembangan Portfolio Keuangan Berkelanjutan Sustainable Portfolio Development
Program			<ul style="list-style-type: none"> aktivitas bisnis Perseroan Risk management Integration of social, environmental and governance in the Company's business activities Penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha Perusahaan Adjustment of Company's business activity classification Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan yang mendukung praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional Perseroan Preparation of Company's Guidelines for Sustainable Finance that support environmental friendly practices in the Company's operational activity Penyusunan SOP Keuangan Berkelanjutan Preparation of SOP of Sustainable Finance 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan kepada Credit Marketing Officer di cabang Training of Sustainable Finance products and/or services to Credit Marketing Officers in branches 	

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 5 (Lima) Tahun 5 (Five) Years Sustainable Finance Action Plan

No	Tahun Year	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Indikator Keberhasilan Success Indicator
1	2020	<p>Peningkatan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan kepada sebagian besar pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dan karyawan di tingkat manajerial / pengambil keputusan. Capacity building related to Sustainable Finance to most of the management (BOD and BOC) and employees at managerial level/decision-making level.</p> <p>Pelaksanaan edukasi internal kepada karyawan kunci di Kantor Pusat bekerja sama dengan pihak eksternal. Implementation of internal education to key employees at head office in collaboration with external parties.</p>	<p>80% dari Dewan Komisaris, Direksi, Deputi Direktur dan Kepala Divisi telah mengikuti seminar Keuangan Berkelanjutan. 80% of BOD, BOC, Deputy Directors and Division Head have attended the Sustainable Seminar.</p> <p>75% dari <i>Department Head dan Section Head</i> telah mengikuti training Keuangan Berkelanjutan. 75% of Department Heads and Section Heads have attended the Sustainable training.</p>
2	2021	<p>Melakukan kajian dalam rangka penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan. Carrying out study in term of preparation of the Company's Guidelines on Sustainable Finance.</p> <p>Peningkatan kapasitas analis manajemen risiko kredit untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup yang tinggi bagi anggota Komite Kredit.</p>	<p>Draft Pedoman Perusahaan tentang Keuangan Berkelanjutan telah tersedia dan sudah <i>direview</i> oleh Direksi. The draft of Company Guidelines on Sustainable Finance is available and has been reviewed by the Board of Directors.</p> <p>Sebanyak 50% dari anggota Komite Kredit telah mengikuti <i>training</i> terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL") / manajemen risiko sosial dan lingkungan</p>

No	Tahun Year	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Indikator Keberhasilan Success Indicator
		<p>Improving risk management capacity of credit analysts for business sectors with high social and environmental risk to Credit Committee members.</p> <p>Melakukan program pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan kepada Cabang. Conducting training programs related to Sustainable Finance to Branches.</p>	<p>50% of Credit Committee members have attended the training related to Environmental Impact Analysis ("AMDAL") / social and environmental risk management.</p> <p>Sebanyak 50% dari Cabang telah mengikuti pelatihan Keuangan Berkelanjutan. 50% of Branches have attended the Sustainable Finance training.</p>
3	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan berbagai kajian antara lain : Carying out various assessments, including : <ul style="list-style-type: none"> v Permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Market demand for Sustainable Finance products and/or services. v Kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan. Conformity of sustainable products and/or services. v Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Development of Sustainable Finance products and/or services. • Integrasi manajemen risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam aktivitas bisnis perusahaan. Risk Management Integration of social, environmental and governance in the Company's business activities. <p>Penyesuaian Klasifikasi kegiatan usaha Perseroan. Adjustment of Company's business activity classification.</p> <p>Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan yang mendukung praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan Preparation of Company's Guidelines for Sustainable Finance that support environmentally friendly practices in the Company's operational activity.</p> <p>Penyusunan SOP Keuangan Berkelanjutan Preparation of SOP of Sustainable Finance.</p>	<p>Telah dilakukan kajian terkait pembiayaan ke sektor-sektor yang mendukung program Keuangan Berkelanjutan. Study has been carried out related to financing to sectors that support the Sustainable Finance program.</p> <p>Disesuaikannya klasifikasi kegiatan usaha Perseroan sesuai Keuangan Berkelanjutan. Adjusted classification of Company's business activity in accordance with Sustainable Finance.</p> <p>Disusunnya pedoman internal terkait praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional Perseroan. Established internal guidelines related to environmentally friendly practices in Company's operational activities.</p> <p><i>Standard Operasional Procedure (SOP)</i> Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi. Standard Operating Procedure (SOP) of Sustainable Finance has been approved by Board of Directors.</p>
4	2023	<p><i>Refreshment</i> Program Keuangan Berkelanjutan di cabang kepada anggota Komite Kredit. Sustainable Finance Refreshment Program in branches to Credit Committee members.</p> <p>Inisiasi portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Initiation of portfolio of Sustainable Finance products and/or services.</p> <p>Risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola telah terintegrasi dalam aktivitas bisnis Perseroan. Social, environmental and governance risk has been integrated into the Company's business activities.</p> <p>Pelaksanaan edukasi <i>customer</i> terkait produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan Conducting customer education related to Sustainable Finance products and/or services</p> <p>Pelatihan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan kepada <i>Credit Marketing Officer</i> di Kantor Cabang Training of Sustainable Finance products and/or services to Credit Marketing Officers in Branches Office</p>	<p>Sebanyak 50% dari anggota Komite Kredit telah mengikuti <i>refreshment</i> program. 50% of Credit Committee members have attended the refreshment program.</p> <p>Peluncuran produk pembiayaan berkelanjutan. Launching of Sustainable Finance products.</p> <p>SOP mengenai integrasi risiko sosial, lingkungan dan tata kelola dalam kegiatan pembiayaan sektor Keuangan Berkelanjutan telah diimplementasikan. SOP on integration of social, environmental and governance risks in the Sustainable Finance sector has been implemented.</p> <p>Pembuatan media komunikasi atas produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Making a communication media of sustainable finance products and/or services</p> <p>80% dari total <i>Credit Marketing Officer</i> telah mengikuti pelatihan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Kantor Cabang 80% of total Credit Marketing Officers have attended the training on Sustainable Finance products and/or services held at branches Office</p>

No	Tahun Year	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Indikator Keberhasilan Success Indicator
5	2024	<p>Peningkatan portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Increasing portfolio of Sustainable Finance products and/or services</p> <p>Pengembangan sistem pelaporan Keuangan Berkelanjutan Development of Sustainable Finance reporting system</p>	<p>Jumlah pembiayaan berkelanjutan pada akhir tahun 2024 yaitu sebesar 5% dari total portofolio Amount of sustainable financing at the end of 2024 will be 5% of the total portfolio</p> <p>Diluncurkannya sistem pengawasan dan pelaporan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Launched the supervision and reporting system on Sustainable Finance Implementation</p>

Dalam tahun 2023 Perusahaan juga terus memfokuskan kepada peningkatan kapasitas pemahaman internal tentang Keuangan Berkelanjutan dalam rangka mempersiapkan Perusahaan untuk melanjutkan ke tahap implementasi lanjutan.

In 2023 The Company also continue focusing to enhance the internal capacity of Sustainable Finance in order to prepare the Company to move on to the implementation phase.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 1 Tahun Sustainable Finance Action Plan 1 Year

Triwulan Quarter	Uraian Aktivitas Description of Activity	Tujuan Aktivitas Purpose of Activity	Indikator Pencapaian Achievement Indicator
Triwulan II 2024 Quarter II 2024	Pengembangan sistem pelaporan Keuangan Berkelanjutan Development of Sustainable Finance reporting system	<ul style="list-style-type: none"> Input klasifikasi portofolio produk/kegiatan usaha berkelanjutan pada core system Input product portfolio classification/ sustainable business activities in the core system Klasifikasi portofolio produk/ kegiatan usaha berkelanjutan di dalam laporan bulanan classification of product portfolio/ sustainable business activities in monthly reports 	Diluncurkannya sistem pengawasan dan pelaporan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Launched the supervision and reporting system on Sustainable Finance Implementation
Triwulan IV 2024 Quarter IV 2024	Peningkatan portofolio produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan Increasing portfolio of Sustainable Finance products and/or services	Meningkatkan jumlah pembiayaan berkelanjutan pada tahun 2024 Increase the amount of sustainable financing in 2024	Jumlah pembiayaan berkelanjutan pada akhir tahun 2024 yaitu sebesar 5% dari total portofolio Amount of sustainable financing at the end of 2024 will be 5% of the total portfolio.

Alokasi Sumber Daya

Dalam mendukung pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan tahun 2024, termasuk pengembangan sistem pengawasan dan pelaporan penerapan Keuangan Berkelanjutan, Perusahaan perlu melakukan penyesuaian sistem informasinya. Untuk penyesuaian sistem informasi pada tahun 2024 Perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp50.000.000.

Resource Allocation

To support Sustainable Finance Program implementation in 2024, including developing a monitoring and reporting system for the implementation of Sustainable Finance, the Company needs to adjust its information system. For adjustment of the information system for 2024, the Company has allocated Rp50,000,000.

Penanggung Jawab Program Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan

Dalam Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan Perseroan tidak membentuk departemen khusus atau unit kerja khusus, melainkan seluruh pihak yang terkait bertanggung jawab terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Person in Charge of Sustainable Finance Implementation Program

In implementation of the Sustainable Finance, the Company does not establish a special department or special work unit, but all related parties will be responsible for implementation of Sustainable Finance.



Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Action Plan Preparation Process

Rujukan yang Digunakan Sebagai Acuan

Dalam menyusun RAKB Perseroan merujuk kepada Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 27 Juli 2017.

Peraturan OJK tersebut mengatur Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan yang di antaranya mencakup kewajiban penyusunan RAKB dan penyusunan Laporan Keberlanjutan.

Reference Used as a Reference

In preparing the SFAP, the Company refers to the OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance to Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies which was promulgated on 27 July 2017.

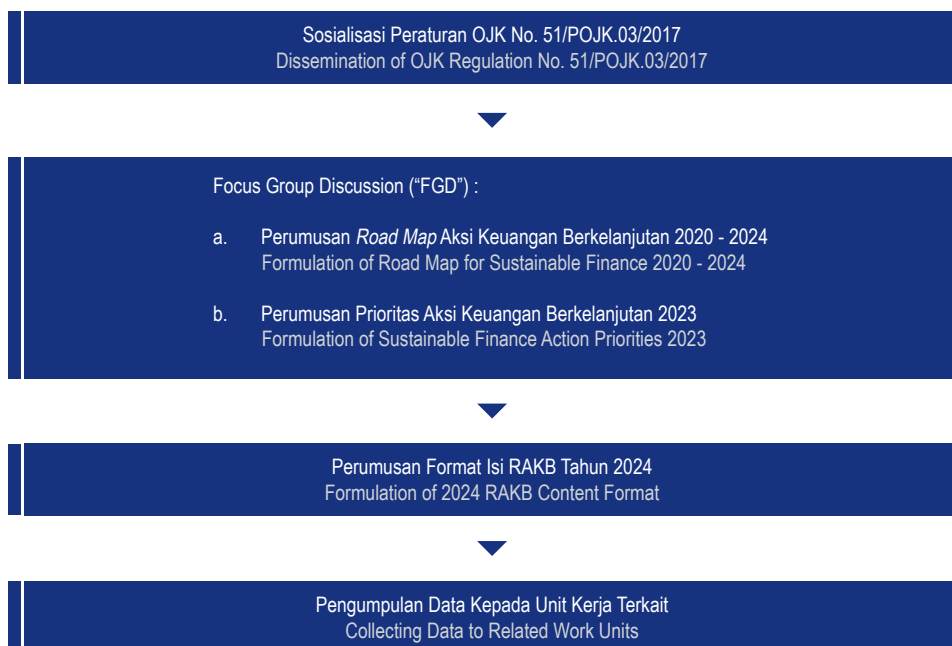
That OJK regulation regulates the implementation of Sustainable Finance Action Plan, which includes the obligation to prepare a SFAP and prepare a Sustainable Report.

Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Proses penyusunan RAKB Perseroan dapat digambarkan sebagai berikut :

Sustainable Finance Action Plan Preparation Process

SFAP Preparation Process of the Company can be illustrated as follows:





Keterlibatan Pihak yang Melakukan Penyusunan

Dalam penyusunan RAKB Tahun 2024 Perseroan tidak menggunakan pihak ketiga atau konsultan, namun melibatkan pihak-pihak terkait seperti Direksi, *Corporate Strategic Planning*, *Corporate Secretary*, *Business Development*, *Marketing & Business*, *Branch Management*, *Business Admin*, *Compliance & APU*, *PPT*, *Risk Management*, *Business Process*, *Finance & Accounting*, *Human Resources Learning & Development*, Internal Audit dan Teknologi Informasi. Proses penyusunan dimulai dari pembahasan dalam bentuk *Focus Group Discussion* ("FGD") dari pihak-pihak internal terkait hingga penyusunan dan finalisasi RAKB.

Involvement of The Drafting Parties

In drafting the SFAP year 2024, the Company does not engage with third parties or consultants, but involves related parties such as Directors, Corporate Strategic Planning, Corporate Secretary, Business Development, Marketing & Business, Branch management, Business Admin, Compliance & APU, PPT, Risk Management, Business Process, Finance & Accounting, Human Resources Learning & Development, Internal Audit and Information Technology. The drafting process starts from discussion in the form of Focus Group Discussion ("FGD") from relevant internal parties to the preparation and finalization of the RAKB.

Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Determinative Factors of Sustainable Finance Action Plan

Rencana Strategi Bisnis

Rencana strategis Perseroan selalu mengacu kepada Visi dan Misi Perseroan. Visi dan Misi Perseroan tersebut tercermin dalam bentuk pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis yang terintegrasi dengan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Cakupan dalam kegiatan operasional dan bisnis tersebut adalah pada efisiensi energi, air, penggunaan kertas, pengembangan masyarakat sekitar serta perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang melibatkan karyawan diseluruh jenjang organisasi Perseroan.

Business Strategic Plan

The Company's strategic plan always refers to the Company's Vision and Missions. The Company's vision and missions are reflected in the form of operational and business activity implementation that is integrated with economic, social and environmental aspects. Scope of the operational and business activities in in energy efficiency, paper usege efficiency, devlopment of the surrounding community as well as protection and improvement of quality of the environment which involves at all levels of the Company's organization.

Organizational Capacity

Dalam upaya mendukung Visi dan Misi Perusahaan, Perseroan senantiasa melakukan penyesuaian struktur organisasi yang berdasarkan pada kebutuhan arah dan pengembangan bisnis yang dilakukan serta karakteristik dan kompleksitas usaha. Dalam rangka menerapkan praktik Keuangan Berkelanjutan, Perseroan membuat langkah awal yaitu program edukasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam rangka memperkuat kapasitas organisasi.

Organizational Capacity

In an effort of supporting the Company's Vision and Missions, the Company continually makes adjustments of the organizational structure based on the required direction and business development conducted as well as the characteristic and compexity of business. In order to implement Sustainable Finance practices, the Company took initial step, namely educational program to improve the quality and competency in order to strengthen the organizational capacity.

Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

Perseroan memiliki kinerja keuangan yang baik untuk mendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Oleh karena itu Perseroan sudah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas teknis bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan.

Financial Condition and Technical Capacity

The Company has good financial performance to support the implementation of Sustainable Finance in accordance with the plans set by the Company. Therefore, the Companys has allocated a budget to increase technical capacity to all parties related with implementation of Sustainable Finance.

KERJA SAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL

Untuk mendukung peningkatan kualitas, kompetensi dan kapasitas teknis maka Perseroan melakukan kerja sama dengan lembaga yang menyediakan jasa dan memiliki keahlian dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan.

STRATEGI KOMUNIKASI

Perseroan senantiasa menerapkan strategi komunikasi yang tepat kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini untuk mendukung terciptanya hubungan baik dan terjalannya komunikasi yang berkesinambungan dengan menerapkan komunikasi dua arah yang efektif meliputi komunikasi dengan internal dan eksternal.

SISTEM MONITORING, EVALUASI DAN MITIGASI

Sistem *monitoring*, evaluasi dan mitigasi terhadap kegiatan operasional dan bisnis Perseroan, dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Bisnis dan Operasional selain itu Perseroan juga dalam rangka melakukan pengendalian internal menerapkan sistem *third lines of defense* yang melibatkan seluruh unit kerja termasuk unit kerja kepatuhan, unit kerja manajemen risiko dan unit kerja internal audit.

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN ISU KEUANGAN BERKELANJUTAN

Dalam rangka mendukung Penerapan Keuangan Berkelanjutan, OJK telah menerbitkan kebijakan yaitu :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

COOPERATION WITH EXTERNAL PARTIES

In order to support the improvement of quality, competency and technical capacity, the Company cooperate with institutions that provide services and have expertise in providing education and understanding on implementation of Sustainable Finance.

COMMUNICATION STRATEGY

The Company always implements proper communication strategy to all stakeholders. This is to support the creation of good relation and the establishment of continuous communication by implementing effective two-way communication including internal and external communication.

MONITORING, EVALUATION AND MITIGATION SYSTEM

Monitoring, evaluation and mitigation system on the Company's operational and business activities is carried out through meetings of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Business and Operations. In addition, the Company also in term of carrying out internal control, implements the third lines of defense system which involves all work units including the compliance work unit, the risk management work unit and the internal audit work unit.

GOVERNMENT POLICIES RELATED TO THE SUSTAINABLE FINANCE ISSUES

In order to support the Sustainable Finance Implementation, the OJK has issued policies, namely :

1. Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 regarding Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 76/POJK.07/2016 dated 28 December 2016 on Improvement of Financial Literacy and Financial Inclusion in the Financial Services Sector.
3. Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 51/POJK.03/2017 dated 27 July 2017 on Implementation of Sustainable Finance to Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.

PRIORITY OF DETAIL OF SUSTAINABLE FINANCE ACTION PLAN

DASAR PEMIKIRAN

Perseroan menetapkan prioritas implementasi Keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 dan dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal sejalan dengan rencana strategi bisnis serta sesuai pertimbangan kapasitas organisasi, kondisi keuangan dan kapasitas teknis sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.

RATIONALE

The Company sets the implementation priorities of Sustainable Finance in accordance with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 and with due regard of external and internal factors in line with the business strategic plan and accordance with consideration of organizational capacity, financial conditions and technical capacity as described in the previous section.

Dalam rangka mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan, sebagaimana tercantum pada Tema Utama dan Program Keuangan Berkelanjutan Perseroan 2020 – 2024, Perseroan memprioritaskan pada peletakan dasar yang kuat agar Keuangan Berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik. Tahun 2020 Perusahaan masih dalam periode konsolidasi sejak penggabungan usaha efektif pada bulan Juli 2019. Sehingga peletakan dasar yang kuat Perseroan pasca penggabungan usaha dinilai penting untuk penerapan Keuangan Keberlanjutan pada masa berikutnya.

Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kapasitas internal Sumber Daya Manusia yang akan menerapkan program Keuangan Berkelanjutan. Selain itu Perseroan mempersiapkan panduan, SOP, penyusunan panduan internal dan kajian produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Dengan paduan kedua hal mendasar tersebut, diharapkan Perseroan mampu menerapkan Keuangan Berkelanjutan, baik dalam peningkatan portofolio produk Keuangan Berkelanjutan maupun integrasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam tata kelola Perseroan sehingga dapat mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

In order to implement the Sustainable Finance, as specified in the Main Theme and Program of the Company's Sustainable Finance 2020-2024, Company prioritized of laying strong foundation to allow the Sustainable Finance to be realized properly. In 2020 Company was still in the consolidation period since the merger was effective in July 2019. Thus, such a laying strong foundation for the Company after the merger is considered important for implementation of Sustainable Finance in the next period.

This was conducted by increasing internal capacity of Human Resources who will implement the Sustainable Finance Program. In addition, the Company prepared the guidelines, SOP, preparation of internal guidelines and study of Sustainable Finance products be able to implement the Sustainable Finance, both in increasing the Sustainable Finance Product portfolio and integrating the economic, social and environmental aspects into the corporate governance so as to supprt the sustainable development objectives.

Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Action Plan Activities

Triwulan Quarters	Uraian Kegiatan Description	Sumber Daya yang Dibutuhkan Relevant Resources	Penanggung Jawab Division In Charge
Triwulan II 2024 Quarter II 2024	Pengembangan sistem pelaporan Keuangan Berkelanjutan Development of Sustainable Finance reporting system	<ul style="list-style-type: none"> • Compliance • Accounting • IT • Risk Management • External Party (Vendor) 	<ul style="list-style-type: none"> • IT • Accounting
Triwulan IV 2024 Quarter IV 2024	Peningkatan portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Increasing portfolio of Sustainable Finance products and/or services	<ul style="list-style-type: none"> • Business Development (retail and corporate) • Marketing (retail and corporate) 	Business Development (retail and corporate)

Sumber Daya

Perseroan telah memiliki Sumber Daya Manusia dan struktur organisasi yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Namun perlu didukung oleh peningkatan kapasitas, kualitas dan kompetensi melalui program edukasi.

Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Keberhasilan dari Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan ditentukan melalui evaluasi pencapaian antara realisasi dan rencana yang telah disusun didalam RAKB.

Resource

The Company has adequate human resources and organizational structure in place in supporting the implementation of Sustainable Finance. However, it needs to be supported by the increased capacity, quality and competency through educational program.

Program Evaluation Implementation System

The success of Sustainable Finance Program implementation is determined through evaluation of achievement between the realization and the plan that has been prepared in this SFAP.

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Performance Overview of Sustainability Aspect

Kinerja Ekonomi	2021	2022	2023	Economy Performance
Pembiayaan Konsumen (Rp-miliar)	189.38	224.00	265.37	Consumer Financing (Rp-billion)
Sewa Pembiayaan (Rp-miliar)	64.88	46.35	55.54	Finance Leases (Rp-billion)
Administrasi dan Provisi (Rp-miliar)	29.45	32.45	45.41	Administration and Provision (Rp-billion)
Penalti (Rp-miliar)	12.36	14.58	20.75	Penalty (Rp-billion)
Bunga (Rp-miliar)	0.44	0.39	0.33	Interest (Rp-billion)
Pendapatan lain-lain (Rp-miliar)	6.38	15.29	13.94	Other Income (Rp-billion)
Jumlah Pendapatan (Rp-miliar)	302.89	333.06	401.34	Total Revenues (Rp-billion)
Kinerja Lingkungan	2021	2022	2023	Environmental Performance
Penggunaan Listrik (Rp-juta)	699.83	807.22	988.20	Electricity Usage (Rp - million)
Penggunaan Air (Rp-juta)	27.17	40.78	51.60	Water Usage (Rp - million)
Jumlah Penggunaan Listrik dan Air (Rp-juta)	727.00	848.00	1.039.80	Total Electricity and Water Usage (Rp - million)
Kinerja Sosial	2021	2022	2023	Social Performance
Jumlah Karyawan (orang)	614	664	711	Total Employees (person)
Rasio Perputaran Karyawan (%)	1.80	1.90	1.83	Employee Turn Over Ratio (%)
Rasio Karyawan Perempuan (%)	21	21	20,5	Female Employee Ratio (%)

Pendapatan Pembiayaan Konsumen Consumer Financing Revenues

Per 31 Desember 2023 / Per 31 December 2023



Pendapatan Sewa Pembiayaan Finance Lease Revenues

Per 31 Desember 2023 / Per 31 December 2023



Administrasi dan Provisi Administration and Provision

Per 31 Desember 2023 / Per 31 December 2023



Penalti Penalty

Per 31 Desember 2023 / Per 31 December 2023



Bunga Interest

Per 31 Desember 2023 / Per 31 December 2023



Pendapatan Lain-lain Other Income

Per 31 Desember 2023 / Per 31 December 2023



Jumlah Pendapatan Total Revenues

Per 31 Desember 2023 / Per 31 December 2023



Penggunaan Listrik Electricity Usage

Per 31 Desember 2023 / Per 31 December 2023



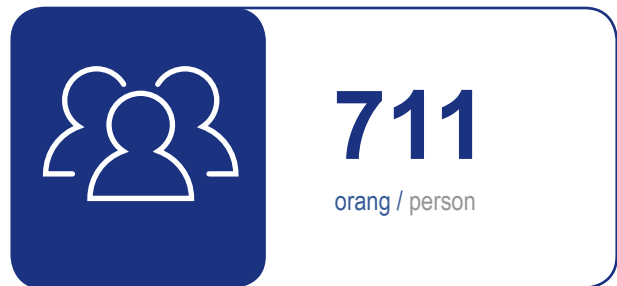
Penggunaan Air Water Usage

Per 31 Desember 2023 / Per 31 December 2023



Jumlah Karyawan Number of Employees

Per 31 Desember 2023 / Per 31 December 2023



Rasio Perputaran Karyawan Employee Turnover Ratio

Per 31 Desember 2023 / Per 31 December 2023



Penjelasan Direksi

The Board of Directors' Remark

Konosuke Mizuta

Direktur Utama
President Director

“ Dalam menjalankan usahanya, Perseroan senantiasa menerapkan strategi bisnis berkelanjutan. Di tahun 2023, Perseroan juga telah memiliki portofolio yang dapat dikategorikan Keuangan Berkelanjutan. Perseroan berkomitmen terhadap strategi yang diterapkan, mendukung program pemerintah, strategi yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terstruktur dan inklusif.

In carrying out its business, the Company always implements a sustainable business strategy. In 2023, the Company will also have a portfolio that can be categorized as Sustainable Finance. The Company is committed in the strategy implemented, supporting government programs, the strategy which will contribute to the sustainable, structured and inclusive economic growth. ”

Tahun 2023, negara-negara di dunia mengalami tiga krisis bumi, yaitu perubahan iklim, polusi & pencemaran, serta kehilangan keanekaragaman hayati.

Kebijakan untuk Merespons Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Pada tahun 2023, Perseroan telah menyusun kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan yang telah disahkan oleh Direksi. Kebijakan dan prosedur tersebut terdiri dari :

- Kebijakan Keuangan Berkelanjutan
- Strategi Keuangan Berkelanjutan
- Standar Operasional Prosedur (“SOP”) Keuangan Berkelanjutan dalam proses pembiayaan

Nilai Keberlanjutan

Nilai Keberlanjutan termaktub dalam visi Perseroan yaitu:

In 2023, countries in the world had triple planetary crisis, namely climate change, pollution & contamination, and the loss of biodiversity.

Policies to Respond The Challenges in Fulfilling Sustainability Challenges

In 2023, the Company has composed Sustainable Finance policies and procedures that have been approved by the Board of Directors. The policy and procedures consist of :

- Sustainable Finance Policy
- Sustainable Finance Strategy
- Sustainable Finance Standard Operational Procedure (“SOP”) in the Financing Process

Sustainability Value

The Sustainability value contained in the Company's vision namely :

“Menjadi Perusahaan yang Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan”

Dalam mencapai visi tersebut, Perseroan mengimplementasikan strategi antara lain:

- Dukungan penuh manajemen dalam penerapan keuangan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam kegiatan usaha Perseroan;
- Peran aktif karyawan yang memiliki skill yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maupun kompetensi penerapan keuangan berkelanjutan sesuai jenjang tugasnya;
- Memperhatikan aspek sosial baik secara internal untuk mewujudkan misi Perseroan dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, maupun secara eksternal lingkungan sosial Kantor Pusat dan Kantor Cabang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Perseroan dan menjaga risiko reputasi;
- Memperhatikan aspek ramah lingkungan di internal Perseroan dengan berbagai upaya untuk efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, kertas dan plastik.

Respon Terhadap Isu Terkait Keuangan Berkelanjutan

Pada bulan Oktober 2023, sesi tahunan AALCO (Asian-African Legal Consultative Organization) ke-61 yang diadakan di Bali membahas langkah-langkah *'Environment and Sustainable Development'*. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia mendukung penuh agenda global untuk mengakhiri polusi plastik termasuk di laut. Indonesia sedang mengimplementasikan kebijakan memerangi sampah plastik dan polusi. Indonesia telah memberlakukan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Sampah Laut dengan target menguranginya sebesar 70% pada tahun 2024.

Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon perdananya pada tanggal 26 September 2023. Hal tersebut menjadi catatan sejarah bagi Indonesia dalam terkait upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia menjadi kontributor besar dalam perdagangan karbon global.

Peluncuran perdagangan bursa karbon yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dikelola oleh Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu. Perdagangan karbon melalui bursa karbon telah menjadi proyek strategis nasional.

Sejak tahun 2019, Pemerintah telah berkomitmen dalam mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*). Peraturan ini dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca. Percepatan program ini diselenggarakan melalui:

“Be a Creator of a Sustainable World”

To achieve this goal, the Company implements strategies as follows:

- Full support of managements in implementing sustainable finance by balancing economic, social, environmental and governance aspects in Company’s business activities;
- The active role of employees who have the skills needed to carry out their duties and as well as the competence in the implementation of sustainable finance in accordance with their level of duties;
- Paying attention to social aspects and internally to realize the Company’s mission in developing competent human resources, as well as externally the social environment of the Head Office and Branch Office to increase public trust in the Company and maintain reputation risk.
- Paying attention to environmental friendly aspects within the Company with various efforts for energy efficiency, efficient use of water, paper and plastic.

Response to Issues Related to Sustainable Finance

In October 2023, the 61st AALCO (Asian-African Legal Consultative Organization) annual session held in Bali discussed ‘Environment and Sustainable Development’ measures. In a statement read by the Head of the Environmental and Forestry Instrument Standardization Agency (KLHK), Indonesia fully supports the global agenda to end plastic pollution, including in the sea. Indonesia is implementing policies to against plastic waste and pollution. Indonesia has implemented a National Action Plan for Eradicating Marine Debris with a target of reducing it by 70% by 2024.

Indonesia has started trading its first carbon exchange in September 26, 2023. This is a historical record for Indonesia in terms of efforts to reduce greenhouse gas emissions, as well as opening up opportunities for Indonesia to become a major contributor to global carbon trading.

The launch of carbon exchange trading, which was inaugurated directly by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo, is managed by the Indonesia Stock Exchange (“BEI”). The Carbon Exchange Operator business license has been granted to the IDX by the Financial Services Authority (“OJK”) through Decree number KEP-77/D.04/2023 on September 18, 2023. Carbon trading through carbon exchange has become a national strategic project.

Since 2019, the Government issued Presidential Regulation Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery Electric Vehicle Program. This regulation was issued to improve energy efficiency, energy security and energy conservation in the transportation sector, and to realize clean energy, clean and environmentally friendly air quality, as well as Indonesia’s commitment to reducing greenhouse gas emissions. This program acceleration is carried out through:

- a. Percepatan pengembangan industri berbasis Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam negeri;
- b. Pemberian insentif;
- c. Penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
- d. Pemenuhan terhadap ketentuan teknis Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
- e. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Tren penggunaan mobil listrik di Indonesia pun kian menguat. Hal ini terlihat dari penjualan produsen ke distributor (*wholesale*) yang terus bertambah tiap tahun. Menurut data Gaikindo, sepanjang 2023 volume penjualan *wholesale* mobil listrik berbasis baterai atau *battery electric vehicle* (BEV) di Indonesia mencapai 17,06 ribu unit. Angka tersebut melonjak 65,20% (yoy) dibanding 2022, sekaligus menjadi rekor tertinggi baru.

Seiring dengan rencana kepindahan ibukota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan diimplementasikan secara bertahap mulai dari tahun 2024, Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan pembangunan sistem transportasi yang cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan di IKN. Pembangunan sistem transportasi konsisten dengan upaya Indonesia yang ingin mewujudkan visi lingkungan hijau yang menjadi semangat utama dalam pembangunan kawasan IKN dengan konsep forest city.

Komitmen Direksi dalam Menerapkan Keuangan Berkelanjutan

Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya dengan selalu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor, Perseroan senantiasa berusaha melindungi dampak keuangan, lingkungan dan sosial dengan bantuan kebijakan yang relevan. Perseroan memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB"), yang secara khusus memandu berbagai langkah perlindungan lingkungan dan sosial serta memastikan bahwa para pemangku kepentingan dapat benar-benar merasakan manfaat berkelanjutan dari operasi dan bisnis Perseroan.

Selain itu, Direksi telah melakukan peninjauan yang komprehensif atas penyusunan Laporan Keberlanjutan 2023 ini yang diharapkan menjadi acuan atas komitmen Perseroan terhadap Keberlanjutan. Direksi senantiasa optimis, bahwa ke depan Perseroan dapat mencapai kemajuan dan pertumbuhan terkait implementasi keberlanjutan.

Pencapaian Kinerja

Perseroan memiliki sertifikat ISO 27001 dengan *Scope of certification: Processing of data population verification through web service API*. Hal ini merupakan komitmen nyata Perseroan terkait sistem manajemen keamanan informasi guna menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Sertifikasi ini juga mencakup komitmen atas pengelolaan risiko terkait keamanan data yang dimiliki atau ditangani oleh Perseroan seraya mewujudkan praktik Tata Kelola yang Baik.

- a. Accelerating the development of domestic battery-based electric motor vehicle industry;
- b. Giving Incentives;
- c. Providing electricity charging infrastructure and regulating electricity tariffs for battery-based electric motorized vehicles.
- d. Fulfillment of technical provisions for Battery-Based Electric Motor Vehicles.
- e. Protection of the environment.

The trend for electric cars in Indonesia is getting stronger. This can be seen from manufacturers' sales to distributors (*wholesale*), which continues to increase every year. According to Gaikindo data, throughout 2023 the *wholesale* sales volume of battery electric vehicles (BEV) in Indonesia reached 17.06 thousand units. This figure hiked 65.20% (yoy) compared to 2022, becoming a new record high.

Along with the plan to move the capital city to the Indonesian Capital City (IKN) which will be implemented in stages starting from 2024, the Ministry of Transportation is preparing to build a smart, integrated and environmentally friendly transportation system in IKN. The development of the transportation system is consistent with Indonesia's efforts to realize the vision of a green environment which is the main spirit in developing the IKN area with the forest city concept.

Board of Directors Commitment in Implementing Sustainable Finance

The Company is committed to always carrying out its business by always considering economic, social and environmental aspects. Therefore, in carrying out office operational activities, the Company always tries to protect financial, environmental and social impacts with the help of relevant policies. The Company has a Sustainable Financial Action Plan ("RAKB"), which specifically guides various environmental and social protection measures and ensures that stakeholders can truly experience sustainable benefits from the Company's operations and business.

In addition, the Board of Directors has carried out a comprehensive review of the preparation of the 2023 Sustainability Report which is expected to become a reference for the Company's commitment to Sustainability. The Board of Directors is always optimistic that in the future the Company can achieve progress and growth related to the implementation of sustainability.

Performance Achievement

The Company has an ISO 27001 certificate with *Scope of certification: Processing of population data verification through web service API*. This is the Company's real commitment regarding the information security management system to establish, implement, maintain and continuously improve the information security management system. This certification also includes a commitment to managing risks related to the security of data owned or handled by the Company while realizing Good Governance practices.

Tantangan dalam Menerapkan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai langkah proaktif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, Perseroan secara adaptif menyesuaikan strategi bisnis serta tata kelola. Perseroan terus mengembangkan diri secara konsisten. Perseroan senantiasa mengedepankan kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan untuk mencapai strategi bisnis yang berkelanjutan. Perseroan optimis akan dapat terus berkembang sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah meningkatkan kinerja dari segi ekonomi, lingkungan hidup, dan juga sosial.

Bidang ekonomi:

Pertumbuhan di bidang ekonomi ditandai dengan kenaikan jumlah piutang pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu mengalami peningkatan sebesar 19,79%.

Pada tahun 2023, Perseroan mampu meningkatkan kinerja sehingga per 31 Desember 2023, Perseroan berhasil meningkatkan jumlah Pendapatan sebesar 20,50% atau sebesar Rp401,34 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian Perseroan membukukan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp61,15 miliar menurun sebesar 1,45% dibandingkan Laba Tahun Berjalan tahun sebelumnya. Sejak Desember 2021, Perseroan juga telah menghentikan pendanaan pada debitur terkait pertambangan batu bara.

Bidang lingkungan:

Salah satu inisiatif Perseroan terkait pengelolaan lingkungan adalah penggunaan gedung yang bersertifikat *green building* untuk Kantor Pusat Perseroan.

Perseroan saat ini telah memiliki portofolio yang dapat dikelompokkan ke dalam pembiayaan Keuangan Berkelanjutan. Pembiayaan dalam kategori keuangan berkelanjutan telah dimasukkan ke dalam laporan bulanan.

Bidang sosial:

Sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap sosial dan lingkungan, Perseroan telah melaksanakan kegiatan edukasi literasi keuangan pada tanggal 5 Oktober 2023 bertempat di SMA Taman Harapan 1 Bekasi. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ditunjukkan Perseroan adalah memberikan sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pemberian sarana pendukung kegiatan belajar mengajar ini diterima langsung oleh Bapak Cahyono, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Taman Harapan 1 Bekasi.

Perseroan juga secara rutin mengadakan program pelatihan keuangan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan pelatihan kepada 63 peserta yang terdiri dari Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Challenges in Implementing Sustainable Finance

As a proactive step in facing challenges and taking advantage of opportunities, the Company adaptively adjusts its business strategy and governance. The Company continues to develop itself consistently. The Company always prioritizes the interests of all Stakeholders to achieve a sustainable business strategy. The company is optimistic that it will continue to develop so that it can contribute to achieving the Sustainable Development Goals (TPB) in Indonesia.

Implementation of Sustainable Finance

Throughout 2023, the Company has improved its performance in terms of economic, environmental and social aspects.

Economic aspect:

Growth in the economic sector is marked by an increase in the amount of receivables in 2023 compared to 2022, namely an increase of 19.79%.

In 2023, the Company was able to improve its performance so that as of December 31 2023, the Company succeeded in increasing its Revenue by 20.50% or IDR 401.34 billion compared to the previous year. Then the Company posted a Profit for the Year of IDR 61.15 billion, a decrease of 1.45% compared to the Profit for the Previous Year. Since December 2021, the Company has also stopped funding debtors related to coal mining.

Environmental aspect:

One of the Company's initiatives related to environmental management is the use of a certified green building for the Company's Head Office.

The Company currently has a portfolio that can be grouped into Sustainable Finance financing. Financing in the sustainable finance category has been included in the monthly report.

Social aspect:

As a form of the Company's commitment to social and environmental matters, the Company has carried out financial literacy education activities on October 5 2023 at SMA Taman Harapan 1 Bekasi. The social and environmental responsibility demonstrated by the Company is to provide facilities to support teaching and learning activities in schools. The provision of supporting facilities for teaching and learning activities was received directly by Mr. Cahyono, S.Pd., M.Pd as Principal of SMA Taman Harapan 1 Bekasi.

The Company also regularly holds sustainable finance training programs. Throughout 2023, training has been conducted for 63 participants consisting of Retail Business Units and Corporate Business Units at the Head Office and Branch Office.

Materi pelatihan antara lain :

- *Refreshment* tentang *sustainable finance*
- ESRA- Analisa Risiko Lingkungan dan Sosial
- Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan
- Taksonomi Hijau

Perseroan juga telah melakukan pelatihan tentang portofolio produk keuangan berkelanjutan kepada *Credit Marketing Officer* di Kantor Cabang.

Peristiwa Penting Berkaitan dengan Keberlanjutan

Di tahun 2023, Perseroan telah memiliki portofolio yang dapat dikelompokkan dalam pembiayaan keuangan berkelanjutan. Hal ini merupakan capaian yang akan menjadi acuan untuk terus dikembangkan ke depan agar semakin banyak portofolio pembiayaan yang berwawasan lingkungan. Adapun kontribusi portofolio Keuangan Berkelanjutan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar 7,17% dari keseluruhan portofolio pembiayaan.

Perseroan senantiasa berkomitmen dalam mengimplementasikan strategi keberlanjutan yang diterapkan guna mendukung program pemerintah, seraya menerapkan strategi yang dapat berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terstruktur dan inklusif.

Ke depan, Perseroan akan senantiasa berupaya meningkatkan portofolio pembiayaan keuangan berkelanjutan dan mengembangkan sistem pelaporan keuangan berkelanjutan.

Strategi Pencapaian Target

Perseroan secara khusus telah berkontribusi untuk mengurangi emisi dengan meningkatkan portofolio yang dapat dikelompokkan dalam Keuangan Berkelanjutan.

Perseroan telah melakukan serangkaian langkah mitigasi risiko sepanjang tahun 2023 seperti:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan melalui rapat-rapat berkala.
- Penyusunan Pedoman dan SOP Keuangan Berkelanjutan.
- Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kompetensi karyawan pada unit kerja terkait.
- Kecukupan pengendalian internal.

Berkaitan dengan komitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, Perseroan menargetkan untuk mencapai visi keuangan berkelanjutan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun faktor internal seperti kondisi keuangan, kapasitas teknis dan kapasitas organisasi.

Tata Kelola Keberlanjutan

Perseroan terus berusaha meningkatkan kinerja tata kelola keberlanjutan untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, Perseroan telah memiliki dasar kerja yaitu peraturan Perseroan, pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG") dan pakta integritas yang harus ditaati oleh segenap manajemen dan karyawan. Seluruh kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Training materials include:

- Refreshment on sustainable finance
- ESRA – Environmental and Social Risk Analysis
- Sustainable Finance Business Category
- Green Taxonomy

the Company has also conducted a training on the sustainable finance product portfolio for Credit Marketing Officers at Branch Office.

Event Highlights Related to Sustainability

In 2023, the Company had a portfolio that can be categorized into financing of sustainable finance. This was an achievement that would serve as a reference for further development in the future for more financing portfolios which are environmentally friendly. The Sustainable Finance portfolio contribution as of December 31 2023 was recorded at 7,17% of the total financing portfolio.

The Company is always committed to implementing sustainability strategies to support government programs, while implementing strategies that would contribute significantly to sustainable, structured and inclusive economic growth.

In the future, the Company would strive to increase its sustainable financial financing portfolio and develop a sustainable financial reporting system.

Target Achievement Strategy

The Company has specifically contributed to reducing emissions by increasing its portfolio which can be grouped under Sustainable Finance.

The Company has carried out a series of risk mitigation steps throughout 2023 such as:

- Active supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the implementation of Sustainable Finance Action through periodic meetings.
- Preparation of Sustainable Finance Guidelines and SOPs.
- Improving the capacity, quality and competency of employees in relevant work units.
- Adequacy of internal control.

In relation to the commitment to implement sustainable finance, Company targeted to achieve the sustainable finance vision in the year of 2024 by considering internal and external factors such as financial condition, technical capacity, and the organization capacity.

Sustainability Governance

The Company continues to strive to improve its sustainability governance performance to protect all stakeholders. In managing environmental, social and governance aspects, the Company already has a working basis, namely Company regulations, Good Corporate Governance ("GCG") guidelines and integrity pacts that must be obeyed by all management and employees. All of the Company's business activities are carried out in compliance with the applicable laws and regulations.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Perseroan menetapkan beberapa faktor penentu dalam keberhasilan Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Bisnis
Rencana strategis Perseroan selalu mengacu kepada visi dan misi Perseroan. Visi dan misi Perseroan tersebut tercermin dalam bentuk pelaksanaan kegiatan bisnis yang terintegrasi dengan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Cakupan dalam kegiatan bisnis ini bertujuan untuk efisiensi energi, air, penggunaan kertas, pengembangan masyarakat sekitar serta perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang melibatkan karyawan diseluruh jenjang organisasi Perseroan.
2. Kapasitas Organisasi
Dalam upaya mendukung visi dan misi, Perseroan senantiasa melakukan penyesuaian struktur organisasi yang berdasarkan pada kebutuhan arah dan pengembangan bisnis yang dilakukan serta karakteristik dan kompleksitas usaha. Dalam rangka menerapkan praktik Keuangan Berkelanjutan, Perseroan membuat langkah awal yaitu program edukasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam rangka memperkuat kapasitas organisasi.
3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis
Perseroan memiliki kinerja keuangan yang baik untuk mendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Oleh karena itu Perseroan sudah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas teknis bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan.
4. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal
Untuk mendukung peningkatan kualitas, kompetensi dan kapasitas teknis maka Perseroan akan melakukan kerja sama dengan lembaga yang menyediakan jasa dan memiliki keahlian dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan.
5. Strategi Komunikasi
Perseroan senantiasa menerapkan strategi komunikasi yang tepat kepada seluruh pemangku kepentingan hal ini untuk mendukung terciptanya hubungan baik dan terjalannya komunikasi yang berkesinambungan dengan menerapkan komunikasi dua arah yang efektif meliputi komunikasi dengan internal dan eksternal.
6. Sistem *Monitoring*, Evaluasi dan Mitigasi
Sistem *monitoring*, evaluasi dan mitigasi terhadap kegiatan operasional dan bisnis Perseroan, dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Bisnis dan Operasional. Selain itu Perseroan juga dalam rangka melakukan pengendalian internal menerapkan sistem *three lines of defense* yang melibatkan seluruh unit kerja termasuk unit kerja kepatuhan, unit kerja manajemen risiko dan unit kerja audit internal.

In preparing the Sustainable Finance Action Plan, the Company determines several determining factors in the success of the Sustainable Finance Action as follows:

1. Strategic Business Plan
The Company's strategic plan always refers to the Company's vision and mission. The Company's vision and mission are reflected in the implementation of business activities that are integrated with economic, social and environmental aspects. The scope of this business activity is aimed at energy efficiency, water, paper use, local community development as well as environmental protection and quality improvement involving employees at all levels of the Company's organization.
2. Organizational Capacity
In an effort to support the vision and mission, the Company always makes adjustments to the organizational structure based on the needs of the direction and development of the business being carried out as well as the characteristics and complexity of the business. In order to implement Sustainable Finance practices, the Company makes the first step in educational program to improve quality and competence in order to strengthen organizational capacity.
3. Financial Condition and Technical Capacity
The Company has good financial performance to support the implementation of Sustainable Finance in accordance with the plans set by the Company. Therefore, the Company has allocated a budget to increase technical capacity for all parties related to the implementation of Sustainable Finance.
4. Cooperation with External Parties
To support the improvement of quality, competence and technical capacity, the Company will collaborate with institutions that provide services and have expertise in providing education and understanding on the implementation of Sustainable Financing.
5. Communication Strategy
The Company always implements the right communication strategy for all stakeholders, this is to support the creation of good relations and continuous communication by implementing effective two-way communication including internal and external communications.
6. Monitoring, Evaluation and Mitigation System
The monitoring, evaluation and mitigation system for the Company's operational and business activities is carried out through the Board of Commissioners, Board of Directors, Business and Operational Meetings. In addition, the Company also implements a three lines of defense system for internal control, which involves all work units including compliance work units, risk management work unit and internal audit work unit.

Pemanfaatan Peluang dan Prospek Usaha

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) tahun 2023 tetap terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, serta koordinasi dan sinergi KSSK yang terus diperkuat. Dengan perkembangan tersebut, kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik secara keseluruhan tahun 2023 terjaga baik dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai institusi yang melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Sebelumnya OJK juga telah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia tahun 2015 – 2019 pada bulan Desember 2014.

Sebagai kelanjutan, di tahun 2021 OJK telah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021– 2025) sebagai panduan untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya melalui Siaran Pers tanggal 5 Oktober 2021 OJK juga telah mengumumkan pembentukan *Task Force* Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Situasi Eksternal Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Sosial

Pada aspek ekonomi, krisis geopolitik berkepanjangan berlanjut hingga tahun 2024 tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika perekonomian global. Harga minyak mentah diprediksikan akan terus meningkat secara moderat imbas dari ketegangan geopolitik ini.

Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis ditengah dinamika perekonomian global maupun nasional, Perseroan akan menjalankan strategi membangun portofolio pembiayaan Ritel dan Korporasi yang berkualitas berdasarkan prinsip kehati-hatian serta melakukan kajian atas produk-produk baru dan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Utilization of Business Opportunities and Prospects

Financial System Stability (SSK) in 2023 remain maintained amidst the risk of a world economic slowdown and global financial market uncertainty. This development was supported by resilient economic conditions and a domestic financial system, as well as KSSK coordination and synergy which continues to be strengthened. With these developments, the overall condition of the domestic economy and financial system in 2023 were well maintained and able to support inclusive and sustainable economic growth.

Financial Services Authority (“OJK”) as an institution that conducts regulation and supervision in the financial services sector has issued OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. Previously, the OJK had also issued a Sustainable Finance Roadmap in Indonesia for 2015 – 2019 in December 2014.

As a continuation, in 2021 OJK has issued a Phase II Sustainable Finance Roadmap (2021 – 2025) as a guide to accelerate the application of environmental, social and governance principles in Indonesia which focuses on creating a comprehensive sustainable financial ecosystem, involving all parties related and encourage the development of cooperation with other parties. Furthermore, through a Press Release on 5 October 2021, the OJK has also announced the formation of a Sustainable Finance Task Force in the Financial Services Sector (SJK).

External Economic, Environmental and Social Situations

In the economic aspect, the prolonged geopolitical crisis continuing until 2024 would certainly have a significant impact on the dynamics of the global economy. Crude oil prices are expected to rise moderately as a result of geopolitical tensions.

In order to increase business growth amidst the dynamics of the global and national economy, the Company would implement the strategy in building a proper retail and corporate financing portfolio based on the principle of prudence and conducts studies on new products and marketing strategies that suit customer needs.

Terkait aspek lingkungan, berbagai infrastruktur kebijakan strategis pada level nasional terus berkembang seiring dengan berprosesnya bursa karbon Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, Perseroan akan senantiasa mengikuti perkembangan terkait regulasi termaksud.

Pada dimensi sosial, di tengah kemajuan teknologi finansial, edukasi dan literasi keuangan sangatlah penting dan menjadi aspek yang sangat krusial bagi masyarakat agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Namun demikian, literasi keuangan di Indonesia yang masih tergolong rendah tentunya membutuhkan perbaikan melalui implementasi keberlanjutan dengan beragam kegiatan edukatif terkait peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan yang dilakukan secara berkala sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan. Ke depan, Perseroan akan senantiasa meningkatkan kegiatan edukatif terkait peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara lebih luas.

Apresiasi

Direksi memberikan penghargaan dan apresiasi bagi seluruh karyawan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan atas dedikasi dan loyalitas dalam melaksanakan komitmen Perseroan dalam aspek keberlanjutan.

Bagi kami, keberlanjutan merupakan cara untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa depan dalam mewujudkan visi Perseroan yaitu Menjadi Perusahaan yang Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan yang bertujuan menjaga keselarasan antara kinerja aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Jakarta, April 2024
Atas nama Direksi
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Regarding environmental aspect, various strategic policies at the national level continue to develop along with the progression of the Indonesian carbon exchange. In line with this, the Company would always follow up the developments related to these regulations.

In the social dimension, amidst the advances in financial technology, education and financial literacy are very important and play such a crucial aspect for the society, preventing them from being left behind. However, financial literacy in Indonesia, which is still relatively low, needs to be improved through the implementation of sustainability through various educational activities related to financial literacy and financial inclusion which are carried out periodically as part of the Company's social and environmental responsibility activities. In the future, the Company would continue to increase educational activities related to increasing financial literacy and financial inclusion extensively.

Appreciation

The Board of Directors gives awards and appreciation to all of the Company's employees and all stakeholders for their dedication and loyalty in carrying out the Company's commitments in the sustainability aspect.

For us, sustainability is a way to encourage the growth and development of the Company in the future in realizing the Company's vision, namely to be a Creator of a Sustainable World with the aim of maintaining harmony between economic, social and environmental performance aspects.

Jakarta, April 2024
On behalf of the Board of Directors
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk



Konosuke Mizuta
Direktur Utama / President Director

Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance

Dalam Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan Perseroan tidak membentuk departemen khusus atau unit kerja khusus, melainkan seluruh pihak yang terkait bertanggung jawab terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

In Implementation of the Sustainable Finance, the Company does not establish a special department or special work unit, but all related parties will be responsible for implementation of Sustainable Finance.

Pejabat Official	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
<p>Direksi Board of Directors</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan secara keseluruhan. To be responsible for the overall implementation of Sustainable Finance Action Program. Setiap Direktur wajib melaksanakan dan mengelola Program Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan program yang telah direncanakan dan disetujui. Each Director is obliged to implement and manage the Sustainable Finance Action Program in accordance with the planned and agreed program
<p><i>Corporate Strategic Planning</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung pelaksanaan RAKB dengan memastikan kolaborasi antar departemen berjalan dengan optimal dan melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Direksi. To support the execution of SFAP by ensuring that any collaboration among departments will work optimally and conduct periodic evaluations and report it to the Board of Directors. Mengkoordinasikan persiapan konsep dengan pengkajian garis besar RAKB. To coordinate concept preparation with the outline study of SFAP.
<p><i>Corporate Secretary</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Laporan Keberlanjutan To prepare Sustainability Report. Memastikan pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan ke OJK. To ensure the submission of Sustainable Financial Action Plan and Sustainability Report to OJK (Financial Service Authority).
<p><i>Business Development</i> Corporate Business</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengkajian Produk dan/atau Jasa Bisnis Korporasi kategori Keuangan Berkelanjutan. Assessment of Corporate Business Products and/or Services of Sustainable Finance category Mempersiapkan dan membuat Produk dan/atau Jasa Unit Bisnis Korporasi kategori Keuangan Berkelanjutan. To prepare and create Corporate Business Unit Products and/or Services of Sustainable Finance category. Penyaluran pembiayaan Produk dan/atau Jasa Unit Bisnis Korporasi kategori Keuangan Berkelanjutan. Distribution of financing to Corporate Business Products and/or Services of Sustainable Finance category.
<p><i>Marketing & Business Development</i> Retail Business</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengkajian Produk dan/atau Jasa Unit Bisnis Ritel kategori Keuangan Berkelanjutan Assessment of Retail Business Unit Products and/or Services of Sustainable Finance category Mempersiapkan dan membuat Produk dan/atau Jasa Unit Bisnis Ritel kategori Keuangan Berkelanjutan To prepare and create Retail Business Unit Products and/or Services of Sustainable Finance category Penyaluran pembiayaan Produk dan/atau Jasa Unit Bisnis Ritel kategori Keuangan Berkelanjutan.

Pejabat Official	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
<i>Branch Management & Business Admin</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution of financing to Retail Business Unit Products and/or Services of Sustainable Finance category. • Mengelola pelaksanaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan di Kantor Cabang Perseroan. • To manage the implementation of Sustainable Finance Action Program in of the Company's Branch Office.
<i>Compliance & APU,PPT</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji penyusunan Pedoman & SOP Perseroan Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan. • To study the preparation of Guidance & SOP for the Sustainable Financial Action of The Company. • Melakukan pembaharuan RAKB dengan melibatkan berbagai departemen terkait untuk realisasi rencana yang berhubungan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. • To make the updating of SFAP by involving various relevant departments for plan realization related to the Sustainable Financial Action Plan. • Melakukan <i>review</i> dan rekomendasi terkait aspek kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan. • To conduct review and recommendation related to the aspects of compliance with the Sustainable Financial Action Program.
<i>Risk Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji integrasi aspek risiko dalam kegiatan usaha dalam rangka penerapan Keuangan Berkelanjutan. • To study the integration of risk aspects into business activities in term of Sustainable Finance implementation. • Melakukan <i>monitoring</i> risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan. • To monitor the credit risk and other risks related to implementation of Sustainable Finance.
<i>Business Processing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun <i>draft</i> dan penyesuaian Pedoman & SOP terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan. • Prepare draft and adjustments to the Guidelines SOP related to the implementation of Sustainable Finance.
<i>Finance and Accounting</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan bulanan terkait realisasi penyaluran pembiayaan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. • Monthly report related to realization of distribution of financing for Sustainable Finance products and/or services.
<i>Human Resources Recruitment and Development</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi terkait program penerapan Keuangan Berkelanjutan. • To conduct competency improvement training related to Sustainable Finance implementation program.
<i>Internal Audit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengendalian internal pada pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan. • To conduct internal control on the implementation of Sustainable Finance Program
Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengembangan teknologi informasi untuk pengawasan dan pelaporan penerapan Keuangan Berkelanjutan. • To develop information technology for monitoring and reporting the implementation of Sustainable Finance

Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan aktivitas yang mendukung Keuangan Keberlanjutan sebagai berikut:

Telah dilakukan pelatihan kepada 63 peserta yang terdiri dari Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Materi pelatihan antara lain :

- *Refreshment* tentang *sustainable finance*
- ESRA- Analisa Risiko Lingkungan dan Sosial
- Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan
- Taksonomi Hijau

Perseroan juga telah melakukan pelatihan tentang portofolio produk keuangan berkelanjutan kepada *Credit Marketing Officer* di Kantor Cabang

Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan yaitu :

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan melalui rapat-rapat berkala.
- b. Penyusunan Pedoman dan SOP Keuangan Berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kompetensi karyawan pada unit kerja terkait.
- d. Kecukupan pengendalian internal.

Pemangku Kepentingan

Perseroan senantiasa menerapkan strategi komunikasi yang tepat kepada seluruh pemangku kepentingan hal ini untuk mendukung terciptanya hubungan baik dan terjalannya komunikasi yang berkesinambungan dengan menerapkan komunikasi dua arah yang efektif meliputi komunikasi dengan internal dan eksternal.

Kendala

Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan Perseroan menghadapi permasalahan dan tantangan, antara lain :

1. Pemahaman terhadap integrasi LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) masih belum merata. Untuk itu Perseroan senantiasa berupaya terus meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan baik oleh pihak internal maupun eksternal.
2. Tantangan untuk Perseroan memberikan pembiayaan berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek risiko dan kehati-hatian, terutama dalam hal risiko kredit, *cyber security* dan keamanan data nasabah

Competence Development

In 2023 the following activities have been carried out to support the Sustainable Finance:

Training has been conducted for 63 participants from of retail business units and corporate business units at the head office and branches.

Training materials include:

- Refreshment on sustainable finance
- ESRA-Environmental and Social Risk Analysis
- Sustainable Finance Business Category
- Green Taxonomy

The Company has also conducted a training on the sustainable finance product portfolio for Credit Marketing Officer at Branch Office.

Risk Mitigation

The risk mitigation to be carried out by the Company includes:

- a. Active supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the implementation of Sustainable Finance Action through periodic meetings.
- b. Preparation of Sustainable Finance Guidelines and SOPs.
- c. Improving the capacity, quality and competency of employees in relevant work units.
- d. Adequacy of internal control.

Stakeholders

The Company always implements proper communication strategy to all stakeholders, this is to support the creation of good relation and the establishment of continuous communication by implementing effective two-way communication including internal and external communication.

Challenges

In implementing sustainable finance, the Company faces problems and challenges, including:

1. Understanding of ESG (Environmental, Social and Governance) integration is still uneven. For this reason, the Company always strives to increase internal capacity through training related to Sustainable Finance by both internal and external parties.
2. The challenge for the Company is to provide sustainable financing without ignoring risk and precautionary aspects, especially in terms of credit risk, cyber security and customer data security

Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Follow Up to Sustainable Finance Action Plan

Penanggung Jawab Terhadap *Monitoring* dan Evaluasi Aksi Keuangan Berkelanjutan

Penanggung jawab terhadap *monitoring* dan evaluasi Aksi Keuangan Berkelanjutan Perusahaan akan dilakukan oleh Unit Kerja Audit Internal yang berkerja sama dengan penanggung jawab masing-masing program.

Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Waktu untuk mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan akan dilakukan secara triwulanan, pengukuran yang dilakukan meliputi persentase pencapaian antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan didalam RAKB.

Tindak Lanjut RAKB

Dalam hal program-program yang telah disusun dalam RAKB ini belum dapat terlaksana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Perseroan akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan realisasi program Keuangan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan.
- b. Melakukan revisi atas RAKB.

Person in Charge for Monitoring and Evaluation of Sustainable Finance Action

The responsibility for monitoring and evaluation of the Company's Sustainable Finance Action will lay on the Internal Audit Work Unit in collaboration with the person in charge of each program.

Timing for Measuring the Realization of Sustainable Finance Action Plan

Timing for measuring the realization of Sustainable Finance Action Plan will be carried out on a quarterly basis, the measurement to be conducted include percentage of achievement between the realization and the target sets in the SFAP.

Follow Up To SFAP

In the event the programs that have been established in this SFAP cannot be implemented in accordance with the predetermined time frame, the Company will follow up as follows:

- a. To review the performance indicators used for the next years based on realization of the Sustainable Finance programs that have been implemented.
- b. To revised the SFAP.



Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance

Kegiatan Membangun Kinerja Keberlanjutan

Mizuho Leasing memahami bahwa setiap bisnis harus selalu menyesuaikan perkembangan zaman. Karena itu Perseroan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Bagi Perseroan, hal ini adalah kunci kelangsungan bisnis sambil menjaga kontribusi positif kepada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Perseroan juga menyadari bahwa dukungan semua pihak, termasuk seluruh pemangku kepentingan, juga merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja yang optimal di era globalisasi ini. Berbagai capaian kinerja yang baik hanya dapat terwujud jika Perseroan bersama seluruh Pemangku Kepentingan mampu berkolaborasi dan bahu-membahu untuk mendorong keberlanjutan.

Selama tahun 2023, Perseroan melanjutkan inisiatif dan komitmen pada bisnis yang mengedepankan prinsip dan nilai berkelanjutan. Dalam praktiknya, Perseroan berpartisipasi dalam berbagai kolaborasi yang melibatkan Pemangku Kepentingan untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Perseroan juga melanjutkan beberapa langkah strategis untuk mempersiapkan tantangan bisnis dan kondisi pasar saat ini, yang salah satunya diwujudkan melalui inisiatif dan transisi bisnis menuju digitalisasi. Melalui transformasi digital, Perseroan akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Perseroan juga menerapkan Rencana Aksi Bisnis Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 untuk menerapkan pembiayaan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.

Kinerja Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan melakukan kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Izin usaha sebagai lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.994/ KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 yang kemudian telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

Segmen usaha Perseroan terdiri dari 2 (dua) segmen yaitu Pembiayaan Ritel dan Pembiayaan Korporasi. Pembiayaan Ritel adalah pembiayaan yang lebih fokus terhadap kebutuhan yang bersifat konsumtif dan Pembiayaan Korporasi adalah pembiayaan yang lebih fokus terhadap kebutuhan yang bersifat produktif.

Saat ini, tantangan persaingan di industri Perseroan pembiayaan meningkat, seiring dengan kondisi pasar otomotif yang mengalami perlambatan karena pengaruh perekonomian nasional.

Activities to Build Sustainability Performance

Mizuho Leasing understands that every business must always adapt to the times. Therefore, the Company always tries to adapt itself to the needs of the times. For the Company, this is the key to business continuity while maintaining a positive contribution to economic, social and environmental aspects. The Company also realizes that the support of all parties, including all stakeholders, is also an important factor to achieve optimal performance in this globalization era. Various good performance achievements can only be realized if the Company and all Stakeholders are able to collaborate and work together to encourage sustainability.

During 2023, the Company will continue its initiatives and commitment to a business that promotes sustainable principles and values. In practice, the Company participates in various collaborations involving Stakeholders to achieve a balance between economic, social and environmental aspects, in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs).

The Company also continues several strategic steps to prepare for business challenges and current market conditions, one of which is realized through initiatives and business transitions towards digitalization. Through digital transformation, the Company will continue to provide the best service to consumers.

The Company also implements a Sustainable Business Action Plan in accordance with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 to implement sustainable financing for financial service institutions, issuers and public companies.

Economic Performance

As previously explained, the Company carries out investment, working capital, multipurpose and other business activities based on the approval of the Financial Services Authority.

The business license as a financial institution owned by the Company is as stated in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.994 / KMK.017 / 1993 dated December 30, 1993 which has subsequently been amended by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-161 / KM.6 / 2004 dated 4 May 2004 and Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-654 / KM.10 / 2010 dated 9 December 2010.

The Company's business segment consists of 2 (two) segments, namely Retail Financing and Corporate Financing. Retail Financing is financing that is more focused on consumptive needs and Corporate Financing is financing that is more focused on productive needs.

Currently, the challenge of competition in the finance company industry is increasing, in line with the condition of the automotive market which is experiencing a slowdown due to the influence of the national economy.

Di tengah kelesuan ekonomi yang melanda, Perseroan dapat membukukan Piutang Pembiayaan sebesar Rp2.615,29 miliar pada tahun 2023.

In the midst of the economic downturn, the Company was able to book Financing Receivables of Rp2,615.29 billion in 2023.

Menjadi nilai kontrak berdasarkan komposisi jenis pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terlihat pada tabel di bawah ini.

The contract value based on the composition of the type of financing as of December 31, 2023, December 31, 2022 and December 31 2021 is shown in the table below.

Total Piutang Pembiayaan / Total Financing Receivables				
Keterangan	2021	2022	2023	Description
Piutang Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)	2,089.64	2,183.49	2,615.29	Financing Receivables (in billion Rupiah)
Volume (dalam unit)	15,208	17,089	18,327	Volume (units)
Pendapatan Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)	254.26	270.35	320.91	Revenues from Financing (in billion Rupiah)

Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing				
Keterangan	2021	2022	2023	Description
Piutang Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah)	1,233.49	1,472.68	1,764.76	Consumer Financing Receivables (in billion Rupiah)
Volume (dalam unit)	14,691	16,768	18,069	Volume (units)
Pendapatan Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah)	189.38	224.00	265.37	Consumer Financing Revenues (in billion Rupiah)

Sewa Pembiayaan / Finance Lease				
Keterangan	2021	2022	2023	Description
Piutang Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)	856.15	710.81	850.53	Finance Lease Receivables (in billion Rupiah)
Volume (dalam unit)	517	321	258	Volume (units)
Pendapatan Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah)	64.88	46.35	55.54	Finance Lease Revenues (in billion Rupiah)

Rasio Keuangan yang Relevan Lainnya

Perseroan secara konsisten menjalankan aktivitas bisnis pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan taat kepada peraturan OJK serta perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mampu memenuhi rasio-rasio keuangan yang diatur oleh *regulator*.

Perbandingan kinerja rasio keuangan utama Perseroan dibandingkan dengan kinerja industri pembiayaan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Other Relevant Financial Ratios

The Company consistently runs financing business activities in accordance with the principle of prudence and obedience to the OJK regulations and applicable laws. The Company is able to meet financial ratios set by the regulator.

The comparison of the performance of the Company's main financial ratios compared to the performance of the industry in 2023 is as follows:

Rasio	Industri / Industry	Perseroan / The Company	Ratio
Financing Asset Ratio (FAR)	85.16%	91.05%	Financing Asset Ratio (FAR)
Rasio Gearing	2.26x	2.59%	Gearing Ratio
Rasio Modal Sendiri – Modal Disetor (MSMD)	315.04%	131.87%	Paid-up Capital - Equity Ratio
NPF- Net	2.44%	0.19%	NPF- Net
Return on Asset (ROA)	5.58%	2.33%	Return on Asset (ROA)
Return on Equity (ROE)	14.96%	8.47%	Return on Equity (ROE)
Beban Operasional – Pendapatan Operasional (BOPO)	76.89%	85.38%	Operational Efficiency Ratio

* Sumber: Statistik Lembaga Pembiayaan Periode Desember 2023

* Source: Financing Institution Statistics for the Period of December 2023

Target dan Realisasi Tahun Buku

Di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik, risiko inflasi, dan perubahan iklim, ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tumbuh 5,05%, lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31%. Industri pembiayaan juga tumbuh lebih rendah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Seperti halnya industri pembiayaan, pertumbuhan Perseroan tidak sesuai dengan yang diproyeksikan sebelumnya. Pencapaian target dan proyeksi kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

Targeted and Realization for the Fiscal Year

Amid global economic slowdown, rising geopolitical tension, inflation risk, and climate change, Indonesia's economy in 2023 grew by 5.05%, lower than the achievement in 2022, which grew by 5.31%. The financing industry also grew at a lower rate in 2023 compared to 2022. Like the financing industry, the Company's growth did not match what was previously projected. Target achievement and projections of the Company's performance are as follows:

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan	Target 2023	Realisasi 2023 2023 Realization	Information
Piutang Pembiayaan - Bersih	2,576.71	2,543,44	Financing Receivables - Net
Total Aset	3,144.55	2,793.58	Total Assets
Total Liabilitas	2,378.53	2,043.10	Total Liabilities
Pendapatan	394.01	401.34	Revenues
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	75.92	60.59	Total Comprehensive Income for The Year
Modal Ditempatkan & Disetor	568.74	568.74	Paid-up Capital
Tambahan Modal Disetor	97.58	97.58	Additional Paid-up Capital
Total Ekuitas	766.01	750.48	Total Equity

Target 2024

Manajemen Perseroan telah menyusun rencana untuk tahun 2024 dengan mempertimbangkan perkembangan industri otomotif, kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian baik dari segi makro maupun mikro.

2024 Targets

The Company's management has drawn up a plan for 2024 by considering the development of the automotive industry, current economic conditions and economic projections both in macro and micro terms.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Jenis	Target 2024	Type
Piutang Pembiayaan - neto	3,127.98	Financing Receivables - net
Total Aset	3,463.05	Total Assets
Total Liabilitas	2,698.04	Total Liabilities
Pendapatan	496.89	Revenues

Jenis	Target 2024	Type
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	14.51	Total Comprehensive Income for The Year
Modal Ditempatkan & Disetor	568.74	Paid-up Capital
Tambahan Modal Disetor	97.58	Additional Paid-up Capital
Total Ekuitas	765.01	Total Equity

Kinerja Lingkungan Hidup

Perseroan senantiasa mengoptimalkan efisiensi penggunaan listrik dan air dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut disosialisasikan dalam berbagai kesempatan secara internal. Adapun paparan penggunaan listrik dan air sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Environmental Performance

The Company always optimizes the efficiency of using electricity and water in carrying out its business activities. This was socialized on various occasions internally. The exposure to electricity and water use throughout 2023 is as follows:

(dalam Rupiah / in Rupiah)

No	Jaringan Kantor Office Network	PAM Water	PLN Electricity	Jumlah
1.	Kantor Pusat / Head Office	-	106.066.184	106.066.184
2.	Pecenongan	-	70.036.452	70.036.452
3.	Kelapa Gading	7.279.109	40.020.843	47.299.952
4.	Lebak Bulus	-	41.115.000	41.115.000
5.	Surabaya	5.720.588	21.788.593	27.509.181
6.	Tangerang	5.477.112	40.361.719	45.838.831
7.	Bekasi	-	44.131.250	44.131.250
8.	Bandung	4.315.919	20.885.817	25.201.736
9.	Medan	1.059.106	46.883.610	47.942.716
10.	Palembang	4.564.189	40.311.164	44.875.353
11.	Bogor	3.411.300	40.581.336	43.992.636
12.	Pekanbaru	-	53.948.192	53.948.192
13.	Samarinda	1.760.134	38.237.734	39.997.868
14.	Makassar	-	30.746.392	30.746.392
15.	Serang	-	10.029.500	10.029.500
16.	Malang	2.972.300	19.189.957	22.162.257
17.	Buaran	-	38.070.500	38.070.500
18.	Cikarang	6.282.267	46.662.599	52.944.866
19.	Depok	1.871.300	36.940.600	38.811.900
20.	Gading Serpong	1.631.200	31.732.250	33.363.450
21.	Jambi	-	31.879.981	31.879.981
22.	Kediri	-	24.577.036	24.577.036
23.	Lamongan	452.835	19.301.116	19.753.951
24.	Denpasar	-	16.787.803	16.787.803
25.	Bandar Lampung	-	27.439.148	27.439.148

No	Jaringan Kantor Office Network	PAM Water	PLN Electricity	Grand Total
26	Pontianak	1.068.800	15.649.736	16.718.536
27	Banjarmasin	1.435.401	18.588.314	20.023.715
28	Jakarta Barat	-	6.563.424	6.563.424
29	Cimahi	1.265.200	8.675.220	9.940.420
30	Balikpapan	1.042.133	1.002.750	2.044.883
	Total	51.608.893	988.204.220	1.039.813.113

Kinerja Sosial

Perseroan melihat Sumber Daya Manusia ("SDM") sebagai aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan operasi dan bisnis yang dijalankan. Sebagai perusahaan di sektor pembiayaan, kualitas SDM yang baik senantiasa menjadi penentu dari kualitas produk dan layanan yang diberikan Perseroan. Terkait hubungan kerja dengan karyawan, Perseroan berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik terkait ketenagakerjaan, maupun kesehatan dan keselamatan kerja.

Perseroan juga memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada mereka yang kompeten dan memiliki integritas tinggi yang selalu menjunjung etos kerja dan kejujuran. Pada tahun 2023, Perseroan telah merekrut 198 orang karyawan baru untuk berbagai posisi. Dalam proses rekrutmen, Perseroan fokus pada kualifikasi berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar Perseroan memiliki SDM yang berkualitas serta dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik.

Berikut disampaikan karyawan yang masuk dan keluar di sepanjang tahun 2023, serta tingkat perputaran karyawan dan perbandingannya dengan tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tingkat Perputaran Karyawan / Employee Turnover

Keterangan	2021	2022	2023	Description
Jumlah Karyawan awal Tahun (Orang)	590	614	664	Total Employees at the beginning of Year (People)
Rekrutmen Karyawan Baru (Orang)	147	195	198	New Employees Recruitment (People)
Karyawan yang Berakhir Hubungan Kerjanya (Orang)	126	145	151	Employees Who Have Ended Their Employment Relationship (People)
Jumlah Karyawan Akhir Tahun (Orang)	614	664	711	Total Employees at the End of the year (People)
Tingkat Perputaran Karyawan (%)	1.80	1.90	1,83	Employees Turnover Rate (%)

Kesetaraan Kesempatan Bekerja

Perseroan senantiasa memastikan kesetaraan kesempatan bekerja tanpa adanya diskriminasi atas *gender*, golongan, suku maupun ras tertentu. Perseroan menjalankan proses rekrutmen secara transparan, independen dan didasarkan pada kualifikasi serta kompetensi. Prinsip kesetaraan kesempatan bekerja merupakan pedoman utama Perseroan dalam memilih individu terbaik untuk bergabung menjadi karyawan Perseroan.

Social Performance

The Company believes that Human Resources ("HR") is an important aspect that cannot be separated from the growth of its operations and business. As a Company in the financing sector, the quality of good HR has always been the determinant of the quality of products and services provided by the Company. Regarding work relations with employees, the Company adheres to the prevailing laws and regulations, both related to employment, as well as occupational health and safety.

The Company also provides equal opportunities to work for those with competence and high integrity who always uphold the work ethic and honesty. In 2023, the Company has recruited 198 new employees for various positions. In the recruitment process, the Company focuses on competency-based qualifications that are tailored to the needs and plans that have been determined. This is done so that the Company has competent HR that could carry out its responsibilities properly.

The following is conveyed by employees who entered and left at throughout 2023, as well as employee turnover rates and the comparison with 2022 and 2021 is as follows:

Equal Employment Opportunity

The Company always ensures equal opportunity in employment with no discrimination on gender, class, or ethnicity. The Company carries out the recruitment process in a transparent, independent manner and is solely based on qualifications and competence. The principle of equal employment opportunities is the main guideline for the Company in selecting the best individuals to join in as Company employees.

Komposisi karyawan berdasarkan jenis kelamin dapat ditemukan pada halaman 61.

Employee composition by gender can be found on page 61.

Perbandingan Gaji Pokok di Level Terendah dengan Upah Miminum Kabupaten/Kota (UMK)

Besaran remunerasi yang diberikan Perseroan kepada pekerja telah memenuhi peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu, besaran gaji pokok dari pekerja tetap baik wanita maupun pria di level terendah masih lebih besar dari besaran Upah Minimum Kabupaten/ Kota ("UMK") yang berlaku di seluruh wilayah Kantor Cabang di Indonesia.

Comparison of Basic Salary at the Lowest Level with Regency/City Minimum Wages (UMK)

The amount of remuneration given by the Company to workers had met the employment regulations in Indonesia. Furthermore, the amount of the basic salary of permanent workers, both women and men at the lowest level, was still greater than the Regency / City Minimum Wage ("UMK") which applied in all Branch Offices in Indonesia.

Persentase Gaji Pokok Pekerja Tetap pada Tingkat Terendah Terhadap UMK.

Percentage of Basic Salary for Permanent Workers at the Lowest Level Against the UMK.

No	Lokasi Kantor Office Location	UMK 2023 (Rp)	Persentase Percentage
1	Kediri	2,318,117	1.68%
2	Lamongan	2,701,977	72.06%
3	Pontianak	2,750,645	1.61%
4	Lampung	2,991,349	3.62%
5	Kendari	2,993,730	3.53%
6	Denpasar	2,994,646	15.97%
7	Malang	3,194,144	8.73%
8	Jambi	3,230,208	7.52%
9	Banjarmasin	3,236,245	7.32%
10	Pekanbaru	3,319,023	5.46%
11	Samarinda	3,329,199	9.68%
12	Makassar	3,523,181	6.40%
13	Palembang	3,541,082	6.85%
14	Medan	3,624,118	4.40%
15	Bandung	4,048,463	2.61%
16	Serang	4,090,799	1.55%
17	Surabaya	4,525,479	2.73%
18	Gading Serpong	4,527,689	2.41%
19	Tangerang	4,584,519	1.14%
20	Bogor	4,639,429	0.64%
21	Depok	4,694,494	0.12%
22	Kantor Pusat / Head Office	4,901,798	2.00%
23	Kelapa Gading	4,901,798	2.00%
24	Pecenongan	4,901,798	2.00%
25	Lebak Bulus	4,901,798	2.00%
26	Buaran	4,901,798	2.00%
27	Jakarta Barat	4,901,798	2.00%
28	Cikarang	5,137,575	0.24%
29	Bekasi	5,158,248	0.81%

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman

Perseroan percaya bahwa tempat kerja yang layak dan lingkungan yang kondusif akan mendorong iklim kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja ("K3") didukung oleh manajemen dan seluruh karyawan mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Keselamatan kerja tercermin dari penataan ruang kantor yang mengacu pada beberapa hal, seperti kelengkapan dan kelayakan sarana seperti ruangan kerja, tempat ibadah, ruangan tunggu konsumen dan toilet, maupun lingkungan kerja yang nyaman seperti suhu ruangan kerja yang diatur serta ventilasi udara yang di jaga agar kesejukan dan kesegarannya dapat dinikmati oleh seluruh karyawan. Perseroan juga mengajak partisipasi seluruh karyawan didalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan cara menjalankan program 5R, yang terdiri dari :

1. Ringkas : Selalu memilah dan memilah lalu membuang barang – barang yang telah tidak dipergunakan.
2. Rapi : Selalu menetapkan tata letak barang – barang untuk tujuan mudah dijangkau apabila diperlukan.
3. Resik : Selalu membersihkan tempat kerja.
4. Rawat : Selalu merawat kebiasaan diri dan kondisi lingkungan kerja yang telah baik untuk menjadi semakin baik.
5. Rajin : Selalu mematuhi seluruh aturan yang ada dan rajin menerapkan 4 komponen R yang lain.

Untuk menjaga nihil kecelakaan serta potensi kerugian maka Perseroan menyiapkan perangkat pemadam kebakaran yang sesuai standar dan dengan jumlah yang memadai di ruangan kantor. Perawatan peralatan pemadam secara berkala dilakukan sesuai standar dan pada masa waktu pakai peralatan tersebut.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Perseroan senantiasa mengembangkan materi dan sarana pelatihan untuk semua karyawan. Beberapa metode yang digunakan dalam penyampaian materi-materi pelatihan, yaitu melalui *video learning*, *video conference* dan *e-learning*. Pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pelatihan tatap muka, baik secara langsung maupun *virtual*, namun juga melalui *on the job training*, *tutoring*, *rotasi*, *coaching*, *counseling* dan *mentoring*. Materi-materi yang disiapkan tidak hanya berorientasi pada industri pembiayaan saja, namun juga materi *soft skills* seperti kepemimpinan, pengembangan kepribadian, dan komunikasi. Media *e-learning* menjadi salah satu solusi dan strategi yang ditempuh untuk pembelajaran yang berkelanjutan.

Decent and Safe Work Environment

The Company believes that providing a decent workplace and conducive environment will foster a working climate that ultimately enhances employee productivity. The implementation of occupational health and safety ("K3") programs is supported by management and all employees, in accordance with the prevailing labor laws.

Work safety is reflected in the arrangement of office space which refers to several things, such as the completeness and appropriateness of facilities such as workspaces, prayer rooms, consumer waiting rooms and toilets, as well as a comfortable working environment such as regulated work room temperature and air ventilation that is kept cool and its freshness can be enjoyed by all employees. The Company also invites the participation of all employees in creating a safe and healthy work environment by running the 5R program, which consists of:

1. Simple : Always sort and choose then throw away items that are not used.
2. Order : Always set item layout - goods for easy-to-reach purposes if needed.
3. Clean : Always clean the workspace
4. Maintain : Taking care of work environment and always focus for betterment.
5. Consistent : Always comply with all existing rules and diligently apply the other 4 R

To maintain zero accidents and potential losses, the Company prepares fire extinguisher equipment according to standards and with an adequate number office space. Periodic maintenance of extinguisher equipment is carried out according to standards and during the life of the equipment.

Employee Development Trainings

The Company continues to develop training materials and tools for all employees. Several methods are used in the delivery of training materials, namely through video learning, video conferencing, e-learning. Human resource development is not only done through face-to-face training, both in person and virtual, but also through on-job training, tutoring, rotation, coaching, counseling, and mentoring. The materials prepared are not only oriented towards the financing industry, but also soft skills materials such as leadership, personality development, and communication. E-learning media is one of the solutions and strategies adopted for continuous learning.

Perseroan senantiasa menyelenggarakan kegiatan alih Pengetahuan tenaga kerja asing (“TKA”) kepada Tenaga Kerja Lokal lainnya guna proses didalam Alih Pengetahuan (*Transfer of Knowledge*)

Program pelatihan sepanjang 2023 dapat ditemukan pada halaman 62.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Dalam menjalankan amanah Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/ Atau Masyarakat. Dalam menjalankan amanah Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No 3 Tahun 2023, Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan Masyarakat.

MLI *Learning Center*, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 telah menjalankan pelaksanaan Program Sosialisasi Edukasi, Literasi Dan Pengelolaan Keuangan dengan peserta dari Siswa/i SMA Taman Harapan-Bekasi dengan Tema bertajuk “Mengetahui Usaha Jasa Pembiayaan”.

Sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap sosial dan lingkungan, Perseroan telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 5 Oktober 2023 bertempat di SMA Taman Harapan 1 Bekasi. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ditunjukkan Perseroan adalah memberikan sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pemberian sarana pendukung kegiatan belajar mengajar ini diterima langsung oleh Bapak Cahyono, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Taman Harapan 1 Bekasi.



Perseroan berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia terutama generasi muda.

The Company always organizes knowledge transfer activities for foreign workers (“TKA”) to other local workers for the process of Transfer of Knowledge.

The training program throughout 2023 can be found on page 62.

Social and Community Development

In carrying out the mandate of the Financial Services Authority through POJK No.76/POJK.07/2016 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and / or the Community. In carrying out the mandate of the Financial Services Authority through POJK No 3 of 2023, concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Community.

MLI Learning Center, on Thursday, October 5, 2023, carried out the implementation of the Education, Literacy, and Financial Management Socialization Program with participants from Taman Harapan-Bekasi High School Students with a theme entitled “Getting to Know the Financing Services Business”.

As a form of the Company’s commitment to social and environment, the Company has carried out activities on October 5, 2023 at Taman Harapan 1 Bekasi High School. The social and environmental responsibility shown by the Company is to provide facilities to support teaching and learning activities at school. The provision of supporting facilities for teaching and learning activities was received directly by Mr. Cahyono, S.Pd., M.Pd as the Principal of SMA Taman Harapan 1 Bekasi.

The Company hopes that through this activity it can make a positive contribution to the community, improve the quality of education, and develop the quality of human resources, especially the younger generation.



Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Responsibility for Sustainable Product Developments and/or Services

Sesuai dengan RAKB 5 (Lima) Tahun yang telah disusun, maka Perseroan menargetkan untuk mulai melakukan beberapa kajian terkait permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, Kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan, dan Pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan di tahun 2024.

Perlakuan Setara untuk Konsumen

Konsumen merupakan salah satu pemangku kepentingan utama Perseroan. Kehadiran mereka sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan Perseroan.

Semakin banyak konsumen yang berhasil diraih dan kepercayaannya terjaga, apalagi dengan adanya konsumen setia yang telah menjadi pelanggan, maka akan semakin terjamin keberlangsungan usaha Perseroan. Dan demikian sebaliknya. Karena posisi konsumen yang strategis, Perseroan tetap berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan yang terbaik dan setara kepada seluruh konsumen tanpa terkecuali.

In accordance with the 5 (Five) Year SFAP that has been prepared, the Company is targeting to start conducting several studies related to market demand for Sustainable Financial products and / or services, the suitability of existing products and / or services with the criteria for sustainable business activities, and Development of Sustainable Financial products and / or services in 2024.

Equal Treatment for Consumers

Customer are one of the main stakeholders of the Company. Their presence greatly determines the development and sustainability of the Company.

The more customer who are successfully achieved and their trust is maintained, especially with loyal customers who have become customers, the more the continuity of the Company's business will be guaranteed. And vice versa. Due to the strategic position of consumers, the Company remains committed to providing the best and equal products and services to all customer without exception.

Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Report and Complaint Resolution

Periode Period	Jenis Kegiatan Activities	Jenis Produk dan/atau Layanan Products/Services	Kategori Permasalahan Category	Jumlah Amount	Status Penyelesaian Resolution Status		
					Selesai Settled	Tidak Selesai Unsettled	Dalam Proses On Progress
JAN - MAR 2023	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments.	Denda / Penalti Fines / Penalties	746	746	0	0
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments.	Perilaku petugas penagihan Collector behavior	1	1	0	0
APR - JUN 2023	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments.	Denda / Penalti Fines / Penalties	786	786	0	0
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Denda / Penalti Fines / Penalties	925	925	0	0
JUL - AUG 2023	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Nilai pelunasan khusus, Special repayment amount	1	1	0	0
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Permasalahan Agunan/Jaminan Collateral Issues	1	1	0	0
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Jumlah tagihan Billing amount	1	1	0	0
OCT - DEC 2023	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Multipurpose Financing with installments	Denda/Penalti Fines/Penalties	1054	1054	0	0

Referensi Kriteria POJK No. 51/POJK.03/2017
Criteria Reference pursuant to POJK No. 51/POJK.03/2017

No	Uraian Description	Halaman Page
1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	162
2	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	174
	a. Aspek ekonomi, paling sedikit meliputi: 1. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; 2. Pendapatan atau penjualan; 3. Laba atau rugi bersih; 4. Produk ramah lingkungan; dan 5. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.	174
	b. Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit meliputi: 1. Penggunaan energi (antara lain listrik dan air); 2. Pengurangan emisi yang dihasilkan Perseroan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup; 3. Pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan Perseroan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup; atau 4. Pelestarian keanekaragaman hayati bagi Perseroan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup.	174
	c. Aspek sosial yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana).	174
3	Profil Singkat Perseroan	161
	a. Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Perseroan;	161
	b. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan Perusahaan;	161
	c. Skala usaha Perusahaan secara singkat, meliputi: 1. Total aset atau kapitalisasi aset, dan total liabilitas (dalam jutaan rupiah); 2. Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; 3. Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan 4. Wilayah Operasional	68 60 55 36
	d. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;	35
	e. Keanggotaan pada asosiasi;	65
	f. Perubahan Perusahaan yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.	75, 36, 55

No	Uraian Description	Halaman Page
4	Penjelasan Direksi	176
	a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:	176
	1. Penjelasan nilai keberlanjutan bagi Perusahaan;	
	2. Penjelasan respon Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;	
	3. Penjelasan komitmen pimpinan Perusahaan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;	
	4. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan	
	5. Tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.	
	b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi:	179
	1. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target; dan	
	2. Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi Perusahaan yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).	
	c. Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi:	180
	1. Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup;	
	2. Pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan	
	3. Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Perusahaan.	
	Board of Directors' Explanation	
	a. Policy to respond challenges to comply with a sustainability strategy, at least includes:	
	1. Explanation of sustainability values for the Company;	
	2. Explanation of the Company's responses to issues related to Sustainable Finance implementation;	
	3. Explanation of commitment of the Company's leaders to achieve targets of Sustainable Finance implementation;	
	4. Performance achievements of Sustainable Finance implementation;	
	5. Challenges on performance achievement of Sustainable Finance implementation;	
	b. Sustainable Finance implementation, at least includes:	
	1. Performance achievement of Sustainable Finance implementation (economic, social, and environmental aspects) compared with targets; and	
	2. Explanation of achievements and challenges, including important events during the reporting period (for a Company required to make an Sustainable Finance Action Plan).	
	b. Strategy for achieving targets, at least includes:	
	1. Risk management of implementation Sustainable Finance related to economic, social, and environmental aspects;	
	2. Opportunities utilization and business prospect; and	
	3. Explanation of external economic, social, and environmental conditions potentially affecting the Company's sustainability.	

No	Uraian Description	Halaman Page
5	Tata Kelola Keberlanjutan	180
	a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/ atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	184
	b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/ atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	186
	c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko perusahaan.	186
	d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (<i>assessment</i>) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan 2. Pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar. 	186
	e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.	186
6	Kinerja Keberlanjutan	188
	a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal Perseroan.	188
	b. Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 tahun terakhir meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan 2. Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. 	188

No	Uraian Description	Halaman Page
c.	<p>Kinerja sosial dalam 3 tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen. 2. Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak; b. Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional; c. Lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan d. Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai. 3. Masyarakat, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan; b. Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan c. TJSJ yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat. 	192
c.	<p>Social performance in the last 3 years:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Company's commitment to providing consumers with equal products and/or services. 2. Employment, at least contains: <ol style="list-style-type: none"> a. Statement on equality of job opportunity and existence of forced labor and child labor; b. Percentage of permanent employee's lowest remuneration to regional minimum wage; c. Decent, safe workplace; and d. Training and development on employees' capability. 3. Community, at least contains: <ol style="list-style-type: none"> a. Information of activities or area of operations making positive and negative impacts on surrounding communities, including financial literacy and inclusion; b. Public complaint mechanism as well as total public complaints received and followed up; and c. Social and environmental responsibility which can be associated with support to the sustainable development goals, i.e. types and achievements of community empowerment programs. 	192
d.	<p>Kinerja Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan; 2. Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan 3. Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan b. Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan. 	191
d.	<p>Environmental performance, at least contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Environmental cost spent; 2. Explanation of use of environment-friendly material, e.g. use of recycled material; and 3. Explanation of energy consumption, at least contains: <ol style="list-style-type: none"> a. Total and intensity of energy consumed; and b. Effort and achievement of energy efficiency implemented, including use of renewable energy. 	191

No.	Uraian Description	Halaman Page
e.	<p>Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perusahaan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d; 2. Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem; 3. Keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan b. Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna. 4. Emisi, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan b. Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan. 5. Limbah dan efluen, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis; b. Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan c. Tumpahan yang terjadi (jika ada). 6. Jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan. 	-
f.	<p>Tanggung jawab pengembangan Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan; 2. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan; 3. Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif; 4. Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau 5. Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan. 	196
7	Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.	-
	Written verification of independent party, if any.	-

Lembar Umpan Balik Feedback Sheet

Laporan ini menyajikan informasi terkait kinerja Perseroan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perseroan sangat mengharapkan kritik, masukan, atau saran dari Bapak/Ibu/Saudara untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan berikutnya.

This report presents information related to performance of the Company in economic, social, and environmental aspects. The Company welcomes your criticisms, feedback or suggestions for improving quality of the subsequent sustainable reports.

Pertanyaan Questions	Setuju Agree	Tidak setuju Disagree
<p>Laporan Keberlanjutan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan. This Sustainability Report has provided useful information on economic, social, and environmental performance of the Company.</p> <p>Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang. Data and information disclosed are easy to understand, complete, transparent, and balanced.</p> <p>Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan. Data and information presented are useful for making decision.</p> <p>Laporan ini menarik dan mudah dibaca. This report is interesting and easy to read.</p>		

Mohon berikan nilai mengenai aspek yang terdapat dalam Laporan ini. (1 = paling penting, 2 = penting, 3 = tidak penting, 4 = sangat tidak penting).

Please score on aspects presented in this Report. (1 = most important, 2 = important, 3 = not important, 4 = very important).

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kinerja Ekonomi
Economic Performance | <input type="checkbox"/> Ketenagakerjaan
Employment | <input type="checkbox"/> Pengelolaan Limbah
Waste Treatment |
| <input type="checkbox"/> Portofolio Produk
Product Portfolio | <input type="checkbox"/> Penggunaan Energi
Energy Consumption | <input type="checkbox"/> Privasi Nasabah
Customer Privacy |
| <input type="checkbox"/> Pelatihan dan Pendidikan
Training and Education | <input type="checkbox"/> Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja yang Adil
Gender Equality and Fair Job Opportunity | <input type="checkbox"/> Anti Korupsi dan Anti Fraud
Anti-Corruption and Anti-Fraud |
| <input type="checkbox"/> Teknologi Informasi
Information Technology | <input type="checkbox"/> Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Work Health and Safety | <input type="checkbox"/> Pengurangan Emisi
Emission Reduction |

Mohon berikan komentar/saran/usulan bagi laporan ini / Please give your comments/suggestions/proposals for this report

.....

.....

.....

Profil Anda / Your Profile

Nama / Name :
 Pekerjaan / Occupation :
 Nama Lembaga/Perusahaan / Name of Institution/Company :
 Kontak (telepon, email) / Contact (phone, e-mail) :

Kategori Pemangku Kepentingan / Category of Stakeholder

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Investor / Investor | <input type="checkbox"/> Nasabah / Customer | <input type="checkbox"/> Pegawai / Employee | <input type="checkbox"/> Distributor / Distributor |
| <input type="checkbox"/> Media / Media | <input type="checkbox"/> Masyarakat / Public | <input type="checkbox"/> Pemerintah / Government | <input type="checkbox"/> Lain-lain, sebutkan /
Others, please specify |

.....

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam Laporan ini mohon dikirimkan kepada:
Please send your suggestion and response to information presented in this Report to:

Kantor Pusat / Head Office
Menara Astra 32nd Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Telp: +62 21 5085.1848 Fax: +62 21 5085.1849

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

**SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2023
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK**

STATEMENT LETTER OF
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE 2023 ANNUAL REPORT
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

We the undersign below hereby declare that all information in the 2023 Annual Report of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk has been provided completely and are fully responsible for the accuracy of the content of the Company's Annual Report.

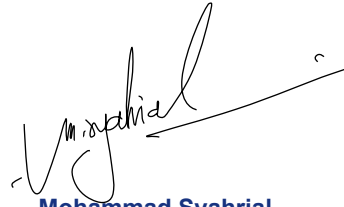
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, April 2024

The statement is made in truthfulness.
Jakarta, April 2024

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Yasuo Imaizumi
Komisaris Utama
President Commissioner



Mohammad Syahril
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Bhindawati Gunawan
Komisaris*
Commissioner

Direksi
Board of Directors



Shunsuke Kojima
Direktur
Director



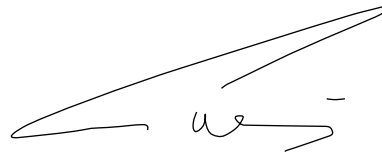
Konosuke Mizuta
Direktur Utama
President Director



Andi Harjono
Direktur
Director



Ade Rafida Saulina S
Direktur
Director



Yudi Gustiawan
Direktur
Director

- *) Bahwa pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- *) That the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner of the Company is effective as of the receipt of approval from the OJK for the *fit and proper test* and in compliance with applicable laws regulations.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT /
AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENT**

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

LAPORAN KEUANGAN/FINANCIAL STATEMENTS

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022/
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2023 AND 2022**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

	Halaman/ Page	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022		FINANCIAL STATEMENTS - For the years ended December 31, 2023 and 2022
Laporan Posisi Keuangan	1	Statement of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas	4	Statement of Changes in Equity
Laporan Arus Kas	5	Statement of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan	6	Notes to Financial Statements
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - Rasio-Rasio Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Tidak Diaudit)	94	SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION - Financial Ratio of Financial Services Authority (Unaudited)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk**PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ We, the undersigned:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama/ Name | : | Konosuke Mizuta |
| Alamat kantor/ Office address | : | Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID card | : | Apartemen Plaza Senayan Unit C#232 Tower C Lt. 23, Jl. Tinju No. 1, Kel. Gelora Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat |
| Nomor telepon/ Phone number | : | (021) 50851848 |
| Jabatan/ Position | : | Presiden Direktur/ President Director |
| 2. Nama/ Name | : | Shunsuke Kojima |
| Alamat kantor/ Office address | : | Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID card | : | Apartemen Plaza Senayan Unit C#026 Tower C Level 2, Jl. Tinju No. 1, Gelora Bung Karno, Tanah Abang, Jakarta Pusat |
| Nomor telepon/ Phone number | : | (021) 50851848 |
| Jabatan/ Position | : | Direktur/ Director |

Menyatakan bahwa/ State that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023; | 1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk's financial statements for the year ended December 31, 2023; |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the financial statements is complete and correct; |
| b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. | 4. We are responsible for the Company's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

11 Jakarta, 13 Maret 2024



Konosuke Mizuta
Direktur Utama/President Director

Shunsuke Kojima
Direktur/Director

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

No. 00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/III/2024

No. 00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

We have audited the financial statements of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Imelda & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which is a separate and independent legal entity, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

Imelda & Rekan

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Kredit Ekspektasian (“KKE”) pada piutang pembiayaan (piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen)

Mengacu pada Catatan 3e Informasi kebijakan akuntansi material - Instrumen keuangan; Catatan 6 Piutang pembiayaan konsumen; Catatan 7 Piutang sewa pembiayaan; dan Catatan 37 Manajemen risiko - risiko kredit.

Pada 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 1.764 miliar dan Rp 850 miliar. Cadangan KKE terhadap piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 35 miliar dan Rp 37 miliar. Perusahaan mengimplementasikan ketentuan PSAK 71 Instrumen Keuangan untuk menghitung estimasi KKE atas eksposur kredit piutang pembiayaan.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

Expected credit losses (“ECL”) on financing receivables (finance lease receivables and consumer financing receivables)

Refer to Note 3e Material accounting policy information - Financial instruments; Note 6 Consumer financing receivables; Note 7 Finance lease receivables; and Note 37 Risk management - credit risk.

As at December 31, 2023, the Company has financing receivables comprising of consumer financing receivables and finance lease receivables amounting to Rp 1,764 billion and Rp 850 billion, respectively. Allowance for ECL against these consumer financing receivables and finance lease receivables amounted to Rp 35 billion and Rp 37 billion, respectively. The Company applies PSAK 71 Financial Instruments requirements to calculate the ECL for its financing receivables exposures.

Imelda & Rekan

Kami berfokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat piutang pembiayaan setelah nilai KKE yang mewakili 91.05% dari total aset Perusahaan. Penentuan KKE didasarkan pada beberapa asumsi yang kompleks dan subjektif dan juga pertimbangan yang digunakan oleh Manajemen. Lebih jauh, kondisi ekonomi dan geopolitik saat ini turut meningkatkan tingginya ketidakpastian atas estimasi dan tingkat pertimbangan yang dibutuhkan untuk digunakan dalam mengestimasi KKE. Dengan melihat faktor-faktor ini, kami mengidentifikasi KKE sebagai hal audit utama.

Perusahaan menghitung KKE untuk piutang pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai maupun untuk yang mengalami penurunan nilai. Untuk piutang pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai, yang tidak dianggap signifikan secara individual, Perusahaan menilai KKE secara kolektif. Untuk piutang pembiayaan yang mengalami penurunan nilai, yang nilainya signifikan secara individual, Perusahaan menilai KKE secara individual.

a. KKE kolektif atas piutang pembiayaan

KKE kolektif atas piutang pembiayaan dihitung dengan mempertimbangkan *probability of default* ("PD"), *loss given default* ("LGD"), *exposure at default* ("EAD"). Perusahaan menggunakan model yang bergantung pada data internal dan eksternal. Perhitungan KKE kolektif menggunakan pertimbangan dan asumsi yang signifikan, termasuk di dalamnya:

- Penilaian atas peningkatan risiko kredit secara signifikan dan kredit *default*;
- Ekspektasi atas faktor makro ekonomi masa depan dan skenario, termasuk penentuan bobot pertimbangannya; dan
- Asumsi model yang digunakan.

b. KKE individual atas piutang pembiayaan

KKE individual atas piutang pembiayaan dihitung dengan estimasi arus kas yang akan diterima di masa depan, dengan mengombinasikan beberapa skenario dan asumsi probabilitas tertimbang. Perhitungan KKE individual menggunakan pertimbangan manajemen dan asumsi yang signifikan, termasuk di dalamnya:

- Perkiraan atas arus kas yang diterima;
- Penilaian aset yang dijaminan; dan
- Estimasi atas skenario, waktu untuk menerima pembayaran di masa depan dan bobot pertimbangannya.

We focused on this area due to the significance of the carrying value of financing receivables after its ECL representing 91.05% of the total assets of the Company. The determination of ECL is based on a number of complex and subjective assumptions and judgments used by Management. Further, the current economic and geopolitical condition have increased the uncertainty of these estimates and degree of judgment required to be exercised in estimating the ECL. In view of these factors, we identified ECL as a key audit matter.

The Company calculates ECL for both non-impaired and impaired financing receivables. For non-impaired and impaired financing receivables, which are not considered individually significant, the Company assesses ECL on a collective basis. For impaired financing receivables, which are considered individually significant, the Company assesses ECL on an individual basis.

a. Collective ECL on financing receivables

Collective ECL on financing receivables is calculated by considering the probability of default ("PD"), loss given default ("LGD") and exposure at default ("EAD"). The Company utilizes modelling which are reliant on internal and external data. The measurement of collective ECL involves significant management judgments and assumptions, including, among others:

- Assessment of significant increase in credit risk and default criteria;
- Expectations of forward-looking macroeconomic factors and scenarios, including in determining the probability weightings; and
- The model assumptions used.

b. Individual ECL on financing receivables

Individual ECL on financing receivables is assessed by the estimation of future cash flows, combining scenarios and probability weightings assumptions. The measurement of individual ECL involves significant management judgments and assumptions, including, among others:

- Expected amount of cash flows;
- Collateral valuations; and
- Estimations of the scenarios, timing to collect the future cash flows and the weighting.

Imelda & Rekan

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespon hal audit utama:

a. KKE kolektif atas piutang pembiayaan

Kami memperoleh pemahaman mengenai pengendalian yang berhubungan dengan audit kami dan menilai desain dan implementasi dari pengendalian yang relevan atas KKE. Hal ini termasuk:

- Identifikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan (SICR), kriteria default atau penurunan nilai kredit;
- Penilaian atas informasi masa depan yang digunakan dalam model KKE;
- Penilaian atas keandalan dan akurasi dari elemen data utama yang digunakan dalam model KKE;
- Penilaian dan persetujuan atas hasil perhitungan KKE;
- Penilaian terhadap pengendalian umum dari Teknologi Informasi (TI) atas sistem KKE, dengan melibatkan spesialis TI kami.

Kami melibatkan spesialis internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur berikut ini dengan dasar sampel:

- Mengevaluasi kelayakan penilaian Perusahaan atas kriteria peningkatan risiko kredit secara signifikan;
- Menguji pendekatan Perusahaan dalam pemilihan skenario ekonomi untuk menilai kewajaran atas skenario ekonomi dan bobot pertimbangan yang diaplikasikan oleh Perusahaan;
- Menilai kewajaran atas pertimbangan dan asumsi utama yang dibuat oleh Manajemen pada model dan parameter dalam *probabilities of default (PD)* dan *loss given default (LGD)*;
- Melakukan validasi independen atas model KKE dan penilaian hasil validasi model oleh Manajemen.

Kami juga melakukan prosedur substantif berikut ini:

- Mengevaluasi masukan dan asumsi relevan yang digunakan oleh Perusahaan dalam model KKE secara basis sampel;
- Menghitung ulang KKE secara independen.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

a. Collective ECL on financing receivables

We obtained an understanding of the controls relevant to our audit and assessed the design and implementation of such relevant controls over the ECL. These include:

- Identification of significant increase in credit risk (SICR), default criteria or credit impairment;
- Assessment of the forward-looking information used in the ECL models;
- Assessment of the reliability and accuracy of critical data elements in the ECL models;
- Assessment and approval of the ECL results;
- Assessment on General IT controls over the ECL system, by involving our IT specialist.

We involved our internal specialist to assist us in performing the following procedures on a sampling basis:

- Evaluated the appropriateness of the Company's assessment of its SICR criteria;
- Challenged the Company's approach for the selection of economic scenario to assess the reasonableness of the economic scenarios and corresponding weightages applied by the Company;
- Assessed the reasonableness of key judgments and assumptions made by management in the probabilities of default (PD) and loss given default (LGD) models and parameters;
- Performed independent validation of the ECL models and assessment of model validation results by management.

We also performed the following substantive testing:

- Evaluated relevant inputs and assumptions used by the Company in the ECL models, on a sampling basis;
- Independently recalculated the ECL.

Imelda & Rekan

Kami telah menilai ketepatan atas pengungkapan terkait yang dibuat di dalam laporan keuangan.

b. KKE individual atas piutang pembiayaan

Kami memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang relevan terhadap audit kami dan menilai desain dan implementasi pengendalian yang relevan atas KKE atas piutang pembiayaan, yang mencakup penilaian dan pemantauan agunan, pemantauan dan peninjauan piutang pembiayaan, serta peninjauan dan persetujuan atas KKE yang dinilai secara individual.

Untuk sampel kami atas piutang pembiayaan yang dinilai secara individual, kami melakukan prosedur berikut:

- Mengkritisi asumsi utama manajemen yang diterapkan dalam ekspektasi arus kas masa depan termasuk jumlah, waktu, dan probabilitas tertimbang yang digunakan;
- Melakukan perhitungan ulang KKE individual.

Kami telah menilai ketepatan atas pengungkapan terkait yang dibuat di dalam laporan keuangan.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

We have assessed appropriateness of the related disclosures made in the financial statements.

b. Individual ECL on financing receivables

We obtained an understanding of the controls relevant to our audit and assessed the design and implementation of the controls of such relevant controls over the ECL on financing receivables, which include collateral valuation and monitoring, credit monitoring and reviews, and review and approval of the individually assessed ECL.

For our selected samples of financing receivables that are individually assessed, we performed the following procedures:

- Challenged management's key assumptions applied on the expected future cash flows of the debtor, including amounts, timing, and probability-weighted outcome used;
- Recalculated the individual ECL

We have assessed appropriateness of the related disclosures made in the financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above, when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Imelda & Rekan

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Imelda & Rekan

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Imelda & Rekan

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

IMELDA & REKAN



Bayu M Dayat

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License No. AP. 1626*

13 Maret 2024/*March 13, 2024*



00052

	Catatan/ Notes	2023 Rp'000	2022 Rp'000	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	5			Cash and cash equivalents
Pihak berelasi	33	15.959.589	34.057.828	Related parties
Pihak ketiga		34.401.613	68.541.908	Third parties
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 34.579.910 pada 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp 34.416.928)	6	1.730.181.413	1.438.260.924	Consumer financing receivables - net of allowance for expected credit losses of Rp 34,579,910 at December 31, 2023 (December 31, 2022: Rp 34,416,928)
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 37.269.504 pada 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp 35.977.048)	7	813.258.674	674.828.310	Finance lease receivables - net of allowance for expected credit losses of Rp 37,269,504 at December 31, 2023 (December 31, 2022: Rp 35,977,048)
Piutang lain-lain - bersih	8			Other receivables - net
Pihak berelasi	33	814.930	497.515	Related parties
Pihak ketiga		81.663.691	78.561.814	Third parties
Biaya dibayar dimuka	9			Prepaid expenses
Pihak berelasi	33	919	11.917	Related parties
Pihak ketiga		2.611.973	1.735.082	Third parties
Aset pajak tangguhan	19	11.655.658	11.581.921	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	11	51.804.948	53.032.718	Property and equipment - net
Aset derivatif	12	7.953.302	17.532.167	Derivative assets
Aset hak-guna - bersih	10	32.112.821	33.763.452	Right-of-use assets - net
Aset lain-lain	13			Other assets
Pihak berelasi	33	74.175	558.295	Related parties
Pihak ketiga		11.088.144	53.706.698	Third parties
JUMLAH ASET		2.793.581.850	2.466.670.549	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

	Catatan/ Notes	2023 Rp'000	2022 Rp'000	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha	15	967.812	714.424	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	17			Accrued expenses
Pihak berelasi	33	3.301.360	2.182.874	Related parties
Pihak ketiga		8.601.448	12.186.551	Third parties
Utang pajak	18	2.054.169	2.245.199	Taxes payables
Liabilitas derivatif	12	231.106	-	Derivative liabilities
Liabilitas sewa	20	27.301.101	29.542.427	Lease liabilities
Utang bank	14			Bank loans
Pihak berelasi	33	1.352.214.146	1.137.759.920	Related parties
Pihak ketiga		587.592.116	523.617.697	Third parties
Utang lain-lain	16			Other payables
Pihak berelasi	33	-	7.865.500	Related parties
Pihak ketiga		46.367.903	48.249.346	Third parties
Liabilitas imbalan pasca-kerja	21	14.465.851	12.408.918	Post-employment benefits liabilities
Jumlah Liabilitas		<u>2.043.097.012</u>	<u>1.776.772.856</u>	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Share capital - par value
Rp 100 (dalam Rupiah penuh)				Rp 100 (in full Rupiah)
per saham				per share
Modal dasar - 10.000.000.000				Authorized capital -
saham				10,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh -				Issued and fully paid -
5.687.353.997 saham	22	568.735.400	568.735.400	5,687,353,997 shares
Tambahan modal disetor	23	97.585.106	97.585.106	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lain		465.594	1.028.277	Other equity components
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		1.500.000	1.200.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		82.198.738	21.348.910	Unappropriated
Jumlah Ekuitas		<u>750.484.838</u>	<u>689.897.693</u>	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>2.793.581.850</u>	<u>2.466.670.549</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

	Catatan/ Notes	2023 Rp'000	2022 Rp'000	
PENDAPATAN				INCOME
Pembiayaan konsumen	24	265.366.992	224.002.335	Consumer financing
Sewa pembiayaan	25	55.537.525	46.353.196	Finance leases
Administrasi dan provisi	26	45.414.855	32.444.527	Administration and provision
Penalti	27	20.747.410	14.580.192	Penalty
Bunga		327.809	390.037	Interest
Pendapatan lain-lain	28	13.946.045	15.290.298	Other income
Jumlah Pendapatan		401.340.636	333.060.585	Total Income
BEBAN				EXPENSES
Bunga dan keuangan	29	(105.225.739)	(59.244.572)	Interest and financing charges
Kepegawaian	30	(112.200.741)	(102.961.163)	Personnel
Umum dan administrasi	31	(69.639.710)	(63.899.439)	General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(52.164.322)	(49.550.126)	Provision for impairment losses
Beban lain-lain		(875.327)	(2.066.803)	Other expenses
Jumlah Beban		(340.105.839)	(277.722.103)	Total Expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		61.234.797	55.338.482	PROFIT BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX
Kini		-	-	Current
Tangguhan	19	(84.969)	6.707.306	Deferred
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		(84.969)	6.707.306	Income Tax (Expense) Benefit
LABA TAHUN BERJALAN		61.149.828	62.045.788	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	21	225.804	(27.925)	Gain (loss) on defined benefit actuarial program
Pajak penghasilan terkait	19	(49.677)	6.143	Income tax related
Jumlah		176.127	(21.782)	Total
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Laba (rugi) dari lindung nilai arus kas	12	(947.193)	3.370.498	Gain (loss) from cash flow hedge
Pajak penghasilan terkait	19	208.383	(741.509)	Income tax related
Jumlah		(738.810)	2.628.989	Total
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		(562.683)	2.607.207	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		60.587.145	64.652.995	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	32	10,75	10,91	BASIC EARNING PER SHARE (in full Rupiah)

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
 STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2023 AND 2022

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital Rp'000	Tambahkan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital Rp'000	Komponen Ekuitas Lain/ Other equity components			Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated Rp'000	Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated Rp'000	Jumlah Ekuitas/ Total Equity Rp'000
			(Kerugian) Keuntungan Aktuarial/ (Loss) Gain on Actuarial Rp'000	Lindung Nilai Arus Kas/ Cash Flows Hedge Rp'000				
Saldo per 1 Januari 2022	568.735.400	97.585.106	(1.647.252)	66.322	1.200.000	(40.696.878)	625.244.698	
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	62.045.788	62.045.788	
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(21.782)	2.628.989	-	-	2.607.207	
Saldo 31 Desember 2022	568.735.400	97.585.106	(1.669.034)	2.697.311	1.200.000	21.348.910	689.897.693	
Pencadangan saldo laba	-	-	-	-	300.000	(300.000)	-	
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	61.149.828	61.149.828	
Penghasilan komprehensif lain	-	-	176.127	(738.810)	-	-	(562.683)	
Saldo 31 Desember 2023	568.735.400	97.585.106	(1.492.907)	1.958.501	1.500.000	82.198.738	750.484.838	

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

	Catatan/ Notes	2023 Rp'000	2022 Rp'000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan		1.985.638.276	1.730.308.369	Cash receipts from consumer financing and finance lease
Penerimaan kas sehubungan dengan pembiayaan bersama		13.671.384	10.534.472	Cash receipts in connection with joint financing
Penerimaan operasional lainnya		23.996.128	4.366.536	Other operating received
Penerimaan tagihan pajak		39.070.270	-	Claims for tax refund received
Penerimaan bunga		327.809	390.037	Interest received
Pembayaran kas untuk:				Cash paid for:
Pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan		(2.101.507.590)	(1.584.707.760)	Consumer financing and finance lease
Beban operasional		(162.652.632)	(73.186.505)	Operational expenses
Pembayaran operasional lainnya		(5.222.536)	(32.832.323)	Payment for other operating activities
Pembayaran bunga		(104.306.869)	(58.518.274)	Payment of interest
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi		<u>(310.985.760)</u>	<u>(3.645.448)</u>	Net Cash Flows Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	11	(10.463.707)	(25.007.851)	Acquisition of property and equipments
Hasil penjualan aset tetap	11	<u>889.114</u>	<u>968.980</u>	Proceed from sale of property and equipments
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(9.574.593)</u>	<u>(24.038.871)</u>	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank	14	1.120.732.594	1.123.314.342	Receipts of bank loans
Pembayaran utang bank	14	(842.303.949)	(1.074.694.805)	Payments for bank loans
Pembayaran pendanaan lainnya		(10.106.826)	(13.973.398)	Other funding payments
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		<u>268.321.819</u>	<u>34.646.139</u>	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(52.238.534)	6.961.820	NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	5	<u>102.599.736</u>	<u>95.637.916</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	5	<u><u>50.361.202</u></u>	<u><u>102.599.736</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance berdasarkan Akta No. 43 tanggal 21 Juli 1993 dari Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 tanggal 29 Oktober 1993 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994, Tambahan No. 8832. Perusahaan telah melakukan perubahan nama beberapa kali, terakhir dari PT Verena Multi Finance Tbk menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing dengan surat No AHU-0068946.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 September 2022 dan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir adalah sebagaimana tersebut dalam Akta No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068946.AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 24 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan meliputi usaha pembiayaan:

- a. Pembiayaan investasi
- b. Pembiayaan modal kerja
- c. Pembiayaan multiguna
- d. Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (the “Company”) was established under the name of PT Maxima Perdana Finance based on Deed No. 43 dated July 21, 1993 from Sri Nanning, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 dated October 29, 1993, and was published in Supplement No. 8832 of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 88 dated November 4, 1994. The Company has changed its name several times, the latest from PT Verena Multi Finance Tbk to become PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk based on the Deed of Shareholders’ Extraordinary Meeting of PT Verena Multi Finance Tbk No. 8 dated September 19, 2022 from Fathiah Helmi, S.H. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as the Financial Services Authority, in letter No. AHU-0068946.AH.01.02.TAHUN 2022 dated September 24, 2022 and Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022, respectively.

The Company’s Articles of Association have been amended several times. The latest amendment to the Company’s Articles of Association is as stated in Deed No. 8 dated September 19, 2022 from Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, have received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0068946.AH.01.02. Year 2022 dated 24 September 2022 concerning Approval of Amendments to the Limited Liability Company Articles of Association.

Based on Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of financing activities:

- a. Investment financing
- b. Working capital financing
- c. Multipurpose financing
- d. Other Financing Business Activities Based on Approval from OJK.

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (*fee*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perusahaan, dengan nama sebelumnya, PT Maxima Perdana Finance, memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993. Perusahaan mulai beroperasi pada tanggal 21 Juni 2003, dengan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Saat ini, Perusahaan menjalankan usaha utamanya dibidang pembiayaan konsumen dan aktivitas sewa pembiayaan dan mempunyai 29 (dua puluh sembilan) kantor cabang yang terletak di kota Bandar Lampung, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cikarang, Denpasar, Depok, Jakarta, Jambi, Kediri, Lamongan, Makassar, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Serang, Surabaya dan Tangerang. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta Pusat 10220.

Perusahaan berada dalam pengendalian Mizuho Leasing Co., Ltd. (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) Jepang.

In addition to the above main business activities, the Company can carry out supporting business activities to perform operating leases and/or fee-based activities as long as the Company does not violate the laws and regulations in the financial services sector.

The Company, under its former name of PT Maxima Perdana Finance, obtained its license to operate as a financing company from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. 994/KMK.017/1993 dated December 30, 1993. The Company started operating on June 21, 2003 with operating license based on the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 dated May 4, 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 dated December 9, 2010 Jo. Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022.

Currently, the Company is engaged in consumer financing and finance lease activities and has 29 (twenty nine) branches located in the city of Bandar Lampung, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cikarang, Denpasar, Depok, Jakarta, Jambi, Kediri, Lamongan, Makassar, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Serang, Surabaya and Tangerang. The head office is located at Menara Astra, 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Central Jakarta 10220.

The Company is under control of Mizuho Leasing Co., Ltd. (formerly IBJ Leasing, Co., Ltd.) Japan.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ <i>December 31, 2023</i>
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	Takeshi Sasaki
Komisaris	Roosniati Salihin*)
Komisaris Independen	Mohammad Syahrial
<u>Direksi</u>	
Direktur Utama	Konosuke Mizuta
Direktur	Andi Harjono
Direktur	Ade Rafida Saulina S.
Direktur	Shunsuke Kojima
Direktur	Yudi Gustiawan

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2023 and 2022, was as follows:

	31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i>
<u>Board of Commissioners</u>	
	President Commissioner
	Commissioner
	Independent Commissioner
<u>Directors</u>	
	President Director
	Director
	Director
	Director
	Director

*) Masa jabatan Beliau berakhir pada tanggal 5 November 2023 dikarenakan telah meninggal dunia/
Her term of services ended on November 5, 2023 due to she has passed away

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direktur Utama mencakup memastikan proses manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnahan masal, perlindungan konsumen, legal korporasi, *corporate strategic planning*, *business processing*, sekretaris perusahaan dan hubungan investor, keuangan berkelanjutan dan menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direktur mencakup pengembangan bisnis dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis, menjalankan fungsi pemasaran, pemberian pembiayaan, manajemen aset, analisa kredit, pencarian sumber dana, proses dan pelaporan keuangan dan akuntansi, teknologi informasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, legal litigasi, memastikan semua fungsi dan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan, membuat pelaporan kepada otoritas terkait secara lengkap dan tepat waktu dan menjalankan program tanggung-jawab sosial dan literasi dan inklusi keuangan.

The scope of duties and responsibilities of the President Director include ensuring the process of risk management, compliance, internal audit, anti-money laundering, prevention of terrorism financing and prevention of financing proliferation of mass destruction weapon, customer protection, corporate legal, corporate strategic planning, business processing, corporate secretary and investor relations, sustainable financial and carrying out corporate social and environment responsibility programs.

The scope of duties and responsibilities of the Director covers business development and achievement of targets set in the business plan, carrying out marketing functions, financing provision, asset management, credit analysis, finding sources of funds, financial and accounting processes and reporting, information technology, human resources, procurement of goods and services, legal litigation, ensuring all functions and responsibilities to stakeholders, making full and timely reporting to relevant authorities and carrying out social responsibility programs and inclusion and financial literacy.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 003/BOC-VMF/LEGAL/III/23 tertanggal 31 Maret 2023, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on the Resolution of the Board of Commissioners No. 003/BOC-VMF/LEGAL/III/23 dated March 31, 2023, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

31 Desember 2023/
December 31, 2023

31 Desember 2022/
December 31, 2022

Komite Audit

Ketua Mohammad Syahril
 Anggota Gregory O.K Ongko
 Anggota Brantas

Audit Committee

Chairman Mohammad Syahril
 Member Bondan Anugrah
 Member Gregory O.K Ongko

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Audit Internal Perusahaan masing-masing dijabat oleh Fransisca Y. Gunawan dan Guntur Sunaryo Putro.

The Corporate Secretary and Head of Internal Audit of the Company is held by Fransisca Y. Gunawan and Guntur Sunaryo Putro, respectively.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 711 dan 664 karyawan (tidak di audit).

As of December 31, 2023 and 2022, the Company had a total of 711 and 664 employees, respectively (unaudited).

c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

c. Public Offering of the Company's shares

Penawaran Umum Saham Perdana

Initial Public Offering of Shares

Pada tanggal 13 Juni 2008, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) berdasarkan surat BAPEPAM-LK No. S-3825/BL/2008 untuk melakukan penawaran umum atas 460.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh) dan harga penawaran per saham sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh). Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 25 Juni 2008. Penawaran umum saham perdana ini disertai dengan penerbitan 46.000.000 Waran Seri I.

On June 13, 2008, the Company received the effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK") based on the BAPEPAM-LK's letter No. S 3825/BL/2008 to carry out an Initial Public Offering of 460,000,000 shares with par value and offering price of Rp 100 (in full Rupiah) and the offering price per share of Rp 100 (in full Rupiah). On June 25, 2008, the Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). Along with the Initial Public Offering, the Company also issued 46,000,000 Series I Warrants.

Penawaran Umum Saham Terbatas I

Limited Public Offering of Shares I

Pada tanggal 27 April 2017, Perusahaan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-204/D.04/2017 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") sebanyak 1.583.160.556 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar saham yang ditawarkan dengan harga Rp 112 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar sahamnya atau sebesar Rp 177.313.982 ribu dan biaya emisi saham sebesar Rp 6.180.220 ribu.

On April 27, 2017, the Company obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of Financial Service Authority Chief Executive of Capital Market Supervision No. S-204/D.04/2017 to conduct a Limited Public Offering ("PUT I") in accordance of issuing pre-emptive rights ("HMETD") of 1,583,160,556 common shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share with an offering price of Rp 112 (in full Rupiah) per shares or equivalent to Rp 177,313,982 thousand and issuance cost of Rp 6,180,220 thousand.

Penawaran Umum Saham Terbatas II

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Dewan Komisiner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-193/D.04/2018 untuk melakukan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 3.102.193.089 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar saham yang ditawarkan dengan harga Rp 140 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar sahamnya atau sebesar Rp 434.307.033 ribu dengan biaya emisi saham sebesar Rp 3.945.083 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah saham Perusahaan yang tercatat di BEI sebanyak 5.687.353.997 lembar.

Ikhtisar penerbitan dan pencatatan saham Perusahaan di BEI adalah sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>Tahun/ Year</u>	<u>Jumlah Saham Ditempatkan dan Beredar/ Number of Shares Issued and Outstanding</u>	<u>Akumulasi Jumlah Saham Tercatat/ Accumulated Number of Listed Shares</u>	<u>Nilai Nominal/ Par Value</u>	<u>Descriptions</u>
Sebelum Penawaran Umum Perdana	-	542.000.000	542.000.000	100	Before Initial Public Offering
Penawaran Umum Perdana	2008	460.000.000	1.002.000.000	100	Initial Public Offering
Konversi Waran	2009	20	1.002.000.020	100	Conversion of Warrant
Konversi Waran	2010	332	1.002.000.352	100	Conversion of Warrant
Penawaran Umum Terbatas I	2017	1.583.160.556	2.585.160.908	100	Limited Public Offering I
Penawaran Umum Terbatas II	2018	3.102.193.089	5.687.353.997	100	Limited Public Offering II

d. Transaksi Akuisisi dan Penggabungan Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memiliki 20% saham pada PT IBJ Verena Finance (IBJV), entitas asosiasi, yang seperti halnya Perusahaan juga menjalankan usaha sebagai perusahaan pembiayaan.

Limited Public Offering of Shares II

On December 28, 2018, the Company obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of Financial Service Authority Chief Executive of Capital Market Supervision No. S-193/D.04/2018 to conduct PUT II in accordance of issuing HMETD of 3,102,193,089 common shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share with an offering price of Rp 140 (in full Rupiah) per share or equivalent to Rp 434,307,033 thousand with issuance cost of Rp 3,945,083 thousand.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company's outstanding shares listed on the BEI were 5,687,353,997 shares.

Summary of the issuance and listing of the Company's shares in BEI are as follows:

d. Acquisiton and Merger Transaction

As of December 31, 2018, the Company owned 20% shares in PT IBJ Verena Finance (IBJV), an associate, which like the Company also engaged business activities as financing company.

Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 25 Januari 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., seluruh saham IBJV sebanyak 141.000 saham yang dimiliki oleh Mizuho Leasing, Co., Ltd., (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) entitas induk Perusahaan (Catatan 23), telah dialihkan kepada Perusahaan. Sehubungan dengan pengalihan ini, maka kepemilikan Perusahaan atas saham IBJV meningkat dari semula sebesar 20% menjadi 100% dan dengan demikian Perusahaan memperoleh pengendalian penuh atas IBJV dan bagi Perusahaan IBJV merupakan entitas anak. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0085595 tanggal 12 Februari 2019.

Transaksi pengalihan saham di atas termasuk dalam lingkup kombinasi bisnis entitas sepengendali sebagaimana diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", mengingat bahwa baik sebelum ataupun setelah terjadinya transaksi, seluruh entitas yang bergabung pada akhirnya tetap dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Mizuho Leasing Co., Ltd. (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) (Catatan 1a), dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Efektif 25 Januari 2019, Mizuho Leasing Co., Ltd., (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) adalah entitas yang mengendalikan Perusahaan, menggantikan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Sesuai dengan PSAK No. 38, penggabungan tersebut dilakukan sejak awal periode di mana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian, yang dalam hal ini sejak awal bulan Januari 2019.

Imbalan yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Mizuho Leasing Co., Ltd., (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) atas 80% saham IBJV yang diambil alih tersebut, adalah sebesar Rp 214.307.032 ribu dan arus kas neto yang dibayarkan, setelah dikurangi kas IBJV yang diperoleh, adalah sebesar Rp 117.134.966 ribu. Adapun selisih yang timbul dari jumlah tercatat perolehan Perusahaan terhadap seluruh saham IBJV dengan porsi kepemilikan Perusahaan atas aset neto IBJV pada tanggal pengalihan tersebut adalah sebesar Rp 32.990.607 ribu yang seluruhnya dicatat pada ekuitas sebagai bagian dari akun "Tambah Modal Disetor" (Catatan 23).

Based on Notarial Deed No. 24 dated January 25, 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., all of 141,000 IBJV's shares which owned by Mizuho Leasing, Co., Ltd., (formerly IBJ Leasing Co., Ltd.) parent entity of the Company (Note 23), have been transferred to the Company. Pertinent to this transfer, the Company's share ownership in IBJV then increased from previously 20% to become 100% and therefore the Company obtained full control over IBJV and for the Company, IBJV then considered as a subsidiary. This Deed has been received and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0085595 dated February 12, 2019.

Such transfer of shares are within the scope of business combination for entities under common control as prescribed in the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 38 on "Business Combination of Entities Under Common Control", considering prior or post transaction occurred, all of combined entities ultimately still under the common control of the same party, which is Mizuho Leasing, Co., Ltd. (formerly IBJ Leasing Co., Ltd.) (Note 1a), and such control is not temporarily. Effective January 25, 2019, Mizuho Leasing Co., Ltd., (formerly IBJ Leasing Co., Ltd.) is an entity which control over the Company, replacing PT Bank Pan Indonesia Tbk. In accordance with PSAK No. 38, such combination shall carried out since the beginning of period where combined entities are under common control, which since the beginning of January 2019.

Consideration paid by the Company to Mizuho Leasing, Co., Ltd., (formerly IBJ Leasing Co., Ltd.) for 80% of IBJV acquired shares amounted to Rp 214,307,032 thousand and net cash flow paid, net of IBJV's acquired cash, amounted to Rp 117,143,966 thousand. The difference arise from the total carrying amount of the Company's acquisition cost for the all IBJV shares with the Company's ownership portion over the net assets of IBJV on such transfer date amounted to Rp 32,990,607 thousand which entirely accounted for in equity as part of "Additional Paid-in Capital" account (Note 23).

Selanjutnya berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama, seluruh pemegang saham, baik dari Perusahaan ataupun IBJV, telah menyetujui rencana penggabungan usaha antara Perusahaan dengan IBJV, entitas anak. Rancangan dan konsep penggabungan tersebut telah dinyatakan dalam Akta Penggabungan Usaha No. 25 pada tanggal dan dari Notaris yang sama. Dalam akta tersebut disepakati bahwa IBJV merupakan pihak yang menggabungkan diri, dan sebagai akibatnya keberadaan IBJV akan berakhir secara hukum tanpa melalui proses likuidasi, dan Perusahaan, sebagai entitas yang dipertahankan, akan menerima penggabungan tersebut terhitung sejak tanggal efektifnya penggabungan usaha. Pada tanggal efektif penggabungan usaha, secara hukum, seluruh aset dan liabilitas IBJV serta seluruh perjanjian dan kontrak antara IBJV dengan pihak ketiga akan beralih kepada Perusahaan. Oleh karena penggabungan usaha ini merupakan penggabungan secara vertikal, yang terjadi di antara Perusahaan sebagai entitas induk dan IBJV sebagai entitas anak (100%), maka tidak menimbulkan konversi saham ataupun mengakibatkan perubahan struktur permodalan pada Perusahaan. Setelah penggabungan usaha, seluruh kegiatan usaha pembiayaan yang dijalankan oleh IBJV tetap dilanjutkan oleh Perusahaan.

Perusahaan telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan penggabungan usaha tersebut berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Dewan Komisiner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-110/D.04/2019 tanggal 10 Juli 2019. Akta Penggabungan Usaha di atas juga telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019. Di samping itu, sesuai dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Komisiner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya No. 113/KD.05/2019 tanggal 20 November 2019, izin usaha IBJV sebagai perusahaan pembiayaan telah dicabut terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019.

Pada tanggal 5 Agustus 2019, Perusahaan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk mengumumkan hasil penggabungan usaha di atas melalui surat kabar.

Moreover, based on Notarial Resolution Deed of Extraordinary Shareholders Meeting (RUPSLB) of the Company No. 23 dated July 17, 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Notarial Circular Resolution Deed of Shareholders of IBJV No. 24 on the same date and from the same Notary, all of the shareholders, both of the Company or IBJV, have approved the merger plan between the Company and IBJV, a subsidiary. The merger draft and concept have been notarized in the Merger Deed No. 25 on the same date and from the same Notary. In such deed, both parties have agreed that IBJV shall become the party who merged, and as a result, IBJV shall no longer legally exist without through liquidation process, and the Company, as a surviving entity, shall accept such merger on the effective merger date. On the effective merger date, legally, all of the IBJV's assets and liabilities as well as the all agreements and contracts between IBJV and third parties shall be transferred to the Company. Since such merger is a vertical merger, occurred between the Company as parent entity and IBJV as a subsidiary (100% owned), therefore neither rise a share conversion nor affect to the Company's capital structure. Post-merger, all of the financing business activities carried out by IBJV still continue by the Company.

The Company has obtained effective statement from Financial Services Authority (OJK) regarding with such merger based on Letter issued by OJK Board of Commissioners - Chief Executive of Capital Market Supervisor No. S-110/D.04/2019 dated July 10, 2019. The Merger Deed have also been received and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-0008953 dated July 23, 2019. In addition, pursuant to Decision issued by OJK Board of Commissioners - Chief Executive of Insurance, Pension Fund, Financial Institution, and Other Financial Institution Supervisor No. 113/KD.05/2019 dated November 20, 2019, IBJV's business license as financing company has been cancelled effective July 23, 2019.

On August 5, 2019, the Company has complied with the statutory law provision to announce its merger result through a newspaper.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023.

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tanggungan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; dan

Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

b. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan perusahaan, standar, interpretasi dan amendemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 73 (amendemen) Sewa: Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Company has applied a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2023.

- Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statement" related to Liabilities Classification as Short or Long-term and Disclosure of Accounting Policies;
- Amendment to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" related to Definition of Accounting Estimates;
- Amendment of PSAK 46 "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and;

The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Company's accounting policies and has no material effect on the amounts reported in these financial statements.

b. Standard and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these company financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2024

- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current
- PSAK 73 (amendment) Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback
- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Non-current Liabilities with Covenants

- PSAK 2 (amandemen) Laporan arus kas dan PSAK 60 (amandemen) Instrumen Keuangan : Pengungkapan : Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 10 (amandemen) Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing : Kekurangan Ketertukaran

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK - IAI").

- PSAK 2 (amendment) Statement of cash flows and PSAK 60 (amendment) Financial Instruments: Disclosures: Supplier Finance Arrangements

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 10 (amendment) The effects of changes in foreign exchange rates: Lack of Exchangeability

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs will be changed as published by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK - IAI").

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK"), yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) No.VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 September 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

b. Dasar Penyusunan

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Statement of Compliance

These financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK"), whose function has been transferred to the Financial Services Authority ("OJK") starting January 1, 2013), rule No.VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 dated September 25, 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company".

b. Basis of Preparation

The measurement basis used in the financial statements is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policies.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Perusahaan memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan ditentukan atas dasar tersebut kecuali untuk transaksi sewa yang merupakan ruang lingkup PSAK 73, dan pengukuran yang memiliki kemiripan dengan nilai wajar namun bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai pakai dalam PSAK 48.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan.

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Nilai tukar kurs mata uang asing ke dalam Rupiah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
1 Dolar Amerika Serikat	15.416	15.731	<i>United States Dollar 1</i>
100 Yen	10.955	11.757	<i>Yen 100</i>

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis, except for leasing transactions that are within the scope of PSAK 73, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in PSAK 48.

The statement of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The directors have, at the time of approving the financial statements, a reasonable expectation that the Company has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the financial statements.

c. Transactions and Foreign Currency Translation of Financial Statements

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency (Rupiah) using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. In the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are presented in the functional currency using Bank Indonesia middle rate prevailing at that date. Any resulting gains or losses from foreign exchanges are credited or charged to current operations.

The foreign exchange rates into Rupiah as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - 2) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - 3) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - 1) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - 2) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - 3) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - 4) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - 5) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
 - 6) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (reporting entity):

- a) A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - 1) has control or joint control over the reporting entity;
 - 2) has significant influence over the reporting entity; or
 - 3) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - 1) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - 2) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - 3) both entities are joint ventures of the same third party.
 - 4) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - 5) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity.
 - 6) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

7) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

8) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Semua pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

7) a person identified in (a) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

8) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

All regular way purchases or sales of financial assets are recognized and derecognized on a trade date basis. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace.

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), jika memenuhi kedua kondisi berikut ini:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, Perusahaan dapat menetapkan pilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi; dan
- menetapkan aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*).

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"):

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

By default, all other financial assets are subsequently measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Despite the foregoing, the Company may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met; and
- irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch.

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos "Penghasilan bunga".

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI (di atas) diukur pada FVTPL, khususnya:

- investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasi sebagai FVTPL, kecuali Perusahaan menetapkan investasi ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontinjen dari kombinasi bisnis, sebagai FVTOCI pada pengakuan awal.
- instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diklasifikasi sebagai FVTPL. Sebagai tambahan, instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (yang disebut "inkonsistensi akuntansi") pengukuran dan pengakuan yang timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian dengan basis berbeda. Perusahaan tidak menetapkan instrumen utang sebagai FVTPL.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditetapkan (lihat kebijakan akuntansi terkait lindung nilai). Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh atas aset keuangan dan dimasukkan dalam pos "Keuntungan dan kerugian lain-lain". Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 35.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Interest income" line item.

Financial assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVTOCI (above) are measured at FVTPL, specifically:

- investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Company designates an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVTOCI on initial recognition.
- debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria are classified as at FVTPL. In addition, debt instruments that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (so called 'accounting mismatch') that would arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases. The Company has not designated any debt instruments as at FVTPL.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value at the end of each reporting period, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy). The net gain or loss recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the "Other gains and losses" line item (Note 48). Fair value is determined in the manner described in Note 35.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada setiap tanggal pelaporan.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan piutang lainnya. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Perusahaan mengakui ECL 12 bulan dan/atau sepanjang umumnya untuk sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, dan piutang lainnya. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Perusahaan beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Perusahaan.

Foreign exchange gains and losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the Bank Indonesia middle rate at the end of each reporting period.

Impairment of financial assets

The Company recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on finance lease receivables, consumer finance receivables, and other receivables. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

The Company recognizes 12 months and/or lifetime ECL for finance lease receivables, consumer finance receivables, and other receivables. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Company's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Company considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Company's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Company's core operations.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi debitur, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi; dan
- aset keuangan yang telah mengajukan program restrukturisasi.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Perusahaan membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Meskipun demikian, Perusahaan mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

1. instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;
2. debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
3. memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Perusahaan menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal '*investment grade*' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal '*performing*'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Perusahaan secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;
- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor; and
- financial assets that has been proposed restructured program.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Company presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Company has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Despite the foregoing, the Company assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

1. the financial instrument has a low risk of default;
2. the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and
3. adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

The Company considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of '*investment grade*' in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of '*performing*'. *Performing* means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

The Company regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definisi gagal bayar

Perusahaan menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Perusahaan, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan).

Perusahaan menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Definition of default

The Company considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- when there is a breach of financial covenants by the debtor; or.
- Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Company, in full (without taking into account any collateral held by the Company).

The Company considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Company has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- a breach of contract, such as a default or past due event;
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Kebijakan penghapusan

Perusahaan menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau ketika jumlahnya sudah lebih 180 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Perusahaan, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default, loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Perusahaan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Untuk piutang sewa, arus kas yang digunakan untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian konsisten dengan arus kas yang digunakan dalam mengukur piutang sewa berdasarkan PSAK 73.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen individual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Status jatuh tempo; dan
- Jenis jaminan untuk piutang sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, dan piutang jual dan sewa-balik.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Write-off policy

The Company writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, when the amounts are over 180 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at the original effective interest rate. For a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses is consistent with the cash flows used in measuring the lease receivable in accordance with PSAK 73.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are Companyed on the following basis:

- Past-due status; and
- Classification of collaterals for finance lease receivables, consumer financing receivables, and sale and leaseback receivables.

The Companying is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each Company continue to share similar credit risk characteristics.

Jika Perusahaan telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan sebesar ECL sepanjang umumnya pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan ini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umumnya tidak lagi terpenuhi, Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan ini.

Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

If the Company has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Company measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date.

The Company recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Company are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received net of direct issue costs.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasi FVTPL ketika liabilitas keuangan merupakan 1) imbalan kontinjen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Perusahaan secara bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Financial liabilities

The Company financial liabilities was classified as FVTPL or at amortized cost.

Financial liabilities at amortized cost

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are recognized at fair value net of transaction costs which are directly attributable to the issuance of such, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, where interest expense is recognized based on the rate of effective return, except for short-term liabilities when the recognition of interest would be immaterial.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies, 2) held for trading, or 3) it is designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Company manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or

- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal.
 - merupakan bagian kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 atau PSAK 71 mengizinkan seluruh kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.
- the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis.
 - it forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and PSAK 55 or PSAK 71 permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Foreign exchange gains and losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

f. Saling apus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

g. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Piutang Pembiayaan Konsumen

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen mengacu pada Catatan 3e.

Pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat perjanjian pembiayaan pertama kali ditandatangani, dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan.

i. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/Years
Bangunan	20
Prasarana	4 - 8
Kendaraan	4 - 8
Perabot dan peralatan kantor	4 - 8
Komputer	4

f. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

g. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

h. Consumer Financing Receivables

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, impairment and derecognition of consumer financing receivables are discussed in Note 3e.

Administration income earned from customers at the time the consumer financing is signed is recorded as income in the current year.

i. Premises and Equipment

Premises and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Building
Leasehold improvement
Motor vehicles
Fixtures and office equipment
Computer

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of premises and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of premises and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

j. Sewa

j. Lease

Perusahaan sebagai penyewa

The Company as lessee

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

Perusahaan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Perusahaan sebagai pesewa

Sewa dimana Perusahaan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Perusahaan menerapkan PSAK 72 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

k. Instrumen keuangan derivatif

Perusahaan melakukan berbagai transaksi instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing menggunakan kontrak valuta berjangka dan *swap* suku bunga.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position.

The Company applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

The Company as lessor

Leases for which the Company is a lessor are classified as finance leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease.

Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Company's net investment outstanding in respect of the leases.

When a contract includes lease and non-lease components, the Company applies PSAK 72 to allocate the consideration under the contract to each component.

k. Derivative financial instruments

Company enter into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risks, using foreign exchange forward contracts and interest rate swaps.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak keuntungan atau kerugian diakui segera di laba rugi kecuali jika derivatif ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai di mana saat pengakuan di laba rugi bergantung pada sifat dari hubungan lindung nilai.

Derivatif dengan nilai wajar positif diakui sebagai aset keuangan sedangkan derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Derivatif tidak saling hapus dalam laporan keuangan kecuali Perusahaan memiliki hak yang memiliki kekuatan hukum dan intensi untuk saling hapus.

Akuntansi lindung nilai

Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas. Pada penetapan awal lindung nilai, Perusahaan secara formal mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dengan item yang dilindung nilai, termasuk tujuan manajemen risiko dan strategi dalam melakukan transaksi lindung nilai, bersamaan dengan metode yang akan digunakan untuk menilai efektifitas dari hubungan lindung nilai tersebut. Perusahaan melakukan penilaian, baik pada awal hubungan lindung nilai maupun secara berkelanjutan, untuk menentukan apakah instrumen lindung nilai tersebut dapat secara sangat efektif menutupi perubahan arus kas dari item yang dilindung nilai.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laba rugi tahun berjalan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap item yang dilindungi nilainya dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas, tergantung pada jenis transaksi dan efektifitas dari lindung nilai tersebut.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contracts are entered into and are subsequently remeasured to their fair values at the end of each reporting period. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately unless the derivative is designated and effective as hedging instrument in which event the timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge relationship.

A derivative with a positive fair value is recognized as a financial asset whereas a derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. Derivatives are not offset in the financial statements unless the Company have both a legally enforceable right and intention to offset.

Hedge accounting

Company applied cash flow hedge accounting. On initial designation of the hedge, the Company formally document the relationship between the hedging instruments and hedged items, including the risk management objective and strategy in undertaking the hedge transaction, together with the method that will be used to assess the effectiveness of the hedging relationship. Company make an assessment, both at the inception of the hedge relationship as well as on an ongoing basis, whether the hedging instruments are expected to be "highly effective" in offsetting the changes in the cash flows of the respective hedged items.

Changes in fair value of derivative instruments that do not qualify for hedge accounting are recognized to the current year profit or loss. If derivative instruments are designated and qualify for hedge accounting, changes in fair value of derivative instruments are recorded as adjustments to the hedged items in the current year other comprehensive income or in the equity, depending on the type of hedge transaction represented and the effectiveness of the hedge.

Pada saat derivatif dirancang sebagai instrumen lindung nilai untuk melindungi perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dari aset atau liabilitas yang diakui atau suatu prakiraan transaksi yang dapat mempengaruhi laba rugi, maka bagian efektif dari perubahan nilai wajar dari derivatif diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laporan laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tahun yang sama dimana arus kas yang dilindungi nilai tersebut mempengaruhi laba rugi, dan pada baris item yang sama pada laporan laba rugi. Setiap bagian yang tidak efektif dalam perubahan nilai wajar derivatif diakui langsung pada laporan laba rugi.

Jika derivatif lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan, atau pada saat lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai arus kas atau pada saat transaksi lindung nilai dibatalkan maka secara prospektif akuntansi lindung nilai dihentikan. Pada saat lindung nilai atas suatu prakiraan transaksi dihentikan, maka jumlah kumulatif yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya sejak tahun dimana lindung nilai tersebut efektif, direklasifikasi dari penghasilan komprehensif lainnya ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada saat prakiraan transaksi tersebut terjadi dan mempengaruhi laba rugi. Jika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, maka saldo di penghasilan komprehensif lainnya langsung direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

I. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

When a derivative is designated as the hedging instrument to hedge the variability in cash flows attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction that could affect profit or loss, the effective portion of changes in the fair value of the derivative is recognized in other comprehensive income. The amount recognized in other comprehensive income is reclassified to the profit or loss as a reclassification adjustment in the same year as the hedged cash flows affect profit or loss, and in the same line item in the statement of profit or loss. Any ineffective portion of changes in the fair value of the derivative is recognized immediately in the statement of profit or loss.

If the hedging derivative expires or is sold, terminated, or exercised, or when the hedge no longer meets the criteria for cash flow hedge accounting, or when the hedge designation is cancelled, then hedge accounting is discontinued prospectively. When the hedge of a forecast transaction is discounted, the cumulative amount recognized in other comprehensive income from the year when the hedge was effective, is reclassified from other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment when the forecast transaction occurs and affects profit or loss. If the forecast transaction is no longer expected to occur, then the balance in other comprehensive income is reclassified immediately to profit or loss as a reclassification adjustment.

I. Impairment of Non Financial Asset

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi kecuali aset relevan tersebut disajikan pada jumlah revaluasi, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi (lihat Catatan 3e di atas).

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

m. Jaminan yang Dikuasakan Kembali

Jaminan yang dikuasakan kembali dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih pada saat jaminan ditarik. Selisih nilai realisasi bersih jaminan yang dikuasakan kembali di atas nilai piutang yang tidak tertagih akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi. Beban yang berhubungan dengan aset yang dikuasakan kembali dan pemeliharannya akan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pada saat akhir tahun, jaminan yang dikuasakan kembali akan direvisi apabila terdapat penurunan nilai. Pada saat jaminan yang dikuasakan kembali dijual, nilai tercatatnya akan dikeluarkan dan hasil laba atau rugi akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase (see Note 3e above).

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3e.

m. Foreclosed Collaterals

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value at the time of foreclosure. The excess of net realizable value of the foreclosed collateral over the balance of uncollectible receivables is credited or charged to profit or loss. Expense related to the foreclosed assets and its maintenance are charged to profit or loss as incurred. At the end of the year, foreclosed collateral are reviewed for any impairment in value. When the foreclosed collaterals are disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss.

n. Imbalan Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas imbalan pasti neto.

Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut: (i) biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian); (ii) beban atau pendapatan bunga neto; (iii) pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

o. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor meliputi selisih antara agio saham (yaitu kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal) dengan biaya-biaya saham yang terkait langsung dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan dalam penawaran umum (Catatan 1c) serta selisih nilai transaksi restrukturisasi dengan entitas sependengali.

n. Employee Benefits

The Company provides defined post-employment benefit plan for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognised in other comprehensive income as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability.

Defined benefit costs are categorised as follows: (i) service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements); (ii) net interest expense or income; (iii) remeasurement.

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

o. Additional Paid-in Capital

Additional paid-in capital includes the difference between the excess of paid-up share capital made by shareholders over its par value and the direct costs incurred in respect of the issuance of the Company's shares in the public offering (Note 1c) and the difference from restructuring transactions with entities under common control.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah sebesar selisih antara harga pengalihan dengan proporsi jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi. Selisih ini terkait dengan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali yang merupakan kombinasi bisnis di mana seluruh entitas atau bisnis yang bergabung, pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama (baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis) dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Transaksi ini tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan dan oleh karenanya dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan bunga dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3e).

Pendapatan sewa pembiayaan dialokasikan berdasarkan metode yang dijelaskan pada Catatan 3j.

Beban provisi sehubungan dengan pinjaman yang diterima diamortisasi dengan metode suku bunga efektif dan dibukukan sebagai bagian dari beban bunga dan beban pembiayaan lainnya.

Pendapatan dan beban lainnya

Pendapatan jasa administrasi yang tidak beratribusi secara langsung atas transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi dan diakui pada saat diterima.

Pendapatan denda keterlambatan dan keuntungan penghentian kontrak diakui pada saat diterima.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

q. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Difference from restructuring transactions with entities under common control are the difference between transfer price and the proportionate of the carrying amount of acquired entity's net assets. This difference pertinent to transaction of business combination under common control entities which is a business combination where all the entities or business that combines, eventually control by the same party (whether before or after business combination) and in nature, the control is permanent. This transaction do not result substantive change in economical ownership on the exchanged business and accordingly accounted for using pooling of interest method.

p. Income and Expenses Recognition

Consumer financing income, finance lease income, interest income and interest expense are recognized under the accrual basis accounting using the effective interest method (Note 3e).

Finance lease income is allocated based on method described in Note 3j.

Loan fees related to the borrowings are amortized using the effective interest method and recorded as part of interest expense and other financial charges.

Income and Other expenses

Administrative income that are not directly attributable to finance lease and consumer financing are recorded as income in profit or loss and recognized when incurred.

Income from late charges and early termination are recognized when received.

Other expenses are recognized when incurred.

q. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Pajak kini

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Perusahaan untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Perusahaan yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi dan pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan dikenai pajak dalam jumlah yang sama. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Company's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgment of tax professionals within the Company supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Deferred tax

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit and at the time of transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

r. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

r. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

s. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) Yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) Dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada lokasi geografis.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

s. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a) That engages in business activities from which it may earn income and incurred expense (including income and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
- b) Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c) For which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on geographic location.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Peningkatan risiko kredit yang signifikan

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai cadangan yang setara dengan ECL 12 bulan untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK 71 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Perusahaan mempertimbangkan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

Perhitungan Cadangan Kerugian

KKE kolektif atas piutang pembiayaan

KKE kolektif atas piutang pembiayaan dihitung dengan mempertimbangkan *probability of default* ("PD"), *loss given default* ("LGD"), *exposure at default* ("EAD"). Saat mengukur ECL, Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Significant increase in credit risk

As explained in Note 3, expected credit losses are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. PSAK 71 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Company takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below.

Calculation of Loss Allowance

Collective ECL on financing receivables

Collective ECL on financing receivables is calculated by considering the probability of default ("PD"), loss given default ("LGD") and exposure at default ("EAD"). When measuring ECL the Company uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

KKE Individual atas piutang pembiayaan

KKE individual atas piutang pembiayaan dihitung dengan estimasi arus kas yang akan diterima di masa depan, dengan mengombinasikan beberapa skenario dan asumsi probabilitas tertimbang. Dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, manajemen membuat pertimbangan mengenai kondisi keuangan dari pihak lawan dan nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diterima. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dievaluasi, dan strategi penyelesaiannya serta estimasi arus kas yang dinilai dapat diperoleh kembali disetujui secara independen oleh Manajemen.

Imbalan kerja

Nilai kini atas kewajiban imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan dari basis aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga atas *Zero Coupon Bonds* yang mempunyai jatuh tempo yang mendekati jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Penilaian instrumen keuangan

Seperti dijelaskan dalam Catatan 35, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan. Catatan 35 memberikan informasi yang rinci mengenai asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar instrumen keuangan.

Direksi berpendapat bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan adalah tepat dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

Individual ECL on financing receivables

Individual ECL on financing receivables is assessed by the estimation of future cash flows, combining scenarios, and probability weightings assumptions. In calculating allowance for impairment losses, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable are independently approved by the Management.

Employee benefits

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of *Zero Coupon Bonds* that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Valuation of financial instruments

As described in Note 35, the Company uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments. Note 35 provides detailed information about the key assumptions used in the determination of the fair value of financial instruments.

The Directors believe that the chosen valuation techniques and assumptions used are appropriate in determining the fair value of financial instruments.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Kas - Rupiah	<u>298.909</u>	<u>268.281</u>	Cash on hand - Rupiah
Bank			Bank
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Mizuho Indonesia	3.297.941	27.092.522	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	160.918	390.541	PT Bank Pan Indonesia Tbk
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
PT Bank Mizuho Indonesia	8.350.084	4.868.986	PT Bank Mizuho Indonesia
<u>Yen</u>			<u>Yen</u>
PT Bank Mizuho Indonesia	<u>4.150.646</u>	<u>1.705.779</u>	PT Bank Mizuho Indonesia
Sub-jumlah	<u>15.959.589</u>	<u>34.057.828</u>	Sub-total
Pihak ketiga			Third parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk	14.321.477	11.570.522	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	13.840.893	19.975.184	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.459.624	714.099	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	160.003	707.502	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BTPN Tbk	98.278	339.656	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	77.654	1.525.889	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Deutsche Bank AG	63.918	64.084	Deutsche Bank AG
Lainnya	58.498	64.229	Others
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
PT Bank Central Asia Tbk	2.735.486	2.025.836	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	830.800	248.290	PT Bank ANZ Indonesia
Deutsche Bank AG	422.225	430.852	Deutsche Bank AG
PT Bank DBS Indonesia	17.420	22.967	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	11.631	579.475	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Tbk	2.026	2.068	PT Bank BTPN Tbk
<u>Yen</u>			<u>Yen</u>
PT Bank BTPN Tbk	<u>2.771</u>	<u>2.974</u>	PT Bank BTPN Tbk
Sub-jumlah	<u>34.102.704</u>	<u>38.273.627</u>	Sub-total
Sub-jumlah	<u>50.062.293</u>	<u>72.331.455</u>	Sub-total
Deposito Berjangka			Time Deposit
Bank ANZ Indonesia			Bank ANZ Indonesia
dengan tingkat bunga per tahun			with interest rates per annum
sebesar 4,15% tahun 2022	<u>-</u>	<u>30.000.000</u>	at 4.15% in 2022
Jumlah	<u>50.361.202</u>	<u>102.599.736</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no cash and cash equivalents which restricted in use.

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

6. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

	2023 Rp'000	2022 Rp'000	
Pihak ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
Piutang pembiayaan konsumen	2.263.459.492	1.829.106.989	Consumer financing receivables
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(498.698.169)	(356.429.137)	Unearned income on consumer financing
Jumlah	1.764.761.323	1.472.677.852	Total
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(34.579.910)	(34.416.928)	Allowance for expected credit losses
Bersih	<u>1.730.181.413</u>	<u>1.438.260.924</u>	Net

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, suku bunga efektif piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, annual effective interest rate for consumer financing receivables are as follows:

	2023	2022	
Rupiah	13,00% - 27,00%	13,00% - 26,00%	Rupiah

Pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui termasuk biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait langsung sebesar Rp 64.127.454 ribu (31 Desember 2022: Rp 45.205.657 ribu).

As of December 31, 2023, unearned income on consumer financing receivables includes unamortized direct transaction costs amounting to Rp 64,127,454 thousand (December 31, 2022: Rp 45,205,657 thousand).

Ringkasan piutang pembiayaan konsumen berdasarkan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Summary of consumer financing receivables based on business activities are as follows:

	2023 Rp'000	2022 Rp'000	
Multiguna	2.061.800.342	1.663.299.149	Multipurpose
Modal kerja	192.300.541	142.589.623	Working capital
Investasi	9.358.609	23.218.217	Investment
Jumlah	<u>2.263.459.492</u>	<u>1.829.106.989</u>	Total

Jumlah angsuran pembiayaan konsumen sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total consumer financing installments based on maturity date are as follows:

	2023 Rp'000	2022 Rp'000	
Dalam tahun berjalan	6.216.700	7.360.907	During the year
Dalam satu tahun berikutnya	942.784.657	836.275.572	Within one year
Dalam dua tahun berikutnya	622.764.985	527.610.174	Within two years
Dalam tiga tahun berikutnya atau lebih	691.693.150	457.860.336	Within three years or more
Jumlah	<u>2.263.459.492</u>	<u>1.829.106.989</u>	Total

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Jangka waktu rata-rata pembiayaan konsumen berkisar antara 1 - 4 tahun.

The average period of consumer financing is ranging from 1 - 4 years.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan konsumen tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2023 and 2022, consumer financing receivables are not used as collateral for bank loans.

Rincian saldo piutang pembiayaan konsumen berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Details of consumer financing receivables based on maturity date are as follows:

	2023 Rp'000	2022 Rp'000	
Belum jatuh tempo	1.702.369.443	1.423.398.996	Not yet due
Telah jatuh tempo			Overdue
Kurang dari 60 hari	45.989.332	33.806.686	Less than 60 days
61 - 180 hari	16.402.548	13.530.178	61 - 180 days
Lebih dari 180 hari	-	1.941.992	More than 180 days
Jumlah	1.764.761.323	1.472.677.852	Total

Tabel berikut menunjukkan perubahan nilai tercatat bruto piutang pembiayaan konsumen:

The following tables show movement of the gross carrying amount of consumer financing receivables:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2023	1.446.114.757	15.425.369	11.137.726	1.472.677.852	Beginning balance - January 1, 2023
Transfer ke tahap 1	1.706.593	(1.552.442)	(154.151)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(16.660.626)	16.714.431	(53.805)	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(7.195.506)	(621.967)	7.817.473	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(831.839.834)	(17.794.871)	37.059.689	(812.575.016)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	1.154.388.494	-	-	1.154.388.494	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(49.730.007)	(49.730.007)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2023	1.746.513.878	12.170.520	6.076.925	1.764.761.323	Ending balance - December 31, 2023
	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2022	1.199.225.101	21.051.736	13.212.340	1.233.489.177	Beginning balance - January 1, 2022
Transfer ke tahap 1	1.513.633	(1.513.633)	-	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(20.741.163)	20.810.236	(69.073)	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(22.312.865)	(11.752.760)	34.065.625	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(887.086.195)	(13.170.210)	(7.174.658)	(907.431.063)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	1.175.516.246	-	-	1.175.516.246	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(28.896.508)	(28.896.508)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2022	1.446.114.757	15.425.369	11.137.726	1.472.677.852	Ending balance - December 31, 2022

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Tabel berikut menunjukkan perubahan cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang pembiayaan konsumen:

The following tables show movement of the allowance for expected credit losses of consumer financing receivables:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2023	24.128.927	3.879.900	6.408.101	34.416.928	Beginning balance - January 1, 2023
Transfer ke tahap 1	446.509	(353.555)	(92.954)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(448.403)	480.918	(32.515)	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(164.837)	(153.543)	318.380	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(8.427.849)	(3.139.602)	(6.282.631)	(17.850.082)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	20.717.181	-	-	20.717.181	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai - bersih	(7.225.778)	1.615.463	52.636.205	47.025.890	Remeasurement of loss allowance - net
Penghapusan	-	-	(49.730.007)	(49.730.007)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2023	<u>29.025.750</u>	<u>2.329.581</u>	<u>3.224.579</u>	<u>34.579.910</u>	Ending balance - December 31, 2023
	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2022	24.849.569	6.556.631	8.407.161	39.813.361	Beginning balance - January 1, 2022
Transfer ke tahap 1	433.600	(433.600)	-	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(538.271)	582.648	(44.377)	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(278.527)	(115.990)	394.517	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(7.653.120)	(5.613.084)	(7.035.641)	(20.301.845)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	17.062.025	-	-	17.062.025	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai - bersih	(9.746.349)	2.903.295	33.582.951	26.739.897	Remeasurement of loss allowance - net
Penghapusan	-	-	(28.896.510)	(28.896.510)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2022	<u>24.128.927</u>	<u>3.879.900</u>	<u>6.408.101</u>	<u>34.416.928</u>	Ending balance - December 31, 2022

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian credit dan agunan yang diterima dari konsumen telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

The management believes that the amount of allowance for credit losses and the value of collateral received from consumers are adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible receivables.

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES

	2023	2022	
	Rp'000	Rp'000	
Pihak ketiga			Third parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Piutang sewa pembiayaan	777.806.575	555.237.332	Finance lease receivables
Nilai sisa	44.620.559	126.736.021	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(89.878.228)	(61.997.052)	Unearned finance lease income
Simpanan jaminan	<u>(44.620.559)</u>	<u>(126.736.021)</u>	Security deposit
Sub-jumlah	<u>687.928.347</u>	<u>493.240.280</u>	Sub-total
Dikurangi bagian yang dibiayai perusahaan pembiayaan lain sehubungan dengan transaksi: Pembiayaan bersama - bersih (Catatan 36)	<u>(572)</u>	<u>(13.044.824)</u>	Less amounts financed by other finance company relating to the transactions: Joint financing - net (Note 36)
Sub-jumlah	<u>687.927.775</u>	<u>480.195.456</u>	Sub-total
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Piutang sewa pembiayaan	71.004.887	145.934.791	Finance lease receivables
Nilai sisa	8.452.309	14.892.207	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(3.656.991)	(8.871.805)	Unearned finance lease income
Simpanan jaminan	<u>(8.452.309)</u>	<u>(14.892.207)</u>	Security deposit
Sub-jumlah	<u>67.347.896</u>	<u>137.062.986</u>	Sub-total
<u>Yen</u>			<u>Yen</u>
Piutang sewa pembiayaan	98.293.486	95.749.679	Finance lease receivables
Nilai sisa	1.561.200	735.055	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(3.040.979)	(2.202.763)	Unearned finance lease income
Simpanan jaminan	<u>(1.561.200)</u>	<u>(735.055)</u>	Security deposit
Sub-jumlah	<u>95.252.507</u>	<u>93.546.916</u>	Sub-total
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	<u>(37.269.504)</u>	<u>(35.977.048)</u>	Allowance for expected credit losses
Jumlah	<u>813.258.674</u>	<u>674.828.310</u>	Total

Pada tahun 2023 dan 2022, kisaran suku bunga efektif piutang sewa pembiayaan dalam masing-masing mata uang adalah sebagai berikut:

In 2023 and 2022, the range of annual effective interest rate for finance lease in each currency are as follows:

	2023	2022	
Rupiah	7,00% - 17,00%	7,00% - 17,00%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2,45% - 9,15%	2,25% - 8,23%	United States Dollar
Yen	1,28% - 3,17%	1,28% - 3,17%	Yen

Pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui termasuk biaya transaksi langsung yang belum diamortisasi sebesar Rp 63.236 ribu (31 Desember 2022: Rp 88.851 ribu).

As of December 31, 2023, unearned income on finance lease receivables includes unamortized direct transaction costs amounting to Rp 63,236 thousand (December 31, 2022: Rp 88,851 thousand).

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Jumlah piutang sewa pembiayaan berdasarkan jenis produk dan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Total finance lease receivables based on type of products and business activities are as follows:

a. Berdasarkan jenis produk

a. Based on type of products

	2023	2022	
	Rp'000	Rp'000	
Mesin	448.176.549	465.390.343	Machineries
Alat berat	245.703.818	136.137.233	Heavy equipments
Kendaraan bermotor	253.224.581	195.394.226	Vehicles
Jumlah	<u>947.104.948</u>	<u>796.921.802</u>	Total

b. Berdasarkan kegiatan usaha

b. Based on business activities

	2023	2022	
	Rp'000	Rp'000	
Investasi	947.083.591	796.516.798	Investment
Multiguna	21.357	405.004	Multipurpose
Jumlah	<u>947.104.948</u>	<u>796.921.802</u>	Total

Jumlah angsuran sewa pembiayaan sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total finance lease installments based on maturity date are as follows:

	Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan/ <i>Minimum Lease Payments</i>		Nilai Kini dari Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan/ <i>Present Value of Minimum Lease Payments</i>		
	2023	2022	2023	2022	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Angsuran Sewa Pembiayaan					Lease Installments
Telah jatuh tempo dan sampai dengan satu tahun	415.420.520	374.450.752	373.060.149	340.454.678	Due and within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	<u>531.684.428</u>	<u>422.471.050</u>	<u>477.468.602</u>	<u>383.395.494</u>	More than one year up to five years
Sub-jumlah	<u>947.104.948</u>	<u>796.921.802</u>	<u>850.528.751</u>	<u>723.850.172</u>	Sub-total
Pendapatan Sewa Pembiayaan Belum Diakui					Unearned Finance Lease Income
Telah jatuh tempo dan sampai dengan satu tahun	(42.360.372)	(33.996.074)	-	-	Due and within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	<u>(54.215.826)</u>	<u>(39.075.556)</u>	-	-	More than one year up to five years
Sub-jumlah	<u>(96.576.198)</u>	<u>(73.071.630)</u>	-	-	Sub-total
Jumlah	<u>850.528.750</u>	<u>723.850.172</u>	<u>850.528.751</u>	<u>723.850.172</u>	Total

Jangka waktu rata-rata pembiayaan adalah 2 sampai 5 tahun.

The average period of financing is 2 up to 5 years.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang sewa pembiayaan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2023 and 2022, finance lease receivables are not used as collateral for bank loans.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Tabel berikut menunjukkan perubahan nilai tercatat bruto piutang sewa pembiayaan:

The following tables show movement of the gross carrying amount of finance lease receivables:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2023	635.867.494	551.631	74.386.233	710.805.358	Beginning balance - January 1, 2023
Transfer ke tahap 1	43.508.598	-	(43.508.598)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(624.837)	624.837	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	-	-	-	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(319.724.532)	(714.179)	1.664.511	(318.774.200)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	458.590.533	-	-	458.590.533	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(93.513)	(93.513)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2023	<u>817.617.256</u>	<u>462.289</u>	<u>32.448.633</u>	<u>850.528.178</u>	Ending balance - December 31, 2023
	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2022	780.777.260	4.189.464	71.187.288	856.154.012	Beginning balance - January 1, 2022
Transfer ke tahap 1	-	-	-	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(1.092.320)	1.092.320	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(3.487.526)	(3.846.656)	7.334.182	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(549.521.434)	(883.497)	(3.123.953)	(553.528.884)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	409.191.514	-	-	409.191.514	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(1.011.284)	(1.011.284)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2022	<u>635.867.494</u>	<u>551.631</u>	<u>74.386.233</u>	<u>710.805.358</u>	Ending balance - December 31, 2022

Tabel berikut menunjukkan perubahan cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa pembiayaan:

The following tables show movement of the allowance for expected credit losses of finance lease receivables:

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2023	192.766	62.637	35.721.645	35.977.048	Beginning balance - January 1, 2023
Transfer ke tahap 1	1.444.604	-	(1.444.604)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(12.893)	12.893	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	-	-	-	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(13.281)	(62.637)	(9.200)	(85.118)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	57.613	-	-	57.613	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai - bersih	2.852.754	75.125	(1.514.405)	1.413.474	Remeasurement of loss allowance - net
Penghapusan	-	-	(93.513)	(93.513)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2023	<u>4.521.563</u>	<u>88.018</u>	<u>32.659.923</u>	<u>37.269.504</u>	Ending balance - December 31, 2023

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2022	190.825	80.725	20.104.190	20.375.740	Beginning balance - January 1, 2022
Transfer ke tahap 1	-	-	-	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(10.919)	10.919	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(3.922)	(576)	4.498	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(76.037)	(53.916)	(22.892)	(152.845)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accrued interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	1.549.064	-	-	1.549.064	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai - bersih	(1.456.245)	25.485	16.647.131	15.216.371	Remeasurement of loss allowance - net
Penghapusan	-	-	(1.011.282)	(1.011.282)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2022	<u>192.766</u>	<u>62.637</u>	<u>35.721.645</u>	<u>35.977.048</u>	Ending balance - December 31, 2022

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa pembiayaan telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

The management believes that allowance for expected credit losses on finance lease receivables are adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible receivables.

Simpanan Jaminan

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, lessee memberikan simpanan jaminan yang akan digunakan sebagai pembayaran atas pembelian dari aset sewa pembiayaan pada akhir masa sewa, bila opsi dilaksanakan penyewa pembiayaan. Apabila opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada lessee pada akhir masa sewa pembiayaan.

Security Deposits

At the inception of finance lease contract, the lessee rendered security deposits which will be used as payment of purchased leased assets at the end of the lease period, if the option is exercised. If the option is not exercised, such security deposits will be returned at the end of the lease period.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

	2023	2022	
	Rp'000	Rp'000	
Pihak berelasi (Catatan 33)	<u>814.930</u>	<u>497.515</u>	Related parties (Note 33)
Pihak ketiga			Third parties
Piutang yang jaminannya dalam proses diambil alih	88.238.435	84.218.350	Receivables which collateral under take over process
Cadangan kerugian kredit ekspektasian Bersih	<u>(13.460.665)</u>	<u>(12.575.301)</u>	Allowance for expected credit losses Net
Lainnya	<u>6.885.921</u>	<u>6.918.765</u>	Others
Sub-jumlah	<u>81.663.691</u>	<u>78.561.814</u>	Sub-total
Jumlah	<u>82.478.621</u>	<u>79.059.329</u>	Total

Piutang yang Jaminannya Dalam Proses Diambil Alih

Akun ini merupakan piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan yang jaminannya sedang dalam proses pengambilalihan oleh Perusahaan.

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

	2023 Rp'000	2022 Rp'000	
Saldo awal	12.575.301	3.137.842	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	885.364	9.437.459	Provision for the year
Saldo akhir	13.460.665	12.575.301	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian kredit nilai piutang yang jaminannya dalam proses diambil alih adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tersebut.

Receivables which Collateral Undertake Over Process

This account represents consumer financing receivables, financing lease receivables whose collateral is in the process of being taken over by the Company.

The changes in the allowance for expected credit losses are as follows:

Management believes that the allowance for credit lossess of receivables which collateral under take over process is adequate to cover potential losses.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan pembayaran atas sewa, asuransi dan lainnya. Pada 31 Desember 2023, jumlah tercatat biaya dibayar dimuka adalah sebesar Rp 2.612.892 ribu (31 Desember 2022: Rp 1.746.999 ribu).

9. PREPAID EXPENSES

This account represents payment of rent, insurances and others. As of December 31, 2023 the carrying amount of prepaid expenses amounted to Rp 2,612,892 thousand (December 31, 2022: Rp 1,746,999 thousand).

10. ASET HAK-GUNA

	1 Januari/ January 1, 2023 Rp'000	Penambahan/ Additions Rp'000	Pengurangan/ Deductions Rp'000	31 Desember/ December 31, 2023 Rp'000	
Biaya Perolehan					Cost
Sewa bangunan	53.428.418	4.954.444	17.559.852	40.823.010	Rental building
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Sewa bangunan	19.664.966	6.605.075	17.559.852	8.710.189	Rental building
Jumlah Tercatat	33.763.452			32.112.821	Carrying Value

	1 Januari/ January 1, 2022 Rp'000	Penambahan/ Additions Rp'000	Pengurangan/ Deductions Rp'000	31 Desember/ December 31, 2022 Rp'000	
Biaya Perolehan					Cost
Sewa bangunan	32.118.812	33.146.900	11.837.294	53.428.418	Rental building
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Sewa bangunan	23.465.705	8.036.555	11.837.294	19.664.966	Rental building
Jumlah Tercatat	8.653.107			33.763.452	Carrying Value

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 6.605.075 ribu (31 Desember 2022: Rp 8.036.555 ribu) dimana seluruhnya dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 31).

Depreciation expense charged to statement of profit or loss and other comprehensive income in December 31, 2023 is amounted to Rp 6,605,075 thousand (December 31, 2022: Rp 8,036,555 thousand), which entirely charged to general and administrative expenses (Note 31).

11. ASET TETAP

11. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2023 Rp'000	Penambahan/ Additions Rp'000	Pengurangan/ Deductions Rp'000	31 Desember/ December 31, 2023 Rp'000	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	13.069.791	-	-	13.069.791	Land
Bangunan	9.783.296	58.000	-	9.841.296	Building
Prasarana bangunan	13.512.574	2.253.638	-	15.766.212	Leasehold improvements
Kendaraan	13.023.273	2.341.736	1.685.750	13.679.259	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	6.165.696	894.734	-	7.060.430	Fixtures and office equipment
Komputer	32.041.951	4.915.599	6.550	36.951.000	Computer
Jumlah Biaya Perolehan	87.596.581	10.463.707	1.692.300	96.367.988	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	4.616.094	491.098	-	5.107.192	Building
Prasarana bangunan	2.491.428	2.503.271	-	4.994.699	Leasehold improvements
Kendaraan	5.306.359	1.531.652	1.258.703	5.579.308	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	1.480.017	1.171.060	-	2.651.077	Fixtures and office equipment
Komputer	20.669.965	5.566.667	5.868	26.230.764	Computer
Jumlah Akumulasi Penyusutan	34.563.863	11.263.748	1.264.571	44.563.040	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	53.032.718			51.804.948	Book Value
	1 Januari/ January 1, 2022 Rp'000	Penambahan/ Additions Rp'000	Pengurangan/ Deductions Rp'000	31 Desember/ December 31, 2022 Rp'000	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	13.069.791	-	-	13.069.791	Land
Bangunan	9.496.296	287.000	-	9.783.296	Building
Prasarana bangunan	7.177.442	9.789.525	3.454.393	13.512.574	Leasehold improvements
Kendaraan	10.028.512	4.436.318	1.441.557	13.023.273	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	3.415.089	4.309.960	1.559.353	6.165.696	Fixtures and office equipment
Komputer	28.448.795	6.185.048	2.591.892	32.041.951	Computer
Jumlah Biaya Perolehan	71.635.925	25.007.851	9.047.195	87.596.581	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	4.141.279	474.815	-	4.616.094	Building
Prasarana bangunan	4.546.910	1.398.911	3.454.393	2.491.428	Leasehold improvements
Kendaraan	4.536.818	1.334.367	564.826	5.306.359	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	2.409.055	604.907	1.533.945	1.480.017	Fixtures and office equipment
Komputer	16.177.262	7.061.872	2.569.169	20.669.965	Computer
Jumlah Akumulasi Penyusutan	31.811.324	10.874.872	8.122.333	34.563.863	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	39.824.601			53.032.718	Book Value

Beban penyusutan aset tetap pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 11.263.748 ribu (31 Desember 2022: Rp 10.874.872 ribu) dimana seluruhnya dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 31).

Depreciation expenses of property and equipment in December 31, 2023 amounted to Rp 11,263,748 thousand (December 31, 2022: Rp 10,874,872 thousand), which entirely charged to general and administrative expenses (Note 31).

Perhitungan laba penjualan aset tetap selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The computations of gain on sale of property and equipment during the year are as follows:

	2023 Rp'000	2022 Rp'000	
Hasil penerimaan dari penjualan	889.114	968.980	Proceeds from sales
Nilai buku	<u>(427.729)</u>	<u>(924.862)</u>	Book value
Laba penjualan aset tetap	<u><u>461.385</u></u>	<u><u>44.118</u></u>	Gain on sale of property and equipment

Perusahaan memiliki 3 bidang tanah di Jakarta dan Medan dengan hak legal berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2035, 2036 dan 2042. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Company owns 3 pieces of land in Jakarta and Medan with Building Use Right (HGB) for 20 (twenty) until 30 (thirty) years expiring in the year of 2035, 2036 and 2042. Management believes that there are no problem with the extension of land right because the land was acquired legally and is supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tanah dan bangunan tersebut tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2023 and 2022, land and building are not used as collateral for bank loans.

Aset tetap selain tanah telah diasuransikan atas risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 51.707.103 ribu (31 Desember 2022: Rp 42.847.023 ribu). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang ditanggungkan.

Property and equipment except land are covered by insurance against losses by fire, theft and other risks with total coverage as of December 31, 2023 amount of Rp 51,707,103 thousand (December 31, 2022: Rp 42,847,023 thousand). The management believes that the above insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset tetap tersebut dapat dipulihkan dan tidak terdapat adanya peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai, sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas aset tetap.

Management believes that the carrying amount of property and equipment are recoverable and also there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment, therefore no provision for impairment of property and equipment were provided.

12. ASET (LIABILITAS) DERIVATIF

Perusahaan menggunakan instrumen derivatif, terutama kontrak *swap* suku bunga dan kontrak *swap cross currency*. Instrumen-instrumen ini meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola risiko, terutama risiko atas fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang timbul sebagai bagian dari kegiatan operasi Perusahaan.

12. DERIVATIVE ASSETS (LIABILITIES)

The Company utilizes derivative instruments, principally interest rate swaps contracts, and cross currency swaps contracts. These instruments enhance the Company's ability to manage risks, primarily interest rates and exchange rates fluctuations, which exist as part of its ongoing business operations.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Estimasi nilai wajar dari instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The estimated fair values of the Company's derivative instruments as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023		2022		
	Nilai Nosional/ Notional Amount Rp'000	Nilai Wajar Disajikan sebagai Aset (Liabilitas) Derivatif/ Fair Value Presented as Derivative Assets (Liabilities) Rp'000	Nilai Nosional/ Notional Amount Rp'000	Nilai Wajar Disajikan sebagai Aset (Liabilitas) Derivatif/ Fair Value Presented as Derivative Assets (Liabilities) Rp'000	
Aset					Assets
Swap suku bunga	558	264.353	1.051	895.839	Interest rate swap
Swap <i>crosss currency</i>	6.589	7.688.949	11.107	16.636.328	Cross currency swap
Sub-jumlah	7.147	7.953.302	12.158	17.532.167	Sub-total
Liabilitas					Liabilities
Swap suku bunga	-	-	-	-	Interest rate swap
Swap <i>crosss currency</i>	(1.751)	(231.106)	-	-	Cross currency swap
Sub-jumlah	(1.751)	(231.106)	-	-	Sub-total
Nilai bersih	5.396	7.722.196	12.158	17.532.167	Net amount

Penurunan nilai wajar sebesar Rp 9.809.971 ribu pada 31 Desember 2023 (Kenaikan nilai wajar pada 31 Desember 2022: Rp 17.523.854 ribu) adalah bagian dari cadangan lindung nilai bersih setelah efek pajak.

The corresponding decrease in fair value of Rp 9,809,971 thousand in December 31, 2023 (Increase in fair value on December 31, 2022: Rp 17,523,854 thousand) are included as part of hedging reserve, net of the related tax effect.

Kontrak *swap* suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, di mana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

The interest rate swap contracts exchange floating rate interest for fixed rate interest and are designated and effective as cash flow hedge instruments.

Kontrak *swap cross currency* mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

The cross currency swap contracts exchange loan received in United States Dollar to Rupiah with a specified exchange rate at initial date and are designated and effective as cash flow hedge.

Kisaran jangka waktu kontrak derivatif adalah 2 - 4 tahun pada tahun 2023 (2022: 3 - 4 tahun).

The range of period for derivative contract are 2 - 4 years in 2023 (2022 3 - 4 years).

Beban bunga kontrak *swap* suku bunga dan *swap cross currency* pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 343.730 ribu (31 Desember 2022: Rp 5.030.832 ribu) yang dicatat sebagai bagian dari "Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya" (Catatan 29).

Interest expenses for interest rate swap and cross currency swap in December 31, 2023 amounted to Rp 343,730 thousand (December 31, 2022: Rp 5,030,832 thousand), which recorded as part of "Interest and Other Financing Charges" (Note 29).

Pendapatan bunga kontrak *swap* suku bunga dan *swap cross currency* pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.106.362 ribu (31 Desember 2022: Rp 249.663) yang dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain".

Interest income for interest rate swap and cross currency swap in December 31, 2023 amounted to Rp 1,106,362 thousand (December 31, 2022: Rp 249,663) which recorded as part of "Other Income".

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Estimasi nilai wajar dari kontrak *swap* suku bunga dan *swap cross currency* dihitung berdasarkan nilai pasar. Perjanjian atas *swap* suku bunga dan *swap cross currency* digunakan untuk mengelola eksposur suku bunga dan nilai tukar dari pinjaman (Catatan 14).

The estimated fair values of the interest rate swap and cross currency swap contracts are calculated based on market rates. An interest rate swap and cross currency swap agreements are used to manage interest rate exposure and exchange rate exposure on the borrowings (Note 14).

Eksposur terhadap risiko kredit pihak lawan (*counterparty*) dianggap rendah karena perjanjian ini dibuat dengan lembaga keuangan terpercaya dengan peringkat kredit yang baik yang diharapkan memenuhi ketentuan sesuai dengan perjanjian.

Exposure to counterparty credit risk is considered low because these agreements have been entered into with major creditworthy institutions with good credit ratings, and they are expected to perform fully under the terms of the agreements.

Mutasi cadangan lindung nilai yang dimiliki oleh Perusahaan pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The movement of the Company's cash flow hedging reserve in 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal	2.697.311	68.322	Beginning balance
Laba (rugi) perubahan nilai wajar	(9.809.971)	17.523.854	Gain (loss) on changes in fair value
Reklasifikasi ke laba rugi	8.862.778	(14.153.356)	Reclassified to profit or loss
Pajak penghasilan terkait yang diakui pada penghasilan komprehensif lain (Catatan 19)	208.383	(741.509)	Income tax related recognized in other comprehensive income (Note 19)
Saldo akhir	<u>1.958.501</u>	<u>2.697.311</u>	Ending balance

13. ASET LAIN-LAIN

13. OTHER ASSETS

	2023	2022	
	Rp'000	Rp'000	
<u>Pihak berelasi (Catatan 33)</u>			Related party (Note 33)
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Beban ditangguhkan	50.000	-	Deferred charges
Uang jaminan	24.175	558.295	Security deposits
Sub-jumlah	<u>74.175</u>	<u>558.295</u>	Sub-total
<u>Pihak ketiga</u>			Third parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Jaminan yang dikuasakan kembali	749.745	2.369.319	Foreclosed collateral
Cadangan kerugian penurunan nilai	(415.745)	(1.813.966)	Allowance for impairment loss
Nilai bersih	<u>334.000</u>	<u>555.353</u>	Net amount
Estimasi tagihan pajak (Catatan 19)	8.209.841	47.304.533	Estimated claim for tax refund (Note 19)
Uang jaminan	2.141.643	3.221.164	Security deposits
Uang muka	402.660	2.617.783	Advances
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Uang jaminan	-	7.865	Security deposits
Sub-jumlah	<u>11.088.144</u>	<u>53.706.698</u>	Sub-total
Jumlah	<u><u>11.162.319</u></u>	<u><u>54.264.993</u></u>	Total

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Beban amortisasi atas beban ditangguhkan atas biaya transaksi pinjaman bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp 25.000 ribu (31 Desember 2022: Rp 90.625 ribu).

Amortization expense of deferred charges of transaction cost for bank loan for the year ended December 31, 2023 amounted to Rp 25,000 thousand (December 31, 2022: Rp 90,625 thousand).

Jaminan yang dikuasakan kembali

Jaminan yang dikuasakan kembali merupakan jaminan piutang pembiayaan berupa kendaraan, alat berat dan mesin yang telah diambil alih oleh Perusahaan.

Foreclosed collateral

Foreclosed collateral represents consumer financing collateral in the form of vehicles, heavy equipment and machineries that have been foreclosed by the Company.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai jaminan yang dikuasakan kembali cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tersebut.

Management believes that the allowance for impairment loss of foreclosed collateral is adequate to cover potential losses.

Atas jaminan yang dikuasakan kembali, Perusahaan terus melakukan upaya penyelesaian.

For the foreclosed collateral, the Company continues to make settlement efforts.

Lainnya

Lainnya terdiri dari uang jaminan sewa, uang jaminan lain-lain dan uang muka lain-lain.

Others

Others consist of rent refundable deposit, other refundable deposit and other advances.

14. UTANG BANK

14. BANK LOANS

	<u>2023</u> Rp'000	<u>2022</u> Rp'000	
<u>Jangka Pendek</u>			<u>Short-term</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 33)</u>			<u>Related parties (Note 33)</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Mizuho Indonesia	1.191.000.000	805.000.000	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.000.000	40.000.000	PT Bank Pan Indonesia Tbk
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
PT Bank Mizuho Indonesia (2022: USD 4.600 ribu)	-	<u>72.362.600</u>	PT Bank Mizuho Indonesia (2022: USD 4,600 thousand)
Sub-jumlah	<u>1.196.000.000</u>	<u>917.362.600</u>	Sub-total

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Pihak ketiga			Third parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank BTPN Tbk	362.000.000	357.550.000	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Resona Perdania	100.000.000	-	PT Bank Resona Perdania
PT Bank Victoria International Tbk	-	10.000.000	PT Bank Victoria International Tbk
<u>Yen</u>			<u>Yen</u>
Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited, Singapore (JPY 425.000 ribu, 2022: JPY 280.000 ribu)	<u>46.557.518</u>	<u>32.918.676</u>	Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited, Singapore (JPY 425,000 thousand, 2022: JPY 280,000 thousand)
Sub-jumlah	<u>508.557.518</u>	<u>400.468.676</u>	Sub-total
Jumlah Jangka Pendek	<u>1.704.557.518</u>	<u>1.317.831.276</u>	Total Short-term
<u>Jangka Panjang</u>			<u>Long-term</u>
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related party (Note 33)
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
PT Bank Mizuho Indonesia (USD 10.133 ribu, 2022: USD 14.010 ribu)	<u>156.214.146</u>	<u>220.397.320</u>	PT Bank Mizuho Indonesia (USD 10,133 thousand, 2022: USD 14,010 thousand)
Pihak ketiga			Third parties
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
The Chiba Bank, Ltd., Hong Kong (USD 1.650 ribu, 2022: USD 3.850 ribu)	25.436.400	60.564.350	The Chiba Bank, Ltd., Hong Kong (USD 1,650 thousand, 2022: USD 3,850 thousand)
<u>Yen</u>			<u>Yen</u>
The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (JPY 423.854 ribu, 2022: JPY 307.916 ribu)	46.431.994	36.200.746	The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (JPY 423,854 thousand, 2022: JPY 307,916 thousand)
The Shizouka Bank, Ltd., Hong Kong (JPY 65.416 ribu, 2022: JPY 224.416 ribu)	<u>7.166.204</u>	<u>26.383.925</u>	The Shizouka Bank, Ltd., Hong Kong (JPY 65,416 thousand, 2022: JPY 224,416 thousand)
Sub-jumlah	<u>79.034.598</u>	<u>123.149.021</u>	Sub-total
Jumlah Jangka Panjang	<u>235.248.744</u>	<u>343.546.341</u>	Total Long-term
Jumlah	<u>1.939.806.262</u>	<u>1.661.377.617</u>	Total
Nilai tercatat pada biaya perolehan diamortisasi dari utang bank adalah sebagai berikut:			Carrying amount at amortized cost of bank loans are as follows:
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Utang bank	1.939.806.262	1.661.377.617	Bank loan
Bunga masih harus dibayar			Accrued interest expenses
Pihak berelasi	3.301.360	2.182.874	Related parties
Pihak ketiga	<u>564.502</u>	<u>1.017.951</u>	Third parties
Jumlah	<u>1.943.672.124</u>	<u>1.664.578.442</u>	Total

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Berikut adalah fasilitas utang bank yang dimiliki Perusahaan:

The Company's bank loans facilities are as follows:

Bank	Fasilitas/ Facilities	Batas Kredit/ Credit Limit '000	Tanggal Perjanjian/ Agreement Date	Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date of the facility	
				31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pinjaman Cerukan/ Overdraft Loan	Rp 30.000.000	30/11/2010	10/09/2024	10/09/2023
	Money Market Line / Money Market Line	Rp 100.000.000	31/10/2016	10/09/2024	10/09/2023
PT Bank Victoria International Tbk	Permintaan Pinjaman dengan Mekanisme Pasar Uang/ Demand Loan with Money Market Line Mechanism Fasilitas ini telah berakhir pada tahun 2023 This facility has ended in 2023	Rp 88.000.000	24/09/2014	-	29/09/2023
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Singapore	Kredit Berulang/ Revolving Loan Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 September 2024/ This agreement has term period until September 30, 2024	JPY 1.500.000	31/03/2017	28/03/2024	31/03/2023
PT Bank Resona Perdania	Pinjaman Modal Kerja Bergulir/ Working Capital Revolving Facility	Rp 100.000.000	27/06/2023	27/06/2024	-
PT Bank BTPN Tbk	Pinjaman Revolving/ Revolving Loan Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 28 April 2028/ This agreement has term period until April 28, 2028	Rp 500.000.000 (atau nilai yang setara dalam USD)/ (or its equivalent in USD)	06/07/2012	28/04/2024	27/04/2023
PT Bank Mizuho Indonesia	Pinjaman Revolving/ Revolving Loan Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 April 2028/ This agreement has term period until April 30, 2028	USD 100.000 (atau nilai yang setara dalam mata uang lain)/ (or its equivalent in other currencies)	02/07/2011	30/04/2024	30/04/2023
The Chiba Bank, Ltd., Hong Kong	Pinjaman Jangka Panjang dalam Mata Uang USD/ Long-term Loan in USD Currency	USD 11.000	15/02/2019	15/08/2024	15/08/2024
The Shizuoka Bank, Ltd., Hong Kong	Pinjaman Jangka Pendek Multikurs Berulang/ Multi-currency Short-term Loan Revolving Facility Fasilitas ini telah berakhir pada tahun 2023/ This facility has ended in 2023	USD 10.000 (atau nilai yang setara dalam Yen)/ (or its equivalent in Yen)	30/06/2011	-	27/06/2023

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Bank	Fasilitas/ Facilities	Batas Kredit/ Credit Limit '000	Tanggal Perjanjian/ Agreement Date	Jatuh tempo fasilitas/ Maturity date of the facility	
				31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
The Shizuoka Bank, Ltd., Hong Kong	Pinjaman Multikurs Berulang Jangka Panjang/ Multi-currency Long-term Loan Revolving Facility Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 27 Juni 2028/ This agreement has term period until June 27, 2028	USD 10.000 (atau nilai yang setara dalam Yen)/ (or its equivalent in Yen)	10/09/2018	09/09/2024	27/06/2023
The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore	Pinjaman Berjangka/ Term Loan Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 20 Januari 2028/ This agreement has term period until January 20, 2028	USD 5.000	20/01/2022	04/07/2026	20/01/2023
	Pinjaman Berjangka/ Term Loan Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 3 Februari 2029/ This agreement has term period until February 3, 2029	USD 6.000 (atau nilai yang setara dalam Yen)/ (or its equivalent in Yen)	30/02/2023	30/02/2024	-
The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong	Pinjaman Jangka Panjang Mata Uang Tunggal/ Single Currency Long-term Loan Fasilitas ini telah berakhir pada tahun 2023 This facility has ended in 2023	USD 10.000	11/02/2017	-	09/11/2023
	Pinjaman Jangka Panjang Mata Uang Tunggal/ Single Currency Long-term Loan	USD 10.000	26/03/2023	20/06/2024	-
The Musashino Bank, Ltd., Tokyo	Pinjaman Berjangka/ Term Loan Fasilitas ini telah dilunasi pada tahun 2022 This facility has been paid in 2022	USD 5.000	08/03/2018	02/03/2024	-
Deutsche Bank AG Jakarta	Pembiayaan Kembali Piutang dan Pinjaman Jangka Pendek/ Receivable Refinancing and Short-term Loan	USD 3.000	16/11/2018	30/06/2024	30/06/2023

Selama tahun 2023, seluruh fasilitas di atas dijamin dengan jaminan Perusahaan dari Mizuho Leasing Co., Ltd.

During 2023, all facilities above are guaranteed by the corporate guarantee from Mizuho Leasing Co., Ltd.

Seluruh utang bank yang diterima Perusahaan digunakan untuk kebutuhan modal kerja.

All of the bank loans obtained by the Company are used for working capital purposes.

Terkait dengan seluruh utang-utang bank yang diperoleh, Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh Bank jika terdapat perubahan susunan pengurus, merger dan akuisisi, perubahan bentuk perusahaan, komposisi permodalan dan pembagian laba Perusahaan. Perjanjian ini juga mencakup persyaratan rasio keuangan sebagai berikut:

In accordance with all bank loans obtained, the Company is obliged to provide written notification to all banks if there are any changes in management, mergers and acquisitions, changes in company structure, changes in composition of capital, and the Company's profit sharing. The agreements also include the following financial ratio requirements as follows:

- Untuk Bank Panin dan Bank Resona Perdania, Perusahaan wajib menjaga gearing ratio sebesar 10x dan kepemilikan saham Mizuho Leasing Co Ltd lebih besar dari 50%
- Untuk Bank Victoria dan Bank Resona Perdania Perusahaan wajib menjaga rasio *non-performing financing* untuk tunggakan lebih dari 90 hari tidak lebih dari 5% serta current ratio minimum 100%.
- For Bank Panin and Bank Resona Perdania, The Company is required to maintain its gearing ratio at 10x and share ownership of Mizuho Leasing Co Ltd more than 50%
- For Bank Victoria and Bank Resona Perdania, the Company obliged to maintain non-performing financing ratio of overdue payment more than 90 days for no exceed than 5% also current ratio at minimum 100%.

Perusahaan tidak memiliki tunggakan pembayaran pokok, bunga maupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan utang bank selama tahun 2023 dan 2022.

The Company did not have any default in the principal or interest payment or breach any covenants with respect to the bank loans in 2023 and 2022.

15. UTANG USAHA

15. TRADE PAYABLES

Akun ini merupakan utang kepada *dealer* kendaraan bermotor (pihak ketiga) serta *vendor* mesin dan alat berat sehubungan dengan kegiatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan jangka waktu.

This account represents payable to motor-vehicle dealer (third parties) along with machine and heavy equipment vendor in connection with the consumer financing and lease financing activities which do not bear interests and without any stated repayment terms.

16. UTANG LAIN-LAIN

16. OTHER ACCOUNTS PAYABLE

	2023 Rp'000	2022 Rp'000	
Pihak berelasi (Catatan 33)	-	7.865.500	Related party (Note 33)
Pihak ketiga			Third parties
Pembayaran diterima dimuka dari pelanggan	37.181.163	38.336.860	Customers' deposits
Pendapatan ditangguhkan	6.125.687	6.003.555	Deferred income
Utang asuransi	1.782.188	2.438.990	Insurance payables
Lainnya	1.278.865	1.469.941	Others
Sub-jumlah	46.367.903	48.249.346	Sub-total
Jumlah	46.367.903	56.114.846	Total

17. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp'000	Rp'000
Pihak berelasi (Catatan 33)		
Bunga atas utang bank	3.301.360	2.182.874
Pihak ketiga		
Bonus dan tunjangan	5.552.000	8.700.000
Jasa profesional	2.192.904	1.608.337
Bunga atas utang bank	564.502	1.017.951
Telepon, internet dan listrik	203.107	233.376
Lain-lain	88.935	626.887
Sub-jumlah	<u>8.601.448</u>	<u>12.186.551</u>
Jumlah	<u>11.902.808</u>	<u>14.369.425</u>

17. ACCRUED EXPENSES

Related parties (Note 33)	
Interest of bank loans	
Third parties	
Bonuses and allowances	
Professional fee	
Interest of bank loans	
Telephone, internet and electricity	
Others	
Sub-total	
Total	

18. UTANG PAJAK

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp'000	Rp'000
Pajak yang dipungut		
Pasal 21	1.132.114	1.363.943
Pasal 23	85.553	68.163
Pasal 26	335.074	500.352
Pasal 4(2)	234.992	172.289
Pajak Pertambahan Nilai	266.436	140.452
Jumlah	<u>2.054.169</u>	<u>2.245.199</u>

18. TAXES PAYABLE

Withholding taxes	
Article 21	
Article 23	
Article 26	
Article 4(2)	
Value Added Tax	
Total	

19. PAJAK PENGHASILAN

a. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun berjalan:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Rp'000	Rp'000
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>61.234.797</u>	<u>55.338.482</u>

Beda temporer:

Kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan	1.362.206	16.390.629
Penyisihan penurunan nilai jaminan yang dikuasakan kembali	(1.398.221)	(160.609)
Penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain	885.363	5.807.795
Penyusutan aset tetap	(1.371.026)	(442.371)
Amortisasi goodwill yang timbul atas transaksi penggabungan usaha	(685.343)	(685.343)
Aset hak-guna	1.713.984	161.984
Imbalan pasca-kerja	2.254.813	715.668
Bonus	(3.148.000)	8.700.000

19. INCOME TAX

a. Corporate Income Tax

The reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income (fiscal loss) for the year are as follows:

Profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income	
--	--

Temporary differences:

Impairment losses on finance lease receivables	
Allowance for decline in value of foreclosed collateral	
Allowance for decline in value of other receivables	
Depreciation of property and equipment	
Amortization of goodwill arise from merger transaction	
Right-of-use-asset	
Post-employment benefits	
Bonus	

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

	<u>2023</u> Rp'000	<u>2022</u> Rp'000	
<u>Beda tetap:</u>			<u>Permanent differences:</u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	2.481.775	5.682.333	Non-deductible expenses for fiscal purposes
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	<u>(327.782)</u>	<u>(390.037)</u>	Income already subjected to final tax
Taksiran Penghasilan Kena Pajak Tahun Berjalan	63.002.566	91.118.531	Estimated Taxable Income for Current Year
Estimasi kompensasi rugi fiskal Tahun 2021	(23.215.957)	(58.772.656)	Estimated fiscal loss carryforward Year 2021
Tahun 2020	-	(55.561.832)	Year 2020
Koreksi sesuai hasil pemeriksaan pajak Tahun 2018	<u>(61.343.468)</u>	<u>-</u>	Adjustment according to tax assessment Year 2018
Jumlah Akumulasi Rugi Fiskal	<u>(21.556.859)</u>	<u>(23.215.957)</u>	Total Accumulated Fiscal Loss

Jumlah taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) di atas menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan ke kantor pajak.

The annual tax return (SPT) which submitted to the tax office are prepared based on the above estimated taxable income (fiscal loss).

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku terhadap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income tax benefit (expense) included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the amount computed by applying the applicable tax rates to profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	<u>2023</u> Rp'000	<u>2022</u> Rp'000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>61.234.797</u>	<u>55.338.482</u>	Profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku efektif	13.471.655	12.174.466	Income tax expense calculated using effective rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	545.991	1.250.113	Non-deductible expenses for fiscal purposes
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(72.112)	(85.808)	Income already subjected to final tax
Beban pajak penghasilan yang dikompensasi dengan akumulasi rugi fiskal	<u>(13.860.565)</u>	<u>(20.046.077)</u>	Income tax expense compensated against accumulated fiscal loss
(Manfaat) beban pajak penghasilan - bersih	<u>84.969</u>	<u>(6.707.306)</u>	Income tax (benefit) expense - net

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak pajak terutang.

The determination of the tax liabilities is based on self assessment. The tax office can perform examination of income taxes within five years after the tax becomes due.

Berdasarkan Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan ("PPH") bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka, Wajib Pajak dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan tersebut diatas apabila memenuhi tambahan kriteria sebagai berikut:

Based on Article 3 of Government Regulation No. 30 year 2020 regarding the Decrease in Income Tax Rates ("PPH") for Domestic Corporate Tax Payers in the Form of Public Companies, tax payers can obtain a reduction in the PP rate of 3% (three percent) lower than the rate of domestic corporate tax payers asregulated in the Taxation Law, if it meets the following additional criteria:

- Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.
- Masing-masing pihak yang dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
- Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan (183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
- Pihak-pihak yang memenuhi persyaratan 300 (tiga ratus) pihak dan 5% (lima persen) sebagaimana di atas, tidak termasuk: Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/atau yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka (tercermin dari kepemilikan saham oleh pengendali dan/atau pemegang saham utama).

- The public owned 40% (forty percent) or more of the total paid up shares and those shares are owned by at least 300 (three hundred) parties.
- Each party can only own less than 5% (five percent) of total paid-up shares.
- The tax payer should fulfill the above mentioned criteria at least within 6 (six) months (183 (one hundred and eighty three) calendar days) in 1 (one) fiscal year.
- Parties that meet the requirements of 300 (three hundred) parties and 5% (five percent) as stated above, do not include: Public Company Tax Payers who buy back their shares; and/or Those who have a special relationship as stipulated in the Income Tax Law with Public Company Tax Payers (reflected in: share ownership by the controlling party and/or major shareholder).

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 29, 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No.7 Year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards.

Berdasarkan kriteria di atas, tarif pajak penghasilan Perusahaan untuk tahun pajak 2023 dan 2022 adalah sebesar 22%.

Based on criteria above, the Company's tax rate for the fiscal year 2023 and 2022 is 22%.

b. Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan-bersih Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2023	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Liabilitas Imbalan pasca-kerja	2.736.105	496.059	(49.677)	3.182.487	Post-employment benefit liabilities
Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa pembiayaan	3.605.938	299.685	-	3.905.623	Allowance for expected credit losses on finance lease receivables
Cadangan kerugian kredit atas piutang lain-lain	2.766.566	194.781	-	2.961.347	Allowance for credit losses on other receivables
Cadangan penurunan kredit jaminan yang dikuasakan kembali	399.072	(307.609)	-	91.463	Allowance for credit losses on foreclosed collateral
Bonus	1.914.000	(692.560)	-	1.221.440	Bonuses
Aset hak-guna	103.213	377.076	-	480.289	Right-of-use assets
Penyusutan aset tetap	126.752	(301.626)	-	(174.874)	Depreciation of fixed assets
Lindung nilai arus kas	(760.780)	-	208.383	(552.397)	Cash flow hedges
Goodwill yang timbul atas transaksi penggabungan usaha	691.055	(150.775)	-	540.280	Goodwill arise from merger transaction
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	<u>11.581.921</u>	<u>(84.969)</u>	<u>158.706</u>	<u>11.655.658</u>	Total deferred tax assets - net

b. Deferred Tax

The details of the Company's deferred tax assets-net are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2022	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Liabilitas Imbalan pasca-kerja	2.572.515	157.448	6.142	2.736.105	Post-employment benefit liabilities
Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa pembiayaan	-	3.605.938	-	3.605.938	Allowance for expected credit losses on financing lease receivables
Cadangan kerugian kredit atas piutang lain-lain	1.488.851	1.277.715	-	2.766.566	Allowance for credit losses on other receivables
Cadangan penurunan kredit jaminan yang dikuasakan kembali	434.406	(35.334)	-	399.072	Allowance for credit losses on foreclosed collateral
Bonus	-	1.914.000	-	1.914.000	Bonus
Aset hak-guna	67.577	35.636	-	103.213	Right-of-use assets
Penyusutan aset tetap	224.074	(97.322)	-	126.752	Depreciation of fixed assets
Lindung nilai arus kas	(19.271)	-	(741.509)	(760.780)	Cash flow hedges
Goodwill yang timbul atas transaksi penggabungan usaha	841.830	(150.775)	-	691.055	Goodwill arise from merger transaction
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	<u>5.609.982</u>	<u>6.707.306</u>	<u>(735.367)</u>	<u>11.581.921</u>	Total deferred tax assets - net

Perusahaan mencatat akumulasi rugi fiskal sebesar Rp 21.556.859 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp 23.215.957 ribu). Rugi fiskal ini telah dicatat namun manajemen yakin diperlukan penyisihan sehubungan dengan sifat ketidakpastian estimasinya terutama berkaitan dengan peraturan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah perpajakan dalam 5 (lima) tahun sejak pajak tersebut terhutang. Secara konservatif, manajemen menghindari pengakuan pendapatan pajak tangguhan yang berasal dari rugi fiskal lebih awal sehingga aset pajak tangguhan belum diakui.

The Company has accumulated tax loss carry forward for the year ended December 31, 2023 amounting to Rp 21,556,859 thousand (December 31, 2022: Rp 23,215,957 thousand). These tax losses have been carried forward however management believes valuation allowance should be provided considering its nature of estimate uncertainty especially under the prevailing regulation, the Directorate General of Tax may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Conservatively, the management avoid to recognize deferred tax income from carry forward tax loss earlier and hence deferred tax assets have not been recognized.

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan di atas dapat dipulihkan dengan penghasilan kena pajak Perusahaan di masa mendatang.

Management believes that deferred tax assets are recoverable against the Company's future taxable income.

c. Estimasi tagihan pajak

	2023	2022	
	Rp'000	Rp'000	
Pajak Penghasilan Badan			Corporate Income Tax
Tahun 2014	5.124.955	8.711.947	Year 2014
Tahun 2015	-	13.488.980	Year 2015
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
Tahun 2018	3.084.886	25.103.606	Year 2018
Jumlah	<u>8.209.841</u>	<u>47.304.533</u>	Total

c. Estimated claims for tax refund

d. Surat Ketetapan Pajak

Pajak Penghasilan 2014

Pada tanggal 28 Februari 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dari Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) sebesar Rp 8.949.531 ribu. Perusahaan telah membayar kurang bayar PPh Badan tersebut pada tanggal 8 Mei 2019. Perusahaan menerima hasil ketetapan atas kurang bayar sebesar Rp 237.584 ribu, sedangkan Perusahaan mengajukan keberatan sebesar Rp 8.711.947 ribu kepada DJP pada tanggal 27 Mei 2019

d. Tax Assessment Letters

Income Tax 2014

On February 28, 2019, the Company received the Tax Assessment Letter Underpayments ("SKPKB") from the Directorate General of Taxation ("DJP") for the underpayment of Corporate Income Tax ("CIT") amounting to Rp 8,949,531 thousand. The Company has paid the CIT underpayment on May 8, 2019. The Company accepted the tax assessment of underpayment amounted to Rp 237,584 thousand, while for the underpayment of Rp 8,711,947 thousand the Company filled an objection to the DJP on May 27, 2019.

Pada tanggal 16 Maret 2020, DJP menolak keberatan Perusahaan tersebut dan pada tanggal 15 Juni 2020, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas jumlah kurang bayar sebesar Rp 8.711.947 ribu.

On March 16, 2020, DJP rejected the objection of the Company and on June 15, 2020, the Company filed an appeal to the Tax Court against the underpayment of Rp 8,711,947 thousand.

Pada tanggal 1 November 2023, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding Perusahaan sebesar Rp 3.586.992 ribu dan telah menerima pengembalian tersebut pada tanggal 6 Desember 2023.

On November 1, 2023, the Tax Court partially granted the Company's appeal amounted to Rp 3,586,992 thousand and has received the refunds on December 6, 2023.

Pada tanggal 24 Januari 2024, Perusahaan mengajukan surat Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk sisa pengembalian SKPKB tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, keputusan tersebut masih dalam proses.

Pajak Penghasilan 2015

Pada tanggal 13 November 2019, Perusahaan menerima SKPKB dari DJP atas kekurangan pembayaran PPh Badan sebesar Rp 13.488.980 ribu. Perusahaan telah membayar kurang bayar PPh Badan tersebut pada tanggal 4 Februari 2020 dan pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan mengajukan keberatan kepada DJP atas kurang bayar tersebut.

Pada tanggal 11 Februari 2021, DJP menolak keberatan Perusahaan tersebut dan pada tanggal 5 Mei 2021, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas jumlah kurang bayar sebesar Rp 13.488.980 ribu.

Pada tanggal 1 November 2023, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan banding Perusahaan dan telah menerima pengembalian sebesar Rp 13.487.702 ribu dari jumlah klaim yang diajukan Perusahaan sebesar Rp 13.488.980 ribu pada tanggal 6 Desember 2023.

Pajak Penghasilan 2018

Pada tanggal 8 April 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") dari DJP sebesar Rp 873.020 ribu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tersebut, terdapat koreksi penyesuaian fiskal positif yang menunjukkan selisih antara estimasi rugi kena pajak yang sebelumnya diajukan Perusahaan sebesar Rp 152.351.244 ribu dengan jumlah yang disetujui oleh DJP. Perusahaan menolak hasil pemeriksaan tersebut, yang berpengaruh pada pengurangan rugi fiskal yang dapat diperhitungkan untuk tahun 2018 menjadi Rp 90.872.715 ribu. Sedangkan, tidak terdapat selisih antara jumlah estimasi tagihan pajak yang ditagih oleh Perusahaan dengan jumlah yang disetujui oleh DJP. Pada tanggal 6 September 2021, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas hasil pemeriksaan pajak tersebut.

Pada bulan Oktober 2023, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian banding Perusahaan atas koreksi penyesuaian fiskal positif, yang berpengaruh pada penambahan rugi fiskal yang dapat diperhitungkan untuk tahun 2018 sebesar Rp 61.343.468 ribu sehingga estimasi rugi kena pajak Perusahaan tahun 2018 menjadi Rp 152.216.182 ribu, dan dan mempertahankan jumlah SKPLB tahun pajak 2018 sebesar Rp 873.020 ribu dan sudah dikompensasikan melalui potongan pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun 2018.

On January 24, 2024, the Company submitted a request for Judicial Review and Memory of Judicial Review to the Supreme Court for the remaining claim of the SPKB. As of the completion date of the financial statements, the decision is still on process.

Income Tax 2015

On November 13, 2019, the Company received the SKPKB from the DJP for the underpayment of CIT amounting to Rp 13,488,980 thousand. The Company has paid the CIT underpayment on February 4, 2020 and on February 7, 2020, the Company filed an objection to the DJP against the underpayment.

On February 11, 2021, DJP rejected the objection of the Company and on May 5, 2021, the Company filed an appeal to the Tax Court against the underpayment of Rp 13,488,980 thousand.

On November 1, 2023, the Tax Court granted all of the Company's appeal and has received the refunds amounting to Rp 13,487,702 thousand from claim balance originally proposed by the Company of Rp 13,488,980 thousand on December 6, 2023.

Income Tax 2018

On April 8, 2020, the Company received the Tax Assessment Letter Overpayments ("SKPLB") from the DJP amounting to Rp 873,020 thousand. Based on the tax assessment, there were positive fiscal adjustments, resulting difference between estimated fiscal loss amount originally proposed by the Company of Rp 152,351,244 thousand and the amount approved by the DJP. The Company rejected the tax assessments, resulting the reduction of fiscal loss amount that can be credited for 2018 to Rp 90,872,715 thousand. While, there is no difference between the amount of estimated claims by the Company and the amount approved by the DJP. On September 6, 2021, the Company filed an appeal to the Tax Court related with the tax assessments.

In October 2023, the Tax Court partially granted the Company's appeal of positive fiscal adjustments, resulting the addition of fiscal loss amount that can be credited for 2018 amounted to Rp 61,343,468 thousand, thus the fiscal loss amount that can be credited for 2018 amounted to Rp 152,216,182 thousand and to maintain the SKPLB amount for 2018 amounted to Rp 873,020 thousand and has been compensated through a deduction for the payment of Tax Collection Letter ("STP") of Value Added Tax for the year 2018.

Pajak Pertambahan Nilai 2018

Pada bulan Maret 2020, Perusahaan menerima SKPKB Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari DJP untuk periode Januari 2018 sampai Desember 2018 sebesar Rp 25.103.606 ribu. Pada bulan Juni 2020, Perusahaan membayar kurang bayar tersebut dan mengajukan keberatan kepada DJP.

Pada bulan Juni 2021, DJP menolak keberatan Perusahaan tersebut dan pada bulan September 2021, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas jumlah kurang bayar tersebut.

Pada bulan November 2023, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding Perusahaan sebesar Rp 21.995.576 ribu dari jumlah klaim pokok sebesar Rp 22.018.720 ribu dan telah menerima pengembalian tersebut pada bulan Desember 2023.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan sisa pengembalian klaim atas denda sebesar Rp 3.084.886 ribu masih dalam proses.

Value Added Tax 2018

In March 2020, the Company received SKPKB of Value Added Taxes ("VAT") from DJP for January 2018 until December 2018 period amounting to Rp 25,103,606 thousand. On June 2020, the Company paid the underpayment and submitted an objection to DJP.

In June 2021, DJP rejected the objection of the Company and in September 2021, the Company filed an appeal to the Tax Court against the underpayments.

On November 2023, the Tax Court partially granted the Company's appeal amounting to Rp 21,995,576 thousand from principal claim balance of Rp 22,018,720 thousand and has received the refunds in December 2023.

As of the completion date of the financial statements, the remaining claim balance for the penalties of Rp 3,084,886 thousand is still on process.

20. LIABILITAS SEWA

	2023
	Rp'000
Masa jatuh tempo (dalam tahun):	
1 tahun	1.472.253
Lebih dari 1 tahun	25.828.848
Jumlah	<u>27.301.101</u>

Jumlah biaya bunga yang dibebankan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.203.138 ribu (31 Desember 2022: Rp 779.578 ribu) (Catatan 29).

20. LEASE LIABILITIES

	2022
	Rp'000
Maturity date (in years):	
1 year	3.642.221
More than 1 years	25.900.206
Total	<u>29.542.427</u>

Interest expense charged for the year ended December 31, 2023 amounting to Rp 2,203,138 thousand (December 31, 2022: Rp 779,578 thousand) (Note 29).

21. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 558 karyawan (31 Desember 2022: 500 karyawan).

Liabilitas imbalan pasca kerja imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

21. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Company calculates defined post-employment benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to the benefits as of December 31, 2023 are 558 employees (December 31, 2022: 500 employees).

The defined employment benefit liabilities plan typically expose the Company to actuarial risks such as interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Risiko harapan hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Longevity risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Reconciliation between beginning and ending balance of post-employment benefits liabilities are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal	12.408.918	11.693.250	Beginning balance
Perubahan yang di bebaskan ke laba rugi:			Changes charged to profit or loss:
Biaya jasa lalu/kerugian kuartilmen	-	(96.949)	Past services cost/curtailment loss
Beban jasa kini	3.118.176	3.856.068	Current service cost
Beban bunga	918.260	888.687	Interest cost
Kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain:			Actuarial loss recognized in other comprehensive income:
Dampak perubahan asumsi keuangan	(225.804)	27.925	Effect on change in financial assumption
Pembayaran manfaat	<u>(1.753.699)</u>	<u>(3.960.063)</u>	Benefits paid
Saldo akhir	<u>14.465.851</u>	<u>12.408.918</u>	Ending balance

Rincian beban imbalan pasca-kerja yang diakui di dalam laba rugi selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenses recognized in profit or loss for the year are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Beban jasa kini	3.118.176	3.856.068	Current service cost
Biaya jasa lalu/kerugian kurtailmen	-	(96.949)	Past services cost/curtailment loss
Beban bunga	918.260	888.687	Interest cost
Sub-jumlah	<u>4.036.436</u>	<u>4.647.806</u>	Sub-total
Kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	<u>(225.804)</u>	<u>27.925</u>	Actuarial loss recognized in other comprehensive income
Jumlah	<u>3.810.632</u>	<u>4.675.731</u>	Total

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, analisis sensitivitas dari perubahan tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diasumsikan (dimana variabel lain dianggap konstan) akan memiliki dampak sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the sensitivity analysis of change in the assumed discount and salary rate (which other variables held constant) would have the following effects:

	2023			
	Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption	
		Rp'000	Rp'000	
Tingkat diskonto	1%	(13.562.320)	15.519.970	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	15.617.953	(13.462.235)	Salary increase rate
	2022			
	Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption	Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption	
		Rp'000	Rp'000	
Tingkat diskonto	1%	(9.094.659)	7.888.682	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	7.871.827	(9.115.488)	Salary increase rate

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

Analisis umur estimasi pembayaran liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Aging analysis of estimated payment of post-employment benefits as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023 Rp'000	2022 Rp'000	
Masa jatuh tempo (dalam tahun):			Maturity date (in years):
Kurang dari 1 tahun	128.221	329.018	Less than a year
1 - 3 tahun	4.636.007	2.514.749	1 - 3 years
3 - 5 tahun	1.762.547	3.339.812	3 - 5 years
5 - 10 tahun	19.155.213	15.484.871	5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	217.141.757	238.486.417	Over 10 years
Jumlah	<u>242.823.745</u>	<u>260.154.867</u>	Total

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 20,07 tahun (31 Desember 2022: 20,19 tahun).

The average duration of the benefits obligation at December 31, 2023 is 20.07 years (December 31, 2022: 20.19 years).

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria (“KKA”) Marcel Pryadarshi Soepeno, aktuaris independen, dalam laporannya tanggal 9 Januari 2024 (2022: 9 Januari 2023), dengan menggunakan metode aktuarial “*Projected Unit Credit*” dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the Company accrued post-employment benefits liabilities based on the actuarial calculation prepared by Kantor Konsultan Aktuaria (“KKA”) Marcel Pryadarshi Soepeno, an independent actuary, based on its report dated January 9, 2024 (2022: January 9, 2023), which using actuarial “*Projected Unit Credit*” method and the following main assumptions:

	2023	2022	
Umur pensiun normal	57 tahun/ <i>years</i>	57 tahun/ <i>years</i>	Normal pension age
Tingkat diskonto	6,9% per tahun/ <i>per year</i>	7,4% per tahun/ <i>per year</i>	Discount rate
Tingkat kenaikan Gaji	3,0% per tahun/ <i>per year</i>	4,0% per tahun/ <i>per year</i>	Salary increase rate
Tingkat mortalitas	TMI IV	TMI IV	Mortality rate

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan laporan yang di susun oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

22. CAPITAL STOCK

The details of the Company’s shareholders as of December 31, 2023 and 2022 based on the report prepared by PT Raya Saham Registra, Share Registrar, are as follows:

Nama Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2023			Name of Stockholders
	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase pemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah modal/ <i>Total paid-up capital stock</i>	
				Rp'000
Mizuho Leasing Co., Ltd.	3.835.346.804	67,44%	383.534.680	Mizuho Leasing Co., Ltd.
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.425.455.604	25,06%	142.545.560	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	426.551.589	7,50%	42.655.160	Public (each below 5% ownership)
Jumlah	5.687.353.997	100,00%	568.735.400	Total
Nama Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2022			Name of Stockholders
	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase pemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah modal/ <i>Total paid-up capital stock</i>	
				Rp'000
Mizuho Leasing Co., Ltd.	3.835.346.804	67,44%	383.534.680	Mizuho Leasing Co., Ltd.
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.425.482.304	25,06%	142.548.230	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	426.524.889	7,50%	42.652.490	Public (each below 5% ownership)
Jumlah	5.687.353.997	100,00%	568.735.400	Total

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) No. 63 tanggal 23 Juni 2023 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., bahwa Pemegang Saham setuju, Perusahaan membentuk dana cadangan umum sejumlah Rp 300.000 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan umum Perusahaan berjumlah Rp 1.500.000 ribu.

Based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) No. 63 dated June 23, 2023 from Notary Fathiah Helmi, S.H., that the Shareholders agreed, the Company established a general reserve fund of Rp 300,000 thousand. As of December 31, 2023, the Company's general reserves amounted to Rp 1,500,000 thousand.

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

The details of this account are as follows:

	<u>Rp'000</u>	
Biaya emisi saham sehubungan dengan penawaran umum perdana saham pada tahun 2008	<u>(2.384.634)</u>	Share issuance cost in connection with initial public offering in 2008
Penawaran Umum Terbatas I pada tahun 2017		Limited Public Offering I in 2017
Agio saham	18.997.926	Share premium
Biaya emisi saham	<u>(6.180.220)</u>	Share issuance cost
Sub-jumlah	<u>12.817.706</u>	Sub-total
Penawaran Umum Terbatas II pada tahun 2019		Limited Public Offering II in 2019
Agio saham	124.087.724	Share premium
Biaya emisi saham	<u>(3.945.083)</u>	Share issuance cost
Sub-jumlah	<u>120.142.641</u>	Sub-total
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependangali (Catatan 1d)	<u>(32.990.607)</u>	Difference in value of transactions among entities under common control (Note 1d)
Neto	<u><u>97.585.106</u></u>	Total
Sehubungan dengan transaksi pengalihan (akuisisi) seluruh saham IBJV (Catatan 1d), Perusahaan telah mencatat selisih nilai restrukturisasi entitas sependangali dengan rincian sebagai berikut:		In accordance with acquisition of the all shares of IBJV (Note 1d), the Company recognized difference in value of transactions among entities under common control with the detail as follows:
Investasi pada IBJV dengan kepemilikan sebelumnya setara 20%	45.329.107	Investment on IBJV with previous ownership equivalent to 20%
Imbalan tunai yang dialihkan untuk memperoleh 80% kepemilikan IBJV	<u>214.307.032</u>	Cash consideration that transferred to obtain 80% ownership on IBJV
Jumlah	259.636.139	Total
Jumlah tercatat aset neto IBJV pada tanggal akuisisi	<u>226.645.532</u>	The carrying amount of net assets of IBJV on acquisition date
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependangali	<u>32.990.607</u>	Difference in value of transaction among entities under common control
Ikhtisar dari jumlah tercatat aset neto IBJV pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:		The summary of carrying amount of IBJV net assets on acquisition date are as follows:
Aset		Assets
Kas dan setara kas	97.172.065	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan	1.250.524.595	Finance lease receivable
Aset keuangan lainnya	8.597.506	Other financial assets
Liabilitas	<u>(1.129.648.634)</u>	Liabilities
Neto	<u><u>226.645.532</u></u>	Net
Selisih di atas mencerminkan manfaat sinergi, perluasan pasar dan pencapaian skala ekonomis yang lebih baik sebagaimana diharapkan timbul dari transaksi pengalihan saham tersebut.		The above difference reflects the benefit of synergy, market extension and enhanced of economic scale as expected shall be arise from such shares transfer transaction.

24. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Pembiayaan sendiri	<u>265.366.992</u>	<u>224.002.335</u>	Self financing

Pada tahun 2023, jumlah amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang dari pendapatan pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp 47.692.297 ribu (2022: Rp 30.691.796 ribu).

Pada tahun 2023 dan 2022, tidak terdapat transaksi kepada satu pihak yang jumlahnya melebihi 10% dari pendapatan pembiayaan konsumen.

24. CONSUMER FINANCING INCOME

In 2023, total amortization of transaction costs which are recognized as a deduction of consumer financing income amounting to Rp 47,692,297 thousand (2022: Rp 30,691,796 thousand).

In 2023 and 2022, there were no transactions made to any single party whose the amount exceeding 10% of the consumer financing income.

25. PENDAPATAN SEWA PEMBIAYAAN

Pendapatan sewa pembiayaan merupakan pendapatan yang diperoleh dari transaksi sewa pembiayaan atas alat-alat berat, peralatan dan mesin-mesin produksi. Pendapatan sewa pembiayaan diperoleh dari piutang sewa pembiayaan yang berasal dari pihak ketiga.

Pada tahun 2023 dan 2022, tidak ada transaksi kepada satu pihak yang jumlah pendapatannya melebihi 10% dari pendapatan sewa pembiayaan.

25. FINANCE LEASES INCOME

Finance leases income represent income earned from finance lease transactions from heavy equipment, equipment and production machines. Finance leases income arises from third parties.

In 2023 and 2022, there were no transactions made to any single party with related income exceeding 10% of finance lease income.

26. PENDAPATAN ADMINISTRASI

Akun ini merupakan pendapatan yang diterima Perusahaan dari pihak ketiga atas jasa administrasi kepada pelanggan dan pengurusan dokumen-dokumen pelanggan.

26. ADMINISTRATION INCOME

Administration income represents income earned by the Company from third parties for administration services to the customers and handling of the customers' documents.

27. PENDAPATAN PENALTI

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Pihak ketiga			Third parties
Keterlambatan pelunasan angsuran	13.141.804	4.101.551	Late charges
Pelunasan dipercepat	<u>7.605.606</u>	<u>10.478.641</u>	Early termination
Jumlah	<u>20.747.410</u>	<u>14.580.192</u>	Total

27. PENALTY INCOME

28. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Merupakan pendapatan yang berasal dari piutang yang tertagih kembali, pendapatan bunga lainnya, pendapatan bunga pinjaman karyawan, keuntungan penjualan aset tetap dan lainnya.

28. OTHER INCOME

Represents income from recovered receivables, other interest income, interest income from employee loan, gain on sales of premises and equipment and others.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

29. BEBAN BUNGA DAN PEMBIAYAAN LAINNYA

29. INTEREST AND OTHER FINANCING CHARGES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Beban bunga utang bank	73.816.850	32.981.977	Interest expenses on bank loans
Beban bunga transaksi swap	343.730	4.512.552	Interest expenses on swap transaction
Provisi dan administrasi bank	<u>2.544.421</u>	<u>2.957.847</u>	Provision fees and bank charges
	<u>76.705.001</u>	<u>40.452.376</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Beban bunga utang bank	26.109.475	17.345.101	Interest expenses on bank loans
Beban bunga transaksi swap	-	518.280	Interest expenses on swap transaction
Provisi dan administrasi bank	208.125	149.237	Provision fees and bank charges
Beban bunga atas liabilitas sewa	<u>2.203.138</u>	<u>779.578</u>	Interest expenses on lease liabilities
	<u>28.520.738</u>	<u>18.792.196</u>	
Jumlah	<u>105.225.739</u>	<u>59.244.572</u>	Total

30. BEBAN KEPEGAWAIAN

30. PERSONNEL EXPENSES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Gaji, bonus dan tunjangan	108.164.305	98.313.357	Salaries, bonuses and allowances
Imbalan pasca-kerja (Catatan 21)	<u>4.036.436</u>	<u>4.647.806</u>	Post-employment benefits (Note 21)
Jumlah	<u>112.200.741</u>	<u>102.961.163</u>	Total

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Rp'000	Rp'000	
Penyusutan (Catatan 10 dan 11)	17.868.823	18.911.427	Depreciation (Notes 10 and 11)
Biaya marketing	13.499.536	9.188.707	Marketing expenses
Honorarium	7.345.083	6.441.267	Honorarium
Perbaikan dan pemeliharaan	6.902.819	5.393.199	Repairs and maintenance
Pajak dan perijinan	5.619.931	5.020.276	Taxes and license
Komunikasi	3.917.704	3.232.663	Communication
Perjalanan dinas	2.760.244	3.733.454	Business travelling
Sewa	2.725.600	1.565.475	Rental
Keamanan	1.465.794	1.312.456	Security
Representasi	1.258.289	1.272.230	Representation
Peralatan dan perlengkapan kantor	1.240.085	2.281.969	Office supplies and stationaries
Prasarana	991.835	879.582	Utilities
Pendidikan dan pelatihan	716.118	1.444.536	Education and training
Asuransi	266.138	596.646	Insurance
Lainnya	<u>3.061.711</u>	<u>2.625.552</u>	Others
Jumlah	<u>69.639.710</u>	<u>63.899.439</u>	Total

32. LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar/dilusian:

	2023 Rp'000	2022 Rp'000
Laba tahun berjalan	61.149.828	62.045.788
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan	5.687.353.997	5.687.353.997
Laba per saham (dalam angka Rupiah penuh)	10,75	10,91

Pada tahun 2023 dan 2022, Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

32. EARNINGS PER SHARE

The computation of basic/diluted earnings per share is based on the following information:

Profit for the year
 Outstanding weighted average number of shares during the year
 Earnings per shares
 (in full amount of Rupiah)

In 2023 and 2022, the Company's does not have any dilutive ordinary shares.

33. SIFAT DAN TRANSAKSI MATERIAL KEPADA PIHAK BERELASI

Ringkasan transaksi material dan sifat hubungan antara Perusahaan dan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

33. NATURE OF RELATIONSHIP AND MATERIAL TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Summary of material transactions and nature of relationships between the Company and related parties were as follows:

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transactions</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationships</i>
Mizuho Leasing Co., Ltd.	Piutang lain-lain atas beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan dan beban komisi atas penjaminan utang <i>Other receivables for the operational expenses paid by the Company and commission fees for loan guarantee</i>	Pemegang saham pengendali/ <i>Controlling shareholder</i>
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Penempatan dana dalam bentuk giro (Catatan 5), fasilitas kredit utang bank (Catatan 14), biaya masih harus dibayar atas beban bunga bank (Catatan 17), beban umum dan administrasi (Catatan 31) / <i>Placement of fund in the form of current accounts (Note 5), credit facilities of bank loan (Note 14), accrued expenses of bank interest charges (Note 17), general and administrative expenses (Note 31)</i>	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>
PT Bank Mizuho Indonesia	Penempatan dana dalam bentuk giro (Catatan 5), fasilitas kredit utang bank (Catatan 14), biaya masih harus dibayar atas beban bunga bank (Catatan 17) / <i>Placement of fund in the form of current accounts (Note 5), credit facilities of bank loan (Note 14), accrued expenses of bank interest charges (Note 17)</i>	Pihak berelasi lainnya/ <i>Other related party</i>

Transaksi dengan Mizuho Leasing Co., Ltd.

- Pada tanggal 4 Desember 2019, Perusahaan dan Mizuho Leasing Co., Ltd. ("MLC") menandatangani perjanjian pinjaman, di mana MLC menyetujui untuk memberikan pinjaman jangka panjang kepada Perusahaan dengan fasilitas maksimum sebesar US\$ 2 juta. Pinjaman ini berjangka waktu selama 4 tahun dan dikenakan bunga ICE LIBOR 3 bulan ditambah dengan margin 0,82%. Pinjaman akan dibayarkan secara angsuran per kuartal sampai dengan tahun 2023. Pada tanggal 16 Desember 2023, saldo terutang atas fasilitas pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan.
- MLC juga memberikan jaminan atas utang yang dimiliki Perusahaan saat ini dan di masa depan kepada kreditur. Perjanjian pemberian jaminan utang ditandatangani pada tanggal 30 April 2020. Sesuai ketentuan perjanjian pemberian jaminan, jika tanpa ada keberatan dari salah satu pihak, jangka waktu pemberian jaminan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu tambahan setiap satu tahun. Perusahaan akan membayar komisi penjaminan kepada MLC berdasarkan tarif komisi masing-masing yang berbeda atas Guarantee (LoG); Komitmen untuk Menjamin (LoU); dan Stand-by Letter of Credit ("SBLC"), dengan tarif berbeda yang dibayarkan setahun sekali.

Pada tahun 2023 dan 2022, beban komisi atas penjaminan tersebut dicatat sebagai bagian dari "Beban Bunga dan Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Selama tahun 2023, jumlah kompensasi kepada manajemen kunci yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek adalah sebesar Rp 9.969.104 ribu (2022: Rp 8.491.888 ribu).

Transactions with Mizuho Leasing Co., Ltd.

- On December 4, 2019, the Company and Mizuho Leasing Co., Ltd. ("MLC") entered into a loan agreement whereby MLC agreed to provide long-term loan to the Company with a maximum facility of US\$ 2 million. This loan has a term of 4 years and bears interest at three-month ICE LIBOR plus margin 0.82%. This loan will be repaid in quarterly basis until 2023. As of December 16, 2023, the outstanding payable of this loan facility has been fully paid by the Company.
- MLC also provided guarantee against present and future loans of Company to creditors. The loan guarantee agreement was signed on April 30, 2020. In accordance with loan guarantee agreement, without any objection from either party, the term guarantee period will be automatically extended for additional period of one year. The Company will pay guarantee commissions to MLC based on respective commission fees with different tariff for Guarantee (LoG); Commitment to Guarantee (LoU); and Stand-by Letter of Credits ("SBLC") that will be paid once a year.

In 2023 and 2022, the commission fee expenses arising from this guarantee agreement recorded as part of "Interest and Financing Charges" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

During 2023, total compensation to the key management which entirely represent short-term employee benefits amounted to Rp 9,969,104 thousand (2022: Rp 8,491,888 thousand).

34. SEGMENT OPERASI

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha pembiayaan dengan aktivitas utama pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna.

Organisasi Perusahaan tidak dikelompokkan per masing-masing segmen usaha, informasi segmen yang tersedia untuk pendapatan, beban, aset dan liabilitas Perusahaan dibagi berdasarkan segmen geografis. Perusahaan tidak mempunyai dasar memadai untuk mengalokasikan pendapatan, beban, aset dan liabilitas ke masing-masing segmen usaha. Berikut adalah segmen geografis Perusahaan:

34. OPERATING SEGMENT

The Company is engaged in the business of financial institution with main activities are investment financing, working capital financing and multifunction financing.

The Company's organization is not separately classified into business segments, therefore the available segment information of income, expenses, assets and liabilities are divided by geographical segment. The Company has no adequate basis for allocating income, expenses, assets and liabilities to the respective business segments. The geographical segment information of the Company are as follows:

	2023			
	Jabotabek Rp'000	Luar Jabotabek/ Non-Jabotabek Rp'000	Jumlah/ Total Rp'000	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan segmen				Segment Income
Pembiayaan konsumen	131.516.042	133.850.950	265.366.992	Consumer financing
Sewa pembiayaan	51.936.104	3.601.421	55.537.525	Finance lease
Pendapatan administrasi	21.811.589	23.603.266	45.414.855	Administration income
Jumlah pendapatan segmen	<u>205.263.735</u>	<u>161.055.637</u>	<u>366.319.372</u>	Total segment income
Beban segmen				Segment expenses
Bunga dan keuangan	(105.183.661)	(42.078)	(105.225.739)	Interest and other financing expense
Penyisihan kerugian kredit	<u>(22.122.370)</u>	<u>(30.041.952)</u>	<u>(52.164.322)</u>	Provision for credit
Jumlah beban segmen	<u>(127.306.031)</u>	<u>(30.084.030)</u>	<u>(157.390.061)</u>	Total segment expenses
Hasil segmen	77.957.704	130.971.607	208.929.311	Segment income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			35.021.266	Unallocated income
Beban tidak dapat dialokasikan			<u>(182.715.780)</u>	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak			61.234.797	Profit before tax
Manfaat pajak penghasilan			<u>(84.969)</u>	Income tax expenses
Laba bersih			<u>61.149.828</u>	Profit for the year
ASET				ASSETS
Aset segmen	1.609.832.117	934.663.614	2.544.495.731	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			<u>249.086.119</u>	Unallocated assets
Jumlah aset			<u>2.793.581.850</u>	Total assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segmen	1.966.198.593	17.394.533	1.983.593.126	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			<u>59.503.886</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			<u>2.043.097.012</u>	Total liabilities

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

	2022			
	Luar		Jumlah/ Total	
	Jabotabek	Jabotabek/ Non-Jabotabek		Jumlah/ Total
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan segmen				Segment Income
Pembiayaan konsumen	124.888.312	99.114.023	224.002.335	Consumer financing
Sewa pembiayaan	39.060.252	7.292.944	46.353.196	Finance lease
Pendapatan administrasi	17.728.801	14.715.726	32.444.527	Administration income
Jumlah pendapatan segmen	181.677.365	121.122.693	302.800.058	Total segment income
Beban segmen				Segment expenses
Bunga dan keuangan	(44.658.511)	(14.586.061)	(59.244.572)	Interest and other financing expense
Rugi penjualan dan penyisihan jaminan yang dikuasakan kembali	(50.609)	-	(50.609)	Loss on sale and provision of foreclosed collateral
Penyisihan kerugian kredit	(34.563.580)	(14.935.937)	(49.499.517)	Provision for credit
Jumlah beban segmen	(79.272.700)	(29.521.998)	(108.794.698)	Total segment expenses
Hasil segmen	102.404.665	91.600.695	194.005.360	Segment income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			30.260.527	Unallocated income
Beban tidak dapat dialokasikan			(168.927.405)	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak			55.338.482	Income before tax
Manfaat pajak penghasilan			6.707.306	Income tax benefit
Laba bersih			62.045.788	Net Income
ASET				ASSETS
Aset segmen	1.403.365.073	710.151.510	2.113.516.583	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			353.153.966	Unallocated assets
Jumlah aset			2.466.670.549	Total assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segmen	1.700.104.652	13.829.563	1.713.934.215	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			62.838.641	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			1.776.772.856	Total liabilities

35. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Kecuali untuk yang disebutkan dalam tabel di bawah ini, manajemen menilai bahwa nilai tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan mendekati dengan nilai wajarnya:

35. FAIR VALUE MEASUREMENTS

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amount of financial assets and financial liabilities approximate their fair values:

	2023		2022		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset Keuangan					Financial Assets
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	1.730.181.413	1.896.788.404	1.438.260.924	1.575.649.571	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	813.258.674	852.748.322	674.828.310	713.545.627	Finance lease receivables - net
Piutang lain-lain - bersih	82.478.621	91.854.091	79.059.329	87.149.754	Other accounts receivable - net
Jumlah	2.625.918.708	2.841.390.817	2.192.148.563	2.376.344.952	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Utang bank	1.939.806.262	1.923.738.765	1.661.377.617	1.654.490.565	Bank loans
Jumlah	1.939.806.262	1.923.738.765	1.661.377.617	1.654.490.565	Total

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

- Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, utang usaha, utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena memiliki sifat jangka pendek dan atau sering dilaksanakan *re-pricing*.
- Estimasi nilai wajar piutang pembiayaan konsumen - bersih dan piutang sewa pembiayaan - bersih dengan suku bunga tetap tanpa kuota. Nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga untuk piutang baru dengan jangka waktu yang serupa.
- Estimasi nilai wajar dari piutang lain-lain ditentukan berdasarkan arus kas yang didiskontokan.
- Estimasi nilai wajar dari utang bank dengan bunga tetap tanpa kuota. Nilai wajar didasarkan pada diskonto arus kas menggunakan suku bunga untuk utang baru dengan jangka waktu yang serupa.
- Nilai wajar dari aset dan liabilitas derivatif diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dengan nilai *input* pasar yang dapat diobservasi.

Hirarki pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas Perusahaan

Tabel berikut ini merangkum nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis nilai wajarnya berdasarkan pada:

Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;

Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan

Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

- Management considers that the carrying amount of cash and cash equivalents, trade accounts payable, other accounts payable and accrued expenses approximate their carrying value because of short term maturities, and/or related instrument are repriced frequently.
- The estimated fair value of consumer financing receivables - net and finance lease receivables - net with fixed interest rate where quoted market prices are not available. The fair value is determined by discounting the estimated future cash flows using a current yield curve appropriate for similar term of the receivables.
- The estimated fair value of loan receivables is determined based on discounted cash flows method.
- The estimated fair value of bank loans with fixed interest rate where quoted market prices are not available. The fair value is determined by discounting the estimated future cash flows using a current yield curve appropriate for similar term of bank loans.
- Fair value of these derivative assets and liabilities are measured at fair value at the end of each reporting period using discounted cash flow method with market observable inputs.

Fair value measurement hierarchy of the Company's assets and liabilities

The following tables summarize the fair values of the assets and liabilities, analyzed among those whose fair value is based on:

Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;

Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and

Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

	2023				
	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					Financial assets for which fair value are disclosed
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	1.896.788.404	-	1.896.788.404	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	852.748.322	-	852.748.322	Finance lease receivables - net
Piutang lain-lain - bersih	-	91.854.091	-	91.854.091	Other accounts receivable - net
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					Financial liabilities for which fair values are disclosed
Utang bank	-	1.923.738.765	-	1.923.738.765	Bank loans
Aset/liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar					Financial asset/liability measured at fair value
Aset derivatif	-	7.953.302	-	7.953.302	Derivative assets
Liabilitas derivatif	-	(231.106)	-	(231.106)	Derivative liabilities
	2022				
	Level 1	Level 2	Level 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					Financial assets for which fair value are disclosed
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	1.575.649.571	-	1.575.649.571	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	713.545.627	-	713.545.627	Finance lease receivables - net
Piutang lain-lain - bersih	-	87.149.754	-	87.149.754	Other accounts receivable - net
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					Financial liabilities for which fair values are disclosed
Utang bank	-	1.654.490.565	-	1.654.490.565	Bank loans
Aset/liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar					Financial asset/liability measured at fair value
Aset derivatif	-	17.532.167	-	17.532.167	Derivative assets

Pada tahun 2023 dan 2022, tidak terdapat perpindahan metode pengukuran nilai wajar dari Level 1 menjadi Level 2, dan sebaliknya.

In 2023 and 2022, there is no transfer in the measurement method of fair value from Level 1 to Level 2, and vice versa.

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Pada tanggal 16 Desember 2021, Perusahaan dan KDB Tifa Finance Tbk telah menandatangani perjanjian pembiayaan bersama untuk membiayai piutang sewa pembiayaan dengan porsi masing-masing sebesar 50% dari jumlah pembiayaan dengan jangka waktu 36 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah piutang pembiayaan tersebut sebesar Rp 572 ribu (Catatan 7).

36. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND AGREEMENTS

On December 16, 2021, the Company and KDB Tifa Finance Tbk have entered into a joint finance agreement to finance lease receivables with a portion for each 50% of the total financing with a term of 36 months. As of December 31, 2023, the outstanding finance receivables are Rp 572 thousand (Note 7).

37. MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko operasional
- Risiko pasar
- Risiko likuiditas
- Risiko kredit

37. RISK MANAGEMENT

The Company has exposure to the following risks are as follows:

- Operational risk
- Market risk
- Liquidity risk
- Credit risk

Kerangka Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan disusun untuk memenuhi perkembangan yang pesat dalam industri jasa pembiayaan. Kebijakan manajemen risiko Perusahaan konsisten dengan Mizuho Leasing Co., Ltd., sebagai induk perusahaan (*parent company*) yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan.

Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kegiatan pembiayaan yang sehat dan berlandaskan tata kelola yang baik membutuhkan penerapan manajemen risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam penerapannya Perusahaan menyadari bahwa peran aktif Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Senior Manajemen sangat menentukan efektivitas penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja dari perusahaan pembiayaan, maka manajemen risiko menjadi elemen pendukung penting bagi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya manajemen risiko di Perusahaan adalah untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul dari aktivitas Perusahaan serta menjaga tingkat risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Kebijakan manajemen risiko merupakan salah satu upaya manajemen Perusahaan untuk menjamin adanya landasan yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dalam batas risiko yang terukur untuk mencapai target peningkatan *shareholder value*.

Tujuan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah:

- Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dan kegiatan pendukung Perusahaan telah memperhitungkan seluruh potensi risiko yang mungkin timbul.
- Untuk melakukan fungsi kontrol dan pengelolaan terhadap seluruh risiko yang melekat pada aktivitas bisnis dalam batas-batas toleransi risiko Perusahaan yang telah ditetapkan.
- Untuk mengoptimalkan penggunaan modal Perusahaan.
- Untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang relevan, dari Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan otoritas lain.
- Untuk meningkatkan *shareholder value* dalam jangka panjang.

Risk Management Framework

The Company's risk management policy designed to address the rapid growth in the financing services industry. Company's risk management policy is consistent with Mizuho Leasing Co., Ltd., as the holding company (parent company) which is engaged in financing services.

The Company realizes that the sound management of financial activities and sound corporate governance grounded in efficient management principles requires the application of risk management including the process of identification, measurement, monitoring and control of risk. In applying this risk management, the Company recognizes that the active role of the Board of Commissioners, Directors and Senior Management strongly determines the effectiveness of implementation the risk management. The implementation of good risk management can support the performance of the financing company, thus risk management is an important supporting element for the Company to operate the business. The target and main purpose of the implementation of the risk management in the Company is to guard and protect the Company through the risk management of possible losses that might arise from Company activities and to maintain the level of risk to comply with Company's policies.

The risk management policy is one of the Company's management efforts to ensure a strong foundation for the implementation of operational activities so that operations can be conducted within measurable limits of risk to achieve the target of increasing shareholder value.

The objectives of the risk management are:

- To ensure that all business and support activities in the Company's operations have taken into consideration all potential risks that may arise.
- To perform the function of supervision and management of all risks inherent in the Company's business activities within the specified risk tolerance limits.
- To optimize the use of the Company's capital.
- To ensure compliance with all relevant regulations, including regulations of Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, the Ministry of Finance and other authorities.
- To increase shareholder value over in the long run.

Strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik, pelestarian nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang terstruktur dan sehat. Budaya risiko yang kuat ini diciptakan dengan membangun kesadaran risiko yang kuat dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai kepada seluruh karyawan Perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik disosialisasikan dan dikembangkan secara menyeluruh pada semua komponen dan aktivitas Perusahaan untuk memastikan bahwa dilaksanakan dengan tanpa kompromi.

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, manajemen Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perusahaan. Departemen Manajemen Risiko yang berperan secara aktif dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan pencegahan, proaktif dan responsive dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan yang ada di dalam Perusahaan untuk mendukung penerapan manajemen risiko ini, karena semua bagian di dalam Perusahaan masing-masing akan memainkan peranan penting.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Perusahaan memiliki mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;

Strategies to support the goals and objectives of risk management is developed through the formation and development of a strong risk culture, the implementation of good corporate governance practices, preserving the values of compliance with regulations, adequate infrastructure, as well as structured and healthy working processes. This strong risk culture is created by building a strong awareness of risk starting from the Board of Commissioners, Directors and to the entire employees of the Company. Good corporate governance is socialized and developed thoroughly in all components and activities within the Company to ensure that they are being implemented without compromise.

As the Company engages in financing activities, the Company's Management is fully committed to implement comprehensive risk management, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and methodology of risks management; hence, the Company's business activities could remain to be directed and controlled at an acceptable risk limit, at the same time the Company can still be profitable. Risk Management Department is playing an active role in coordinating preventive, proactive and responsive actions with all employees from various levels within the Company in order to support the implementation of risk management, because all divisions of the Company will play their respective important roles.

In the application of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that rests on four (4) risk management pillars, which can be described as follows:

Pillar 1: Active Supervision by Board of Commissioners and Directors

Active supervision is reflected starting from the annual business planning, which includes:

- Approving and evaluating risk management policies periodically;
- Evaluating and approving actions that require the approval of the Board of Commissioners or Directors;
- Establishing risk management policies and strategies, including establishment of authority in setting limits and evaluation of the quality of the portfolio on a regular basis;

- Terdapatnya Komite Audit dan Pemantau Risiko sebagai organ Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko serta Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagai organ Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Pilar 2: Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Batasan

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Standar Operasional Prosedur dan Surat Edaran yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko di Perusahaan yang digunakan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Departemen Manajemen Risiko adalah pihak yang berfungsi memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko.

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko kredit dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala Komite Audit dan Pemantau Risiko. Selain itu, sistem teknologi informasi utama Perusahaan mampu menyediakan data/informasi secara cepat, akurat dan *real time online* kepada pihak Manajemen.

Pilar 4: Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Perusahaan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari semua proses yang ada di dalam Perusahaan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas-aktivitas di dalam Perusahaan termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut;

- The existence of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee as an organ of the Board of Commissioners and Risk Management Committee and Information Technology Steering Committee as organ of the Directors in carrying out its oversight responsibilities.

Pillar 2: Adequacy of Policy, Procedure and Application of Limits Determination

The Company formulates policies related to risk management which are checked regularly and continually adapted to current business conditions. The policies are translated into the Standard Operating Procedures and Circular Letter which are distributed to all employees. The Company also has policies regarding restrictions approval/authorization limits for credit transactions and non-credit transactions.

Pillar 3: Adequacy of Identification Process, Assessment, Monitoring and Risks Control

The processes of identification, assessment, monitoring and risks control are the main components of the process of risks management implementation in the company which is used to analyze resources and potential risks along with the impacts. Risk Management Department is a division responsible to analyze the level, trend, and course of the risk.

The Company has tools to identify, assess and monitor risks, particularly credit risk and operational risk through the existing reporting mechanism and the management information systems also through regular meetings of Audit Committee and Risk Monitoring Committee. In addition, the Company's main information technology system is able to provide, quick, accurate and in real time online data/information for Management.

Pillar 4: Comprehensive Internal Control

The Company has an Internal Audit Division, which independently reports the process and results of its investigations to the Board of Commissioners and the President Director. The accountability of the Internal Audit Division includes:

- Providing an assessment of the adequacy and effectiveness of all existing processes within the Company;
- Reporting on key issues related to the process of monitoring activities within the Company, including potential improvements to these processes;

- Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perusahaan. Penanganan risiko operasional dalam Perusahaan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah di atas telah diterjemahkan Perusahaan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut:

- Pengertian yang jelas oleh semua lini yang terkait terhadap risiko yang melekat pada setiap tahapan proses kegiatan operasional yang berhubungan terutama dengan persetujuan dan pencairan pembiayaan, pelayanan konsumen, pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan.
- Pembagian tugas yang jelas dan terpisah antara pelaksana dan kontrol. Sebagai pelaksana, aktivitas yang dikerjakan berdasarkan *Standard Operating Procedures* (SOP) baku Perusahaan, sedangkan fungsi kontrol memastikan aktivitas sudah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh SOP.
- Perusahaan menggunakan Sistem Teknologi Informasi yang handal agar kelangsungan dan kelancaran pengoperasian sistem dapat terjamin. Perusahaan sudah menerapkan sistem *on-line* dan *real time* sehingga dengan demikian pihak manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional secara langsung, dan dengan cepat dapat mengambil keputusan strategis dan tepat untuk memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi akibat kelalaian, tidak berfungsinya sistem, maupun penyimpangan dari pelaksanaan SOP dan/atau kebijakan Perusahaan.

- Coordinating with other control and oversight functions (risk management, compliance, legal and external audit).

Operational Risk

Operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations. The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- Risk identification
- Risk measurement
- Risk management, supervision and control

The three steps above are inseparable unified processes. The steps above have been converted to the Company's operational risk management mechanism as follows:

- A clear understanding by all lines concerned regarding the risk inherent in each stage of the processes of operational activities relating primarily to the approval and disbursement of financing, customer service, accounting records and preparation of reports.
- A clear separation of duties between executors and overseers. Executors, carry out activities based on the Company's Standard Operating Procedures (SOP), while the oversight functions ensure that the activities are done in accordance with the requirements outlined by the SOP.
- The Company uses a reliable Information Technology Systems so that the continuity and smooth operation of the system can be guaranteed. The Company has implemented an online and real time system so that management can monitor all operational activities directly and can quickly make strategic and appropriate decisions to mitigate possible risks that occur due to negligence, system malfunctions, or deviations from SOP implementation and/or Company policy.

- Perusahaan menerapkan *Risk Control Self Assessment* (RCSA), suatu konsep manajemen risiko yang dibentuk berdasarkan SOP yang berlaku dalam Perusahaan, untuk menelaah dan mengukur besarnya potensi risiko-risiko yang berlangsung selama proses internal untuk menghasilkan status risiko operasional, dan dilaporkan secara periodik.
- Perusahaan senantiasa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan karyawannya dengan berbagai pelatihan melalui *MLI Learning Centre* agar dapat menekan seminimal mungkin frekuensi kesalahan manusia dan sistem operasional dan dampak kerugian finansial yang mungkin terjadi.
- Memastikan bahwa semua lini yang terkait telah memahami risiko pada setiap tahap kegiatan operasional terutama yang berhubungan dengan persetujuan dan pencairan kredit, pelayanan konsumen, pembukuan, dan penyusunan laporan.
- Memisahkan tugas pelaksana dan kontrol secara tegas. Pelaksana bekerja berdasarkan SOP, sedangkan kontrol memastikan bahwa aktivitas pelaksanaan telah sesuai dengan SOP.
- Proses pencatatan transaksi keuangan (accounting) dilakukan melalui sistem built in control yang berjenjang dan terintegrasi.
- Membuat *back-up* melalui *Disaster Recovery Center* ("DRC") atas data-data operasional untuk menghindari terganggunya kegiatan operasional jika seluruh data hilang akibat gangguan sistem, kebakaran, banjir, huru-hara, atau gempa bumi.
- The Company implements a Risk Control Self Assessment (RCSA), a concept of risk management, which was established based on applicable Standard Operating Procedures in the Company, to examine and measure the extent of potential risk occurring throughout the internal processes in order to generate operational risk status, and is reported periodically.
- The Company always develops the skills and knowledge of its employees with various training through MLI Learning Centre in order to minimize the frequency of human error and operational system as well as the impact of possible financial losses.
- Ensure that all related lines understand the risks that may occur at every stage of operational activities, especially those related to credit approval and disbursement, customer service, bookkeeping, and reporting.
- Strictly separate executive and supervision duties. The executors work according to the SOP, while the supervisors ensure that the activities are in accordance with the SOP
- The process of recording financial transactions (accounting) is carried out through a tiered and integrated built-in control system.
- Make backups through the Disaster Recovery Center ("DRC") of operational data to avoid disruption of operational activities if all data is lost due to system disruption, fire, flood, riot or earthquake.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administrative termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko Pasar antara lain meliputi Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko ekuitas. Manajemen Risiko pada Risiko Pasar dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perusahaan

Market Risk

Market Risk is Risk in the position of assets, liabilities, equity, and/or administrative accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions. Market Risk includes, among others, interest rate risk, exchange rate risk and equity risk. Market Risk Management is carried out to minimize the possibility of negative impacts due to changes in market conditions on the Company's assets and capital

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada akun aset ataupun liabilitas Perusahaan Pembiayaan akibat perubahan suku bunga. Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap* suku bunga. Melalui *swap* suku bunga, Perusahaan setuju untuk mempertukarkan selisih antara suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang yang dihitung sesuai dengan nilai nosional yang telah disepakati. Nilai wajar dari *swap* suku bunga pada akhir periode pelaporan ditentukan dengan mendiskonto nilai arus kas di masa yang akan datang dengan menggunakan kurva pada akhir periode pelaporan dan risiko kredit yang melekat pada kontrak. Nilai rata-rata suku bunga ditentukan dari nilai saldo pada akhir periode pelaporan. Kontrak *swap* suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrument lindung nilai arus kas.

Tabel berikut menggambarkan rincian berdasarkan suku bunga atas aset bruto dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *repricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

Interest Risk

Interest risk is the risk of loss in the Company's financial assets or liabilities due to changes in interest rates. The Company manages interest rate risk using derivative instruments, which is interest rate swaps. Through an interest rate swap, the Company agrees to exchange the difference between a fixed interest rate and a floating interest rate calculated according to the agreed notional value. The fair value of interest rate swaps at the end of the reporting period is determined by discounting the value of future cash flows using a curve at the end of the reporting period and credit risk attached to the contract. The average value of the interest rate is determined from the balance value at the end of the reporting period. An interest rate swap contract exchanges a floating interest rate with a fixed rate, which is designated and effective as a cash flow hedge instrument.

The following table summarizes the breakdown based on interest rates on gross assets and financial liabilities of the Company which are grouped according to which is earlier between the repricing date or contractual due date to see the impact of changes in interest rates:

	2023							
	Suku bunga variabel/ Variable interest			Suku bunga tetap/ Fixed interest				
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	>1-12 bulan/ >1-12 months	>1-5 tahun/ >1-5 year	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	>1-12 bulan/ >1-12 months	>1-5 tahun/ >1-5 year		Jumlah/ Total
	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000		Rp 000
Aset keuangan							Financial assets	
Kas dan setara kas	50.062.293	-	-	-	-	50.062.293	Cash and cash equivalents	
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	75.449.171	664.462.851	1.024.849.301	1.764.761.323	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	-	-	48.595.813	324.463.763	477.468.602	850.528.178	Finance lease receivables
Aset derivatif	-	7.953.302	-	-	-	-	7.953.302	Derivative assets
Jumlah	50.062.293	7.953.302	-	124.044.984	988.926.614	1.502.317.903	2.673.305.096	Total
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Utang bank	(7.329.975)	(118.357.302)	(55.963.269)	(1.706.531.646)	(21.761.075)	(29.862.995)	(1.939.806.262)	Bank loans
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	(3.865.862)	-	-	(3.865.862)	Accrued expense
Liabilitas derivatif	-	(231.106)	-	-	-	-	(231.106)	Derivative liabilities
Jumlah	(7.329.975)	(118.588.408)	(55.963.269)	(1.710.397.508)	(21.761.075)	(29.862.995)	(1.943.903.230)	Total
Bersih	42.732.318	(110.635.106)	(55.963.269)	(1.586.352.524)	967.165.539	1.472.454.908	729.401.866	Net

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

	2022						Jumlah/ Total	
	Suku bunga variabel/ Variable interest			Suku bunga tetap/ Fixed interest				
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	>1-12 bulan/ >1-12 months	>1-5 tahun/ >1-5 year	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	>1-12 bulan/ >1-12 months	>1-5 tahun/ >1-5 year		
	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000		
Aset keuangan							Financial assets	
Kas dan setara kas	102.331.455	-	-	-	-	-	102.331.455	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	69.634.045	609.607.118	793.436.689	1.472.677.852	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	-	-	45.791.418	281.618.435	383.395.505	710.805.358	Finance lease receivables
Aset derivatif	-	17.532.167	-	-	-	-	17.532.167	Derivative assets
Jumlah	102.331.455	17.532.167	-	115.425.463	891.225.553	1.176.832.194	2.303.346.832	Total
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Utang bank	(6.227.282)	(116.598.688)	(158.135.699)	(1.208.243.299)	(139.449.920)	(32.722.729)	(1.661.377.617)	Bank loans
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	(3.200.825)	-	-	(3.200.825)	Accrued expense
Jumlah	(6.227.282)	(116.598.688)	(158.135.699)	(1.211.444.124)	(139.449.920)	(32.722.729)	(1.664.578.442)	Total
Bersih	96.104.173	(99.066.521)	(158.135.699)	(1.096.018.661)	751.775.633	1.144.109.465	638.768.390	Net

Perusahaan terpapar risiko suku bunga terutama karena utang bank memiliki suku bunga tetap dan mengambang.

Companies are exposed to interest rate risk mainly because of bank loans have fixed and floating interest rates.

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar dan risiko suku bunga atas arus kas dijelaskan dalam Catatan 5, 6, 7, 8, 12 dan 14.

The Company's financial assets and liabilities that are exposed to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk are detailed in Notes 5, 6, 7, 8, 12 and 14.

Risiko Mata Uang

Currency Risk

Perusahaan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penyaluran piutang pembiayaan dan penerimaan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Perusahaan mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang.

The Company is exposed to the effects of fluctuations in foreign exchange rates mainly due to transactions of denominated foreign currencies such as distribution of finance lease receivables and receipt of loans denominated in foreign currencies. The Company manages foreign currency exposure by matching receipts and payments in each individual currency, as much as possible.

Risiko nilai tukar terhadap mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas di masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi dikarenakan adanya perubahan nilai tukar terhadap mata yang asing. Eksposur risiko Perusahaan terhadap nilai tukar berasal dari kas di bank, piutang sewa pembiayaan, aset lain lain dan utang bank.

Exchange rate risk against foreign currencies is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in the exchange rate of foreign currencies. The Company's risk exposure to the exchange rate comes from cash in banks, finance lease receivables, other assets and bank loans.

Pada risiko ini, Perusahaan mengelola risiko dengan menyesuaikan kondisi mata uang piutang sewa pembiayaan dengan mata uang pendanaan pinjaman yang ditetapkan oleh bank. Perusahaan mengelola risiko nilai tukar dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap cross currency*. Melalui *swap cross currency*, Perusahaan setuju untuk mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut memenuhi kriteria dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

At this risk, the Company manages risk by adjusting the condition of the finance lease receivables with the loan funding currency specified by the bank. The Company manages exchange rate risk by using a derivative instrument, namely cross currency swap. Through cross currency swaps, the Company agrees to exchange loans received in foreign currencies for loans in Rupiah using a specific exchange rate at the date of commencement of the transaction, where the contract meets the criteria and is effective as a cash flow hedge instrument.

	2023		
	Kenaikan (Penurunan)/ <i>Increase</i> (Decrease)	Sensitivitas Laba (Rugi)/ <i>Profit (Loss)</i> <i>Sensitivity</i>	
Mata Uang Asing			Foreign Currency
Dolar Amerika Serikat	0,66%	(606.820)	United States Dollar
Yen	1,17%	(13.011)	Yen

	2022		
	Kenaikan (Penurunan)/ <i>Increase</i> (Decrease)	Sensitivitas Laba (Rugi)/ <i>Profit (Loss)</i> <i>Sensitivity</i>	
Mata Uang Asing			Foreign Currency
Dolar Amerika Serikat	0,46%	(733.289)	United States Dollar
Yen	1,45%	80.204	Yen

Aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

The Company's assets and liabilities denominated in foreign currency are as follows:

		2023		2022		
		Mata uang asing/ <i>Foreign</i> <i>currency</i>	Ekivalen Rupiah/ <i>Equivalent</i> <i>Rupiah</i> Rp'000	Mata uang asing/ <i>Foreign</i> <i>currency</i>	Ekivalen Rupiah/ <i>Equivalent</i> <i>Rupiah</i> Rp'000	
Kas dan setara kas	USD	802.392	12.369.672	519.895	8.178.472	USD Cash and cash equivalents
	Yen	37.914	4.153.417	14.768	1.708.753	
Piutang sewa pembiayaan	USD	4.605.921	67.347.896	8.712.923	137.062.986	USD Finance lease receivables
	Yen	897.271.459	95.252.508	808.460	93.546.916	
Aset lain-lain	USD	-	-	500	7.865	USD Other assets
Jumlah			<u>179.123.493</u>		<u>240.504.992</u>	Total
Utang bank	USD	11.783.248	181.650.546	22.460.382	353.324.270	USD Bank loan
	Yen	914.271	100.155.716	825.368	95.503.347	
Utang lain-lain pihak berelasi	USD	-	-	500.000	7.865.500	USD Other payables related parties
Jumlah			<u>281.806.262</u>		<u>456.693.117</u>	Total

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilititas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

Manajemen Risiko pada Risiko Likuiditas dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Pada awal bulan Perusahaan menetapkan tingkat suku bunga dan juga *spread* yang akan diterapkan pada bulan tersebut. Penetapan dilakukan setelah melakukan analisa pasar. *Funding cost* ditetapkan dengan memperhatikan *spread* dan suku bunga pinjaman kreditur serta suku bunga pasar yang diperoleh dari Bloomberg. Dengan demikian pergerakan suku bunga pinjaman tetap dapat tertutup oleh suku bunga piutang sewa pembiayaan. Perusahaan juga berusaha menetapkan suku bunga tetap atau mengambang dalam kegiatan pendanaan disesuaikan dengan suku bunga tetap atau mengambang pada piutang sewa pembiayaan. Pada akhir bulan akan dibuat laporan yang melaporkan jumlah pinjaman selama bulan tersebut. Laporan tersebut berisi total jumlah pinjaman, bunga, dan *spread*.

Analisis Sensitivitas

Untuk utang bank suku bunga mengambang, analisis sensitivitas disusun dengan asumsi jumlah utang bank terutang pada tanggal laporan posisi keuangan adalah yang terutang untuk sepanjang tahun. Perubahan dari 100 basis poin suku bunga pada tanggal laporan keuangan akan meningkatkan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.506.505 ribu (31 Desember 2022: Rp 2.809.617 ribu). Analisis ini mengasumsikan bahwa semua variabel lainnya tetap konstan. Perubahan terutama disebabkan oleh tingkat suku bunga pinjaman variabel.

Untuk modal kerja, utang dan pinjaman investasi, Perusahaan berusaha dengan mengurangi risiko tingkat suku bunganya dengan cara mendapatkan struktur pinjaman dengan suku bunga kompetitif.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaannya, selain menggunakan dana sendiri, Perusahaan juga membina kerjasama dengan beberapa bank nasional dan bank pemerintah maupun bank asing dalam bentuk *demand loan* dan *term loan*. Dalam hal ini Perusahaan mengharuskan limit fasilitas pinjaman yang didapatkan minimal 110% dari total kebutuhan dana untuk aktivitas pembiayaan.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is the Risk due to the inability of the Company to meet maturing liabilities from cash flow funding sources and / or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.

Risk Management on Liquidity Risk is carried out to minimize the possibility of the Company's inability to obtain cash flow funding sources.

At the beginning of the month, the Company sets the interest rate and spread that will be applied for the month. The determination is made after conducting a market analysis. Funding costs are determined by taking into account the spread and interest rates on creditors' loans as well as market interest rates obtained from Bloomberg. Thus the movement in loan interest rates can still be covered by the interest rates on finance lease receivables. The Company also seeks to set a fixed or floating interest rate in its financing activities at a fixed or floating rate on finance lease receivables. At the end of the month, a report will be generated that reports the loan amount during the month. The report contains the total loan amount, interest, and spread.

Sensitivity Analysis

For floating rate bank loans, the sensitivity analysis is prepared assuming the amount of bank loans outstanding at the statement of financial position date was outstanding for the whole year. A change of 100 basis points in interest rates at the reporting dates would have increased or decreased profit before income tax for the year then ended December 31, 2023 is Rp 15,506,505 thousand (December 31, 2022: Rp 2,809,617 thousand). This analysis assumes that all other variables remain constant. The movement is mainly attributable to interest rates on its variable rate borrowings.

For working capital, investment loans and borrowings, the Company may seek to mitigate its interest rate risk by obtaining loans structure with competitive interest rate.

In its financing activities the Company does not only rely on their own funds, the Company is also able to use other sources of funds from several banks by agreement in the forms of demand loan and term loan. In regard to this, in the situations where the Company needs to borrow some funds from mentioned parties; the lenders shall give loan in the least, amounted 110% from the sum of the required funds.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Saldo kas setiap hari cukup untuk minimal menutupi kebutuhan dana pembiayaan satu hari. Perusahaan juga mempunyai fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang dapat ditarik setiap waktu dengan limit minimal menutup kebutuhan dana 5 hari kerja.

An adequate cash balance is maintained every day to cover financing needs for one day. The Company also has a current account loan facility that may be withdrawn at any time with a minimum limit to cover financing needs for 5 business days.

Perusahaan memiliki rasio likuiditas yang sangat sehat. Perbandingan liabilitas terhadap ekuitas Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 272,20% (31 Desember 2022: 257,76%). Dalam hal perbandingan liabilitas terhadap jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 73,13% (31 Desember 2022: 72,03%).

The Company has a very healthy liquidity ratio. The comparison of the Company's liabilities to equity as of December 31, 2023 amounted to 272.20% (December 31, 2022: 257.76%). Meanwhile, the ratio of liabilities to total assets as of December 31, 2023 amounted to 73.13% (December 31, 2022: 72.03%).

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The following table shows the differences in the maturity profile of the Company's financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022:

	2023				Jumlah/ Total Rp'000	
	> 1 bulan s.d 3 bulan/ 1 bulan/ Until 1 month Rp'000	> 1 month until 3 months Rp'000	> 3 bulan s.d 12 bulan/ > 3 months until 12 months Rp'000	> 1 tahun s.d 5 tahun/ > 1 year until 5 years Rp'000		
Aset keuangan						
Financial assets						
Tanpa suku bunga						Non-interest bearing
Kas dan setara kas	298.909	-	-	-	298.909	Cash and cash equivalents
Suku bunga variabel						Variable interest
Kas dan setara kas	50.062.293	-	-	-	50.062.293	Cash and cash equivalent
Aset derivatif	-	7.953.302	-	-	7.953.302	Derivative assets
Suku bunga tetap						Fixed interest
Piutang pembiayaan konsumen	75.449.172	130.516.733	533.946.118	1.024.849.300	1.764.761.323	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	48.595.794	62.478.410	261.985.353	477.468.601	850.528.158	Finance lease receivables
Piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	-	814.930	-	814.930	Other account receivables to related parties
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	69.851.581	503.610	1.291.196	23.477.969	95.124.356	Other account receivables to third parties
Jumlah	244.257.749	201.452.055	798.037.597	1.525.795.870	2.769.543.271	Total
Liabilitas keuangan						
Financial liabilities						
Tanpa suku bunga						Non-interest bearing
Utang usaha	967.812	-	-	-	967.812	Trade accounts payable
Utang lain-lain	1.278.867	37.181.163	1.782.188	33.426.788	73.669.006	Other accounts payable
Suku variabel						Variable interest
Utang bank	7.329.975	26.524.103	91.833.199	55.963.269	181.650.546	Bank loans
Liabilitas derivatif	-	231.106	-	-	231.106	Derivative liability
Suku bunga tetap						Fixed interest
Utang bank	1.710.397.508	4.952.442	16.808.633	29.862.994	1.762.021.577	Bank loans
Liabilitas sewa	405.813	420.716	645.724	25.828.848	27.301.101	Lease liabilities
Jumlah	1.720.379.975	69.309.530	111.069.744	145.081.899	2.045.841.148	Total
Bersih	(1.476.122.226)	132.142.525	686.967.853	1.380.713.971	723.702.123	Net

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

	2022				Jumlah/ Total Rp'000	
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month Rp'000	> 1 bulan s.d 3 bulan/ > 1 month until 3 months Rp'000	> 3 bulan s.d 12 bulan/ > 3 months until 12 months Rp'000	> 1 tahun s.d 5 tahun/ > 1 year until 5 years Rp'000		
Aset keuangan						Financial assets
Tanpa suku bunga						Non-interest bearing
Kas dan setara kas	268.281	-	-	-	268.281	Cash and cash equivalents
Suku bunga variabel						Variable interest
Kas dan setara kas	72.331.455	-	-	-	72.331.455	Cash and cash equivalent
Aset derivatif	-	17.532.167	-	-	17.532.167	Derivative assets
Suku bunga tetap						Fixed interest
Kas dan setara kas	30.000.000	-	-	-	30.000.000	Cash and cash equivalent
Piutang pembiayaan konsumen	69.634.045	155.727.371	453.879.746	793.436.690	1.472.677.852	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	45.791.418	57.823.991	223.794.444	383.395.505	710.805.358	Finance lease receivables
Piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	-	497.515	-	497.515	Other account receivables to related parties
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	75.284.542	292.748	3.600.116	11.959.709	91.137.115	Other account receivables to third parties
Jumlah	293.309.741	231.376.277	681.771.821	1.188.791.904	2.395.249.743	Total
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Tanpa suku bunga						Non-interest bearing
Utang usaha	714.424	-	-	-	714.424	Trade accounts payable
Utang lain-lain	1.469.943	38.336.860	2.438.991	18.412.470	60.658.264	Other accounts payable
Suku variabel						Variable interest
Utang bank	6.227.282	24.561.143	92.037.546	158.135.699	280.961.670	Bank loans
Suku bunga tetap						Fixed interest
Utang bank	1.211.444.124	73.047.380	66.402.540	32.722.728	1.383.616.772	Bank loans
Liabilitas sewa	541.915	1.032.596	2.067.709	25.900.207	29.542.427	Lease liabilities
Jumlah	1.220.397.688	136.977.979	162.946.786	235.171.104	1.755.493.557	Total
Bersih	(927.087.947)	94.398.298	518.825.035	953.620.800	639.756.186	Net

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan settlement risk.

Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan. Oleh karenanya Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip "Benar dari Awal" yang diterapkan oleh Perusahaan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian ini. Perusahaan menerapkan proses pemberian kredit yang ketat, antara lain survei calon konsumen, verifikasi data konsumen, dan persyaratan uang muka yang berlaku. Prinsip 5C dan 1P (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral dan Purpose*) sudah merupakan standar dalam setiap analisa kelayakan konsumen. Juga pemilihan dan analisa *Dealer/Showroom* atau vendor merupakan kesatuan dari analisa persetujuan proses pembiayaan.

Credit Risk

Credit risk is the risk due to failure of other parties to fulfill obligations to the Company, including credit risk due to debtor failure, including credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.

Credit risk is a major risk because the Company is engaged in consumer financing and finance lease. The Company faces risks directly when consumers are not able to fulfill their obligations in paying off loans already agreed upon in the contract between consumers and the Company. Therefore the Company applies the precautionary principle. The "Right from the Beginning" principle adopted by the Company is a reflection of this attitude of prudence. The Company applies a rigorous credit process, including surveys of potential customers, verification of customer data, and applicable requirements for down payments. The 5C and 1P (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral dan Purpose*) principles have become standard in every consumer feasibility analysis. Selection and analysis *Dealer/Showroom* or vendor is also an integral part of the financing process analysis.

Analisis calon konsumen dan pemantauan Konsumen secara menyeluruh, Perusahaan menggunakan survei internal untuk validasi informasi calon konsumen dan survei yang telah dilakukan oleh *Credit Marketing Officer* (CMO) tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perusahaan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari konsumen, status jaminan dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan konsumen sehingga konsumen yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal.

Untuk pembiayaan korporasi, Perusahaan menerapkan kebijakan hanya akan bertransaksi dengan rekanan yang memiliki kelayakan kredit dan mendapatkan jaminan yang memadai, bila sesuai, sebagai sarana mengurangi risiko kerugian atau tunggakan. Perusahaan hanya bertransaksi dengan entitas, tergantung pada rating kreditanya, yang mana pemegang saham melakukan bisnis, entitas yang memberikan jaminan memadai, induk perusahaan, pelanggan prospektif dan entitas-entitas yang ditunjuk oleh Mizuho Leasing Co., Ltd. Perusahaan meminimalkan biaya kredit dengan mengoptimalkan struktur manajemen kredit. Pada tahap awal pelaksanaan kesepakatan, Perusahaan memberikan peringkat kredit untuk setiap debitur dan melakukan seleksi kredit yang ketat. Oleh karena itu, Perusahaan menilai kelayakan kredit untuk menandatangani perjanjian dengan melakukan pemeriksaan kredit masing-masing debitur secara ketat. Sistem rating kredit terdiri atas rating untuk Perusahaan Jepang dan non-Jepang, dan akan diklasifikasikan dalam peringkat 1 sampai dengan 10 yang terbagi dalam 2 kategori yaitu untuk perusahaan bermutu baik dalam rating 1 sampai 7 dan perusahaan bermutu buruk, menunggak ataupun Perusahaan dalam kebangkrutan dalam rating 7E sampai dengan 10. Prosedur dan keputusan rating kredit diatur dan disediakan oleh Mizuho Leasing Co., Ltd. Eksposur kelompok usaha dan rating kredit dari pihak lawan dimonitor terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar diantara pihak lawan yang telah disetujui.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit Perusahaan.

I. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat dengan menggunakan nilai gross.

In its analysis of prospective consumers and monitoring of consumers as a whole, the Company uses an internal survey service to validate information on prospective consumers and a survey conducted by *Credit Marketing Officer* (CMO) without reducing the speed of financing approval decisions. The Company also monitors the characteristics of consumer installment payments, insurance status, and other conditions that may affect the consumer's income sources so that consumers who might pose problems can be recognized early.

For corporate financing, the Company implements a policy of only transacting with partners who are creditworthy and receive adequate collateral, if appropriate, as a means of reducing the risk of loss or arrears. The Company only transacts with entities, depending on its credit rating, in which shareholders do business, entities that provide adequate guarantees, parent company, prospective customers and entities designated by Mizuho Leasing Co., Ltd. The Company minimizes the cost of credit by optimizing the credit management structure. In the early stages of execution of the agreement, the Company assigns a credit rating to each debtor and conducts a strict credit selection. Therefore, the Company assesses the credit worthiness of signing the agreement by closely examining each debtor's credit. The credit rating system consists of ratings for Japanese and non-Japanese companies, and will be classified into ranks 1 to 10 which are divided into 2 categories, namely good quality companies in ratings 1 to 7 and companies with bad quality, arrears or companies in bankruptcy. rating 7E to 10. Credit rating procedures and decisions are regulated and provided by Mizuho Leasing Co., Ltd. The exposure of the business group and the credit rating of the counterparty are monitored continuously and the aggregate value of the related transactions is spread out among the agreed counter parties.

The following are the Company's maximum exposure to credit risk and credit risk concentration analysis.

I. Maximum exposure to credit risk

The Company's credit risk exposure is almost entirely derived from consumer financing and finance lease receivables, where the maximum credit risk exposure is equal to the carrying amount with gross amount.

II. Analisis konsentrasi risiko kredit

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah konsumen bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Perusahaan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya mayoritas adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu, kecuali untuk sewa pembiayaan. Untuk usaha pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, proses pemberian kredit dijalankan sangat ketat, mulai dari survei calon konsumen, verifikasi data konsumen serta pemberian uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikendalikan dengan baik.

Perusahaan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko atas piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang dimiliki Perusahaan:

	2023	2022	
	Rp'000	Rp'000	
Piutang pembiayaan konsumen			Consumer financing receivables
Korporasi	89.573.765	105.793.609	Corporate
Individu	<u>2.173.885.727</u>	<u>1.723.313.380</u>	Individual
Sub-jumlah	<u>2.263.459.492</u>	<u>1.829.106.989</u>	Sub-total
Piutang sewa pembiayaan			Finance lease receivables
Korporasi	940.676.427	704.612.899	Corporate
Individu	<u>6.428.521</u>	<u>92.308.903</u>	Individual
Sub-jumlah	<u>947.104.948</u>	<u>796.921.802</u>	Sub-total
Jumlah	<u>3.210.564.440</u>	<u>2.626.028.791</u>	Total

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan BMPP.

II. Credit risk concentration analysis

Concentration of credit risk arises when a number of consumers operate in the same business activity or in activities within the same geographic area, or when they have similar characteristics that would cause the ability to meet contractual obligations to be equally affected by changes in economic or other conditions.

The Company is engaged in the consumer financing business the majority of whose clients are individuals and not concentrated in any certain geographic areas, except for finance lease. For consumer finance and finance lease business, the process for extending credit is very strict, with the survey of prospective customers, verification of customer data, and down payments based on conditions applied, so the risks that might arise can be controlled properly.

The Company is also implementing Anti-Money-Laundering, Terrorism-Funding-Prevention Programs and Prevention of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in respect to the regulation based on Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Art. 8 year 2023 regarding on the Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction by Financial Service Providers in the Non-Bank Financial Industry Sector.

The following table illustrates the amount of credit risk and concentration risk on consumer financing receivables and finance lease receivables held by the Company:

Based on the maximum financing limit (BMPP) reports as of December 31, 2023 and 2022, there is no financing receivables exceeding the BMPP regulation.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

Tabel berikut merupakan rincian nilai dari agunan yang dimiliki oleh Perusahaan pada tanggal tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The following tables detail the Company's collateral held as security as of December 31, 2023 and 2022:

	2023					
	Pembiayaan konsumen/ <i>Consumer finance</i>	Sewa pembiayaan/ <i>Finance lease</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivable</i>	Kredit karyawan/ <i>Employee loan</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Eksposur kredit	1.764.802.154	850.487.347	88.238.435	1.809.727	2.705.337.663	Credit exposure
Nilai jaminan	2.159.727.622	977.950.169	98.958.929	-	3.236.636.720	Collateral value
Total eksposur tanpa jaminan kredit	-	-	-	1.809.727	1.809.727	Total Unsecured credit exposure
Porsi eksposur kredit tanpa jaminan kredit	-	-	-	100,00%	0,07%	Unsecured portion of credit exposure
Tanah dan bangunan	6.317.668	-	73.876.871	-	80.194.539	Land and building
Kendaraan	2.152.893.493	252.644.818	25.082.058	-	2.430.620.369	Vehicle
Mesin dan alat berat	516.461	524.828.783	-	-	525.345.244	Machine and heavy equipment
Lainnya	-	200.476.568	-	-	200.476.568	Others
Jumlah	2.159.727.622	977.950.169	98.958.929	-	3.236.636.720	Total

	2022					
	Pembiayaan konsumen/ <i>Consumer finance</i>	Sewa pembiayaan/ <i>Finance lease</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivable</i>	Kredit karyawan/ <i>Employee loan</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Eksposur kredit	1.472.677.852	710.805.358	84.218.350	2.766.998	2.270.468.558	Credit exposure
Nilai jaminan	1.913.035.746	981.296.655	99.794.838	-	2.994.127.239	Collateral value
Total eksposur tanpa jaminan kredit	-	-	-	2.766.998	2.766.998	Total Unsecured credit exposure
Porsi eksposur kredit tanpa jaminan kredit	-	-	-	100,00%	0,12%	Unsecured portion of credit exposure
Tanah dan bangunan	9.617.668	-	86.560.599	-	96.178.267	Land and building
Kendaraan	1.836.337.478	280.827.009	13.234.239	-	2.130.398.726	Vehicle
Mesin dan alat berat	40.900.600	543.344.997	-	-	584.245.597	Machine and heavy equipment
Lainnya	26.180.000	157.124.649	-	-	183.304.649	Others
Jumlah	1.913.035.746	981.296.655	99.794.838	-	2.994.127.239	Total

38. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

38. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	Arus kas dari aktivitas pendanaan/				
	1 Januari/ <i>January 1,</i>	<i>Financing cash flows</i>	Lain-lain/ <i>Others *)</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Utang bank	1.661.377.617	278.428.645	-	1.939.806.262	Bank loans
Utang lain-lain	7.865.500	(7.865.500)	-	-	Other payables
Liabilitas sewa	29.542.427	(4.444.464)	2.203.138	27.301.101	Lease liabilities
	1.698.785.544	266.118.681	2.203.138	1.967.107.363	

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
(Continued)

	1 Januari/ Januari 1, 2022 Rp'000	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Financing cash flows Rp'000	Lain-lain/ Others *) Rp'000	31 Desember/ December 31, 2022 Rp'000	
Utang bank	1.612.758.080	48.619.537	-	1.661.377.617	Bank loans
Utang lain-lain	14.269.000	(7.440.875)	1.037.375	7.865.500	Other payables
Liabilitas sewa	4.950.271	(6.532.523)	31.124.678	29.542.426	Lease liabilities
	<u>1.631.977.351</u>	<u>34.646.139</u>	<u>32.162.053</u>	<u>1.698.785.543</u>	

*) Merupakan penambahan aset hak-guna and akresi bunga/
Represent additional right-of-use assets and accretion of interest

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 2 Februari 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman baru dari Hachijuni Bank Ltd., Singapore Branch sebesar US\$ 6 juta yang akan tersedia sampai dengan tanggal 3 Februari 2025.

39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

On February 2, 2024, the Company obtained a new loan facility from Hachijuni Bank Ltd., Singapore Branch amounting to US\$ 6 million, which will be available until February 3, 2025.

40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan pada halaman 1 sampai dengan 93 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024.

40. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 93 are the responsibilities of the management and are approved and authorized for issue by the Company's Directors on March 13, 2024.

LAMPIRAN 1 - PENGUNGKAPAN RASIO
BERDASARKAN PERATURAN OJK
NO.35/POJK.05/2018

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi sejumlah rasio keuangan tertentu. Rasio-rasio ini dibuat oleh Perusahaan berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan.

Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Peraturan OJK:

APPENDIX 1 – RATIOS DISCLOSURES PURSUANT
TO OJK REGULATION NO. 35/POJK.05/2018

Based on POJK No. 35/POJK.05/2018 dated December 31, 2018 regarding the Organisation of Financing Company Business, the Company is required to comply with several financial ratios. These ratios have been prepared by the Company based on the formula as prescribed in the said OJK regulation for regulatory compliance purposes.

The following are the financial ratios based on OJK Regulations (OJK):

	2023 (TIDAK DIAUDIT)/ <u>2023 (UNAUDITED)</u>	2022 (TIDAK DIAUDIT)/ <u>2022 (UNAUDITED)</u>	
Rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset	91,05%	85,67%	Financing to asset ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan yang diterima	131,12%	127,19%	Net financing receivables to funding ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	38,20%	35,77%	Net financing receivables for investment and working capital Financing to total financing receivables ratio
Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF)	0,19%	2,22%	Non-performing financing (NF) ratio
Rasio permodalan	77,41%	86,97%	Capital ratio
Gearing ratio	2.59	2.42	Gearing ratio
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	131,87%	121,12%	Equity to paid up capital ratio

MIZUHO Mizuho Leasing Indonesia

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra 32nd Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Telp: +62 21 5085.1848
Fax: +62 21 5085.1849
www.mizuho-ls.co.id

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk is licensed and supervised by the Indonesia Financial Services Authority

